



PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN LOKAKARYA PLS FIP UNG

"Reaktualisasi Pendidikan Luar Sekolah sebagai Pemberdayaan Masyarakat"



DR. Abd. Hamid Isa, M.Pd

Drs. Yakob Napu, M.Pd

DR. Moh. Zubadi, M.Pd

UNG Press

UNG Press - Gorontalo

ISBN : 978-602-6204-08-0

PROSIDING

**SEMINAR NASIONAL
DAN LOKAKARYA PLS FIP UNG**

TEMA:

***“REAKTUALISASI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”***

Editor:

DR. Abd. Hamid Isa, M.Pd

Drs. Yakob Napu, M.Pd

DR. Moh. Zubadi, M.Pd

ISBN : 978-602-6204-08-0



Universitas Negeri Gorontalo Press

Anggota IKAPI

Jl. Jend. Sudirman No.6 Telp. (0435) 821125

Kota Gorontalo

Website : www.ung.ac.id



Universitas Negeri Gorontalo Press

Anggota IKAPI

Jl. Jend. Sudirman No.6 Telp. (0435) 821125

Kota Gorontalo

Website : www.ung.ac.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
DAN LOKAKARYA PLS FIP UNG**

ISBN : 978-602-6204-08-0

Editor:

DR. Abd. Hamid Isa, M.Pd

Drs. Yakob Napu, M.Pd

DR. Moh. Zubadi, M.Pd

Dicetak oleh:

UNG Press

Januari 2017

PENERBIT UNG Press Gorontalo

Anggota IKAPI

Isi diluar tanggungjawab percetakan

© 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini **tanpa izin
tertulis** dari penerbit

SAMBUTAN DEKAN

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat

Untuk menjawab berbagai tantangan, pendidikan menjadi salah satu indikator dalam mengembangkan SDM, namun demikian pendidikan yang selama ini berkembang dirasa masih kurang mampu melahirkan tenaga/SDM terdidik yang siap untuk menjawab berbagai tantangan, hal ini karena system pendidikan yang dilaksanakan cenderung mengedepankan pada kualitas akademik.

Salah satu pilar dalam meningkat daya saing komunitas ASEAN 2015 adalah masyarakat sosial budaya ASEAN (*asean socio-cultural community*). Dalam roadmaps ASEAN *sosio-cultural community* terkandung enam program kerja yang harus diwujudkan oleh semua negara ASEAN, yakni; *human development, social welfare and protection, social justice and rights, ensuring environmental sustainability narrowing the development GAP and building the ASEAN identity*

Dari keenam program kerja ASEAN dalam kerangka sosial budaya, terdapat aspek pendidikan yang diharapkan mampu menopang perkembangan laju peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kualifikasi sumber daya manusia, mau tidak mau harus melakukan perubahan yang mendasar. Perubahan yang paling mendasar adalah melakukan review terhadap kurikulum. Seiring dengan tuntutan perubahan, maka jurusan pendidikan luar sekolah melakukan perubahan yang mendasar dengan mengganti nama jurusan pendidikan nonformal

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah sebagai salah satu departemen di Universitas Negeri Gorontalo mempunyai peluang yang sama dalam memberikan layanan pendidikan. Layanan Pendidikan Luar Sekolah adalah dengan mencetak manusia pembelajar yang mampu memberikan sumbangsih bagi pemberdayaan masyarakat, agar nantinya mampu bersaing dengan masyarakat ASEAN, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya

Salah satu usaha untuk mencetak lulusan sebagai manusia pembelajar adalah dengan penguatan kurikulum PLS, yang pada akhirnya

setiap lulusan diharapkan mampu menjadi agen pemberdayaan bagi masyarakat desa maupun perkotaan.

Pelaksanaan seminar dan lokakarya ini diharapkan menghasilkan berbagai pokok pikiran dalam pengembangan jurusan pendidikan luar sekolah FIP UNG

Wassalamualaikum warohmatullahiwabarkatuh

Gorontalo Desember 2016

KATA PENGANTAR

Indikasi yang mudah kita amati di era modern sekarang ini yaitu adanya perubahan yang begitu cepat diberbagai lini kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik maupun teknologi. Cepatnya perubahan yang ada pada saat sekarang ini memaksa kita untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, hal ini perlu dilakukan sebab apabila tidak dilakukan penyesuaian dengan perubahan yang ada maka kita akan tertinggal oleh perubahan itu sendiri oleh karena itu wajib bagi kita untuk terus menyesuaikan dengan perubahan yang ada agar kita tetap survive.

Menyikapi fenomena yang ada di era modern seperti yang dikemukakan diatas, maka Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo senantiasa berusaha terus untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ada sehingga PLS FIP UNG akan tetap survive di era modern seperti sekarang ini. Wujud nyata usaha jurusan PLS FIP UNG untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan yaitu dengan dilaksanakannya Seminar Nasional dan Lokakarya pada tanggal 03 Desember 2016 bertempat di Rahmat Hotel. Kegiatan ini bertujuan untuk meriview dan mengkaji kurikulum pendidikan nonformal sesuai dengan KKNi, Mendapatkan masukan yang relevan dari berbagai praktisi dan akademisi terkait dengan penguatan kurikulum berbasis KKNi, Penguatan terhadap kurikulum PLS pada konsentrasi Diklat dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pendidikan Keluarga dan Anak Usia Dini, Merumuskan berbagai kebijakan dalam rangka pengembangan profesionalisme lulusan pendidikan luar sekolah. Hasil seminar nasional dan lokakarya ini tentu akan dijadikan masukan untuk jurusan PLS FIP UNG dalam memformulasikan kurikulum maupun program unggulan yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang lebih profesional sehingga mampu berkompetisi dengan lulusan lainnya yang ada di UNG maupun Univeristas lainnya yang ada di Indonesia.

Selain seminar nasional dan lokakarya, PLS FIP UNG juga berusaha menerbitkan buku prosiding yang merupakan kumpulan artikel ilmiah hasil dari penelitian maupun kajian teoritis yang dapat memperkaya

khasanah keilmuan untuk pengembangan pendidikan luar sekolah. Kumpulan artikel ilmiah tersebut tertuang dalam buku prosiding yang sekarang ada dihadapan pembaca.

Apa yang tertuang dalam buku prosiding ini, semoga dapat memberikan memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya bidang pendidikan luar sekolah. Terakhir, atas nama Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang sudah berkontribusi mengirimkan artikel ilmiah untuk prosiding.

Gorontalo, Desember 2016

Panitia,

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Sambutan Dekan.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Pendidikan Kecakapan Hidup (<i>Life Skills</i>) dalam Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) <i>Dadang Yunus Lutfiansyah, Achmad Hufad</i>	1
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keaksaraan Fungsional <i>Yakob Napu</i>	21
Reaktualisasi Pendidikan Kesetaraan melalui Implementasi Kurikulum 2013 <i>Simin Rauf</i>	30
Reaktualisasi Pendidikan Luar Sekolah dan Beberapa Tantangannya <i>Yoenersih Nazar</i>	37
Nilai Budaya Komunitas Bajo dalam Meningkatkan Motivasi Belajar <i>Life Skill</i> <i>Ningsi Hanapi, Ruslin Badu, Mohamad Zubaidi</i>	48
Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Perspektif PNF <i>Abd Hamid Isa</i>	64
Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar IPS di SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara <i>Nurhayati Poloungo</i>	78
Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa pada <i>Sustainable Livelihood</i> di Desa Binajaya Kabupaten Gorontalo <i>Abdul Rahmat</i>	92
Pola Asuh Orang Tua dan Perilaku Agresi Anak <i>Icam Sutisna</i>	105
Pendidikan Nonformal dan Peranannya terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin <i>Misran Rahman</i>	115
Partisipasi Anggota Kelompok Pengajian pada Kegiatan Belajar Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Pamekasan <i>Mohamad Zubaidi</i>	121
Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar Pendidikan Nonformal melalui Pendekatan Heutagogi <i>Rosdiana</i>	133

Perlindungan Hukum terhadap <i>Whistleblower</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia <i>Ramlani Lina Sinaulan</i>	143
Dualisme Kompetensi Peradilan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Aparatur Sipil Negara yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara <i>Yuhelson</i>	156
Perspektif Istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah <i>Soetoto Adiwinarno & Wahyu Edy Setiawan</i>	173
Identifikasi Sumber Daya Potensi Lokal dalam Pelatihan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan Masyarakat <i>Dayat Hidayat</i>	189
Pendidikan Kebencanaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat <i>Asep Saepudin</i>	206
Hubungan Konsep Diri dan Pengalaman Kerja Widyaiswara dengan Kinerja Widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung <i>Imas Masliah, Achmad Hufad, Yanti Shantini</i>	218
Partisipasi Masyarakat dalam Program Kewirausahaan di PKBM Bina Terampil Mandiri Kabupaten Bandung Barat <i>Raden Aufa Mulqi, Oong Komar, Iip Saripah</i>	226

**PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (*LIFE SKILLS*)
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KEPALA KELUARGA (PEKKA)
(Studi pada Program Perempuan Kepala Keluarga
di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)**

Dadang Yunus Lutfiansyah, Achmad Hufad
dadangyunus@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penerapan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) dalam pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) untuk peningkatan pendapatan dan kemandirian berwirausaha yang dilaksanakan di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Teori yang mendasari pada penelitian ini diantaranya: konsep pendidikan kecakapan hidup, konsep pemberdayaan perempuan, dan konsep kemandirian berwirausaha,

Penelitian ini menggunakan metode kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui teknik wawancara, observasi, studi literatur, studi dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 3 orang subjek primer yang berasal dari lulusan pelatihan serta triangulasi dari pihak informan yang berasal dari penyelenggara, pendamping, tokoh masyarakat serta nara sumber. Total responden yaitu berjumlah 7 orang.

Berdasarkan analisa data dan pembahasan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut : Hasil penelitian diperoleh data : 1). Proses pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif-andragogi, muatan PKH yang ditemukan yaitu : *personal skills*, *social skills* dan *vocational skill*. 2). Hasil pelaksanaan pembelajaran terhadap aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta pendapatan menunjukkan peningkatan ke arah yang progressif dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan. 3). Dampak pembelajaran menunjukkan (a). Rasa toleransi dan kebersamaan (bersosialisasi) dalam berbuat sosial meningkat (b). tercipta kondisi saling membelajarkan (percaya diri) di dalam kelompok setelah mengikuti program (c). Motivasi untuk berusaha semakin tinggi serta kemampuan melihat celah usaha (pasar) semakin meningkat.

Kata Kunci : *Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills), Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Pemberdayaan Perempuan dan Kemandirian Berwirausaha*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia kini memasuki gerbang abad ke-21, era globalisasi yang penuh dengan tantangan, kompetitif serta membutuhkan manusia yang berkualitas tinggi. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan bangsa, disamping sumber daya alam (hayati, non hayati dan buatan) serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, krisis moneter yang berkepanjangan menjadi

hambatan yang tidak mudah untuk dihadapi, bahkan dewasa ini lebih mempertegas lagi perlunya pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang tangguh, berwawasan keunggulan dan terampil dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai budaya, religi dan konteks lokal atau meminjam istilah Kindervatter yaitu *indigenious*.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh yaitu *pertama* peningkatan kualitas sumber daya manusia secara fisik yang meliputi peningkatan kualitas kesehatan dan kesegaran jasmani, serta usaha meningkatkan kualitas perbaikan gizi masyarakat. *Kedua* peningkatan kualitas sumber daya manusia non fisik ditujukan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, pengembangan mental dan spiritual, peningkatan etos kerja dan yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kadar produktifitas kerja.

Dari ungkapan tersebut arah pemikiran tertuju pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang seimbang antara peningkatan kualitas material dan kualitas spiritual. Pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana mengupayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas kesejahteraan sehingga mereka terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan untuk dapat hidup layak dan mandiri di lingkungan masyarakat sendiri.

Menurut Kartasasmita (1996 : 293) bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui empat jalur kebijaksanaan yaitu (1) peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani dan kejuangan, maupun kualitas kehidupannya, (2) peningkatan kualitas sumber daya yang produktif dan upaya penyebarannya, (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK, (4) serta pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usaha pencapaian kualitas SDM seperti yang diharapkan di atas tidak terlepas dari peranan pendidikan.

Pendidikan merupakan setiap proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan (*knowledge acquisition*), mengembangkan kemampuan/keterampilan (*skills developments*) sikap atau mengubah sikap (*attitude change*). Pendidikan adalah suatu proses transformasi anak didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang diikutinya. Definisi pendidikan menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sebagai berikut :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

Tujuan pendidikan menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Bab II pasal 3 bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Lebih lanjut, dijelaskan di dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (2004: 23).

Definisi dan fungsi dari Pendidikan Non Formal sebagaimana yang tercantum di dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 yaitu :

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (UU. Sisdiknas, 2004 : 23-2)

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut, pendidikan non formal melakukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat bagi perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang dilihat dari pendidikan masih perlu pembinaan dan layanan pendidikan, terutama layanan pendidikan keterampilan dalam rangka mempertahankan kehidupan. Mayoritas PEKKA tidak bersekolah, miskin, kemudian buta aksara. Pemberdayaan masyarakat bagi perempuan kepala keluarga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak – hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara.

Pemberdayaan komunitas perempuan kepala keluarga secara umum dipengaruhi oleh tauladan – tauladan dari tindakan (perilaku) pemimpinnya, sebagai langkah awal proses penyadaran kritis untuk pemberdayaan komunitas perempuan kepala keluarga dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat, hal ini dilakukan supaya masyarakat sadar akan kondisi dan potensinya dan pada akhirnya dapat maju bersama sehingga tercipta masyarakat berorganisasi dengan landasan nilai – nilai kemanusiaan. Perempuan dan laki-laki mempunyai akal sehat, hati nurani, dan pilihan bebas, jadi tidak ada perbedaan yang hakiki antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pemberdayaan, baik perempuan dan laki-laki mestinya diberdayakan untuk menuju kualitas manusia yang sejati dan berdaya, karena secara hakiki perempuan dan laki-laki mempunyai martabat yang sama sebagai manusia .

Terciptanya komunitas yang berdaya seperti inilah yang akan bisa menanggulangi kemiskinan yang diakibatkan oleh luntarnya nilai – nilai kemanusiaan. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai – nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka dan mandiri. (1) unik dalam konteks kemajemukan manusia; (2) merdeka dari segala belenggu internal maupun eksternal termasuk belenggu keduniawian dan kemiskinan (3) mandiri untuk mampu menjadi *programmer* bagi dirinya dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama.

Sebuah kenyataan bahwa 13,4% rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan karena kematian suami baik secara alamiah maupun karena terbunuh dalam konflik, perceraian, ditinggalkan begitu saja, suami cacat atau sakit menahun, dan perempuan lajang yang beranak. Lebih dari separuh mereka adalah komunitas atau kelompok masyarakat termiskin di Indonesia. Nilai sosial dan budaya yang berlaku cenderung meminggirkan para perempuan kepala keluarga, dan sebagian besar program pembangunan telah gagal menjangkau mereka. Mereka umumnya berusia antara 20 – 60 tahun, buta huruf dan tidak pernah duduk dibangku Sekolah Dasar sekalipun. Mereka menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata Rp.7,000 per hari.

Berdasarkan hasil pendataan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab.Bandung Barat sebanyak 48.501 perempuan di Kab.Bandung Barat (KBB) berperan sebagai kepala keluarga. Jumlah terbesar perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga terdapat di Kec.Cipatat, yaitu sebanyak 5.070 jiwa dan jumlah terkecil di Kec.Rongga, yaitu 1.240 jiwa, Sebagian

besar perempuan yang memerankan posisi sebagai kepala keluarga, bekerja di sektor informal, seperti buruh dan pembantu rumah tangga. Tidak sedikit dari mereka mengadu nasib di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, hal ini cukup mencengangkan, karena jumlahnya lebih dari 10% total kepala keluarga di KBB (Galamedia, Kamis/22 April 2010).

Perempuan kepala keluarga sebagai komunitas yang termarginalkan dari akses layanan pendidikan membutuhkan pendampingan untuk membentuk dan mengembangkan kelompok mereka, mengembangkan lembaga keuangan mikro melalui kegiatan simpan pinjam, mendapatkan pelatihan keterampilan teknis dan manajerial serta pengembangan diri, menangani persoalan khusus seperti konseling trauma, mengembangkan jaringan kerjasama, mengembangkan kepemimpinan, dan melakukan advokasi kebijakan bagi keprihatinan mereka.

Pendidikan Luar Sekolah memiliki peran yang urgen di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung semakin cepat menimbulkan kebutuhan yang beraneka ragam dalam hal peralihan informasi, pengetahuan serta keterampilan guna pengembangan potensi perempuan kepala keluarga dengan menyeimbangkan antara pengetahuan dan keterampilan fungsional. Satuan Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal terdiri atas lembaga kursus/pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis berupaya menjembatani pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam tersebut.

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) sebagai salah satu satuan program dari pendidikan nonformal memiliki peran yang urgen dalam rangka membekali warga belajar agar dapat hidup secara mandiri. Ditjen PLS Depdiknas dalam Pedoman Program *Life Skills* (2007 : 2) menggambarkan bahwa program pendidikan kecakapan hidup ini secara khusus bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik agar: 1) memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja baik bekerja secara mandiri (wirausaha) dan/atau bekerja pada suatu perusahaan produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 2) memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global, 3) memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya, 4) memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan keadilan pendidikan di setiap lapisan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam program pendidikan kecakapan hidup keterampilan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan antara keadaan saat ini (prasejahtera, keterbatasan akses terhadap sumber daya) dengan keadaan yang diharapkan di masa mendatang (sejahtera dan terpenuhi kebutuhan). Bagi individu yang mengikuti program pendidikan kecakapan hidup keterampilan diharapkan akan dapat mengatasi kekurangan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan persyaratan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki baik untuk bekerja pada suatu lembaga atau untuk mengadakan kegiatan mandiri berupa wiraswasta dan lain sebagainya

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) dalam pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat bertujuan memberikan seseorang bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Apalagi mayoritas peserta pelatihan pada program pendidikan kecakapan hidup adalah mereka yang tamatan sekolah dasar serta termasuk dalam kategori perempuan kepala keluarga dengan kategori keluarga miskin yang kurang mampu.

Program pendidikan kecakapan hidup merupakan suatu langkah penting dan perlu dilakukan dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai keluarga yang miskin atau kategori masyarakat kelas bawah. Dari hasil identifikasi bahwa pelatihan kecakapan hidup ini diikuti oleh 20 orang perempuan kepala keluarga yang merupakan kategori masyarakat ekonomi bawah.

Pemberdayaan dan pemberian potensi-potensi (baik SDM maupun SDA) yang ada di masyarakat perlu digali untuk menunjang program pendidikan masyarakat. Program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) dalam rangka pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang tidak didukung oleh kemampuan dasar dalam aspek intelektual, emosional dan spiritual dari warga belajar, maka ada kecenderungan implementasi program pendidikan kecakapan hidup tidak akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian berwirausaha. Kemandirian berusaha memiliki aspek sikap, mental, kecakapan dan keterampilan berusaha, diaplikasikan dalam kehidupan nyata sebagai kecakapan hidup yang bisa membawa diri ke arah lebih maju dan berkembang secara normatif.

KAJIAN TEORITIS

1. Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Istilah Kecakapan Hidup (*life skills*) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga Teknis, 2003).

Brolin (1989) menjelaskan bahwa *life skills constitute a continuum of knowledge and aptitude that are necessary for a person to function effectively and to avoid interruptions of employment experience*. Brolin memaparkan bahwa yang dimaksud *life skills* adalah sesuatu yang kontinum dari pengetahuan dan sikap yang penting untuk seseorang agar mendapatkan fungsi yang efektif dan berpengaruh terhadap pengalaman hidup pegawai. Dengan demikian, *life skill* dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup (*experience*). Istilah hidup, tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja (*vocational job*), namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar di tempat kerja, mempergunakan teknologi (Ditjen PLS, Direktorat Tenaga Teknis, 2003).

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) lebih luas dari sekedar keterampilan bekerja, apalagi sekedar keterampilan manual. Pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga belajar agar memiliki keberanian dan kemauan menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya.

Indikator-indikator yang terkandung dalam *life skills* tersebut secara konseptual dikelompokkan : (1) Kecakapan mengenal diri (*self awarness*) atau sering juga disebut kemampuan personal (*personal skills*) (2) Kecakapan berfikir rasional (*thinking skills*) atau kecakapan akademik (*akademik skills*) (3) Kecakapan sosial (*social skills*) (4) Kecakapan vokasional (*vocational skills*) sering juga disebut dengan keterampilan kejuruan artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik (*spesifik skills*) atau keterampilan teknis (*technical skills*) (Ditjen PLS, Direktorat Tenaga Teknis, 2003).

Menurut Jecques Delor mengatakan bahwa pada dasarnya program *life skills* ini berpegang pada empat pilar pembelajaran yaitu sebagai berikut:

- a. *Learning to know* (belajar untuk memperoleh pengetahuan)
- b. *Learning to do* (belajar untuk dapat berbuat /bekerja)
- c. *Learning to be* (belajar untuk menjadi orang yang berguna)
- d. *Learning to live together* (belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain)

2. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

Istilah pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari “*empowerment*” yang merupakan hasil pemikiran dan telaah pikiran manusia dan kebudayaan barat (Eropa) mulai muncul sekitar dekade 70-an dan dipermasalahkan dan berkembang terus pada dekade 80-an, dan dekade 90-an sampai pada akhir abad ke 20. Pemberdayaan muncul sebagai tema yang penting terutama dalam gerakan demokratisasi, partisipatoris, emansipatif termasuk gerakan wanita dan gerakan-gerakan kaum tertindas lainnya dalam pengorganisasian masyarakat dan pertumbuhan dari *new -populism* dan dalam gerakan-gerakan progresif untuk perdamaian dan keadilan sosial (Kresberg dalam Ife, 1998). Mulyana, E., (2007: 47) mengemukakan bahwa:

Istilah pemberdayaan menjadi demikian populer pada era reformasi, yaitu suatu era yang menghendaki adanya koreksi terhadap berbagai penyimpangan praktek pemerintahan terutama bersifat kolusi, korupsi dan nepotisme. Istilah itu terutama dikaitkan dengan terminologi demokratisasi, pembangkitan ekonomi kerakyatan, keadilan dan penegakan hukum serta partisipasi politik. Dengan pemberdayaan tersebut dimaksudkan rakyat kebanyakan yang sebagian besar adalah kaum melarat, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak beruntung dan orang yang underpreveledge, menjadi terangkat derajatnya, terangkat perekonomiannya, terangkat hak-haknya, dan memiliki posisi seimbang dengan kaum lain yang selama ini telah lebih mapan kehidupannya. Dengan pemberdayaan, kaum idealis atau para pejuang demokrasi, keadilan dan hak azasi manusia menginginkan adanya tata kehidupan yang lebih adil, lebih demokratis, dan dimana keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.

Menurut Mulyana, E., (2007: 48) dan Sudjana, HD., (2005: 77), memberikan batasan pemberdayaan (*empowering*) dipandang dari hasilnya sebagai “*people gaining and understanding of and control over social, economic, and or political forces in order to improve their standing in society*”. Batasan ini lebih menekankan pada produk akhir dari proses pemberdayaan, yaitu masyarakat memperoleh pemahaman dan mampu mengontrol daya-daya sosial, ekonomi, dan politik agar bisameningkatkan kedudukannya dalam masyarakat.

Pemberdayaan lebih menekankan pada pemberian dan peningkatan kemampuan untuk bisa berubah, berkembang, berpartisipasi serta memperbaiki

keadaan menuju ke arah yang lebih baik, yaitu dengan memberikan motivasi agar individu atau kelompok memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya” (Suharto, 2006:58).

Pemberdayaan adalah sebuah upaya agar individu atau masyarakat menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai upaya pembangunan, pengontrolan, perbaikan dan perubahan serta pengembangan baik itu secara individu ataupun secara bersama-sama/ berkelompok terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.”Pemberdayaan menunjuk kepada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial” (Suharto, 2006: 59).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memilih akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan agar mereka dapat lebih mandiri dengan cara menumbuhkan potensi yang dimilikinya, serta menggali rasa percaya dirinya agar mereka dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam perubahan dan perkembangan lingkungannya.

Pemberdayaan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan kelompok-kelompok di masyarakat terutama suku-suku yang minoritas dan kelompok-kelompok yang menderita dari berbagai jenis atau bentuk stigma sosial mengenai hak-hak bagi individu dan masyarakat yang termarginal dan terhimpit dan tidak berdaya, dalam hal ini pemberdayaan mempunyai peranan penting sebagai suatu penyeimbang model-model pola praktek untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep yang paling penting dalam hal ini adalah pemberdayaan.

Para pelaksana pemberdayaan mempunyai strategi-strategi yang selalu berpangkal kepada hal yang rasional, mengasumsikan bahwa pemberdayaan itu mungkin dilaksanakan untuk mengubah lingkungan masyarakat yang menyenangkan Roger 1986 (*Malcolm Payn dalam Ife, 1998*), menegaskan "*empowerment strategies have fundamentally different objectives. They are rationalist in nature, assuming that it is possible to change the environment in clients favour*".

3. Kemandirian

Mandiri berarti dapat melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) kata "mandiri" diartikan sebagai "dalam keadaan berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain".

Dalam kaitan ini seseorang yang memiliki sikap mandiri senantiasa percaya atas kemampuannya sendiri, kerjasama yang dijalani dengan orang lain bukan berarti seseorang tidak memiliki sikap mandiri yang dimiliki justru semakin berkembang ke arah yang lebih produktif apabila diterapkan secara bersama-sama. Kemandirian merupakan ciri kedewasaan individu, kemandirian dapat diartikan sebagai kemauan, kemampuan berusaha untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya secara sah, wajar dan bertanggungjawab, sedangkan menurut Covey dalam Mujani (2002) mengemukakan pengertian kemandirian sebagai berikut:

"They move us progressively on a maturity continuum from dependence to independence... Then gradually, over the ensuing months and year we become more and more independent physically mentally, emotionally and financially".

Jadi kemandirian yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Covey di atas, sehingga pengertian kemandirian adalah kemandirian warga belajar dalam berwirausaha, mandiri secara fisik, mandiri secara mental, mandiri secara emosional dan mandiri secara finansial. Kemandirian berwirausaha dicerminkan dengan perilaku penguasaan keterampilan berwirausaha seperti: keterampilan mencari informasi pasar, merancang produk, cara mendapatkan bahan baku yang baik, memiliki alat dan perlengkapan produksi, mengelola usaha, memiliki sistem permodalan yang kuat, memasarkan hasil produk dan sebagainya.

Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Apabila diakibatkan dengan suatu tugas/pekerjaan mandiri adalah sikap atau perilaku yang

dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau aktifitas secara independen atau tanpa bergantung pada pihak lain.

Sikap mandiri adalah suatu hasil perkembangan yang dilakukan oleh setiap individu. Sikap mandiri pada tiap individu tidak muncul begitu saja secara alami tetapi memerlukan bimbingan dan latihan dari yang berpengalaman. Akan tetapi keinginan untuk mandiri itu selalu ada pada setiap individu, Hariri Nawawi dan Mimi Martini dalam Marliah (2005) mengemukakan pendapatnya tentang karakteristik-karakteristik kemandirian sebagai berikut :

- a. Mengetahui secara tepat ciri-ciri yang hendak dicapai
- b. Mengetahui secara jelas yang harus dilakukan untuk melakukan cita-cita atas yang diinginkan setiap hari
- c. Bersedia kerja keras
- d. Berdisiplin
- e. Percaya dan yakin manusia ditentukan oleh Tuhan YME
- f. Memiliki kepercayaan pada diri sendiri
- g. Mengetahui bahwa sukses adalah kesempatan yang menuntut perjuangan hidup yang keras bukan hadiah, menggunakan otak untuk mendorong dan menolong diri sendiri menuju sukses

Sikap mandiri tidak hanya berdampak pada faktor psikologis individu saja tetapi akan memunculkan rasa sosial yang tinggi untuk melakukan kewajiban dan memanfaatkan segala potensi yang ada pada dirinya.

Kemandirian merupakan kemampuan orang untuk mengoptimalkan diri dalam kebersamaan dengan orang lain. Ini berarti bahwa kemandirian itu harus diawali dengan kegiatan belajar dan mengikuti fase-fase perkembangan sehingga dapat dimanfaatkan potensi diri untuk memecahkan masalah. Belajar dan bekerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan, artinya orang dewasa belajar yang dipelajarinya itu akan menarik bila mana erat dengan lapangan kehidupan atau pekerjaan.

4. Kewirausahaan

a. Definisi

Kewirausahaan secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) berasal dari dua kata yaitu wira dan usaha. Kata wira berarti teladan atau patut di contoh, sedangkan usaha berarti berkemauan keras untuk memperoleh. Jadi wirausaha berarti mengarah kepada tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud.

Sejalan dengan itu menurut Soesarsono Wijandi(Yunus, 2007), pengertian wirausaha adalah :

Sifat-sifat keberanian, keutamaan, keteladanan dengan semangat yang bersumber dari kekuatan sendiri, dari seorang pendekar kemajuan, baik dalam kekaryaan pemerintahan maupun dalam kegiatan apa saja di luar pemerintahan dalam arti yang menjadi pengkal keberhasilan seseorang.

Sedangkan pengertian wirausaha menurut Suparman Sumawijaya (Bukhori Alma, 2000 : 24) adalah sebagai berikut :

Wirausaha adalah pejuang kemajuan yang mengabdikan diri kepada masyarakat dalam mewujudkan edukasi dan tekadnya atas kemampuan sendiri sebagai rangkaian kiat kewirausahaan untuk membantu kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, memperluas kesempatan kerja, turut serta berdaya guna mengakhiri ketergantungan kepada luar negeri dan di dalam fungsi-fungsi tersebut selalu tunduk pada tertib hubungan lingkungannya.

Dari beberapa pengertian wirausaha tersebut di atas, pada intinya bahwa yang dimaksud dengan wirausaha adalah seseorang yang memiliki sikap, sifat, semangat dan prilaku mandiri dalam berbagai sektor usaha sehingga dapat berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

b. Ciri-Ciri Wirausaha

Ada beberapa ciri-ciri wirausaha yang dikemukakan dari berbagai sumber atau para pakar kewirausahaan yaitu sebagai berikut :

No	Ciri-Ciri	Watak
1.	Percaya Diri	- Keteguhan, kepribadian mantap, optimisme
2.	Berorientasi Tugas dan Hasil	- Kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba atau hasil, tekun dan tabah, tekad, kerja keras, motivasi, energik, penuh inisiatif
3.	Pengambil Resiko	- Mampu mengambil resiko - Suka pada tantangan
4.	Kepemimpinan	- Mampu memimpin - Dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik
5.	Keorsinilan	- Inovatif, kreatif, fleksibel, banyak sumber, serba bisa, mengetahui banyak
6.	Berorientasi Masa Depan	- Pandangan ke depan, persepsi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena dengan metode ini akan menggali lebih mendalam mengenai masalah penelitian (*deep description*) sehingga akan terungkap keunikan dan kekhasan penelitian ini. Subjek penelitian berjumlah 3 orang subjek primer yang berasal dari lulusan pelatihan serta triangulasi dari pihak informan yang berasal dari penyelenggara, pendamping, tokoh masyarakat serta nara sumber. Total responden yaitu berjumlah 7 orang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran tentang objek yang diteliti secara utuh sebagaimana diungkapkan oleh Taylor dalam Moleong (1993:3) bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Nasution (1992:5) mengemukakan bahwa penelitian pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan kerjanya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Pendekatan kualitatif yang dipertimbangkan sesuai dan memenuhi tuntutan penelitian, karena hal-hal sebagai berikut :

1. Fokus penelitian diperoleh dari hasil observasi aktual
2. Penelitian dilakukan secara intensif dimana peneliti terlibat dalam situasi sosial penelitian
3. Instrumen utama penelitian adalah peneliti
4. Hanya terdapat sejumlah kecil pertanyaan penelitian yang kemudian dikembangkan pada saat penelitian berlangsung
5. Digunakan interview informal
6. Dipergunakan berbagai teknik pelengkap sebagai komplemen penelitian
7. Keputusan yang berhubungan dengan pengumpulan data dan analisisnya dilakukan langsung
8. Proses penelitian sejauh mungkin tidak mengganggu kehidupan sosial objek penelitian
9. Kesimpulan penelitian merupakan produk bersama antara peneliti dengan pihak yang diteliti
(Burgess, 1995:84)

Kesesuaian penggunaan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada permasalahan dalam penelitian ini dan dengan pertimbangan-pertimbangan: 1) lebih

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, 2) menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden, 3) lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J. Molleong, 1998:5).

HASIL PENELITIAN

1. Berdasarkan data hasil lapangan proses pembelajaran pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang diselenggarakan oleh PKBM Ash-Shoddiq melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang berjalan sesuai agenda dan evaluasi yang terukur. Pada tahap awal penyelenggaraan program pembelajaran diawali dengan tahap identifikasi kebutuhan belajar, temuan ini sejalan dengan konsep para ahli perencanaan pendidikan luar sekolah (Pendidikan Orang Dewasa), diantaranya konsep Arief dan Sudjana (2005) yang intinya menegaskan bahwa dalam perencanaan program-program pendidikan luar sekolah (pendidikan orang dewasa) hendaknya diawali dengan proses identifikasi kebutuhan belajar warga belajar yang melibatkan unsur-unsur penyelenggara, sumber belajar dan warga belajar, sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal setempat.

Pada tahapan selanjutnya, kegiatan proses pembelajaran pendidikan kecakapan hidup pendekatan yang digunakan yaitu partisipatif-andragogis, dengan metode : ceramah, diskusi, *brainstorming*, dan demonstrasi. Selain metode partisipatif-andragogis, penyelenggara menggunakan metode *problem solving* sebagai pendekatan dalam upaya mengeksplorasi berbagai macam problematika yang dihadapi oleh PEKKA serta berusaha untuk memecahkan permasalahannya, atau lebih dikenal dengan pendekatan informal yang kentara dengan suasana kekeluargaan antara warga belajar satu dengan yang lainnya sehingga hubungan emosional antara sesama menjadi lebih erat. Implikasinya warga belajar merasa percaya diri dalam melakukan pergaulan (bersosialisasi) dilingkungan sekitar. Jenis program *life skills* yang dilaksanakan oleh penyelenggara lebih banyak bermuatan personal skills, sosial skills dan vocational skills. Personal skills diberikan dalam upaya menanamkan kepercayaan diri PEKKA agar mampu menghadapi problematika *stereotype negatif* di masyarakat, sedangkan sosial skills lebih kepada kemampuan untuk bergaul dan bersosialisasi PEKKA dengan masyarakat agar dihargai keberadaannya dan diakui eksistensinya serta memiliki

hak yang sama sehingga citra negatif tentang PEKKA dapat dihilangkan secara perlahan-lahan.

Adapun *vocational skills* menurut temuan peneliti diberikan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan diri PEKKA dan keluarganya sehingga mampu meningkatkan peran sosial di masyarakat sekitarnya. Ketiga jenis *life skills* ini diberikan berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan, analisa potensi wilayah dan situasi setempat. Kunci pada proses pembelajaran pada program pendidikan kecakapan hidup yang berhasil ditemukan oleh peneliti adalah 1). nara sumber belajar yang memegang peranan penting dalam kegiatan pembelajaran, dimana mereka sebagai motivator, fasilitator, dinamisator bagi peserta pelatihan untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki peserta pelatihan. Selain nara sumber, 2). pendamping memiliki peran yang strategis dalam upaya memberikan bimbingan, berbagi (*sharing*) sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, kritis, empati, yang berimplikasi pada tumbuhnya keberanian dan kepercayaan diri PEKKA dalam berinteraksi dimasyarakat.

2. Hasil pelaksanaan pembelajaran dalam pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) dirancang untuk membimbing, melatih, dan membelajarkan warga belajar (masyarakat) agar mempunyai bekal dalam menghadapi masa depan yang lebih baik. Pendidikan kecakapan hidup (*personal skills*, *social skills* dan *vocational skills*) dari deskripsi penelitian terungkap bahwa hasil pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor, pada umumnya warga belajar dapat dikategorikan baik. Secara kuantitatif warga belajar yang mengikuti program ini telah berhasil lulus semua, sedangkan secara kualitatif yang menyangkut kemampuan (kompetensi), warga belajar berhasil meningkatkan ilmu pengetahuan tentang cara membuat opak singkong, manajemen usaha, (*kognitif*), mempunyai sikap mental (*afeksi*) ulet, sabar, disiplin, berwawasan kedepan, bermental wirausaha, mudah bergaul dan bersosialisasi dan mempunyai keterampilan (*psikomotor*) membuat opak singkong, buku kas sederhana keuangan kelompok dan sebagainya
3. Dampak pembelajaran pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) terhadap peningkatan pendapatan menggambarkan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan terhadap materi belajar dalam kemampuan teknis managerial, terutama memanfaatkan peluang usaha dalam penciptaan lapangan kerja. Sehingga dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan tersebut mereka dapat mengembangkan

usaha yang telah mereka rintis sejak awal. Disamping perubahan sikap dan prilaku, ditemukan juga peningkatan pendapatan atau penghasilan warga belajar sebelum dan sesudah mengikuti program ini. Selain hal tersebut, aktifitas warga belajar dalam mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar mengalami peningkatan, misal ; kegiatan mengikuti majelis taklim, membantu pernikahan, membantu mempersiapkan hidangan makanan bagi tamu yang datang ke PKBM, menyediakan makanan bagi mereka yang bergotong royong (kerja bhakti). Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sudjana bahwa pengaruh meliputi: (a) perubahan taraf hidup lulusan yang ditandai dengan perolehan pekerjaan, atau berwirausaha, perolehan/peningkatan pendapatan, kesehatan dan penampilan diri, (b) membelajarkan orang lain terhadap hasil yang telah dimiliki dan dirasakan manfaatnya oleh lulusan, (c) peningkatan partisipasinya dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat, baik partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda dan dana.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Proses pembelajaran pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), yaitu :
 - a. Proses pembelajaran pendidikan kecakapan hidup dalam pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang diselenggarakan oleh penyelenggara menggunakan metode partisipatif-andragogi yaitu pelibatan warga belajar sebagai sumber belajar dalam pembelajaran dengan mengangkat pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Selain metode partisipatif-andragogis, penyelenggara menggunakan metode *problem solving* sebagai pendekatan dalam upaya mengeksplorasi berbagai macam problematika yang dihadapi oleh PEKKA serta berusaha untuk memecahkan permasalahannya, atau lebih dikenal dengan pendekatan informal yang kentara dengan suasana kekeluargaan antara warga belajar satu dengan yang lainnya sehingga hubungan emosional antara sesama menjadi lebih erat. Implikasinya warga belajar merasa percaya diri dalam melakukan pergaulan (bersosialisasi) dilingkungan sekitar.
Adapun teknik pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi, ceramah, simulasi dan tanya jawab serta demonstrasi.
 - b. Sebelum proses pembelajaran program pendidikan kecakapan hidup dimulai, penyelenggara membuat rancangan atau perencanaan program *life skills*, hal ini

ditandai dengan adanya penyusunan rencana dan tujuan penyelenggaraan program yang disusun tidak hanya sepihak saja, namun semua komponen ikut terlibat yang berbasis pada kebutuhan, diantaranya ; penyelenggara, tokoh masyarakat, pendamping/fasilitator dan nara sumber.

- c. Tujuan dari penyelenggaraan program *life skills* ini yaitu untuk untuk memberdayakan masyarakat desa khususnya perempuan kepala keluarga (PEKKA) melalui pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup serta kemandirian dalam berwirausaha. Adapun tujuan warga belajar mengikuti pendidikan kecakapan hidup ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan/penghasilan, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat bekerja secara mandiri yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya
- d. Jenis program *life skills* yang dilaksanakan oleh penyelenggara lebih banyak bermuatan personal skills, sosial skills dan vocational skills. Personal skills diberikan dalam upaya menanamkan kepercayaan diri PEKKA agar mampu menghadapi problematika *stereotype negatif* di masyarakat, sedangkan sosial skills lebih kepada kemampuan untuk bergaul dan bersosialisasi PEKKA dengan masyarakat agar dihargai keberadaannya dan diakui eksistensinya serta memiliki hak yang sama sehingga citra negatif tentang PEKKA dapat dihilangkan secara perlahan-lahan. Adapun *vocational skills* menurut temuan peneliti diberikan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan diri PEKKA dan keluarganya sehingga mampu meningkatkan peran sosial di masyarakat sekitarnya. Ketiga jenis *life skills* ini diberikan berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan, analisa potensi wilayah dan situasi setempat. Materi yang disampaikan terbagi menjadi tiga kategori yaitu (1). materi yang bersifat keterampilan, diantaranya materi pengenalan dan pemilihan bahan, pengolahan makanan (memotong, mencuci, menggoreng), pengemasan dan pemasaran (2) materi yang bersifat umum, diantaranya materi tentang kewirausahaan, manajemen waktu, *Achievement Motivation Training (AMT)* serta (3) gugus studi penunjang, diantaranya pelatihan bagi fasilitator dan KBU.
- e. Rekrutmen warga belajar dan nara sumber ditetapkan oleh penyelenggara program
- f. Perbandingan atau prosentase antara teori dan praktek dalam penyelenggaraan pelatihan kecakapan hidup (*life skills*) yang diselenggarakan oleh penyelenggara lebih besar praktek sehingga berimplikasi pada kompetensi

- vokasional warga belajar yang lebih terampil dalam memproduksi opak singkong
- g. Evaluasi atau penilaian terhadap warga belajar dilakukan melalui pengamatan sikap dan perilaku serta pengetahuan warga belajar melalui tes-non tes sehingga dapat diketahui keberhasilannya
 - h. Program pendampingan sebagai suatu proses pembelajaran dari tindak lanjut program PNFI memiliki peran yang strategis dalam upaya *mensupport* dan membimbing PEKKA agar mampu bangkit dari kondisi keterpurukkan, keterbelakangan, ketidakpercayaan diri, kurang terampil ke arah yang lebih baik (*progressif*) melalui pendekatan informal, artinya suatu pendekatan yang lebih kentara dengan suasana akademik tetapi luhur dalam hubungan emosional
 - i. Sumber dana penyelenggaraan program yang bersifat swadaya dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program yang dapat berjalan dengan lancar, transparan, terbuka sehingga hal ini merupakan salah satu proses pembelajaran bagi masyarakat dalam memahami konsepsi kemandirian
2. Hasil pembelajaran pelaksanaan pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) terhadap peningkatan pendapatan mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : (a).Kognitif (pengetahuan) peserta meningkat tentang pengolahan makanan, hal ini berbanding terbalik dengan pengetahuan awal warga belajar sebelum mengikuti pelatihan (b). Afektif ; kepercayaan diri, bekerja keras, semangat dalam bekerja, berani mengambil resiko dalam berusaha meningkat setelah mengikuti pelatihan, keberanian mengemukakan pendapat di depan umum apabila ada hal yang dianggap kurang mengerti/kurang faham.Kondisi sebaliknya terjadi ketika sebelum mengikuti pelatihan seperti sifat malas, malu untuk bertanya, rasa toleransi antar sesama yang kurang dan sebagainya. (c) Psikomotorik ;keterampilan peserta meningkat hal ini bisa dilihat dari kemampuan WB dalam menerapkan pengetahuan (teori) membuat opak singkong,kemudian terampil dalam mengelola kelompok yang ditandai dengan adanya administrasi kehadiran dan laporan keuangan yang bersifat sederhana.
3. Dampak pembelajaran pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) untuk peningkatan pendapatan dan kemandirian dalam berwirausaha yaitu ;

- a. Pendapatan warga belajar bertambah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah mengikuti pelatihan dan terlibat secara aktif dalam kelompok belajar usaha
- b. Rasa toleransi dan kebersamaan dalam berbuat sosial bertambah hal ini ditandai dengan perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh warga belajar dengan membantu keluarga yang terkena musibah (meninggal), syukuran khitanan, kerja bakti dengan partisipasi ibu-ibu dalam menyediakan/menyajikan makanan bagi tamu undangan yang datang ke PKBM Ash-Shoddiq
- c. Setelah terbentuk kelompok belajar usaha (KBU), tercipta kondisi saling membelajarkan di dalam kelompok dalam bentuk kegiatan *sharing* mengenai penentuan harga, diskusi tentang inovasi produk ke depan (dari penampilan kemasan dan rasa)
- d. Motivasi untuk berusaha semakin tinggi serta kemampuan melihat celah usaha (pasar) semakin meningkat, hal tersebut ditandai dengan adanya beberapa peserta pelatihan/warga belajar yang berwirausaha *voucher* pulsa, membuka warung, setelah mengikuti pelatihan *life skills* disamping tetap memproduksi opak singkong

Daftar Pustaka

- Arief, Z (1981). *Suatu Petunjuk Untuk Pelatih dalam Pendekatan Andragogi “Konsep, Pengalaman dan Aplikasi”*. BPKB Jayagiri : Unit Sumber Pendayagunaan Inovasi (USPI).
- Alma, B (2005). *Kewirausahaan*. Bandung : Alfa Beta.
- Badudu, J (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Brolin, D.E. (1989) *Life-Centered Career Education: A Competency-Based Approach*. Reston VA: *The Council For Exceptional Children*.
- Ditjen PLSP. (2007). *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) Pendidikan Non Formal*. Jakarta : Ditjen PLSP
- _____ (2003). *Program Life Skills Melalui Pendekatan Broad Based Education (BBE)*. Jakarta : Direktorat Tenaga Teknis Depdiknas.
- Ife, J, (1998), *Community Development*, New York : Macmillan Publishing Company.
- Kartasmita, G. (1996). *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Yogyakarta : UGM, Tidak diterbitkan.
- Molleong, Lexy J. (1989). *Metode Penelitian*. Jakarta : Rhineka Cipta.

Mulyana, E., (2007), *Model Tukar Belajar (Learning Exchange) dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, Bandung ; Mutiara Ilmu.

Sudjana, HD., (2005), *Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan, Sejarah, Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung*, Bandung : Falah Production.

_____, (2004) *Manajemen Program Pendidikan, untuk Pendidikan NonFormal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Falah Production,

Suharto, E., (2006), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Jakarta : Depdiknas

Sumber lainnya :

Mujani, Ridwan (2002). *Dampak Program Pelatihan Keterampilan Mekanik Mobil Terhadap Kemandirian Peserta Didik Pencari Kerja*. Bandung : PPS UPI, Tesis PPS UPI.

Mally, Marliah. (2005). *Dampak Program Pembelajaran Kejar Usaha Bidang Busana Kemandirian Warga Belajar Berwirausaha*. Bandung :. Tesis PPS UPI.

Yunus, L (2007) *Dampak Pendidikan Kecakapan Hidup Keterampilan terhadap Perubahan Sikap, Prilaku dan Kemandirian dalam Berwirausaha*. Bandung : Skripsi Jurusan PLS FIP UPI

Sumber Elektronik/Internet :

[www.klik-galamedia.com/kamis/22 April 2010](http://www.klik-galamedia.com/kamis/22_April_2010)

(<http://pekka.comuf.com/laporan/Intro%20lap%20akhir%202005%20Ind.pdf>.)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL

Yakob Napu

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan non formal (PNF) sebagai salah satu jalur pendidikan, memiliki berbagai program yang dapat berfungsi memberdayakan masyarakat. Salah satu program PNF yang berfungsi memberdayakan masyarakat adalah program keaksaraan fungsional (KF). Keaksaraan fungsional sebagai program layanan pemberdayaan masyarakat, seharusnya dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Pelaksanaan KF secara sistemik dan sistematis dicoba pelaksanaannya melalui pendekatan andragogi/partisipatif di Desa Bina Jaya Kecamatan Tolangohula. Keefektifan program KF ini belum maksimal, karena terdapat beberapa hambatan, baik pada pihak peserta didik, tutor, maupun sarana dan prasarana pembelajaran.

***Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Keaksaraan Fungsional*

PENDAHULUAN

Buta aksara sebagai salah satu masalah kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan. Di Indonesia, walaupun telah dilakukan pemberantasan buta aksara sejak zaman kemerdekaan, namun sampai sekarang Bangsa Indonesia belum bebas dari buta aksara. Karena itu, pemberantasan buta aksara masih mendapat perhatian dari pemerintah. Pendidikan Non Formal sebagai salah satu jalur pendidikan, diberi amanah oleh UURI/20/2003 tentang Sisdiknas untuk menyelenggarakan program keaksaraan. Salah satu program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat adalah keaksaraan fungsional (KF).

Program Keaksaraan Fungsional (KF) dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki keterbelakangan dalam hal keaksaraan dan pengetahuan fungsional. Sebagian kecil masyarakat Desa Bina Jaya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo masih menyandang buta aksara dan pengetahuan fungsional. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, baik faktor geografis, faktor demografis maupun keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan. Karena itu, diperlukan program keaksaraan fungsional sebagai program intervensi untuk memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keaksaraan fungsional, dimaksudkan agar masyarakat terbebas dari buta baca, tulis, hitung dan berbahasa Indonesia serta memiliki pengetahuan fungsional untuk kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pemberdayaan melalui program keaksaraan fungsional, diorganisir dalam bentuk kelompok-kelompok belajar. Setiap kelompok belajar beranggotakan 10 orang. Tiap kelompok dibimbing oleh seorang tutor untuk membantu proses pembelajaran dan menilai kemajuan belajar warga belajar.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kegiatan keaksaraan fungsional sebagai pemberdayaan masyarakat. Melalui temuan penelitian diharapkan dapat direkomendasikan hal-hal yang bermanfaat untuk perbaikan pelaksanaan program keaksaraan fungsional kepada stakeholder.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah dan tidak memiliki akses sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Soeharto (2006) melihat dimensi-dimensi tersebut adalah: (a) memenuhi kebutuhan bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-asas yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Suharto (2006) mengemukakan pemberdayaan bertujuan dua arah, yaitu: *pertama*, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. (Priyono dan Pranarka, 1996). Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Pemberdayaan ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Sumodiningrat (1999) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang

mereka miliki. Dalam kaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, Mubyarto (1998) mengemukakan dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang ada pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat pada intinya menjadikan masyarakat menjadi berdaya. Keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Pemberdayaan masyarakat bertolak dari postulat bahwa setiap masyarakat memiliki potensi atau daya untuk berkembang. Potensi tersebut, baik yang melekat pada setiap individu (seperti: daya fisik, cipta, karsa, karya) sebagai anggota masyarakat maupun potensi lingkungan yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat dapat berdimensi dua yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

Pertama; pemberdayaan individu-individu sebagai anggota masyarakat. Semakin banyak individu yang berdaya atau memiliki keberdayaan, maka semakin besar peluang bagi masyarakat yang bersangkutan untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Pemberdayaan dalam konteks ini adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan menyadarkan individu/masyarakat mengenai potensi yang dimiliki, diikuti oleh kesadaran untuk mengembangkannya, baik secara individual mandiri dan atau atas fasilitas pihak eksternal (*stake holder*) terutama melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan maupun berbagai intervensi lainnya. Pemberdayaan ini bersifat internal, yaitu intervensi terhadap diri manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Kedua; pemberdayaan lingkungan, terutama potensi lingkungan alam yang tersedia, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan berbagai potensi lingkungan lainnya.

Lingkungan masyarakat perlu diberdayakan sehingga dapat memberi manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Memberdayakan lingkungan sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat dengan aktor utamanya adalah masyarakat itu sendiri yang sudah memiliki keberdayaan sebagaimana diuraikan pada butir pertama di atas.

Walaupun aktor utamanya adalah masyarakat itu sendiri, tetapi untuk mendukung pemberdayaan lingkungan oleh masyarakat, sangat diperlukan intervensi

dari pihak eksternal, terutama pemerintah dan berbagai lembaga pemerintah, seperti lembaga keuangan, lembaga sosial, lembaga swasta lainnya seperti LSM yang berkepentingan dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Intervensi dari pihak eksternal mutlak diperlukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memberdayakan lingkungan, sehingga lingkungan masyarakat menjadi fungsional bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Keaksaraan Fungsional dalam Konteks Pemberdayaan

Salah program pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan non formal adalah program keaksaraan fungsional (*functional literacy*). Penyelenggaraan program keaksaraan fungsional merupakan amanat konstitusi sebagaimana dinyatakan pada pasal 26 UURI 20/2003, yang mengatur tentang pendidikan non formal. Pada ayat (2) dinyatakan pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Selanjutnya pada ayat (3) dikemukakan salah satu program pendidikan non formal adalah pendidikan keaksaraan.

Program keaksaraan fungsional merupakan usaha sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka mampu membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia serta memiliki pengetahuan dan keterampilan fungsional yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memperoleh gambaran tentang kedudukan program keaksaraan fungsional dalam konteks pemberdayaan masyarakat, perlu dikaji beberapa konsep keaksaraan fungsional.

Di Indonesia, keaksaraan dirumuskan sebagai suatu kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi dalam implementasinya keaksaraan tidak hanya dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan, baca, tulis, dan hitung, tetapi juga kemampuan berbahasa Indonesia. Bahkan sekarang ini program keaksaraan diperluas menjadi program keaksaraan fungsional. Karena program ini, baik kurikulum maupun proses pembelajaran dipadukan dengan pengetahuan fungsional yang diperlukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

UNESCO, merumuskan keaksaraan (*literacy*) merupakan kemampuan yang dicapai seseorang dalam hal menulis, berhitung dan membaca dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengenai fungsional (*functional*), oleh Arif (1986) diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan kecakapannya secara efektif dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari dalam kelompoknya serta memungkinkan dia menggunakan kecakapan untuk pembangunan masyarakat.

UNDP (Darkenwald and Merriam, 1982:206) menekankan keaksaraan fungsional sebagai kemampuan pengetahuan umum yang bersifat dasar dan kemampuan dalam bekerja, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan bernegara dan pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungan.

Direktorat Pendidikan Masyarakat (2004) sebagai lembaga yang bertanggungjawab menyelenggarakan program keaksaraan fungsional merumuskan keaksaraan fungsional merupakan program layanan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan baca, tulis dan hitung, kemampuan mengamati dan menganalisa, yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam lingkungannya.

Keaksaraan fungsional sebagai program layanan pemberdayaan masyarakat, bertujuan: *pertama*; membuka jalan untuk mencari/mendapatkan sumber-sumber kehidupan, *kedua*; melaksanakan kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien, *ketiga*; mengunjungi dan belajar pada lembaga yang dibutuhkan, *keempat*; menggali, mempelajari pengetahuan, keterampilan dan sikap pembaharuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dan *kelima*; mampu memecahkan masalah kehidupan sendiri dan kehidupan masyarakat sekitarnya. (Direktorat Dikmas, 2004).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa keaksaraan fungsional merupakan jalan untuk meningkatkan kemampuan setiap individu/masyarakat, sehingga mereka dapat secara langsung memberikan kontribusi pada pembangunan di berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, politik, serta budaya sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan uraian pada butir ini, jelas bahwa program keaksaraan fungsional merupakan upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik, sehingga melalui upaya pendidikan berbagai potensi peserta didik berubah menjadi kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain daya-daya yang ada pada setiap individu yang sifatnya potensial diberdayakan sehingga menjadi sumber daya/kekuatan bagi individu dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Prosedur Pelaksanaan Program

Pemberdayaan masyarakat melalui program keaksaraan fungsional di Desa Bina Jaya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, merupakan penelitian non eksperimen untuk mengevaluasi efektivitas program keaksaraan, yang dilakukan melalui beberapa tahap.

Tahap Diskusi Fokus;

Pada tahapan ini dilakukan diskusi dengan praktisi dan akademisi yang berkecimpung dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan.

Dalam kegiatan ini dipilih sekelompok orang berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh tim pemberdayaan masyarakat melalui program keaksaraan fungsional. Kriteria yang dimaksud adalah: keahlian, pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, memiliki wawasan luas/tokoh masyarakat. Hasil diskusi fokus adalah pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan model pemberdayaan yang berpusat pada masyarakat. Dengan pemberdayaan yang berpusat pada masyarakat, lebih terasa penekanan pemberdayaan yang mampu memberikan pengalaman masyarakat dalam melakukan sesuatu. Dengan pendekatan ini muncul kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan, pendapatan serta memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan model ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diawali dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Bina Jaya, khususnya terkait dengan program keaksaraan fungsional.

Pada tahap ini, telah ditentukan struktur dan mekanisme pembelajaran sebagai suatu proses pemberdayaan. Proses pembelajaran yang dipilih adalah pendekatan andragogi. Sedangkan kurikulum dalam keaksaraan fungsional menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan amanat undang-undang sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Dalam diskusi terfokus ditentukan pula sasaran utama pada kegiatan pemberdayaan. Adapun kriteria sasaran, kurikulum, dan mekanisme kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Peserta Didik

Peserta didik sebagai sasaran program pemberdayaan masyarakat melalui keaksaraan fungsional di Desa Bina Jaya harus memenuhi beberapa kriteria yang dipersyaratkan yang berhubungan dengan kependudukan, kepemilikan pengetahuan/keterampilan, dan kemauan. Jumlah peserta didik yang mengikuti program sebanyak 30 orang, dibagi ke dalam tiga kelompok dengan keterampilan yang berbeda sesuai hasil identifikasi kebutuhan dan kesanggupan penyelenggara. Peserta direkrut oleh Kepala Desa kerja sama dengan pihak terkait, seperti perangkat desa dan tokoh adat/masyarakat.

2. Kurikulum dan Jenis Keterampilan/Vokasi

Kurikulum sesuai kebutuhan masyarakat, dengan prioritas sebagai berikut: (a) membaca, (b) menulis, (c) berhitung, (d) tata boga (masakan tradisional), (e) menjahit, (f) pertanian/agro bisnis, (g) jasa-jasa lainnya sesuai kebutuhan lapangan kerja di pedesaan.

3. Pemanfaatan Dana Kerja Sama

Dana yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat melalui program keaksaraan fungsional yang berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup diperoleh melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Pemanfaatan dana kerja sama, mengikuti ketentuan yang berlaku

Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran keaksaraan fungsional dikemukakan sebagai berikut:

1. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran huruf-huruf dan hitungan disampaikan secara kontekstual. Dalam proses pembelajaran tutor menyampaikan materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Muatan kegiatan pembelajaran mencakup kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.

2. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi, yaitu mengutamakan keterlibatan/partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik diposisikan sebagai sumber belajar dengan menggali berbagai pengalaman peserta didik yang relevan dengan materi yang dipelajari.

3. Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sarana dan prasarana pembelajaran yang digunakan adalah yang berada di lingkungan peserta didik sesuai ketersediannya, seperti rumah-rumah peserta didik/penduduk dengan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya sesuai kesepakatan. Penggunaan tempat belajar juga menggunakan Kantor Desa Bina Jaya. Demikian pula dengan sarana pembelajaran, di samping menggunakan sarana pembelajaran yang disediakan oleh pengelola, juga menggunakan bahan dan alat yang ada di masyarakat/peserta didik.

4. Jadwal Pembelajaran

Jadwal pembelajaran, terutama yang terkait dengan lamanya waktu belajar senantiasa memperhatikan dengan ketentuan yang berlaku dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Tetapi mengenai waktu pelaksanaan, ditentukan sesuai kesepakatan antara pengelola, tutor, dan peserta didik.

5. Pengendalian Program

Untuk menjamin kualitas program, terutama proses pembelajaran, mutu dan kualitas lulusan dilakukan pengendalian program, dengan mengacu pada

ketentuan yang berlaku dan kesepakatan bersama antara pengelola, tutor, dan peserta didik.

6. Indikator Keberhasilan

Untuk menjamin kualitas lulusan program keaksaraan fungsional, ditetapkan indikator keberhasilan program pembelajaran, yaitu: (a) keberhasilan peserta didik menyelesaikan program sampai tuntas, (b) tingkat kompetensi lulusan, dan (c) kemandirian peserta didik mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki.

Hasil Program

Setelah dilakukan evaluasi hasil belajar bagi peserta didik program keaksaraan fungsional, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Peserta didik mampu membaca dan membedakan kuitansi dan bon. Peserta didik mampu menyebutkan nilai uang yang dibayarkan dalam kuitansi tersebut.
2. Peserta didik mampu membaca kartu tanda pengenal, baik KTP, SIM dan tanda pengenal lainnya. Baik KTP atau SIM miliknya sendiri maupun milik orang lain.
3. Peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari jenis alat komunikasi, televisi dan radio.
4. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diajukan tutor.
5. Peserta didik mampu membaca dan menjawab pertanyaan dari bahan yang dibacanya.
6. Peserta didik mampu menulis pertanyaan dan jawaban.

Selanjutnya keberhasilan peserta didik pada kegiatan keterampilan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Peserta didik mampu melakukan budidaya pertanian dan mengolah hasil pertanian, sehingga menjadi nilai tambah bagi kehidupan keluarganya.
2. Peserta didik, khususnya ibu-ibu mampu berinovasi dengan memvariasikan jenis masakan dari bahan makanan yang tersedia.
3. Peserta didik mampu membuat berbagai keterampilan yang berbahan dasar alam/lokal, walaupun terdapat beberapa orang yang belum terampil terhadap keterampilan yang telah diajarkan.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran program keaksaraan fungsional sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, dapat dikemukakan beberapa simpulan: (a) peserta didik sebagian besar sudah memiliki kemampuan baca, tulis, hitung yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari dan (b)

memiliki keterampilan/vokasi yang dapat digunakan untuk bekerja/berusaha sebagai sumber pendapatan/penghasilan dalam menunjang kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan program ini masih menghadapi hambatan, baik yang terkait aktivitas peserta didik yang belum maksimal mengikuti kegiatan pembelajaran, tutor belum menerapkan sepenuhnya pendekatan andragogi/partisipasi dalam pembelajaran, terbatas media lokal yang dimanfaatkan dalam pembelajaran.

Berdasarkan simpulan di atas, dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: (a) pemotivasian peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran perlu ditingkatkan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik daripada motivasi ekstrinsik. (b) Optimalisasi kegiatan pembelajaran yang bersifat partisipatif. (c) Pelatihan-pelatihan untuk peningkatan mutu tutor.

Daftar Pustaka

- Arif, Zianuddin. 1986. *Andragogi*. Bandung: Angkasa.
- Basleman, A. 2003. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Melalui PLS. Visi, Nomor 14/TH XI/2003.
- Darkenwald, Gordon G and Marriam, Sharan B. 1982. *Adult Eduaction: Foundations of Practice*. New York: Harper & Row Publishers.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. 2004. *Rencana Aksi Nasional Pendidikan Keaksaraan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Prijono, Onny S. Dan Pranarka, A. M. W. (Penyunting). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Adimata..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

REAKTUALISASI PENDIDIKAN KESETARAAN MELALUI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Simin Rauf

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

Abstrak

Perubahan kurikulum pendidikan formal dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 berimplikasi pada perubahan empat dari delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Idealnya perubahan tersebut berimbang pada pendidikan kesetaraan yang selama ini menjadi andalan pendidikan nonformal untuk mengimbangi pendidikan formal. Dari perubahan standar yang telah dilakukan, yang mencantumkan pendidikan kesetaraan baru pada rumusan SKL. Namun demikian realisasi perubahan kurikulum pendidikan kesetaraan belum diikuti oleh standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan kesetaraan. Sehingga perubahan kurikulum pendidikan kesetaraan hingga sekarang belum terealisasi. Sesuai kurikulum sebelumnya (kurikulum 2006) kurikulum pendidikan kesetaraan berbeda dengan kurikulum lembaga pendidikan pada pendidikan nonformal. Sistem pembelajaran pada pendidikan kesetaraan menggunakan satuan kredit kompetensi (SKK). Tujuan pembahasan ini adalah memberikan wawasan tentang reaktualisasi pendidikan kesetaraan melalui kurikulum 2013. Metode yang digunakan adalah metode analisis konseptual dengan mengkaji beberapa literatur berupa regulasi dan teori. Melalui pembahasan ini diharapkan agar kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan dapat membantu eksisnya pendidikan kesetaraan.

Kata kunci: *Reaktualisasi, pendidikan kesetaraan, kurikulum 2013.*

PENDAHULUAN

Tiga tahun terakhir negara Indonesia dihebohkan oleh reformasi di bidang pendidikan yaitu dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2006 menuju kurikulum 2013. Perubahan ini secara konseptual mencakup pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kesetaraan pada pendidikan nonformal. Hal ini nampak pada setiap regulasi dari empat standar yang berhubungan langsung dengan kurikulum dan ditetapkan melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, selalu mengikutsertakan lembaga pendidikan kesetaraan baik Paket A, paket B, maupun Paket C. Hal ini berarti bahwa peluang berubahnya kurikulum pendidikan kesetaraan ke kurikulum 2013 merupakan suatu keniscayaan. Akan tetapi hingga saat ini regulasi tentang standar isi, standar proses, dan standar penilaian serta struktur kurikulum pendidikan kesetaraan belum terbit.

Perlu dikemukakan bahwa pembelajaran pada pendidikan kesetaraan berbeda dengan pendidikan pada sekolah formal. Pada pembelajaran kesetaraan

menggunakan tatap muka, tutorial dan kegiatan mandiri. Harapannya pembelajaran pada pendidikan kesetaraan dapat menyesuaikan dengan kurikulum 2013.

Konsep Dasar Kurikulum 2013

Pengembangan Kurikulum 2013 dilandasi oleh aspek filosofis, yuridis dan konseptual. Secara filosofisnya pendidikan hendaknya berbasis nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat serta kurikulum berorientasi pengembangan kompetensi. Secara yuridis pendidikan dilandaskan pada perubahan metodologi pembelajaran, penataan kurikulum dan aspek hukum lainnya yang ditetapkan untuk sektor pendidikan. Secara konseptual pendidikan harus mempunyai relevansi, lebih dari hanya sekedar dokumen, berbasis kompetensi, memperhatikan proses, aktivitas, output dan outcome pembelajaran dan penilaian dan lainnya. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar atau pondasi dalam mengembangkan kurikulum 2013.

Pengembangan kurikulum 2013 tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana dituliskan pada Pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari tujuan pendidikan tersebut dikembangkanlah kompetensi inti yaitu menjadi 3 (tiga) aspek yaitu Pertama aspek sikap yang meliputi sikap spiritual (beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan sikap sosial (berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab), kedua aspek pengetahuan (berilmu) dan ketiga aspek keterampilan (cakap dan kreatif). Ketiga aspek itulah yang dikembangkan dalam kurikulum 2013 menjadi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik secara berjenjang mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sekolah Dasar (SD) sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajatnya. Kompetensi Inti inilah yang menjadi tujuan pendidikan menurut kurikulum 2013.

Tuntutan kurikulum 2013 ini muncul karena adanya perubahan paradigma pembangunan di negara Indonesia. Pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis kekayaan alam menjadi pembangunan berbasis kekayaan peradaban. Dimana pembangunan sampai dengan dekade akhir abad 20 meliputi pembangunan berbasis sumber daya ekonomi, SDA sebagai modal pembangunan, SDM sebagai beban pembangunan dan penduduk sebagai pasar/pengguna. Sedangkan

pembangunan abad 21 dan seterusnya meliputi ; pembangunan kesejahteraan berbasis peradaban, peradaban sebagai model pembangunan, SDM beradab sebagai model pembangunan dan penduduk sebagai pelaku/produsen. Pergesaran paradigma pembangunan ini menuntut sektor pendidikan mengambil peran penting. Transformasi melalui pendidikan merupakan suatu cara yang dianggap efektif. Sehingga pendidikan harus menyiapkan SDM yang beradab dan kekayaan peradaban.

Kurikulum 2013 juga menggeser paradigma belajar yang selama ini ada menjadi paradigma belajar abad 21 yang membutuhkan model pembelajaran saintifik yang bercirikan sebagai berikut:

- Pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik “mencari tahu” dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu, karena informasi tersedia dimana saja dan kapan saja dapat diakses.
- Pembelajaran diarahkan untuk mampu “merumuskan masalah (menanya)”, bukan hanya menyelesaikan masalah (menjawab).
- Pembelajaran diarahkan untuk melatih berfikir “analitis (pengambilan keputusan)” bukan berfikir mekanistik (rutin).
- Pembelajaran menekankan pentingnya “kerjasama dan kolaborasi” dalam menyelesaikan masalah.

Adapun tema pengembangan kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indoensia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan, sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum 2013 mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba (observation based learning) untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Disamping itu, dibiasakan bagi peserta didik untuk bekerja dalam jejaringan melalui collaborative learning. Kegiatan pembelajarannya meliputi:

- Kegiatan mengamati (observing) ; aktivitas belajarnya adalah mengamati gejala sosial dengan melihat, membaca, mendengar dan mencermatinya melalui berbagai sumber, seperti kunjungan lapangan, kajian pustaka, dan sumber informasi dari media massa.
- Kegiatan menanya (questioning); aktivitas belajarnya adalah melakukan pengamatan berbagai gejala sosial dengan merumuskan pertanyaan berdasarkan kaitan, pengaruh dan kecenderungannya;
- Kegiatan mengumpulkan data (eksperimenting); aktivitas belajarnya adalah mengumpulkan data dengan merumuskan daftar pertanyaan berdasarkan hasil

identifikasi, menentukan indikator, melakukan wawancara dan atau mengisi kuesioner.

- Kegiatan mengasosiasi (*associating*) ; aktivitas belajarnya adalah melakukan analisis data berdasarkan kerangka analisis dengan melihat keterkaitan data dengan konsep, klasifikasi, kuantifikasi, interpretasi dan tabulasi data. Memecahkan masalah dengan mengajukan pendapat, penilaian atau argumen untuk merumuskan rencana aksi dan strategi serta melakukan evaluasi;
- Kegiatan mengkomunikasikan (*Communicating*); aktivitas belajarnya adalah mengkomunikasikan proses dan hasil kegiatan dalam memecahkan masalah sosial dengan memaparkan, mendiskusikan, membuat laporan dan mempublikasikannya.

Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menjadi roh nya kurikulum 2013 untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada tingkat satuan pendidikan tetap dilakukan penyusunan kurikulum yang mengacu pada permendikbud yang mengatur 8 standar pendidikan nasional. Kurikulum 2013 memang baru dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, bagaimana dengan pendidikan nonformal dan informal?

Pendidikan informal yang diselenggarakan oleh keluarga dan masyarakat selama ini hanya ada sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara mandiri, jadi dapat disimpulkan bahwa jauh dari sentuhan kurikulum 2013. Sedangkan pendidikan nonformal yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. PNFI meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (Pasal 26 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Sekilas Kurikulum Pendidikan Kesetaraan

Struktur kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C dilaksanakan dalam sistem tingkatan dan derajat yang setara dengan sistem kelas pada pendidikan formal dengan kompetensi masing-masing sebagai berikut:

1. Program Paket A meliputi Tingkatan 1 dan tingkatan 2. Tingkatan 1 dengan derajat kompetensi Awal setara dengan kelas III SD/MI, menekankan pada kemampuan literasi dan numerasi (kemahirwacanaan bahasa dan angka), sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan, baik dalam bentuk huruf maupun angka. Selanjutnya Tingkatan 2 dengan derajat

kompetensi Dasar setara dengan kelas VI SD/MI, menekankan penguasaan fakta, konsep, dan data secara bertahap, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan dengan menggunakan fenomena alam dan atau sosial sederhana secara etis, untuk memiliki keterampilan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

2. Program Paket B meliputi: Tingkatan 3 dengan derajat kompetensi Terampil 1 setara dengan kelas VIII SMP/MTs, menekankan pada penguasaan dan penerapan konsep-konsep abstrak secara lebih meluas dan berlatih meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak logis dan etis, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan, serta memecahkan masalah dengan menggunakan fenomena alam dan atau sosial yang lebih luas. Sedangkan Tingkatan 4 dengan derajat kompetensi Terampil 2 setara dengan kelas IX SMP/MTs, menekankan peningkatan keterampilan berpikir dan mengolah informasi serta menerapkannya untuk menghasilkan karya sederhana yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, sehingga peserta didik mampu secara aktif mengekspresikan diri dan mengkomunikasikan karyanya melalui teks secara lisan dan tertulis berdasarkan data dan informasi yang akurat secara etis, untuk memenuhi tuntutan keterampilan dunia kerja sederhana dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
3. Program Paket C meliputi: Tingkatan 5 dengan derajat kompetensi Mahir 1 setara dengan kelas X SMA/MA, diarahkan pada pencapaian dasar-dasar kompetensi akademik dan menerapkannya untuk menghasilkan karya sehingga peserta didik mampu mengkomunikasikan konsep-konsep secara lebih ilmiah dan etis serta mempersiapkan diri untuk mampu bekerja mandiri dan mengembangkan kepribadian profesional. Selanjutnya Tingkatan 6 dengan derajat kompetensi Mahir 2 setara dengan kelas XII SMA/MA, diarahkan untuk pencapaian kemampuan akademik dan keterampilan fungsional secara etis, sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri atau berwirausaha, bersikap profesional, berpartisipasi aktif dan produktif dalam kehidupan masyarakat, serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Struktur kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permen Diknas 23/2006 dengan orientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program program Paket A, Paket B, dan Paket C, yaitu:

- a. Paket A: Memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Paket B: Memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.
- c. Paket C: Memiliki keterampilan berwirausaha.

Program kesetaraan menggunakan sistem satuan kredit kompetensi (SKK). SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan KD tiap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri.

Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran yaitu sama dengan 35 menit untuk Paket A, 40 menit untuk Paket B, dan 45 menit untuk Paket C.

Upaya Reaktualisasi Pendidikan Kesetaraan Melalui Kurikulum 2013

Dalam upaya pengembangan kurikulum pada pendidikan kesetaraan, beberapa peluang yang dapat digunakan.

1. Standar isi, standar proses, dan standar penilaian struktur kurikulum pendidikan kesetaraan pada Kurikulum 2013 diha-rapkan tidak berbeda jauh dengan struktur kurikulum pada kurikulum 2006.
2. Pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik “mencari tahu” dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu, karena informasi tersedia dimana saja dan kapan saja dapat diakses.
3. Pembelajaran diarahkan untuk mampu “merumuskan masalah (menanya)”, bukan hanya menyelesaikan masalah (menjawab).
4. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berfikir “analitis (pengambilan keputusan)” bukan berfikir mekanistik (rutin).
5. Pembelajaran menekankan pentingnya “kerjasama dan kolaborasi” dalam menyelesaikan masalah.

PENUTUP

1. Kurikulum untuk pendidikan kesetaraan secara konseptual telah termuat pada standar kompetensi lulusan pendidikan formal.

2. Untuk standar lain seperti standar isi, standar proses, dan standar penilaian termasuk Struktur kurikulum belum diterbitkan untuk pendidikan kesetaraan
3. Diharapkan kurikulum 2013 untuk pendidikan kesetaraan tidak berbeda jauh dengan kurikulum

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional (2007) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 14 tahun 2007 Standar Isi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Dan Program Paket C
- Departemen Pendidikan Nasional (2008) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Dan Program Paket C.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2014) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

REAKTUALISASI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN BEBERAPA TANTANGANNYA

Yoenarsih Nazar
MDF Asia
yoenarsih@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pendidikan luar sekolah menjadi sangat strategis manakala pendidikan ini mempunyai peran yang dirasakan oleh masyarakat. Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan sekolah, karena itu pendidikan luar sekolah merupakan bentuk pendidikan yang mampu memberdayakan masyarakat melalui berbagai program, karena itu, reaktualisasi program pendidikan luar sekolah menjadi sangat penting bagi keberadaan jurusan pendidikan luar sekolah itu sendiri. Reaktualisasi PLS tidak hanya menyangkut melihat kembali kurikulum jurusan PLS dan kurikulum pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk masyarakat. Perubahan ini terkait erat dengan berbagai komponen lainnya dari suatu organisasi, dan akan mempengaruhi semua elemen tersebut. reaktualisasi PLS dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat ASEAN agar bisa berdaya saing tinggi, beberapa pertanyaan berikut ini perlu ditemukan dan disepakati jawabannya, dalam rangka membunikan cita-cita masyarakat ASEAN di tanah Gorontalo

Kata Kunci: *Reaktualisasi, Pendidikan Luar Sekolah*

Latar Belakang

Kata reaktualisasi terdiri dari dua kata, re dan aktualisasi, yang berarti mengaktualisasikan kembali. Dalam konteks seminar ini, berarti mengaktualisasikan kembali Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di bumi Gorontalo. Oleh siapa? Oleh Universitas Negeri Gorontalo.

Mengapa UNG ingin mengaktualisasikan kembali PLS? Kerangka acuan seminar ini menyebutkan dua alasan utama: 1) karena mutu SDM Indonesia saat ini masih ketinggalan dan berada di belakang SDM negara-negara maju dan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand; 2) karena UNG ingin mewujudkan cita-cita asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara, ASEAN, dalam membangun manusia, komunitas ASEAN, yang berdaya saing tinggi.

Setiap perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab strategis untuk selalu melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam mengejawantahkan tanggung jawab ini, UNG berkewajiban menghubungkan cita-cita ASEAN “meningkatkan daya saing komunitas ASEAN” dengan kondisi kini masyarakat di Gorontalo, sehingga cita-cita mulia itu membunikan. Dengan apa menghubungkannya? Dengan kurikulum yang memenuhi kaidah kompetensi yang sudah distandarkan secara nasional melalui Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia.

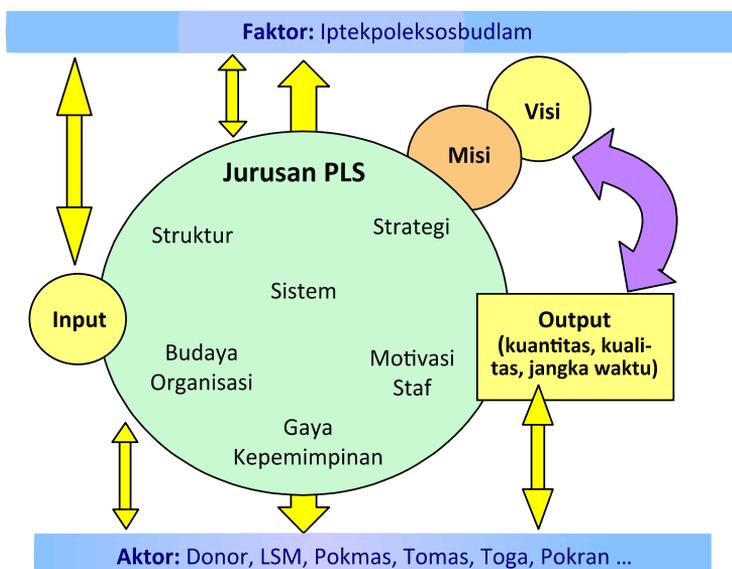
Makalah ini mencoba memotret hubungan tersebut dengan mengajak peserta melihat kembali keberadaan UNG, khususnya jurusan PLS, dalam konteks lingkungan strategisnya, menentukan fokus pada cita-cita masyarakat ASEAN yang akan dijadikan target program PLS di UNG, dan menguraikan pentingnya menjabarkan cita-cita itu menjadi rumusan yang jelas dan terukur. Akan disinggung juga pentingnya mengevaluasi hasil pendidikan dari jurusan PLS, dan apa saja peran lulusan jurusan PLS.

Keberadaan Jurusan PLS

Me-reaktualisasi-kan PLS tidak hanya menyangkut melihat kembali kurikulum jurusan PLS dan kurikulum pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk masyarakat. Perubahan ini terkait erat dengan berbagai komponen lainnya dari suatu organisasi, dan akan mempengaruhi semua elemen tersebut.

Organisasi merupakan suatu entitas dalam suatu lingkungan, dan lingkungan (eksternal) haruslah dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan, yang terpadu, dari sebuah organisasi. Kenapa demikian? Karena alasan dari keberadaan suatu organisasi sebenarnya adalah untuk merespon, dan dipengaruhi oleh, apa yang ada di luar sana di lingkungannya.

Cara melihat organisasi seperti ini dikenal dengan Model Organisasi Terpadu/MOT (dalam bahasa Inggris, *Integrated Organization Model/IOM*). Gambar 1 di bawah ini memperlihatkan apa saja unsur atau elemen yang terkait dengan sebuah organisasi, bila kita melihat organisasi secara terpadu dengan lingkungannya melalui MOT ini. Dalam hal ini, Jurusan PLS, atau Fakultas Ilmu Pendidikan, atau bahkan UNG, dapat kita anggap sebagai entitas organisasi yang dimaksud (tergantung pada entitas mana yang dianggap sebagai “pemilik” perubahan ini).



Gambar 1 Model Organisasi Terpadu (MOT)

Dengan menganalisis organisasi menggunakan model MOT ini, kita akan melihat bahwa setiap perubahan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi seluruh elemen organisasi. Mari kita ambil re-aktualisasi PLS ini sebagai contoh. Bagaimana kita melihat reaktualisasi ini dari perspektif MOT? Apa saja pertanyaan yang dapat kita lontarkan untuk menantang diri kita sendiri dan untuk melihat apakah perubahan yang dicanangkan ini layak atau bisa dilakukan? Berikut ini beberapa contoh pertanyaan yang dapat kita lontarkan yang terkait dengan beberapa unsur/elemen organisasi seperti yang tergambar pada model MOT di atas.

Elemen/Unsur dalam MOT		Contoh Pertanyaan
External: Faktor	Iptek	Apa teknologi yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan gagasan baru kepada para pemangku kepentingan?
	Kebijakan	UU/Peraturan mana yang memberi kesempatan kepada lembaga kita untuk mengembangkan kemampuan para guru / dosen?
	Input	Apa saja sumber daya, buku, media, yang tersedia di luar sana yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh guru/dosen kita, untuk mendukung cara baru dalam mengajar?
	Output	Apa kata para lulusan kita tentang cara dosen kita mengajar mereka? Bagaimana program kita menginspirasi mereka dalam membuat keputusan untuk masa depan mereka?
External: Aktor	Perguruan tinggi/ lembaga pelatihan lain	Apakah ada contoh di luar sana dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang dapat kita jadikan sebagai bahan pembelajaran?
	Donor	Apakah ada lembaga donor yang mandate atau program-nya sejalan dengan niat kita untuk meningkatkan keterampilan dosen/guru kita?
Internal	Sistem	Apakah perubahan yang diusulkan akan mempengaruhi evaluasi kinerja atau mekanisme sertifikasi dosen kita? Bagaimana prosedur untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan agar kita dapat menerapkan metode-metode pengajaran yang baru?
	Struktur	Apakah sebaiknya kita mendapatkan persetujuan dulu dari Rektor atau Dekan, dan meminta mereka untuk mengeluarkan kebijakan untuk mengimplementasikan perubahan, atau apakah sebaiknya kita mencobanya pada skala kecil dulu dengan beberapa teman dan kita lihat bagaimana kelanjutannya?
	Strategi	Apa yang akan menjadi strategi yang terbaik untuk mempromosikan ide baru ini? Dan untuk menyebarkannya nanti? Apa yang perlu dengan hati-hati kita perhatikan?
	Motivasi staf	Seberapa bersemangat anggota fakultas dan dosen kita pada perubahan yang diusulkan?
	Budaya organisasi	Apakah kita cenderung membuat keputusan baru secara langsung, lurus kedepan, atau lebih baik menunggu dan "menguji coba" dulu? Seberapa penting gaya mengajar bagi lembaga kita, dibandingkan dengan penelitian?
	Gaya kepemimpinan	Seberapa terbuka pimpinan/manajemen universitas dan fakultas kita terhadap perubahan yang diinginkan?

Membumikan Cita-cita Masyarakat ASEAN melalui PLS

Ketika reaktualisasi PLS dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat ASEAN agar bisa berdaya saing tinggi, beberapa pertanyaan berikut

ini perlu ditemukan dan disepakati jawabannya, dalam rangka membumikan cita-cita masyarakat ASEAN di tanah Gorontalo:

- 1) Program kerja yang mana dari enam fokus ASEAN dalam membangun komunitas sosio-budaya, yang akan menjadi fokus re-aktualisasi PLS? Menjadi fokus re-aktualisasi berarti memastikan bahwa apa yang disajikan program PLS benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi target sarannya, masyarakat Gorontalo. Enam program kerja yang dimaksud adalah pengembangan SDM, perlindungan dan kesejahteraan sosial, keadilan dan hak sosial, memastikan keberlanjutan lingkungan, memperkecil jurang pembangunan, dan membangun identitas ASEAN.
- 2) Seberapa jauh UNG/FIP/Jurusan PLS telah mengadakan penelitian terhadap kebutuhan penguatan pada masyarakat Gorontalo? Apakah “menu” program PLS ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah, atau UNG, atau atas dasar hasil dialog dengan masyarakat dan penyelenggara PLS selama ini? Bagaimana Jurusan PLS akan merespon kondisi berbagai kalangan di masyarakat yang berbeda-beda adat kebiasaannya?
- 3) Bagaimana pula hubungan misi ASEAN dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan seberapa jauh kompetensi yang ingin diwujudkan telah terumuskan secara SMART? Seperti apa profil kompetensi lulusan jurusan PLS di UNG yang diinginkan, dan seperti apa pula profil “lulusan program-program PLS” yang dilakukan di masyarakat nantinya?
- 4) Sejauh mana kemudian kurikulum jurusan PLS di UNG terkait dengan, atau merespon pembelajaran yang dipetik dari pelaksanaan program-program PLS selama ini di Gorontalo?

Mengapa pertanyaan-pertanyaan itu timbul? Karena di banyak tempat dan di berbagai lembaga, sering ditemukan ketidak-terhubungan antara menu yang disiapkan dengan kebutuhan penerima manfaatnya. Misi “Stop Pekerja Anak” sebuah lembaga advokasi anak, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di desa yang diperjuangkannya, karena masalahnya disana buka anak-anak dipaksa bekerja, tapi karena bekerja adalah pilihan terbaik ksaat itu disebabkan tidak adanya sekolah. Atau misi pemerintah memberikan bantuan alat pengering ikan di kampung nelayan, yang ternyata kapasitasnya kalah jauh dibandingkan dengan alat bikinan nelayan sendiri.

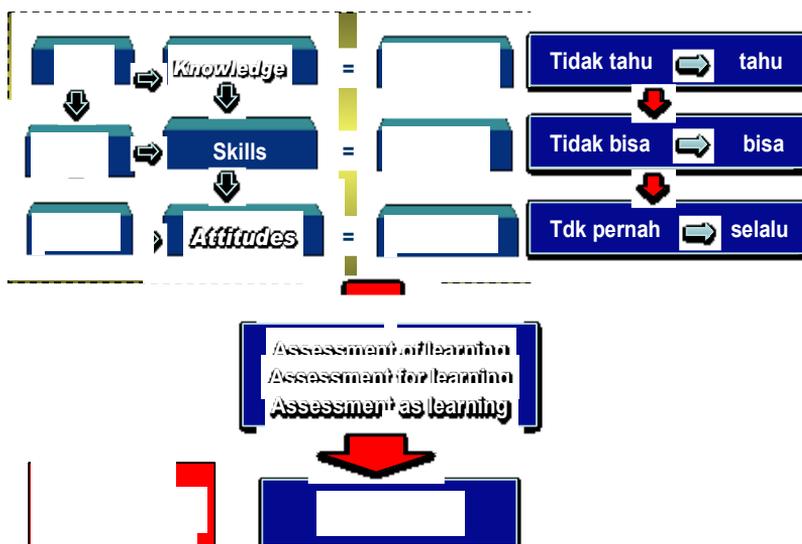
Mengevaluasi Hasil Pendidikan Luar Sekolah

Mengevaluasi hasil pendidikan bukanlah berarti hanya melakukan tes atau ujian di akhir pendidikan (atau pelatihan). Tes hasil belajar hanyalah salah satu tahap dalam proses penilaian. Menurut Donald Kirkpatrick ada 4 tahap penilaian pendidikan:

- 1) Menilai proses belajar: apakah proses belajar menyenangkan bagi peserta didik dan mendorongnya untuk berpikir kreatif dan menyelesaikan persoalan?
- 2) Menilai hasil belajar: apakah peserta didik, di akhir masa pendidikannya, berhasil mencapai tujuan-tujuan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum?
- 3) Menilai pengamalan hasil belajar dalam kehidupan: apakah peserta didik berhasil mengamalkan ilmu yang dipelajarinya di bangku pendidikan dalam kehidupan atau pekerjaannya sehari-hari? Apakah ia mampu memecahkan persoalan hidupnya dengan kreatif dan membuat terobosan-terobosan baru?
- 4) Menilai dampak hasil belajar: apakah peserta didik mampu membawa perubahan pada lingkungannya, pada organisasinya, pada daerahnya?

Itu evaluasi dari sisi penyelenggara pendidikan, dan dilakukan oleh orang atau lembaga diluar diri peserta didik. Hasilnya bisa saja tidak bertahan lama, karena pendorongnya adalah sesuatu diluar diri si peserta didik: mungkin sistem pendidikan, mungkin kepentingan proyek atau lembaga donor, mungkin juga karena kepentingan mendapatkan dana APBN yang lebih besar. Evaluasi yang hasilnya akan bertahan lebih lama, sepanjang usia, bahkan setelah si peserta didik meninggalkan dunia yang fana ini, adalah ketika keinginan melakukan evaluasi itu datang dari dirinya sendiri.

Apa yang dievaluasi? Tiga ranah dalam pendidikan: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan dievaluasi untuk mencek apakah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Keterampilan dievaluasi untuk melihat apakah dia dari tidak bisa menjadi bisa. Sedangkan sikap dievaluasi untuk melihat apakah dia sudah berubah dari tidak biasa melakukan (hal yang baik) menjadi terbiasa. Gambar 3 di halaman berikut memperlihatkan penilaian pada ketiga ranah ini.



Gambar 2
Evaluasi ranah pendidikan

Pertanyaannya sekarang adalah, sampai di tahap mana UNG, dalam hal ini jurusan PLS, akan mengevaluasi hasil pendidikannya?

Peran Lulusan PLS

Dalam melaksanakan program PLS, lulusan jurusan PLS dituntut untuk mampu melaksanakan berbagai peran: sebagai pengelola proses pemberdayaan masyarakat, juga sebagai motivator, inspirator, nara sumber, guru, atau pelatih. Kita akan lihat lebih jauh perannya sebagai pelatih.

Peran pelatih ini sekarang sudah bergeser. Dulu pelatih dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan informasi, yang mentransfer ilmu dan keahliannya kepada peserta pelatihan. Sekarang peran itu sudah bergeser: seorang pelatih hendaklah sekaligus menjadi fasilitator, yang akan memandu proses kelompok dan menciptakan suasana di mana proses dapat berkembang, dan membantu kelompok menghasilkan keputusan, solusi atau kesimpulan. "Proses kelompok" adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola diskusi, mendapatkan yang terbaik dari semua peserta, dan memandu keseluruhan acara dengan sukses.

Dalam proses kelompok yang difasilitasi dengan baik, peserta lebih banyak belajar dari pengalaman, yakni benar-benar melakukan sesuatu sendiri: di kelompok kecil, berdiskusi dengan sesama peserta, dan menerima umpan balik dari pelatih dan dari sesama peserta. Pelatihan tidak lagi merupakan jalur satu arah di mana pelatih menuangkan pengetahuan ke dalam "gelas kosong", tapi merupakan interaksi yang hidup, yang membuat pelatihan menjadi menarik.

Fasilitasi pembelajaran dalam kerja kelompok dimulai dengan pemberian tugas yang jelas bagi peserta. Pelatih / fasilitator memberikan tugas sedemikian rupa sehingga sangat jelas bagi peserta, apa yang diharapkan dari mereka. Ketika mereka kembali ke diskusi pleno, fasilitator memungkinkan mereka untuk berbagi keprihatinan dan pertanyaan dengan kelompok mereka. Ini harus dilakukan dengan kedalaman yang cukup, sehingga penerapan suatu konsep oleh peserta didasarkan pada pemahamannya yang baik terhadap konsep tersebut. Semua ini perlu dilakukan dengan cara yang efisien tanpa kehilangan fleksibilitas terkait dengan waktu.

Untuk dapat memfasilitasi dengan efektif, seorang fasilitator harus memiliki beberapa keterampilan dasar. Ada empat tingkat keterampilan yang dibutuhkan dari seorang fasilitator yang handal:

1. Tingkat dasar (intra-personal): Seorang fasilitator harus matang secara emosional, dan mampu mengelola emosinya dengan baik. Dia dia harus menghormati kelompok dan mempercayai mereka sebagai orang dewasa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup.

2. Tingkat interpersonal: Fasilitator harus mampu berkomunikasi dengan kelompok, membuat mereka memahami proses, mengetahui harapan mereka dari proses kelompok dan apa yang ingin mereka lakukan. Di sisi lain, ia juga perlu memahami apa yang dikatakan peserta, mendengarkan dengan aktif (= menyimak), mendeteksi isu-isu penting, dan merangkum diskusi.
3. Tingkat dinamika kelompok: Di tingkat ini fasilitator diharapkan untuk merangsang dialog terbuka dan saling berbagi di antara peserta. Ia juga harus mampu mengelola dinamika kelompok, bahkan konflik, seandainya terjadi. Untuk melakukan perannya dengan baik pada tingkat ini, seorang fasilitator haruslah objektif. Ini tidak berarti dia harus datang dari luar organisasi atau tim. Maksudnya adalah, bahwa untuk keperluan proses kelompok yang dia fasilitasi, si fasilitator akan mengambil sikap netral. Seorang fasilitator “menjaga jarak” dengan substansi diskusi yang rinci, dan dari pandangan pribadinya, dan berfokus sepenuhnya pada proses kelompok.
4. Tingkat desain proses: Seorang fasilitator diharapkan juga menjadi terampil dalam merancang acara yang akan dia fasilitasi. Untuk melakukan hal ini dengan efektif, fasilitator perlu mempertimbangkan beberapa faktor, misalnya:
 - a) Sifat dari topik yang sedang dibahas.
 - b) Output/produk yang diharapkan dari acara tersebut.
 - c) Siapa peserta, berapa banyak diperkirakan akan hadir.
 - d) Apa latar belakang dan posisi mereka.
 - e) Bagaimana posisi mereka terhadap substansi yang dibahas, seberapa dalam mereka mengetahuinya - dan mengenal satu sama lain.
 - f) Bentuk keterlibatan peserta.
 - g) Waktu yang tersedia untuk proses yang ia fasilitasi.

Disinilah seorang fasilitator membuat rencana bagaimana dia akan “menenun” konsep pembelajaran orang dewasa (dan konsep pembelajaran lainnya) ke dalam proses yang ia fasilitasi, dan menghasilkan rencana yang dirancang dengan baik, atau “cetak biru”, dari proses bahwa yang akan ia fasilitasi. Gambar 3 di halaman berikut menunjukkan tingkat keterampilan fasilitator yang dimaksudkan di bagian ini.

Rahasia dari fasilitasi yang berhasil adalah proses kelompok yang mengalir - dan dengan demikian, akan mengalir pula gagasan-gagasan kelompok, solusi, dan juga keputusan-keputusan penting.



Gambar 3 – Tingkat keterampilan fasilitator

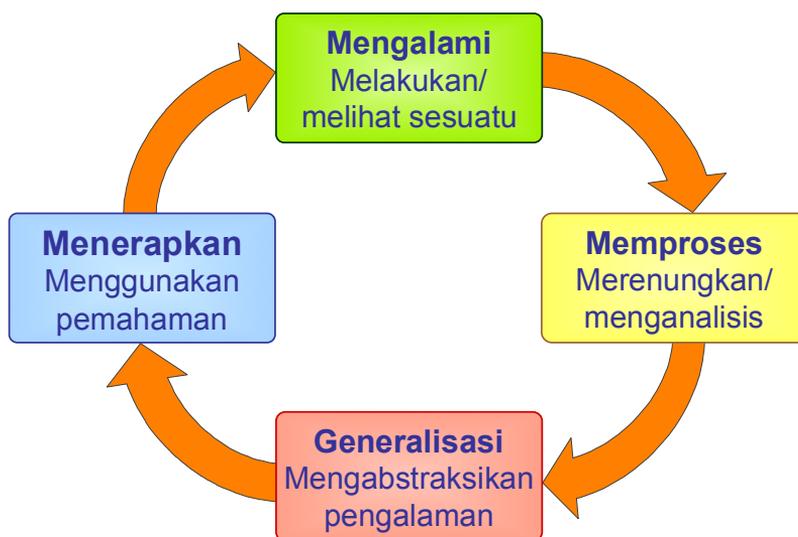
PLS dan Siklus Belajar Orang Dewasa

Pendidikan luar sekolah atau PLS berkaitan erat dengan proses belajar orang dewasa (andragogy). Bila program pelatihan dan program universitas banyak dimulai dengan teori, praktek dilakukan kemudian, maka prinsip belajar orang dewasa mengambil rute sebaliknya: dimulai dengan praktek atau mengalami sesuatu lebih dulu, baru diikuti dengan teori. Proses ini disebut siklus belajar berbasis pengalaman (experiential learning cycle). Ada empat langkah utama dalam siklus ini, yang selalu dimulai dengan pengalaman. Langkah-langkahnya adalah:

- 1) Mengalami: (melihat, melakukan suatu kegiatan);
- 2) Mengolah atau memproses (merenungkan, membahas kegiatan);
- 3) Generalisasi (menyimpulkan dari pengalaman di tingkat yang lebih tinggi dari abstraksi, mendefinisikan beberapa "kebenaran" tentang bagaimana sesuatu bekerja);
- 4) Menerapkan (memanfaatkan generalisasi untuk mengubah perilaku menjadi lebih efektif).

Bagaimana dalam praktek hal ini dilakukan? Untuk langkah pertama (**Mengalami**), pelatih mengatur situasi dan lingkungan yang paling memungkinkan untuk memberikan kepada peserta pengalaman yang diinginkan, atau membuat situasi yang memungkinkan mereka untuk mengingat pengalaman kehidupan nyata yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Pelatih kemudian memandu proses refleksi, diskusi atau umpan balik, yang memungkinkan peserta untuk berbagi reaksi dan pengamatan, dan memproses pengalaman (**Mengolah/memproses**). Jika peserta

pelatihan diharapkan dapat memanfaatkan substansi pelatihan pada kerja nyata mereka, mereka harus mentransformasikan apa yang telah mereka amati atau alami dalam satu situasi tadi menjadi prinsip umum, atau menarik pembelajaran umum dari situ. Pelatih membuat hal itu memungkinkan bagi peserta dengan menghubungkan pengetahuan atau teori yang ada mengenai topik tersebut dengan pengalaman peserta pelatihan. Pengetahuan atau teori yang ada ini dapat disampaikan baik oleh peserta maupun oleh pelatih, baik melalui presentasi singkat atau dengan memfasilitasi diskusi untuk memperjelas pokok persoalan, dan membantu menghubungkannya dengan potensi penerapannya nanti (**Konseptualisasi abstrak**). Akhirnya, untuk menyimpulkan sesi, pelatih membantu peserta untuk mengidentifikasi dan merencanakan bagaimana mereka akan menerapkan apa yang telah mereka pelajari untuk membantu mereka untuk melakukan pekerjaan mereka lebih efektif (**Penerapan/Eksperimentasi Aktif**) dan bila mungkin mengatur aplikasi kehidupan nyata yang lagi memberikan masukan baru bagi loop lain sesuai dengan siklus belajar. Siklus tersebut digambarkan di bawah ini.



Gambar 4 – Siklus Belajar Berbasis Pengalaman (Siklus Belajar Orang Dewasa)

Konsep *experiential learning* ini berfungsi sebagai pengatur proses belajar pada pelatihan-pelatihan. Pemahaman terhadap bagaimana orang dewasa belajar memungkinkan pelatih untuk memberikan pembelajaran berkualitas tinggi dan mempertegas peran seorang pelatih.

Salah Tafsir Konsep

Dalam pekerjaan saya saat ini dan sebelumnya, saya sering bertemu dan berinteraksi dengan berbagai pelatih, dan mengamati bagaimana mereka memandu proses kelompok. Seringkali saya menemukan, langkah pertama dari siklus

pembelajaran orang dewasa, yakni mengalami, disalah-artikan sebagai memberikan *ice breaker*. Untuk membuat awal pelatihan hidup, banyak pelatih menggunakan berbagai jenis pembuka percakapan. Sayangnya, mereka melakukannya hanya sekedar untuk hura-hura saja, sehingga proses itu menjadi tidak berarti. Hal ini telah membuat banyak orang merasa alergi ketika mereka mendengar kata *ice breaker*. Mereka menganggap pembuka proses ini hanya main-main, sembrono, dan buang-buang waktu saja.

Persepsi ini disebabkan oleh alasan yang berbeda. Beberapa kritikus berpendapat peserta didik dari budaya atau negara tertentu mungkin lebih enggan melakukan *ice breaker* dibandingkan peserta dari budaya atau negara lain. Kritikus lain mengatakan, ketidak sukaan orang pada *ice breaker* mungkin karena perbedaan sifat atau kepribadian individu. Ada orang yang introvert, ada pula yang extrovert. Ada yang berpangkat tinggi, ada pula stsaf biasa.

Terlepas dari adanya ketidak sukaan itu, *ice breaker* tetap menjadi komponen yang sangat terhormat pada sesi belajar, tidak peduli usia, tingkat, atau lokasi geografis dari peserta didik. Mengapa? Karena manfaatnya lebih besar dari kelemahannya. Banyak juga pelatih yang dapat menggunakannya dengan tepat. Jadi pertanyaannya bukan pada “apakah kita perlu menggunakan *ice breaker* atau tidak”, tapi “bagaimana melakukannya dengan benar”. Setidaknya ada tiga alasan, yang disebut "tiga Rs", yang membuat orang menggunakannya:

- a) Untuk melengkapi tujuan Anda (**relevansi**), atau
- b) Untuk menarik peserta tanpa menempatkan orang lain “diluar garis” (**relaksasi**)
- c) Untuk mendiskusikan dan mengartikulasikan manfaat yang diperoleh dari pengalaman (**review**).

Ada juga yang menamakan pembuka sesi ini "teaser". Istilah ini biasa digunakan orang-orang di TV dan Film orang yang sangat singkat, 1-3 menit membuka segmen film / acara TV yang halus mengungkapkan rusa-rusa betina tema utama acara.

Kesimpulan

Melakukan re-aktualisasi PLS berarti melihat kembali keterkaitan rencana pendidikan dengan situasi terkini kelompok sasaran, dan melihat keberadaan lembaga pendidikan dalam konteks lingkungannya. Ketika kita ingin mewujudkan cita-cita besar kawasan regional, kita tetap harus menghubungkannya dengan kondisi terkini kelompok sasaran dan kebijakan pemerintah, sehingga cita-cita itu benar-benar membumi. Hasil pendidikan kemudian seyogyanya diukur tidak hanya dari ujian dan tes, tapi dari penerapan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya tujuan

pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan hendaklah terukur. PLS berkaitan erat dengan pendidikan orang dewasa, dan peran pendidik lebih sebagai fasilitator ketimbang sebagai nara sumber.

Sumber

Conner, M.L. (1997-2004). ‘Andragogy and Pedagogy’. Ageless learner

David A. Kolb on experiential learning, Smith, M. K. at <http://www.infed.org/b-explrn.htm>

Experiential Learning articles and critiques of David Kolb’s theory at <http://reviewing.co.uk/research/experiential.learning.htm>

Ice breakers article at <http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1966301>

Kearsley, G. (2010). Andragogy (M.Knowles). The theory Into practice database. Retrieved from **Error! Hyperlink reference not valid.**

Knowles, M. (1984). The Adult Learner: A Neglected Species (3rd Ed.). Houston, TX: Gulf Publishing.

Knowles, M. (1984). Andragogy in Action. San Francisco: Jossey-Bass.

Kolb learning styles at www.businessballs.com/kolblearninstyles.htm

Silberman ML (2007). The Handbook of Experiential Learning. New York: John Wiley and Sons.

Smith, M. K. (2002.) ‘Malcolm Knowles, informal adult education, self-direction and andragogy’, the Encyclopaedia of Informal Education, <http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm>

NILAI BUDAYA KOMUNITAS BAJO DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR *LIFE SKILL*

Ningsi Hanapi, Ruslin Badu, Mohamad Zubaidi

PLS-Universitas Negeri Gorontalo
qiuning.onggiok@gmail.com

Abstrak

Kajian terhadap komunitas Bajo, sangat menarik. Salah satunya ditinjau dari aspek pendidikan nonformal (PNF). Hasil *preliminary study* menunjukkan bahwa program pendidikan keaksaraan, dan kesetaraan (bagian dari program PNF) tidak memberikan hasil yang optimal, hal ini disebabkan (1) motivasi belajar yang rendah, (2) sosial budaya dan nilai-nilai masyarakat Bajo sebagai orang pelaut dan (2) untuk program ketrampilan berbentuk *life skill* memberikan nuansa baru dalam kehidupan Bajo. Mencermati karakteristik masyarakat Bajo, jika dikaitkan dengan penyelenggaraan program *life skill* sesungguhnya memberikan kontribusi besar terhadap motivasi belajarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran Nilai Budaya Komunitas Masyarakat Bajo dalam Meningkatkan Motivasi Belajar *Life Skill*. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan meliputi: 1) Wawancara 2) Observasi, dan 3) Studi Dokumen. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisa kualitatif dari Milles dan Hubberman (1987) yang dilaksanakan melalui langkah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) orientasi Nilai Budaya Komunitas Bajo merupakan pemaknaan terhadap konsep “hidup” yang sesungguhnya sebagai penjabaran dari kerangka nilai budaya yang dikembangkan oleh Kluckhohn. (2) motivasi Belajar komunitas Bajo terhadap pembelajaran *life skill* meningkat yang ditunjang oleh perubahan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor; (3) implementasi nilai budaya dalam meningkatkan motivasi belajar *life skill* sangat nampak pada esensi pemaknaan hidup komunitas Bajo sebagai usaha pencapaian kualitas hidup yang memberikan kontribusi besar terhadap motivasi belajar komunitas Bajo terhadap pembelajaran *life skill*. Berdasarkan temuan penelitian diatas, maka disarankan kepada *stakeholders* bahwa (1) penyelenggaraan program non formal dimasyarakat harus benar-benar mengedepankan prinsip pembelajaran partisipatif dengan pendekatan andragogi dan (2) memberikan nuansa yang dibutuhkan masyarakat serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nilai sosial budaya masyarakat.

Kata Kunci: *Nilai Budaya, Motivasi Belajar, Masyarakat Bajo, life skill*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sepanjang perjalanan sejarah peradaban manusia, telah terjadi banyak perubahan yang disebabkan oleh alam maupun manusia itu sendiri, yang pada akhirnya berdampak pada pola kehidupan manusia sebagai makhluk individu, kelompok dan masyarakat. Setiap perubahan yang ditimbulkan akan mengubah pula pola pikir, perilaku dan orientasi masing-masing individu baik dalam kerangka kecil (*mikro*) maupun besar (*makro*). Proses perubahan inilah yang disebut sebagai bentuk

perubahan yang bersifat transformasi sosial, dimana proses ini selalu bersifat multi aspek, dalam artian setiap perubahan pada dasarnya tidak berdiri sendiri.

Bagi masyarakat tradisional, proses perubahan selalu terjadi secara lambat (*evolitif*), dimana dalam setiap keluarga hanya berfokus pada persoalan pemenuhan ekonomi keluarga, masing-masing anggota keluarga laki-laki atau perempuan tahu akan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Bagi kelompok masyarakat ini tidak ada satupun anggota keluarga dibiarkan terlantar, tanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bergotong royong yang didasarkan pada konsensus tak tertulis dan dilandasi pada nilai-nilai setempat.

Namun demikian, perubahan yang terjadi dalam masyarakat tradisional tidak selamanya menjadi sebuah kenyataan di masyarakat. Masyarakat menjadi sangat antusias untuk merubah pola hidupnya, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya proses liberalisasi berbagai sektor kebijakan yang memungkinkan seorang bebas menentukan pilihan. seperti yang pernah diramalkan oleh Naisbitt (2000)

Kondisi serupa terjadi pada komunitas masyarakat Bajo yang berada di kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Komunitas masyarakat Bajo memiliki karakteristik serta nilai-nilai budaya yang selalu dijunjung tinggi. Tradisi dan nilai-nilai budaya yang diwarisi dari leluhurnya itulah yang membuat Komunitas Bajo awalnya sulit untuk terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi dilingkungan sosialnya. Kondisi-kondisi yang bersifat kultural seperti ini yang menyebabkan sulit berkembangnya komunitas Bajo. Kehadiran pendidikan non formal sebagai upaya untuk mengatasi keterbelakangan pendidikan yang dimiliki komunitas Bajo tidak mampu memberikan solusi yang signifikan terhadap masalah yang terjadi. Komunitas Bajo bukan hanya tidak mau sekolah pada jalur formal, namun mereka juga tidak mau berpartisipasi pada penyelenggaraan program seperti program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri dan Program Kesetaraan (Paket A). yang dilaksanakan di desa Bajo kecamatan Tilamuta. Dari beberapa program yang dilaksanakan di Desa Bajo selama beberapa tahun, tercatat bahwa jumlah angka partisipasi maksimum warga belajar dalam pembelajaran hanya mencapai 35%.

Hasil observasi yang dilakukan terhadap komunitas Bajo yang berada di kecamatan Tilamuta menunjukkan bahwa rendahnya motivasi belajar komunitas Bajo pada program keaksaraan dan kesetaraan ini sangat kuat dipengaruhi oleh Nilai-nilai budaya komunitas Bajo, dimana selama ini komunitas Bajo diindikasikan sebagai masyarakat miskin dan terbelakang pendidikannya. Keterbelakangan tingkat

pendidikan inilah yang menjadi salah satu penyebab kurangnya tingkat pemahaman komunitas Bajo terhadap pendidikan itu sendiri. Sementara itu Filosofi masyarakat Bajo yang menyebutkan bahwa ”orang Bajo terlahir sebagai pelaut” memberikan pemahaman bahwa komunitas Bajo memang dilahirkan untuk menjadi pelaut dan sampai kapan pun akan tetap menjadi pelaut, sehingga pendidikan secara akademik tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas kehidupan mereka.

Namun demikian, semangat kerja keras yang ditunjukkan oleh komunitas Bajo ini bukan hanya dalam segi melaut saja, akan tetapi juga ditunjukkan dalam aktivitas sehari-hari. Hal lain yang menjadi kekuatan nilai budaya komunitas Bajo adalah jiwa sosial mereka yang cukup tinggi. Rasa kebersamaan yang begitu kuat melahirkan rasa keterpanggilan pada jiwa mereka untuk selalu saling membantu sesama dalam komunitasnya baik suka maupun duka, begitupun ketika ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang diselenggarakan di tempat mereka, mereka akan memberikan partisipasi yang tinggi terhadap pelaksanaannya. Bentuk ketaatan kepada orang-orang tertentu yang dihormati dan dipercaya, serta kekuatan jiwa sosial antar sesama komunitas menjadi landasan dari respon yang diberikan masyarakat tersebut. Sementara itu dasar dan keyakinan agama mereka memberikan energi positif dalam kekentalan budaya yang telah mengakar dalam komunitas Bajo. Cara pandang mereka terhadap kehidupan melahirkan suatu kekuatan yang mendorong setiap individu untuk terus bekerja keras dalam rangka memperbaiki kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang didukung jiwa sosial yang tinggi dalam interaksi antar individu dalam komunitasnya.

Kondisi seperti itu terlihat pada pembelajaran *life skill* yang diprogramkan oleh Kopperindag, pembelajaran keterampilan *life skill* dengan jenis keterampilan pembuatan bakso ikan, pembuatan abon ikan, pembuatan kerupuk ikan, pembuatan ikan asin cukup mendapat sambutan positif dari komunitas Bajo. Respon positif peserta didik dalam berbagai pembelajaran keterampilan tersebut menunjukkan adanya motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik untuk mengikuti pembelajaran *life skill* tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya kehadiran peserta didik dalam pembelajaran. Semua peserta didik yang terdaftar dalam kelompok pembelajaran hadir untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan mereka cukup tekun dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketekunan mereka dalam mengikuti pembelajaran turut memberi dampak pada hasil belajar yang ditandai oleh banyaknya peserta didik lulusan pembelajaran *life skill* yang memulai usaha kecil-kecilan dengan menekuni salah satu

kegiatan usaha dari beberapa keterampilan yang telah dibelajarkan melalui program *life skill*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan judul “Nilai Budaya Komunitas Bajo dalam Meningkatkan Motivasi Belajar *Life Skill* di Kabupaten Boalemo”.

Fokus Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana orientasi nilai budaya pada komunitas Bajo?; (2) Bagaimana motivasi belajar komunitas Bajo pada pembelajaran *life skill*?, dan (3) Bagaimana implementasi nilai budaya komunitas Bajo dalam meningkatkan motivasi Belajar *Life Skill*?

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Nilai Budaya

Nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan sebagai orientasi dan rujuk dalam bertindak, oleh karena itu nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia (Koentjaraningrat, 1987;85). Sementara itu Clyde Kluckhohn dalam Pelly (1994) mendefinisikan nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang dan tentang hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan yang mungkin bertalian dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia.

Nilai budaya juga dikatakan sebagai konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran manusia yang dianggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup mereka sehingga berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para warga masyarakat (Koentjaraningrat, 2009;153). Berdasarkan hal tersebut maka Nilai Budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Namun demikian, Koentjaraningrat menilai meskipun nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia, tetapi sebagai konsep, nilai tersebut bersifat sangat umum karena mempunyai lingkup yang sangat luas dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata, sehingga nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa setiap individu dalam

komunitas masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Dalam suatu kelompok masyarakat dengan komunitas tertentu terdapat nilai-nilai budaya yang saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu sistem nilai budaya yang dijadikan sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang dapat memotivasi dan mengarahkan komunitas masyarakatnya tersebut. F. Kluckhohn mengembangkan nilai budaya kedalam lima masalah yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, diantaranya: a) masalah hakikat hidup, b) masalah hakikat dari karya manusia, c) masalah hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu, d) masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya dan e) masalah hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

Kerangka Kluckhohn mengenai Lima Masalah Dasar dalam Hidup yang Menentukan Orientasi Nilai Budaya Manusia

Masalah Dasar dalam Hidup	Orientasi Nilai Budaya		
Hakikat Hidup (HH)	Hidup itu Buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi baik
Hakikat Karya (HK)	Karya itu untuk nafkah hidup	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan, dan sebagainya	Karya itu untuk menambah karya
Persepsi manusia tentang waktu (MW)	Orientasi ke masa kini	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa depan
Persepsi manusia terhadap alam (MA)	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat	Manusia menjaga keselarasan dengan alam	Manusia berusaha menguasai alam
Hakikat hubungan manusia dengan sesamanya (MM)	Orientasi kolateral (horizontal), rasa ketergantungan kepada sesamanya (berjiwa gotong-royong)	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh, atasan dan berpangkat	Individualisme, menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri

Sumber : Koentjaraningrat (2009;157)

Beberapa pandangan berkaitan dengan nilai budaya memperlihatkan bahwa setiap kebudayaan memiliki konsep pemahaman yang berbeda-beda dalam cara memandang hidup dalam komunitas kebudayaan mereka, dan hal itu yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman bagi mereka dalam menjalani kehidupan dalam masyarakatnya. nilai budaya menjadi konsepsi umum dan terorganisir yang ada dalam pikiran masyarakat yang dianggap mulia dan dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam bertindak dalam mengatur dan mengarahkan perilaku manusia yang berhubungan dengan alam, lingkungan dan sesama manusia, sehingga dapat dipahami bahwa nilai mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap komunitas atau

kebudayaan tertentu yang berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat, terutama dalam konteks pemahaman perilaku dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu komunitas masyarakat tertentu.

Motivasi Belajar Masyarakat

Motivasi Belajar merupakan faktor psikis yang memiliki peranan penting dalam penumbuhan gairah, perasaan dan semangat untuk belajar. Rohmalina Wahab (2015;134) mendefinisikan motivasi belajar sebagai dorongan yang menjadi penggerak dalam diri individu untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk mencapai prestasi. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sardiman (2008;75) yang mendefinisikan motivasi belajar sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan yang memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai.

Dalam memperkuat fungsinya untuk mencapai tujuan belajar, terdapat jenis-jenis motivasi yang membentuk perilaku manusia. Frandsen (dalam Sardiman, 2007;87) menyebutkan jenis-jenis sebagai berikut: (a) *Cognitive Motives*: Motiv ini menunjuk pada gejala intrinsik,. (b) *Self-Expression*: Penampilan diri adalah sebagian dari perilaku manusia. Kebutuhan individu tidak hanya sekedar tahu mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi, tetapi juga mampu membuat suatu kejadian. (c) *Self-Enhancement*: Melalui aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan meningkatkan kemajuan diri seseorang. Ketinggian dan kemajuan diri ini menjadi salah satu keinginan bagi setiap individu. Dalam belajar dapat diciptakan suasana kompetensi yang sehat bagi anak didik untuk mencapai suatu prestasi.

Life Skill dalam konteks Pemberdayaan

Kecakapan hidup adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif (World Health Organization, 1997). pengembangan kecakapan hidup dalam proses pembelajaran, menjadi landasan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, karena itu kecakapan hidup secara umum kecakapan hidup atau *life skill* dapat dibagi menjadi dua yakni: 1) kecakapan hidup yang bersifat generik yang mencakup kecakapan personal, kecakapan berfikir rasional dan kecakapan sosial, dan 2) kecakapan hidup spesifik yang mencakup kecakapan akademik dan kecakapan vokasional (Handayani, 2013).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bajo Kabupaten Boalemo, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnometodologi yang mengarah pada bagaimana komunitas Bajo memahami kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai sebuah nilai yang mentradisi menjadi sebuah motivasi. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Adapun analisis data dalam penelitian ini dibagi dalam tiga tahap (Miles dan Huberman, 1992:16) yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Nilai Budaya Komunitas Bajo

Hasil kajian tentang orientasi nilai budaya komunitas Bajo menunjukkan beberapa aspek yang mendasari orientasi nilai budaya yang merupakan penjabaran dari lima 5 (lima) kerangka dasar (F. Kluckhohn) yang mendasari kehidupan komunitas Bajo, *pertama* hakikat hidup dalam pandangan komunitas Bajo adalah *”llong jjara na llong”* (hidup untuk hidup); *Kedua* inti hakikat hubungan karya dengan manusia adalah *”karaja pajagga”* (kerja keras) ; *Ketiga* hakikat hubungan manusia dengan waktu: *”Daha ngalawak alam”* (jangan menentang alam) sebagai persamaan pada komitmen komunitas Bajo untuk tunduk pada tanda-tanda alam; *Keempat* inti hakikat hubungan manusia dengan alam adalah *”dilao iru kaullumang”* (laut adalah sumber kehidupan); dan, *kelima* inti hakikat hubungan manusia dengan sesama: *”rambanglah nyawa”* (sehidup semati).

2. Motivasi Belajar *Life Skill* Komunitas Bajo

Dari kajian tentang faktor pembentuk motivasi belajar dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar *life skill* pada komunitas Bajo terbentuk karena pengaruh faktor-faktor yang dijabarkan sebagai berikut: *pertama cognitive motives*; dibentuk oleh adanya (1) pemahaman peserta didik terhadap program *life skill*; (2) kebutuhan belajar. *kedua self expression*; terbentuk karena adanya keinginan untuk aktualisasi diri yang dipengaruhi oleh adanya: (1) keinginan untuk memiliki keterampilan membuat bakso, kerupuk ikan, abon ikan dan keterampilan membuat ikan asin; (2) keinginan membuka modal usaha; dan *ketiga self enhancement* terbentuk karena adanya keinginan untuk: (1) mengembangkan keterampilan; (2) peningkatan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diklasifikasikan lagi kedalam dua bentuk motivasi, yakni motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Sebagaimana diketahui bahwa motivasi terbentuk atas dua faktor yakni faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Dari keseluruhan jawaban wawancara dengan para informan dapat diperoleh gambaran bahwa ketiga bentuk motivasi yang mempengaruhi motivasi belajar *life skill* komunitas Bajo adalah: (1) *cognitive motivies* yang terbentuk secara intrinsik; dan (2) *self expression* dan *self enhancement* yang dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik.

3. Implementasi Nilai Budaya dalam Meningkatkan Motivasi Belajar *Life Skill*

Mensikronisasikan hasil penelitian tentang orientasi nilai budaya komunitas Bajo dengan motivasi belajar *life skill* ditemukan hal-hal sebagai berikut: *pertama* implementasi hakikat hidup masyarakat Bajo dalam meningkatkan motivasi belajar *life skill* lebih banyak memberikan kontribusi pada aspek *cognitive motivies*, dimana pandangan masyarakat Bajo terhadap hidup dan kehidupan memberi makna yang mendalam bahwa untuk mencapai keberhasilan hidup manusia harus menjalani sebuah proses yakni berusaha. Belajar *life skill* merupakan bagian dari usaha masyarakat Bajo menuju pencapaian tujuan hidup. Pemahaman terhadap makna dan manfaat pembelajaran *life skill* dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu cara positif manusia dalam memandang kehidupan bahwasanya kehidupan itu baik dan akan menjadi lebih baik apabila manusia tersebut mampu mengusahakannya.

Kedua, implementasi hakikat karya masyarakat Bajo terhadap motivasi belajar *life skill* dapat dilihat dari makna dan tujuan bekerja yang dilakukan oleh masyarakat Bajo yang memberikan muatan motivasi belajar karena dari pembelajaran *life skill* tersebut masyarakat akan memperoleh keterampilan sebagai modal berkarya. Hal ini lebih mengarah kepada terbentuknya *self expression* yakni adanya harapan untuk mengaktualisasikan hasil belajarnya sebagai bagian dari praktek berkarya masyarakat Bajo.

Ketiga, implementasi hakikat ruang dan waktu terhadap motivasi belajar *life skill* lebih ditekankan pada kemampuan masyarakat Bajo dalam membangun harapan untuk kehidupannya dimasa depan, dan waktu diyakini dapat mengantarkan masyarakat Bajo kedalam pencapaian harapan tersebut. Harapan untuk berkembang mempengaruhi aspek *self enhancement* yang mendorong terjadinya motivasi belajar *life skill*.

Keempat, implemementasi hakikat hubungan manusia dengan alam dalam meningkatkan motivasi belajar *life skill* lebih melihat dari sudut pandang masyarakat

Bajo sebagai masyarakat nelayan yang secara fakta lebih menyatu dengan alam. Pembelajaran *life skill* dengan jenis keterampilan pembuatan bakso, kerupuk ikan, pembuatan abon dan pembuatan ikan asin yang dibelajarkan kepada masyarakat Bajo benar-benar sangat dekat dengan potensi lokal yang ada. Keberadaan alam yang dipahami oleh masyarakat Bajo sebagai penyedia kebutuhan hidup manusia (*dilao iru kaullumang*) memberi keyakinan pasti kepada masyarakat untuk mampu mengimplementasikan hasil belajar *life skill* dalam kehidupan sehari-hari, hal ini lebih terkait dengan *self expression*.

Kelima, implementasi hakikat hubungan dengan sesama dalam meningkatkan motivasi belajar *life skill* sangat nampak dari kebersamaan masyarakat dalam mengikuti pembelajaran *life skill*, ikatan sosial antar masyarakat Bajo yang begitu erat mendorong keterpanggilan jiwa untuk belajar bersama karena mereka menyadari bahwa kebutuhan belajar keterampilan bukan saja menjadi kebutuhan individu tetapi juga kebutuhan masyarakat sebagai satu ikatan sosial dalam komunitas Bajo, disitulah nampak kekuatan "*rambanglah nyawa*". Hakikat hubungan sesama manusia ini lebih banyak mempengaruhi *self enhancement* yakni manusia membutuhkan keberadaan orang lain sebagai bahan perbandingan terhadap dirinya, dalam hal ini manusia dapat membuat target capaian prestasi hidup berdasarkan status dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

PEMBAHASAN

1. Nilai Budaya Komunitas Bajo sebagai landasan Motivasi

Hasil penelitian tentang orientasi nilai budaya komunitas Bajo menunjukkan beberapa aspek yang mendasari orientasi nilai budaya yang dijabarkan kedalam lima (lima) kerangka dasar (Kluckhohn) yang mendasari kehidupan komunitas Bajo dan menunjukkan adanya saling keterkaitan antar satu dimensi nilai dengan dimensi lainnya. Diawali dengan prinsip hidup komunitas Bajo yang memaknai hakikat hidup sebagai kehidupan yang harus dijalani menuju pencapaian kualitas hidup (kehidupan lebih baik). Dalam pencapaian tersebut komunitas Bajo harus berkarya dan itu membutuhkan dukungan ruang dan waktu agar komunitas Bajo bisa leluasa melaksanakan aktivitasnya. Dukungan ruang dan waktu tidak lepas dari gejala ataupun tanda-tanda yang ditunjukkan oleh alam sebagai petunjuk adanya ruang gerak bagi komunitas Bajo untuk bekerja atau berkarya, dimana peran alam sebagai sumber kehidupan benar-benar memberikan totalitas fungsinya dalam menggerakkan aktivitas komunitas Bajo, dan dalam menjalankan aktivitas dan fungsinya komunitas Bajo tidak

lepas dari interaksi dengan sesamanya guna menunjang kehidupan satu dengan lainnya.

Masing-masing dimensi nilai budaya tersebut dimaknai berdasarkan persepsi dan pemahaman komunitas Bajo, dan itu menjadi bagian dari prinsip hidup yang diimplementasikan dalam kehidupannya. Pemaknaan terhadap masing-masing dimensi nilai budaya tersebut dapat diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

Orientasi Nilai Budaya komunitas Bajo digambarkan dalam bagan berikut:

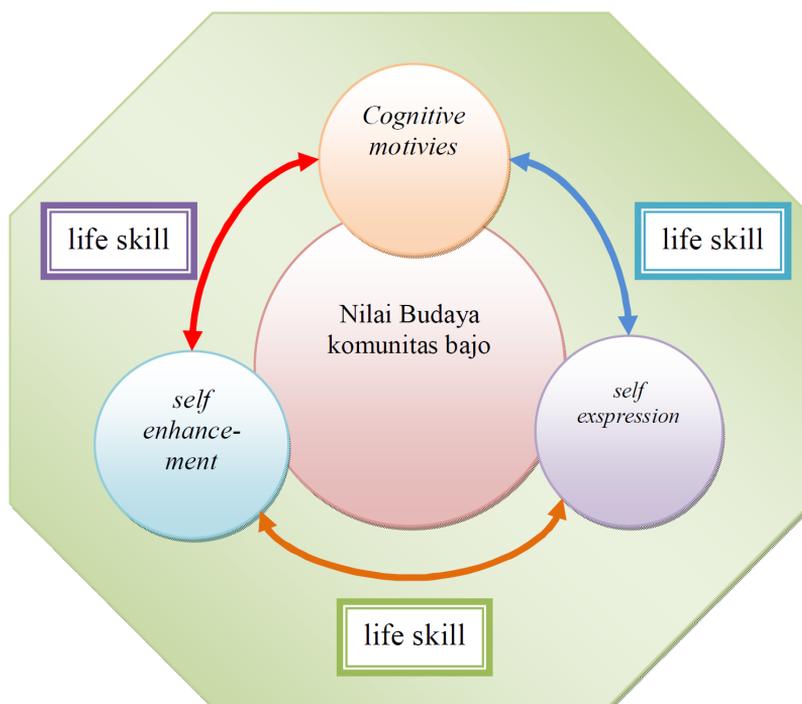


bagan 1 : Pemetaan Konsep Nilai Budaya komunitas Bajo

Gambaran keterkaitan 5 (lima) kerangka dasar yang dikembangkan oleh Kluckhohn dalam kehidupan komunitas Bajo dapat dilihat bahwa orientasi hidup komunitas Bajo adalah pencapaian kualitas hidup yang dibangun atas konsep *”long baka kaullumang”* (hidup untuk hidup), yang menjelaskan bahwa inti dari hidup manusia adalah untuk *”hidup”* dalam arti bahwa manusia hidup untuk butuh hidup (kehidupan selanjutnya). Dalam usaha pencapaian hidup kualitas hidup pada kehidupan selanjutnya membutuhkan karya manusia yang diaktualisasikan dalam *”karêja pajagga”* (kerja keras). Segala usaha manusia dalam melakukan karyanya (kerja) tidak pernah lepas dari dukungan ruang dan waktu sebagai penentu lancar tidaknya usaha manusia dalam berkarya (bekerja), hal ini akan berhubungan dengan

peran alam sebagai media yang menampakkan gejala-gejala tertentu yang akan mempengaruhi ruang dan waktu bagi komunitas Bajo dalam menjalankan karyanya. Implementasi nilai budaya komunitas bajo dalam kaitannya dengan ruang waktu dan peran alam adalah tunduknya komunitas pada tanda-tanda alam yang dipercayai sebagai tanda yang membawa manusia pada keselamatan. Sementara itu, peran alam dalam kehidupan komunitas Bajo dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya alam sehingga diyakini bahwa ”*dilao iru kaullumang*” (laut adalah sumber kehidupan), dan dalam menguatkan peran alam sebagai sumber kehidupan bagi komunitas Bajo dibutuhkan karya manusia (komunitas Bajo) dalam mengolah dan memanfaatkannya. Tujuan manusia berkarya dengan memanfaatkan hasil alam tersebut merupakan implementasi nilai budaya dalam pencapaian kualitas hidup komunitas bajo, sehingga dapat dipahami bahwa lima kerangka dasar Kluckhohn yang dijabarkan dalam kehidupan komunitas Bajo, membentuk suatu siklus yang selalu berkaitan satu sama lain dan bermuara pada tahap pencapaian kualitas hidup, inilah yang dinamakan bahwa ”hidup” komunitas Bajo adalah untuk ”hidup”, dimana berangkat dari konsep awal tentang pemaknaan hidup, kemudian diimplementasikan dalam bentuk penerapan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk siklus kegiatan yang kembali pada pencapaian ”hidup” (lebih baik) itu sendiri. hubungan nilai budaya dengan motivasi bagi komunitas Bajo dapat di deskripsika, *Pertama*, Motivasi belajar *life skill* komunitas Bajo yang terbentuk oleh tiga jenis motivasi, yang dibangun atas pemahaman individu (*cognitive motives*) terhadap kebermanfaatan pembelajaran *life skill* dalam kehidupan mereka, dan hasil wawancara yang didukung oleh kondisi pembelajaran dilapangan menunjukkan adanya partisipasi yang aktif peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang adanya perubahan secara kognitif pada diri individu (peserta didik) sehingga terbentuk motivasi untuk belajar *life skill*. *Kedua*, *Self Expression* memperkuat adanya keinginan atau dorongan peserta didik (komunitas Bajo) untuk mengaktualisasikan kemampuan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari.. *Ketiga*, *Self Enhancement* terbentuk oleh adanya harapan-harapan terhadap terjadinya peningkatan dalam kehidupan peserta didik (komunitas Bajo), baik peningkatan keterampilan maupun peningkatan ekonomi. Harapan untuk mengembangkan kemampuan diri adalah merupakan suatu motivasi dalam rangka membangun kepercayaan diri untuk tampil dan melakukan hal yang sama seperti usaha yang telah dilakukan orang lain, artinya bahwa motivasi yang timbul lebih merujuk kepada kemampuan kompetitif personal untuk.

Memahami peran tiga bentuk motivasi yang memperkuat fungsi motivasi belajar pada diri peserta didik (komunitas Bajo), dapat digambarkan berdasarkan peta konsep berikut:



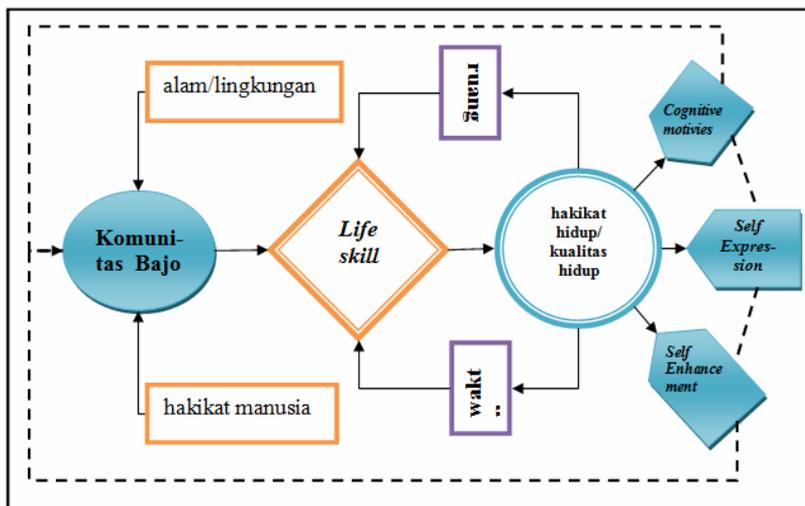
Bagan 2. Pemetaan tiga bentuk motivasi dalam memperkuat fungsi motivasi belajar *life skill*

Dari bagan tersebut dapat dipahami bahwa motivasi belajar *life skill* pada komunitas Bajo yang terbentuk dan diperkuat oleh 3 aspek yakni *cognitive motives*, *self expression* dan *self enhancement* pada dasarnya dibangun oleh konsep nilai budaya komunitas Bajo yang memaknai hidup untuk hidup yang memerlukan kerja keras manusia dalam pencapaiannya, memberi pengaruh yang positif terhadap lahirnya *cognitive motives* yang berasal dari intrinsik, dan *self expression* dan *self enhancement* sebagai motif yang mempengaruhi individu secara ekstrinsik.

2. Implementasi Nilai Budaya dalam Meningkatkan Motivasi Belajar *Life Skill*

Memaknai implementasi nilai-nilai budaya komunitas Bajo dalam peningkatan motivasi belajar *life skill*, diperoleh gambaran secara umum bahwa pada dasarnya kelima kerangka dasar orientasi nilai yang dikemukakan oleh Kluckhohn (Koentjaraningrat, 2009;156) memberi pengaruh yang positif terhadap motivasi belajar *life skill* komunitas Bajo.

Gambaran hubungan kelima dasar nilai budaya komunitas Bajo dalam meningkatkan motivasi Belajar *life skill* dapat digambarkan dalam kerangka berikut berikut:



Bagan 3. Pemetaan hubungan Nilai Budaya Komunitas Bajo dengan Motivasi Belajar *life skill*

Gambaran tentang hubungan antara nilai budaya dengan motivasi belajar *life skill* pada bagan tersebut memberikan gambaran bahwa Implementasi nilai budaya komunitas Bajo dalam kehidupan sehari-hari sangat didukung oleh bagaimana pemaknaan komunitas Bajo terhadap hidup dan kehidupan, serta apa yang dilakukan dalam proses pencapaian hakikat hidup yang sebenarnya (kualitas hidup). Konsep hidup komunitas Bajo yang dikaitkan dengan peran alam sebagai sumber kehidupan manusia membutuhkan peran karya manusia, dalam hal ini *life skill* dipahami sebagai bentuk karya manusia yang akan dijalani atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pengimplementasian *life skill* dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan dukungan dukungan ruang dan waktu, dimana komunitas Bajo bisa membaca peluang-peluang berkarya (bekerja) dengan memperhatikan ruang dan waktu (yang dipengaruhi oleh gejala alam) sehingga terjadi kesuksesan dalam pencapaian tujuan hidup yang sebenarnya (kualitas hidup). Keinginan peserta didik (komunitas Bajo) untuk mencapai tujuan hidup yang berkualitas tersebut melahirkan aspek *cognitive motives* yang menunjukkan terjadinya perubahan pada aspek kognitif, *self expression* yang menunjukkan adanya perubahan dan peningkatan dalam aspek psikomotor dan *self enhancement* yang menunjukkan adanya perubahan pada aspek afektif. Ketiga motif tersebut yang memperkuat fungsi motivasi belajar individu

(peserta didik) dalam pembelajaran *life skill*. Segala bentuk usaha yang dilakukan komunitas bajo dalam proses pencapaian kualitas hidup sangat didukung oleh teori berprestasi McClelland. Keinginan mencapai kualitas hidup merupakan suatu dorongan bagi komunitas Bajo untuk terlibat dalam pembelajaran *life skill* yang hasilnya dapat diimplementasikan dalam bentuk karya manusia yang mendukung keinginan komunitas Bajo dalam pencapaian tujuan hidup yang sebenarnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Orientasi Nilai budaya komunitas Bajo didasarkan pada lima kerangka Kluckohn yakni, masalah hakikat hidup, masalah hakikat karya, masalah hakikat ruang dan waktu, masalah hakikat hubungan manusia dengan alam, dan masalah hakikat manusia dengan sesama. Kelima kerangka yang menjadi orientasi nilai budaya tersebut berlandaskan pada agama Islam sebagai agama yang diyakini dan dianut oleh komunitas Bajo secara turun-temurun. Motivasi belajar *life skill* komunitas masyarakat Bajo lebih merujuk pada pemahaman dan orientasi pencapaian tujuan peserta didik dalam keikutsertaannya pada pembelajaran *life skill*.
2. Nilai budaya tidak terlepas dari peran agama yang dijadikan sebagai pedoman yang mengarahkan keteraturan hidup bagi masyarakat yang menganutnya. Sementara itu orientasi Nilai budaya komunitas Bajo senantiasa menekankan pada 5 masalah dasar yang harus dijawab, diatasi dan dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidupnya serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan. Cara komunitas Bajo memaknai kelima orientasi nilai tersebut memberi kontribusi yang besar terhadap perubahan kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik sehingga termotivasi untuk belajar *life skill* karena pada prinsipnya pembelajaran *life skill* merupakan pembelajaran yang bermuatan keterampilan yang sangat relevan dengan makna berkarya dalam kehidupan komunitas Bajo.

Saran

Bertolak dari kesimpulan diatas, maka saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut; (1) Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pengembangan model pembelajaran yang berbasis nilai sosial dan budaya masyarakat; (2) Secara praktis diperlukan: (a) pemahaman secara radikal terhadap nilai sosial dan budaya sebagai dasar dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal; (b)

pemahaman terhadap konsep andragogi dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal dalam upaya meningkatkan motivasi masyarakat; (c) Perlunya peran aktif berbagai komponen terkait dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program pendidikan nonformal; (e) pendekatan sosial untuk memahami karakteristik masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas mutu layanan program pendidikan nonformal; (f) mengedepankan nilai budaya masyarakat dalam menumbuhkembangkan partisipasi dan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal.

DAFTAR PUSTAKA

- Apps. Jerold W. 1979. *Problems in Continuing Education*. United State of America: McGraw-Hill.
- Koentjaraningrat (Red.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta. Gramedia.
- Baskara, Benny. 2011. Jurnal Ilmiah Sosial: Manifestasi Identitas Islam Suku Bajo dalam Naskah Lontarak Assalenna Bajo. Kawistara. Pascasarjana UGM.
- Basleman. A. 2003. *Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Melalui PLS*. VISI, Nomor 14/TH XI/2003.
- Bogdan, R.C. and Biklen, S K.1992. *Qualitative Research for Education, an Introduction To Theory and Methods*. Boston:Allyn And Bacon Inc., London.
- Boyle, P. G. 1981. *Planing Better Programs*. New York: McGraw-Hill Book Company..
- Brookfield, Stephen D. 1989. Facilitating Adult Learning. Dalam Sharan B. Maerriam and P.M. Cunningham (eds), *Handbook of Adult and Continuing Education*. (hal 201-208). San Fransisco: American Association for Adult and Continuing Education.
- Brundage. Donald H. 1980. *Adult Learning Principles and Their Application to Program Planning*. Ontario. Ministry of Education.
- Bungin. Burhan (ed). 2001. *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta. Rajawali Grafindo Persada.
- Coombs, D.H.;R. Prosser And A. Mauzoor, 1973. *New Paths To Learning For Rural Children And Youth*. New York:ICED.
- Dale H. Schunk. (2012). *Motivasi dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Indeks.
- Darkenwald, G & Marriam, S.B. 1982. *Adult Education, Foundation of Practice*. New York: Harper & Row Publisher.
- Dimiyati. 2009. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta; Rineka Cipta.

- Faisal, Sanapiah. 1990. *Dasar-dasar dan Aplikasi Penelitian Kualitatif*. Malang. YA3 Malang.
- Garna, J. K. 1999. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung. Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Inspiration of Cultures*. New York. Basic Books
- Hamzah B. Uno. 2009. *Teori Motivasi & Pengukurannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Anthropologi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta. Tiara Wacana Yokya.
- Liliweri, A. 2002. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta. LKIS.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Nanga, Umar. 1996. Tulisan: *Perjalanan Sejarah Suku Samee/Bajo Tahun 2.500-1.500 SM*.
- Oemar Hamalik. 2010. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta. Bumi Aksara
- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Soekamto, Soerjono. 2008. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Rajawali Press.

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF PNF

Abd Hamid Isa

Dosen pada Jurusan PLS FIP Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Konsep dan substansi gerakan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) bukanlah sesuatu yang baru, meskipun konsep pendidikan berorientasi kecakapan hidup baru digulirkan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Pentingnya pendidikan kecakapan hidup (PKH) telah mendapat pengakuan dari para pakar yang berkecimpung di dunia pendidikan. Penegasan tentang pentingnya kecakapan hidup dapat dilihat pada Pokok-Pokok Deklarasi Dakkar Tahun 2000 tentang Pendidikan Untuk Semua yang menunjukkan adanya hak bagi setiap warga negara, baik anak-anak maupun orang dewasa, untuk memperoleh kesempatan yang ada dalam mengikuti pendidikan kecakapan hidup, dan adanya kewajiban bagi setiap negara untuk menyediakan, memperbaiki, meningkatkan dan menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, terutama kecakapan hidup yang bersifat penting, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Indonesia sebagai Negara yang memprioritaskan pengembangan sumber daya pembangunan khususnya pada sektor pembangunan pendidikan senantiasa memberi ruang dan kesempatan kepada warga Negara dan masyarakat untuk memperoleh dan menikmati pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks PNF, PKH menjadi kajian sekaligus implementasi program dan kegiatan baik pada satuan penyelenggaraan maupun pada berbagai kebijakan yang terkait langsung dengan pengakajian dan pengembangan PNF.

Kata Kunci : PKH dan PNF

PENDAHULUAN

Kecakapan hidup (*life skills*) merupakan sebuah konsep yang sering dikemukakan oleh para ahli maupun organisasi yang memiliki otoritas terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Konsep *life skills* dalam bidang kesehatan, seperti yang didefinisikan oleh WHO adalah sebagai suatu keterampilan atau kemampuan manusia untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seorang manusia mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupannya sehari-hari secara efektif, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraannya.

Menurut Santoso S. Hamidjojo (2002 : 2-3) gagasan tentang pendidikan kecakapan hidup telah dimulai oleh UNESCO pada tahun 1949 melalui konsep *functional literacy*. Gagasan pokok dari konsep tersebut adalah agar kemampuan baca-tulis-hitung dapat berfungsi dapat berfungsi memberi manfaat bagi yang bersangkutan untuk keluar dari tiga kesengsaraan, yaitu: kebodohan (*ignorance*, kepenyakitan (*ill-health*), dan kemelaratan (*poverty*).

Dalam bidang pendidikan, konsep life skills mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Kent Davis (2000:1) yang mengatakan bahwa kecakapan merupakan sebuah “manual pribadi” bagi seseorang yang dapat membantu peserta didik belajar bagaimana memelihara tubuhnya, tumbuh menjadi dirinya, bekerjasama secara baik dengan orang lain, membuat keputusan yang logis, melindungi dirinya sendiri dan mencapai tujuan di dalam kehidupannya.

Pentingnya pendidikan kecakapan hidup bagi setiap pribadi karena mereka menghadapi berbagai masalah yang harus senantiasa diselesaikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kecakapan hidup itulah yang diperlukan pada individu memasuki kehidupan yang mandiri, anggota masyarakat dan warga negara. Sehingga dengan penguasaan terhadap life skills, individu diharapkan akan menjadi individu yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahannya dengan menemukan alternatif/ solusi yang tepat yang berimplikasi positif bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang berada di sekitar kehidupannya. Perilaku dan karakter inilah yang akan menyebabkan mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman, *survive* dan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsanya.

Dalam pada itu, bahwa seseorang memerlukan berbagai macam kemampuan supaya dapat hidup dengan sukses, bahagia, bermartabat dalam masyarakatnya. Hal ini dapat terwujud jika seseorang/individu mampu mengembangkan komunikasi yang efektif dalam hidupnya, mampu mengembangkan kerjasama, mampu melaksanakan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki karakter dan berpola pikir maju dalam kehidupannya. Uraian ini sekilas mendeskripsikan aktualisasi pendidikan kecakapan hidup sebagai substansi dan implementasi program dan kegiatan Pendidikan Nonformal (PNF),

PEMBAHASAN

Substansi pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) banyak dikemukakan oleh para pakar maupun badan/lembaga yang memiliki otoritas di bidang pendidikan, pelatihan dan kesehatan, antara lain menurut Brolling (1989) *life skills* adalah interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri.

Menurut Kent Davis (2000 : 1) Kecakapan hidup adalah “manual pribadi” bagi tubuh seseorang. Kecakapan ini membantu peserta didik belajar bagaimana memelihara tubuhnya, tumbuh menjadi dirinya sendiri, bekerja sama secara baik

dengan orang lain, membuat keputusan logis, melindungi dirinya sendiri dan mencapai tujuan di dalam kehidupannya.

Makna kecakapan hidup (*life skills*) lebih luas dari keterampilan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja misalnya ibu rumah tangga, orang yang telah pensiun atau anak-anak tetap memerlukan kecakapan hidup. Sebagaimana orang yang bekerja, mereka juga menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan. Orang yang sedang menempuh pendidikan pun memerlukan kecakapan hidup, karena mereka tentu memiliki permasalahan sendiri. Kecakapan hidup di bagi menjadi 4 (empat) jenis: *Pertama* : Kecakapan personal (*personal skills*) yang mencakup kecakapan mengenal diri (*self awareness*), dan kecakapan berpikir rasional (*thinking skills*). *Kedua* : Kecakapan sosial (*social skills*) *Ketiga* : Kecakapan akademik (*academic skills*), dan *Keempat* : Kecakapan vokasional (*vocational skills*).

Kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikan sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.

Kecakapan berpikir rasional mencakup : (1) kecakapan menggali dan menemukan informasi (*informating searching*), (2) kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan (*informating processing and decision making skills*), serta (3) kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (*creative problem solving skills*).

Kecakapan sosial atau kecakapan interpersonal (*interpersonal skills*) mencakup antara lain kecakapan komunikasi dengan empati (*communication skills*), dan kecakapan bekerjasama (*collaboration skills*). Empati, sikap penuh pengertian dan seni komunikasi dua arah, perlu ditekankan karena yang dimaksud berkomunikasi di sini bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan yang baik menumbuhkan hubungan harmonis.

Dua kecakapan hidup yang dikemukakan di atas biasanya disebut sebagai kecakapan hidup bersifat umum atau kecakapan hidup general (*generic life skills/GLS*). Kecakapan hidup tersebut diperlukan oleh siapapun, baik mereka yang bekerja, yang tidak bekerja dan yang sedang menempuh pendidikan.

Bagi bangsa Indonesia yang merupakan bagian integral dari masyarakat dunia yang memiliki sifat religius, kecakapan hidup yang bersifat umum (GLS) di atas masih harus ditambah satu sebagai acuan, yakni akhlak. Artinya kesadaran diri, berfikir rasional, hubungan antar personal, kecakapan akademik serta kecakapan

vokasional harus dijiwai oleh akhlak yang mulia. Akhlak harus menjadi kendali dari setiap tindakan seseorang. Karena itu, kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa harus mampu mengembangkan akhlak yang mulia tersebut. Disinilah pentingnya pembentukan jati diri dan kepribadian (*character building*) guna mengembangkan penghayatan nilai-nilai etika sosio-religius yang merupakan bagian integral dari pendidikan disemua jenis dan jenjang pendidikan itu sendiri.

Kecakapan hidup yang bersifat spesifik (*specific life skills*) diperlukan seseorang untuk menghadapi problema bidang khusus tertentu. Untuk mengatasi problema ”komputer yang rusak” misalnya sudah barang tentu diperlukan kecakapan khusus tentang komputer. Demikian pula untuk memecahkan masalah karena dagangan yang tidak laku terjual, diperlukan kecakapan/keterampilan dibidang pemasaran.

Kecakapan hidup yang bersifat khusus biasanya disebut juga sebagai kompetensi teknis (*technical competencies*) yang terkait dengan materi mata pelajaran atau mata diklat tertentu dan pendekatan pendidikan lainnya. Sebagaimana disebut di depan *specific life skills* mencakup pengembangan akademik (kecakapan akademik) dan kecakapan vokasional yang terkait dengan pekerjaan tertentu.

Kecakapan akademik (*academic life skills*) yang seringkali juga disebut kemampuan berfikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berfikir rasional pada GLS. Jika kecakapan berfikir rasional masih bersifat umum, kecakapan akademik lebih menjurus kepada kegiatan yang bersifat akademik/keilmuan. Kecakapan akademik mencakup antara lain kecakapan melakukan indentifikasi variabel dan menjelaskan hubungannya pada suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, serta merancang dan melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan atau keingintahuan.

Kecakapan vokasional (*vocational skills*) seringkali disebut dengan kecakapan kejuruan. Artinya, kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat dilingkungan masyarakat.

Perlu di maklumi bahwa dalam kehidupan alam nyata, antara *generic life skills* (GLS) dan *specific life skills* (SLS) yaitu antara kecakapan mengenal diri, kecakapan berfikir rasional, kecakapan sosial, dan kecakapan akademik serta kecakapan vokasional tidak berfungsi secara terpisah-pisah atau tidak terpisah secara eksklusif. Hal yang terjadi adalah peleburan kecakapan-kecakapan tersebut, sehingga menyatu menjadi sebuah tindakan individu yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional dan

intelektual. Derajat kualitas tindakan individu dalam banyak hal dipengaruhi oleh kualitas kematangan berbagai aspek pendukung tersebut di atas.

Dalam menghadapi kehidupan dimasyarakat juga akan selalu diperlukan GLS dan SLS yang sesuai dengan masalahnya. Untuk mengatasi masalah komputer yang rusak diperlukan *vocasional skills* (bagian dari SLS), khususnya tentang komputer dan juga GLS, khususnya tentang berfikir rasional, menganalisis dan memecahkan masalah secara kreatif. Dengan perkataan lain, walaupun antara kecakapan-kecakapan hidup tersebut dapat dipilah, tetapi dalam penggunaannya akan selalu bersama-sama dan saling menunjang.

Pendeskripsian kecakapan hidup sebagaimana dijelaskan di atas, disebut pendeskripsian berdasarkan kompetensi. Disamping itu masih ada beberapa pendeskripsian dari sudut pandang lain, misalnya dari segi fungsi yang memisahkan kecakapan hidup menjadi kecakapan dasar dan kecakapan instrumental.

Sondra Stein (2000:7) berpendapat bahwa terdapat empat kategori standar yang perlu dipersiapkan pada masa depan untuk kecakapan orang dewasa, yaitu :*pertama* mendapatkan informasi dan ide-ide, *kedua* mengkomunikasikan dengan penuh percaya diri pesannya dan dapat dimengerti oleh orang lain, *ketiga* membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang valid dan mampu menganalisis serta dapat memutuskan secara cermat, *ke empat* selalu belajar agar tidak tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan.

Mengacu pada teori dan urgensi pentingnya pembelajaran dan pengembangan *life skill* maka indikator yang digunakan dalam kajian ini secara konseptual dikelompokkan sebagai berikut : (a) kecakapan mengenal diri sendiri atau disebut juga kecakapan personal dan kepribadian (*personal skills*), (b) kecakapan berfikir rasional (*thinking skills*) atau kecakapan akademik (*academic skills*), (c) kecakapan sosial (*social skills*), (d) kecakapan vokasional (*vocational skills*) disebut juga keterampilan kejuruan artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik (*specific skills*) atau keterampilan teknis (*technical skills*).

Selanjutnya ke empat jenis kecakapan hidup di maksud mempunyai peran tertentu dalam implementasinya yang dapat diuraikan sebagai berikut : Kecakapan sosial disebut dengan istilah kecakapan umum atau general, yang merupakan fondasi dari kecakapan hidup. Kecakapan personal mencakup kecakapan mengenal diri dan kecakapan berfikir rasional. Seperti kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, kecakapan memecahkan

masalah secara kreatif. Kecakapan sosial yang dimaksud meliputi kecakapan komunikasi dan kecakapan bekerja sama.

Kecakapan akademik dan kecakapan vokasional disebut dengan istilah kecakapan khusus karena dianggap lebih spesifik. Kecakapan akademik dapat dikatakan sebagai pengembangan dari kecakapan berfikir rasional yang terdapat dalam kecakapan general, namun dikembangkan lebih spesifik yang mengarah pada aktivitas yang bersifat akademis. Kecakapan vokasional merupakan kecakapan yang cenderung dikaitkan dengan pekerjaan tertentu yang ada dalam lingkungan masyarakat.

a. Tujuan dan Bidang-Bidang Program Pendidikan *Life Skills*

Pengembangan program pendidikan *life skills* bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimilikinya serta dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Dengan demikian pelaksanaan program pendidikan *life skills* dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat untuk memperoleh kecakapan hidup. Soepardi (2003 : 13) mengemukakan bahwa yang harus dicapai dalam konsep pendidikan *life skills* atau kecakapan hidup adalah kemandirian. Oleh sebab itu, tujuan program pendidikan *life skills* adalah untuk mencapai kemandirian dengan mengacu pada *personal* dan *social skills*. *Personal skill* mencakup kecakapan mengenai diri sendiri (*self awareness*) dan kecakapan berpikir rasional (*thinking skills*) yang secara utuh diartikan sebagai kemampuan berdialog secara baik dengan diri sendiri untuk mengaktualisasikan jati dirinya, sehingga capak memecahkan masalah secara kreatif dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Sedangkan *social skills* adalah kemampuan mendengar dan memahami perasaan orang lain, kecakapan berkomunikasi dan kecakapan bekerja sama. Kecakapan ini mengarah kepada ”membuat orang menjadi mandiri”. Dari pendapat ini jelas bahwa program pendidikan *life skills* sangat bermanfaat bagi masyarakat, agar masyarakat menjadi mandiri. Hal ini berarti bahwa program pendidikan *life skills* mempunyai peranan penting dalam ikut serta meningkatkan mutu sumber daya manusia. Keberadaan program pendidikan *life skills* pada dasarnya mengacu pada prinsip pendidikan seumur hidup yaitu bertumpu pada kepercayaan warga belajar untuk menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Yunus (2000 : 3) mengemukakan tujuan pendidikan *life skills* secara umum dan secara khusus. *Tujuan Secara Umum:* Pendidikan *life skills* yang

diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap warga belajar di bidang pekerjaan/usaha tertentu sesuai dengan bakat, minat perkembangan fisik dan jiwanya serta potensi lingkungannya, sehingga mereka memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri yang dapat dijadikan bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. *Tujuan Secara Khusus:* Memberikan pelayanan pendidikan kecakapan hidup kepada warga belajar agar : (a) Memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja baik bekerja mandiri (wirausaha) dan/atau bekerja pada suatu produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (b) Memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global, (c) Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun anggota keluarganya, (d) Mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat (*life long education*) dalam rangka mewujudkan keadilan di setiap lapisan masyarakat.

Selanjutnya mengenai bidang-bidang yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan program pendidikan *life skills*, Yunus (2010 : 4) secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. *Produksi Ekstraktif*. Produksi ekstraktif yaitu kegiatan pembelajaran yang memproduksi/menghasilkan suatu barang yang langsung diperoleh dari alam, seperti perikanan, kehutanan, dan pertambangan. 2. *Produksi Agraris*. Produksi agraris yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam mengolah tanah bagi kegiatan pertanian, seperti tanaman pangan, sayuran, bunga dan buah-buahan serta pengembangan berbagai jenis ternak. 3. *Produksi Industri*. Produksi industri yaitu pembelajaran yang mengolah, merakit, memperbaiki, dan merekayasa suatu jenis bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun bahan yang setengah jadi menjadi bahan jadi. 4. *Produksi Perdagangan*. Produksi perdagangan yaitu pembelajaran melalui usaha perdagangan seperti berjual beli, melalui usaha mandiri, analisis pasar, perhitungan laba-rugi dan pengembangan usaha. 5. *Produksi Jasa*. Produksi jasa yaitu pembelajaran yang melakukan pelayanan berupa jasa yang diperlukan oleh pengguna jasa berdasarkan kriteria pelayanan yang disepakati, seperti jasa sopir, tata rias rambut dan wajadan dan h,penerjemah bahasa, konsultan teknik, pengajar dan pertukangan.

Berdasarkan bidang-bidang tersebut *life skills* bermaksud memberi kepada seseorang bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat

meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Program *life skills* dirancang untuk membimbing, melatih dan membelajarkan warga belajar agar mempunyai bekal dalam menghadapi masa depannya dengan memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada.

b. Pendidikan Kecakapan Hidup Dalam PLS

Dalam upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui PLS yang berorientasi keterampilan hidup, terdapat beberapa program strategis yang dapat dilakukan antara lain program kesetaraan plus keterampilan, yaitu dengan pendekatan *broad-base education*, maksudnya memberi bekal keterampilan sebagai antisipasi agar dapat dimanfaatkan oleh lulusan Paket A/B/C yang tidak melanjutkan pendidikannya untuk memasuki dunia kerja.

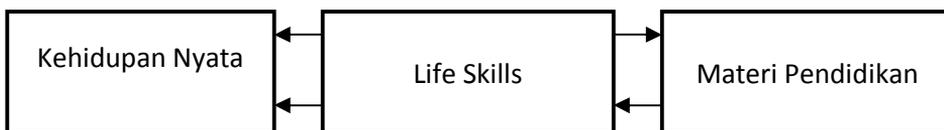
Pada kategori pengenalan wawasan kerja dan bisnis, peserta didik (warga belajar) diharapkan mengenal pola dunia kerja/ bisnis. Sedangkan pada kategori pembekalan keterampilan hidup, peserta didik diharapkan dapat mulai mengikuti kegiatan praktek keterampilan pada pusat-pusat kerja yang telah mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga. Di samping itu, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan satu paket program secara utuh sampai pada tingkat kemahiran tertentu.

Pendayagunaan mata pelajaran muatan lokal dengan program pendidikan yang berorientasi kerja, di beberapa daerah memfokuskan pada mata pelajaran muatan lokal yang menitik beratkan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar, misalnya di Bali kemampuan berbahasa Inggris, masih banyak lagi contoh pada daerah lain dengan orientasi pada jenis keterampilan kerja. Kegiatan seperti ini dapat dikembangkan pula di daerah lain, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pelaksanaan kecakapan hidup diselenggarakan di luar sekolah memiliki beberapa persyaratan. Persyaratan mendasar penetapan jenis keterampilan hidup tersebut, meliputi : (1) keterampilan hidup dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan individu dan/atau kelompok sasaran; (2) terkait dengan karakteristik potensi wilayah setempat, misalnya : sumber daya alam, ekonomi, pariwisata dan sosial budaya; (3) dapat dikembangkan secara nyata sebagai dasar penguatan sektor usaha kecil atau *home industry*; dan (4) berorientasi kepada peningkatan kompetensi keterampilan untuk berusaha dan bekerja, sehingga tidak terlalu teoritik namun lebih bersifat aplikatif dan operasional; serta (5) jenis keterampilan ditetapkan oleh pengelola program bersama-sama dengan peserta didik, mitra kerja terkait, tokoh masyarakat, dan lainnya yang berhubungan dengan program keterampilan hidup.

c. Hubungan antara Kehidupan Nyata, Kecakapan Hidup dan materi Peserta Didik

Dari dimensi kecakapan hidup dapat dikemukakan bahwa antara kehidupan nyata dengan kecakapan hidup dan materi pendidikan memiliki keterhubungan.



Gambar 2. 1 Hubungan antara Kehidupan Nyata, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Materi Pendidikan

Berdasarkan skema tersebut di atas dapat dijelaskan tahapan-tahapan perumusan pendidikan kecakapan hidup. *Pertama*, mengidentifikasi kecakapan hidup yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. *Kedua*, berdasarkan hasil identifikasi kecakapan hidup tersebut, disusun ke dalam bentuk-bentuk kecakapan berdasarkan kategori pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendukung pembentukan kecakapan hidup tersebut. *Ketiga*, mengklasifikasikan dalam bentuk tema/pokok bahasan/topik yang dikemas ke dalam materi pendidikan.

Dari sisi pemberian bekal bagi peserta didik ditunjukkan dengan anak panah bergaris tegas, yaitu apa yang dipelajari pada setiap materi pendidikan diharapkan dapat membentuk kecakapan hidup yang nantinya diperlukan pada saat yang bersangkutan memasuki kehidupan nyata di masyarakat.

Dari pemahaman tersebut, sekali lagi materi peserta didik adalah alam, sedangkan yang ingin dicapai adalah pembentukan kecakapan hidup. Kecakapan hidup itulah yang diperlukan pada saat seseorang memasuki kehidupan sebagai individu yang mandiri, anggota masyarakat dan warga negara. Kompetensi yang dicapai pada materi pendidikan hanyalah kompetensi antara untuk mewujudkan kemampuan nyata yang diinginkan yaitu kecakapan hidup.

Sebagai contoh, mempelajari IPA bukan sekedar untuk pandai IPA, melainkan agar seseorang dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui peristiwa alam, menelaah mengapa peristiwa itu dapat terjadi, mempelajari ilmu lain yang terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi dan sebagainya. Demikian pula dengan pelajaran bahasa yakni Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, bukan sekedar paham bahasanya, namun mampu dipergunakan untuk bernalar, mengungkapkan dan menyampaikan buah pikiran dalam bentuk komunikasi yang efektif. Begitu pula dengan materi peserta didik pendidikan kewarganegaraan, bukan sekedar untuk memahami prinsip dan aturan kewarganegaraan, tetapi lebih dari itu, yakni agar

peserta didik mampu menerapkan pengetahuannya untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Inovasi pendidikan di negara maju kini juga mengarah kepada pengembangan kecakapan hidup. Model peserta didik terpadu (*integrated learning*) dan pendidikan kontekstual (*contextual teaching and learning*) merupakan model pendidikan yang mengarah kepada pengembangan kecakapan hidup. Model realistik (*realistic education*) yang kini sedang berkembang, juga merupakan upaya mengatur agar pendidikan sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik, agar hasilnya dapat diterapkan guna memecahkan dan mengatasi problema hidup yang di hadapi.

Pada model-model pendidikan tersebut, materi pendidikan dipadukan atau dikaitkan satu dengan yang lain, agar sesuai dengan kehidupan nyata dimasyarakat. Pendidikan dikaitkan dengan konteks kehidupan peserta didik, agar memungkinkan mereka belajar menerapkan isi materi pendidikan dalam memecahkan problem yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, walaupun dengan istilah berbeda dengan kecakapan hidup yang sedang dikembangkan dinegara maju.

Perlu dicermati pula mengenai evaluasi hasil belajar. Pendidikan yang berorientasi pada pembekalan kecakapan hidup dengan pendidikan kontekstual memerlukan model evaluasi otentik, yaitu evaluasi dalam bentuk perilaku peserta didik dalam menerapkan apa yang dipelajarinya (IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris atau lainnya) dalam kehidupan nyata. Paling tidak dalam bentuk evaluasi tersemar, yaitu dalam bentuk pemberian tugas proyek/kegiatan untuk memecahkan masalah yang memang terjadi masyarakat.

d. Pendidikan Berbasis Luas sebagai Wahana Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup

Pendidikan berbasis luas merupakan suatu pendekatan yang memiliki karakteristik bahwa proses pendidikan bersumber pada nilai-nilai hidup yang berkembang secara luas di masyarakat. Wardiman (1998: 73) berpendapat pendidikan berbasis luas merupakan sistem baru yang berwawasan sumber daya manusia, berwawasan keunggulan, menganut prinsip tidak mungkin membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan, kalau tidak diawali dengan pembentukan dasar (fondasi) yang kuat. Dengan demikian *broad-based education* diartikan bahwa pendekatan pendidikan yang harus memberikan orientasi yang lebih luas, kuat dan mendasar, sehingga memungkinkan warga masyarakat memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap kemungkinan yang terjadi pada dirinya baik yang berkaitan dengan usaha atau pekerjaannya.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam program keterampilan hidup dengan pendekatan pendidikan berbasis luas pada aktivitas pendidikan nonformal. (1)

Adanya penyempurnaan kurikulum dari program pendidikan yang berbasis sempit (*narrow-based curriculum*) menjadi berbasis mendasar, kuat dan luas (*broad-based curriculum*). (2) Pelaksanaan evaluasi difokuskan kepada kompetensi peserta didik yang mengikuti kegiatan pendidikan. (3) Metode pendidikan variatif menerapkan prinsip "*reinforcement*". Peserta didik dilatih mencapai tingkat keberhasilan tertentu, dituntut untuk tidak mudah puas, sehingga tetap didorong untuk mencapai keberhasilan yang lebih tinggi (optimal). (4) Peningkatan mutu dan pembentukan keunggulan sebagai bekal menghadapi berbagai perubahan yang berkembang semakin cepat. (5) Membuka wawasan dan pola pikir, sikap mental warga masyarakat sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada, merubah tantangan menjadi peluang bagi kehidupannya. (6) Membentuk dan meningkatkan mutu tim fasilitasi terhadap pelaksanaan program keterampilan hidup guna memantau dan memberikan supervisi terhadap program sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. (7) Memfasilitasi berbagai bentuk kegiatan dalam rangka mendukung program keterampilan hidup. (8) Mengoptimalkan peran lembaga/masyarakat untuk melaksanakan dan mengembangkan program keterampilan hidup, sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah/lokal. (9) Meningkatkan kerjasama dengan unit kerja terkait, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya dalam mendukung pelaksanaan program keterampilan hidup.

Pendekatan pendidikan berbasis luas di atas telah diperkuat pula dengan gagasan dari UNESCO berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai proses memperluas pilihan masyarakat.

Perspektif pendekatan PNF dalam pembangunan dapat pula di lihat dari teori fungsi (*Functional Theory*) dan *Human Development and Creative planning approach*. Dalam pandangan pendekatan fungsional, program pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk mendukung pengembangan fungsi kehidupan ekonomi masyarakat agar senantiasa semakin baik.

Coombs dan Ahmed (1974) mengelompokkan jenis program PNF yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dalam empat kategori, (1) pendekatan pendidikan perluasan (*extension approach*), (2) pendekatan latihan (*training approach*), (3) pendekatan pengembangan swadaya masyarakat (*the co-operative self-help approach*), (4) pendekatan pembangunan terpadu (*integrated development approach*) antara berbagai sektor yang terkait (Sudjana,2000 : 17).

Di jelaskan pula oleh Morooka (1977) bahwa jenis kegiatan belajar dalam PNF di jepang terdiri dari lima kategori, yakni; (1) belajar mandiri secara bebas (*self-directed independent learning*), (2) belajar berdasarkan dan terhadap lingkungan (*environment based learning*) dengan menggunakan pendekatan multi media yang

tersedia, (3) kegiatan belajar melalui latihan hubungan kemanusiaan (*human relations training*) melalui berbagai kegiatan kelompok belajar, (4) kegiatan belajar sukarela (*voluntarism*) yang dilakukan secara spontan sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing-masing; dan (5) kegiatan belajar yang berorientasi pada kehidupan masyarakat (*community oriented activities*) yang ditekankan pada pengembangan kehidupan demokratis, kesadaran bermasyarakat dan kesetiakawanan yang dibangun antar warga masyarakat.

Sedangkan pendekatan *human development and creative approach*, yakni kegiatan yang di arahkan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan merencanakan yang terdapat pada diri peserta didik sehingga mereka dapat berfungsi lebih dinamis dan efektif dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan kepeloporan dalam perubahan dan pembangunan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan kreativitas peserta belajar (warga belajar) agar lebih terbuka terhadap inovasi dan yang dapat meningkatkan keterlibatannya dalam pembangunan.

Langkah-langkah kegiatan PNF melalui optimalisasi program pendidikan kecakapan hidup sebagai pemberdayaan masyarakat, Kindervater (1979:255) menjelaskan dalam formula sebagaimana tertulis dalam rangkuman rincian tentang *Guidelines for action*, antara lain sebagai berikut:

- (1) Menyusun kelompok kecil sebagai penerima awal atas rencana program pemberdayaan (*Create a small team of receptive planners*)
- (2) Mengadakan identifikasi atau membangun kelompok belajar masyarakat (*Identify/establish village-level group of learners*)
- (3) Memilih atau melatih fasilitator kelompok (*Select and train group facilitators*)
- (4) Mengaktifkan kelompok belajar (*Activate the learning groups*)
- (5) Menyelenggarakan pertemuan dengan fasilitator (*Attend facilitators meetings*)
- (6) Mendukung aktivitas kelompok (*Support on-going group activities*)
- (7) Mengembangkan hubungan antara kelompok (*Promote relationships amongst groups*)
- (8) Melaksanakan diskusi untuk evaluasi (*Convene and evaluation workshop*)

Sebagai rangkuman karakteristik dan prosedur pengembangan keterampilan hidup dalam PNF/PLS untuk pemberdayaan, Kindervater (1979:245) memberikan catatan sebagai berikut:

Generally, nonformal education for empowering is an education approach which enables learners to gain greater understanding of and control over social, economic, and/or political forces through: 1) exercising a high degree of control over all aspects of the learning process, 2) learning both "content" and "process" skills responsive to their needs and problem, 3) working collaboratively to solve mutual problems.

Dari beberapa langkah dan catatan yang telah diungkapkan secara rinci tersebut, di akui Kindervater memang belum cukup bila digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan dimensi-dimensi spesifik program PNF, seperti : bagaimana kebutuhan belajar harus diukur, bagaimana kurikulum harus dikembangkan, jenis-jenis material apa yang harus digunakan, dan yang lain-lain. Namun demikian secara garis besar langkah ini sudah dapat digunakan dalam melaksanakan berbagai program PNF sebagai proses pemberdayaan di masyarakat.

PENUTUP

Pentingnya pendidikan kecakapan hidup bagi setiap pribadi karena dalam berbagai aktivitas senantiasa menghadapi berbagai masalah yang harus diselesaikan sehingga tidak berpengaruh signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup kearah lebih baik. Kecakapan hidup diperlukan setiap individu memasuki kehidupan yang mandiri, anggota masyarakat dan warga negara. Sehingga dengan penguasaan terhadap *life skills*, individu diharapkan akan menjadi individu yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahannya dengan menemukan alternative atau solusi yang tepat yang berimplikasi positif bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang berada di sekitar kehidupannya.

Bahwa program dan kegiatan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) sangat bermanfaat bagi masyarakat, agar masyarakat menjadi mandiri. Hal ini berarti bahwa program pendidikan *life skills* mempunyai peranan penting dalam ikut serta meningkatkan mutu sumber daya manusia. Keberadaan program pendidikan *life skills* pada dasarnya mengacu dan sesuai prinsip pendidikan nonformal yaitu bertumpu pada kepercayaan, kesungguhan dan peranserta warga belajar untuk menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Daftar Pustaka

Ahmed,M. (1975), *The Economics of Non Formal Education (Resources, Costand Benefit)*, New York, Praeger Publishers.

Amirin,Tatang (2002). *Landasan Filosofis Pendidikan Berwawasan Kecakapan Hidup (Life Skills)*, Majalah Dinamika Pendidikan No, 1/Tahun IX, Maret 2002. Yogyakarta.

Hikamawan, Rusydi. [Andragogi, Pendidikan Untuk Pendewasaan,](http://pelajarislam.wordpress.com/2007/10/23/andragogi-pendidikan-untuk-pendewasaan/) <http://pelajarislam.wordpress.com/2007/10/23/andragogi-pendidikan-untuk-pendewasaan/>, 23 Oktober 2007.

<http://www.jugafasilitator.com/article/49/tahun/2006/bulan/10/tanggal/10/id/184/>

Jim Ife, 1996, *Community development (Creating community alternatives vision, analisis and practice)*, Sydney: Longman.

- Jalal, F. (2004). *Isu Strategis Pendidikan: Pendidikan Untuk Semua dan Kesepakatan Dakkar*. Disampaikan pada Capacity Building Bagi Calon Anggota DPR-RI dari DPD Perempuan Periode 2004-2009 yang diselenggarakan oleh DPR-RI, Tanggal 4 Agustus 2004 di Jakarta.
-(1996). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Hamijoyo, S.S.(2002). *Menjelajah Ranah Keterampilan Hidup; Suatu Analisis dan Arah Konseptual*. Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema *Life Skills* dalam Perspektif Pendidikan Nasional di Era Global yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 April di Yogyakarta.
- Kamil, M, (2002), *Model Pembelajaran Magang Bagi Peningkatan Kemandirian Warga Belajar*. Disertasi Program Pascasarjana UPI. Tidak diterbitkan.
- Kamil, M, (2007), *Developing Nonformal Education Through From Kominkan in Japan*, Tsukuba Center For Research in International Cooperation in Educational Development (University of Tsukuba)
- Kindervater, S. (1979). *Nonformal Education as An Empowering Process*, Massachusetts: Center for International Education University of Massachusetts.
- Rifaid, (2000). *Dampak Pelatihan Keterampilan Terhadap Perubahan Sikap dan Perilaku serta Kemandirian Bekas Wanita Susila(WTS)* di Nusa Tenggara Barat. Tesis Program Pascasarjana UPI, Tidak dipublikasikan.
- Slamet PH. (2002). *Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsep Dasar*, (Diperoleh dari <http://www.depdiknas.go.id> pada tanggal 15 November 2002)
- Soepardi. 2003. *Menyiapkan Sumber Daya Manusia Mandiri Melalui Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
- Sudjana, D. (1993). *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif dalam Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Nusantara Press.
- Yunus, Dadang (2010). *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills)*. Online [http://file upi edu/Direktori/FIP/Jur. Pend Luar Sekolah](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/Jur. Pend Luar Sekolah).

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD TERHADAP MOTIVASI BELAJAR DAN HASIL BELAJAR IPS DI SMP NEGERI 1 ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA

Nurhayati Poloungo

Pendidikan Dasar-Universitas Negeri Gorontalo

Abstract

The purpose of this study is (1) to determine the effect of learning model on the students motivation SMP Negeri 1 Orchids North Gorontalo District (2) to determine the effect of learning model to the learning outcomes of students of SMP Negeri 1 Orchids North Gorontalo District, (3) to determine the effect models learning for learning motivation and learning outcomes of students of SMP Negeri 1 Orchids North Gorontalo District.

The method used in this study is a quasi-experimental method using pre-test design type of post-test group desing, namely research involving duakelompok samples, each defined as an experimental group and a control group. The population in this study is the SMP Negeri 1 Orchids of North Gorontalo Regency in class VIII (eight) totaling 42 students spread in two classes with a total sample of 21 people. Data were collected through questionnaires.

The findings of the study are first, methods of cooperative learning model STAD (Student Teams Achievement Divisions) effect on learning outcomes in social studies class VIII SMP Negeri 1 Orchids North Gorontalo District. Second, the method of cooperative learning model STAD (Student Teams Achievement Divisions) effect on learning outcomes in social studies class VIII SMP Negeri 1 Orchids North Gorontalo District. Third, the method of cooperative learning model STAD (Student Teams Achievement Divisions) affect motivation and learning outcomes in social studies class VIII SMP Negeri 1 Orchids North Gorontalo District.

The conclusion of this study is (1) a method of cooperative learning model STAD (Student Teams Achievement Divisions) effect on learning outcomes in social studies class VIII SMP Negeri 1 Orchids North Gorontalo District. (2) methods of cooperative learning model STAD (Student Teams Achievement Divisions) effect on learning outcomes in social studies class VIII SMP Negeri 1 Orchids North Gorontalo District. (3) methods of cooperative learning model STAD (Student Teams Achievement Divisions) affect motivation and learning outcomes in social studies class VIII SMP Negeri 1 Orchids North Gorontalo District.

Keywords: *Cooperative type STAD, Motivation.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memerlukan perhatian tersendiri dalam pembangunan nasional yaitu usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dijadikan modal utama pelaksanaan pembangunan. Mutu pendidikan sangat berkaitan

dengan prestasi yang dicapai oleh seseorang atau siswa, karena prestasi merupakan hasil belajar yang dicapai oleh siswa ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur yang ada dalam prestasi siswa terdiri dari hasil belajar berupa nilai yang diperoleh dari proses belajar mengajar. Nurhadi (2003: 65) menyatakan dalam proses belajar mengajar, proses komunikasi harus diciptakan oleh guru dan siswa. Sehingga kegiatan belajar mengajar tidak seharusnya berpusat pada guru, karena akan mengakibatkan siswa pasif dalam kegiatan belajar mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran kurang efektif.

Guru lebih cenderung menempatkan dirinya sebagai satu-satunya sumber belajar, sehingga peserta didik selama ini lebih cenderung dianggap sebagai objek belajar yang harus menerima segala sesuatu yang akan diberikan oleh guru. Dengan demikian tentunya kurang kondusif untuk mengembangkan motivasi, kreatifitas, daya analisis, dan sikap kritis siswa dalam belajar. Akibatnya proses pembelajaran yang terjadi selama ini kurang bermakna bagi siswa, sehingga belum mampu mengembangkan motivasi dan potensi kemampuan siswa secara lebih optimal.

Selain itu ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu secara internal keinginan siswa dalam belajar masih kurang, sedangkan secara eksternal kegiatan belajar kurang menarik karena siswa cenderung pasif dan jarang mengajukan pertanyaan. Perhatian dan kemandirian siswa masih rendah karena siswa hanya bergantung pada apa yang diberikan oleh guru.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng dkk (2013) menyatakan bahwa motivasi belajar (motivasi intrinsik) memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 0,045 terhadap prestasi siswa di SMA Unggulan kota Probolinggo. Secara simultan motivasi belajar memberikan pengaruh sebesar 53,7% terhadap prestasi siswa di SMA Unggulan, sedangkan sisanya sebesar 46,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian. (b) Motivasi belajar siswa (motivasi intrinsik) secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi siswa di SMA Reguler sebesar 0,044. Sedangkan secara simultan motivasi belajar memberikan pengaruh sebesar 84,3% terhadap prestasi siswa di SMA Reguler di kota Probolinggo. Dan sisanya sebesar 15,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian ini. (c) tidak terdapat perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi siswa di SMA Unggulan dan di SMA Reguler. Motivasi belajar (motivasi intrinsik) sama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa.

Dalam rangka peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, salah satu usaha yang dapat dilakukan ialah dengan memahami dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat menggugah motivasi siswa dalam belajar. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu diantara mata pelajaran wajib yang diberikan di setiap sekolah dengan frekuensi jam pelajaran 4 jam pelajaran atau sekitar 140 menit perminggu ditingkat Sekolah Ibtidaiyah.

Dari pengamatan serta wawancara dengan guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VIII SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan hasil belajar yang dicapai siswa kurang maksimal. Hal ini disebabkan juga karena motivasi siswa yang belum terpenuhi yaitu antusias siswa dalam belajar, mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, mengajukan pertanyaan yang belum jelas, menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain, dan mendengarkan penjelasan guru.

Dengan penerapan model pembelajaran tersebut maka hasil belajar yang diperoleh siswa pada pelaksanaan mid semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 pada mata pelajaran IPS di kelas VIIIA bahwa dari 42 orang siswa pada dua kelas yang mengikuti ulangan semester ganjil, 40% atau 17 orang di antaranya tuntas dan 60% atau 25 orang lainnya tidak tuntas yaitu memiliki nilai di bawah KKM (75). Sedangkan secara klasikal nilai yang diperoleh siswa rata-rata di bawah KKM yakni sebesar 67.5. Masih terdapatnya siswa yang belum tuntas dikarenakan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum meningkatkan motivasi belajar siswa.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Model pembelajaran merupakan sarana interaksi guru dengan siswa dalam kegiatan belajar-mengajar. Model pembelajaran yang baik adalah model yang mampu membawa siswa untuk mencapai tujuan pendidikan dan melatih kemampuan siswa dalam berbagai kegiatan. Dengan demikian siswa harus diberi berbagai kegiatan, baik di dalam ataupun di luar sekolah untuk memilih suatu model pembelajaran perlu memperhatikan beberapa hal. Seperti materi yang akan disampaikan tujuan, waktu yang tersedia dan banyaknya siswa serta hal lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

Nurhadi (dalam Muslich, 2009: 41) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks belajar bukan hanya sekedar mendengarkan dan

mencatat, akan tetapi belajar merupakan suatu proses berpengalaman secara langsung. Melalui proses berpengalaman itu diharapkan perkembangan siswa terjadi secara utuh, yang tidak hanya berkembang dalam aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan juga psikomotorik.

Model pembelajaran kooperatif yang diyakini dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah *Student Teams Achievement Division (STAD)*. Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD merupakan pendekatan *Cooperative Learning* yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Guru yang menggunakan STAD mengajukan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu menggunakan presentasi Verbal atau teks. Dengan demikian model pembelajaran tipe (STAD) merupakan salah satu metode atau pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik untuk guru yang baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif dalam kelas, STAD juga merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif yang efektif.

Berdasarkan latar paparan tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar IPS di SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?
3. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo di kelas VIII pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016. Penelitian dilaksanakan bulan Januari 2016 sampai dengan penyusunan laporan penelitian.

Desain Penelitian

Metode quasi eksperimen, desain Jenis *pre-tes pos-tes group desing*

Tabel 1. Rancangan Penelitian

Kelas	Pretest	Perlakuan	Posttest
E (Eksperimen)	O ₁	X	O ₂
K (Kontrol)	O ₃	C	O ₄

Keterangan:

E = Kelompok eksperimen

K = Kelompok control

O1 = Pre-tes kelompok eksperimen

O2 = Pos-tes kelompok eksperimen

O3 = Pre-tes kelompok kontrol

O4 = Pos-tes kelompok kontrol

X = Perlakuan dengan metode GI

C = Pembelajaran dengan penerapan metode konvensional (Riyanto, 2011)

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII berjumlah 42 siswa yang tersebar dalam 2 kelas di SMP N 1 Anggrek. sementara Sampel yaitu siswa kelas VIII SMP N 1 Anggrek dengan teknik *Purposif Sampling*. pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu Metode Tes, Angket, Observasi, Dokumentasi. Analisis Data pada penelitian ini digunakan pendekatan analisis kuantitatif

Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif Variabel Pembelajaran Kooperatif Metode STAD

Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari penyajian materi oleh guru, ke siswa bekerja dalam kelompok heterogen

yang terdiri dari tingkat akademis yang berbeda (tinggi, sedang, dan kurang) serta memperhatikan kesetaraan gender, kuis individual, pemberian skor peningkatan prestasi individu penghargaan kelompok berdasarkan rata-rata akumulasi skor peningkatan individu anggota kelompok. Penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) dikatakan berhasil jika semua langkah-langkah metode STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) telah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi). Observasi dilakukan oleh peneliti dan satu teman sejawat guru di setiap pertemuan. Hal ini bertujuan sebagai fungsi kontrol untuk meminimalkan kemungkinan subjektifitas baik dari peneliti maupun dari pihak teman sejawat guru sehingga hasil observasi penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD dapat terjamin.

Hasil observasi penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Observasi Penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode STAD

No	Aspek Yang Diamati	Skor			
		Pertemuan I		Pertemuan II	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	Guru memberikan presentasi kelas untuk memberikan stimulus, membangkitkan semangat dan mengetahui gambaran umum tentang materi yang dipelajari melalui penjelasan singkat dan Tanya jawab	√		√	
2	Pelaksanaan kerja kelompok - Siswa bergabung dalam kelompok heterogen - Siswa berdiskusi dalam kelompok - Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam memecahkan masalah yang ditemukan dalam tugas kelompok - Siswa saling mengecek untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah menguasai konsep serta materi yang dipelajari	√		√	
3	Pelaksanaan tes individual	√		√	
4	Perhitungan skor peningkatan prestasi individu	√		√	
5	Pembuatan rangkuman materi yang telah dipelajari	√		√	
6	Pemberian penghargaan Kelompok - perhitungan skor perolehan kelompok dari rata-rata skor peningkatan prestasi individu anggota - guru memberikan penghargaan kepada masing-masing kelompok	√		√	

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat dari rekapitulasi hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dan teman sejawat guru, menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) telah berhasil dilaksanakan dalam setiap pertemuan.

2. Analisis Deskriptif Variabel Motivasi Belajar

Pada variabel motivasi belajar peneliti menggunakan teknik angket pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pemberian angket motivasi belajar diberikan diawal sebelum perlakuan dan diakhir perlakuan. Adapun hasil data angket motivasi belajar awal dan akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Skor Angket Motivasi Belajar Awal dan Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

No	Skor	Ket	Motivasi Belajar Awal				Motivasi Belajar Akhir			
			Eksperimen		Kontrol		Eksperimen		Kontrol	
			Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	125-132	Sangat Tinggi	4	19	1	5	18	86	7	33
2	118-124	Tinggi	6	29	11	52	3	14	11	52
3	111-117	Cukup	8	38	5	24	-	-	3	14
4	104-110	Rendah	3	14	4	19	-	-	-	-
Rata-Rata			117 (cukup)		116 (Cukup)		128 (sangat Tinggi)		122 (tinggi)	
Tertinggi			128		126		132		128	
Rendah			104		106		121		114	

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa Perhitungan skor motivasi belajar awal kelas eksperimen adalah sebanyak 14,3% siswa memiliki motivasi rendah, 28,7% siswa memiliki motivasi cukup, 38% siswa memiliki motivasi tinggi, dan 19% siswa yang memiliki motivasi sangat tinggi. Sedangkan perhitungan motivasi belajar awal kelas kontrol adalah sebanyak 19% siswa memiliki motivasi rendah, 23,7% siswa memiliki motivasi cukup, 52,6% siswa memiliki motivasi tinggi, 4,7% siswa memiliki motivasi sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-rata motivasi belajar awal cukup.

Perhitungan skor motivasi belajar akhir kelas eksperimen adalah sebanyak 14,3% siswa memiliki motivasi tinggi, sedangkan 85,7% siswa memiliki motivasi sangat tinggi. Sedangkan perhitungan skor motivasi belajar akhir kelas control adalah sebanyak 14,3% siswa memiliki motivasi cukup, 52,6% siswa memiliki motivasi tinggi, dan 33,1% siswa memiliki motivasi sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa motivasi belajar siswa setelah diberikan perlakuan berupa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi disbanding dengan motivasi belajar siswa yang mendapat perlakuan tanpa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata motivasi belajar akhir siswa kelas eksperimen adalah 128, sehingga siswa kelas eksperimen dikategorikan memiliki motivasi sangat tinggi, sedangkan skor rata-rata motivasi belajar akhir siswa kelas kontrol adalah 122, sehingga siswa kelas kontrol dikategorikan memiliki motivasi tinggi.

Uji Hipotesis

1) Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Siswa

Pengaruh model pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa dilakukan melalui Uji Perbedaan dua rata-rata skor motivasi belajar akhir kelas eksperimen dan kontrol menggunakan SPSS 16 for windows yakni uji Independent Sample t-test. Hasil uji perbedaan dapat dilihat pada output uji independent sample t-test pada tabel berikut :

Tabel 4 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Skor Motivasi Belajar Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kontrol		Eksperimen		t	tstat	P
n	Mean	n	Mean			
21	121,90	21	128,43	-2,079	-5,230	0,000

Berdasarkan tabel 4.23 Output independent samples t- test diperoleh angka P atau sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Oleh karena nilai sig. (2-tailed) $0,000 \leq 0,05$ dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata skor motivasi belajar akhir antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan pengambilan keputusan berdasarkan uji t diperoleh -t hitung sebesar -5,230. Oleh karena $-t$ hitung $< -t$ tabel yakni $-5,230 < -2,079$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata skor motivasi belajar akhir kelas eksperimen dan kontrol adalah berbeda. Sehingga dapat diasumsikan bahwa siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan dengan dan tanpa model pembelajaran kooperatif tipe STAD motivasi belajar akhirnya adalah berbeda secara signifikan dengan rata-rata skor motivasi akhir kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol yakni rata-rata skor motivasi akhir kelas eksperimen sebesar 128 dan kelas kontrol sebesar 122.

2) Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa

Pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa menggunakan Uji Perbedaan dua rata-rata nilai posttest kelas eksperimen dan kontrol menggunakan SPSS 16 for windows yakni uji Independent Sample t-test. Hasil uji perbedaan dapat dilihat pada output uji independent samples t-test pada tabel 4.24 berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kontrol		Eksperimen		t	tstat	P
n	Mean	n	Mean			
21	76,67	21	86,90	-2,079	-3,869	0,000

Catatan: skor maksimal = 100

$P > 0,05$

Berdasarkan tabel 4.24 Output independent samples t- test diperoleh angka P atau sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Oleh karena nilai sig. (2-tailed) $0,000 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan pengambilan keputusan berdasarkan uji t diperoleh -t hitung sebesar -3,869. Karena -t hitung $< -t$ tabel, yakni $-3,869 < -2,079$ maka rata-rata nilai posttest hasil belajar kelas eksperimen dan kontrol adalah berbeda. Sehingga diasumsikan bahwa bahwa siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan dengan dan tanpa model pembelajaran kooperatif tipe STAD hasil belajar akhirnya adalah berbeda secara signifikan, dengan rata-rata nilai posttest kelas eksperimen lebih tinggi daripada hasil belajar kelas kontrol yaitu nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 86,90 dan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 76,66.

3) Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa

Pengaruh model pembelajaran terhadap motivasi dan hasil belajar siswa menggunakan Uji Perbedaan dua rata-rata nilai motivasi dan hasil belajar kelas control menggunakan SPSS 16 for windows yakni uji Independent Sample t-test. Hasil uji perbedaan dapat dilihat pada output uji independent samples t-test pada tabel 4.25 berikut

Tabel 6 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Nilai Motivasi dan Hasil Belajar Kelas Kontrol

Motivasi Belajar		Hasil Belajar				
N	Mean	n	Mean	t	tstat	P
21	121,90	21	63,52	-2,079	0,001	0,000

Catatan: skor maksimal = 100 $P > 0,05$

Berdasarkan tabel 4.24 Output independent samples t- test diperoleh angka P atau sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Oleh karena nilai sig. (2-tailed) 0,000 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan pengambilan keputusan berdasarkan uji t diperoleh -t hitung sebesar 0,001. Karena -t hitung < -t tabel, yakni 0,001 < -2,079 maka rata-rata nilai motivasi dan hasil belajar kelas control adalah berbeda. Sehingga diasumsikan bahwa bahwa motivasi dan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan tanpa model pembelajaran kooperatif tipe STAD hasil belajar akhirnya adalah berbeda secara signifikan, dengan rata-rata motivasi belajar lebih tinggi daripada hasil belajar kelas kontrol yaitu nilai rata-rata motivasi belajar 121,90 dan nilai rata-rata hasil belajar sebesar 63,52.

PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Kelas yang digunakan sebagai subjek penelitian yakni kelas VIII A sebagai kelas kontrol yang terdiri dari 21 siswa dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 9 anak dan siswa perempuan sebanyak 12 anak. Sedangkan kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 11 anak dan siswa perempuan sebanyak 10 anak.

Berdasarkan data hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) pada kelas eksperimen telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kooperatif metode STAD yang meliputi presentasi kelas oleh guru melalui penjelasan singkat dan tanya jawab, kerja kelompok heterogen (terdiri dari 4-5 siswa dengan tingkat akademis berbeda yakni tinggi, sedang dan rendah serta memperhatikan kesetaraan gender), tes secara individual, perhitungan skor peningkatan individu, membuat rangkuman serta penghargaan kelompok.

Observasi dilakukan oleh peneliti dan 1 orang teman sejawat guru sebagai fungsi kontrol yakni menghindari objektivitas baik dari peneliti maupun teman sejawat sehingga hasil observasinya dapat lebih terjamin. Dalam aspek motivasi belajar, dari hasil uji kesamaan motivasi awal kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan, diketahui $-t$ hitung sebesar $-0,967$. Karena nilai $-t$ hitung $> -t$ tabel yakni $-0,967 > -2,079$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata skor motivasi belajar awal kelas eksperimen dan kontrol adalah sama. Sehingga dapat diasumsikan bahwa siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki motivasi belajar yang relatif sama yakni dalam kategori cukup dengan rata-rata skor motivasi belajar awal kelas eksperimen sebesar 118 dan kelas kontrol sebesar 116.

Hasil uji beda dua rata-rata motivasi belajar akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol pada output independent samples t-test menunjukkan $-t$ hitung sebesar $-5,230$. Oleh karena $-t$ hitung $< -t$ tabel yakni $-5,230 < -2,079$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata motivasi belajar akhir kelas eksperimen dan kontrol adalah berbeda. Hal ini membuktikan bahwa motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan metode STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) berbeda secara signifikan dengan kelas kontrol yang mendapat perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah.

Hasil angket motivasi belajar akhir menunjukkan rata-rata motivasi belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada motivasi belajar kelas kontrol yaitu rata-rata kelas eksperimen sebesar 128 yang termasuk dalam level sangat tinggi dan rata-rata kelas kontrol sebesar 122 yang termasuk dalam level tinggi. Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif metode STAD dalam pembelajaran IPS dengan materi pembelajaran IPS di kelas eksperimen menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi meningkat.

Hal tersebut dikarenakan siswa belajar dalam kelompok. Belajar dalam bentuk kelompok membuat komunikasi antar siswa terjalin dengan baik sehingga siswa lebih aktif dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan menyumbangkan ide. Materi pelajaran IPS juga berperan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa karena materi tersebut berhubungan langsung dengan siswa. Siswa dapat menemukan berbagai jenis pembelajaran IPS terutama kubus dan balok di lingkungan sekitar mereka seperti di sekolah maupun di rumah, sehingga ilmu yang diperoleh setelah belajar materi pembelajaran IPS dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu tugas kelompok yang disajikan dalam bentuk permainan juga menarik perhatian siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Penghitungan skor peningkatan prestasi individu dari hasil tes individual serta adanya penghargaan kelompok yang diberikan guru diakhir pembelajaran membuat siswa merasa bangga dan puas terhadap hasil belajarnya sehingga motivasi belajarnya dapat meningkat.

Peningkatan motivasi belajar siswa di kelas eksperimen dengan menerapkan tipe STAD dalam pembelajaran relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norman (2005), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa STAD memberikan efek positif yang signifikan terhadap hasil belajar, motivasi serta respon siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris.

Hasil uji kesamaan nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan, diketahui t hitung sebesar sebesar 0,195. Oleh karena t hitung $< t$ tabel, yakni $0,195 < 2,079$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata nilai pretest kelas eksperimen dan kontrol adalah sama. Sehingga dapat diasumsikan siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang sama dengan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen sebesar 62,85 dan kelas kontrol sebesar 63,52. Hasil pretest kelas eksperimen menunjukkan bahwa dari 21 anak, ada 17 anak yang tidak tuntas hasil pretest kelas kontrol menunjukkan bahwa dari 21 anak, ada 15 anak yang tidak tuntas.

Berdasarkan hasil uji beda dua rata-rata nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol yakni output Independent Samples T-Test diperoleh $-t$ hitung sebesar -3,869. Oleh karena $-t$ hitung $< -t$ tabel yakni $-3,869 < -2,079$ maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata posttest kelas eksperimen dan kontrol adalah berbeda. Hal ini membuktikan bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan metode STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) berbeda secara signifikan dengan kelas kontrol yang mendapat perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah.

Hasil posttest kelas eksperimen menunjukkan semua siswa dinyatakan tuntas sedangkan hasil posttest kelas kontrol menunjukkan masih ada 6 siswa yang belum tuntas. Rata-rata nilai posttest kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol yakni rata-rata kelas kelas eksperimen 86,90, sedangkan kelas kontrol dengan rata-rata nilai posttest 76,66. Melalui pembelajaran dengan menggunakan tipe STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) pada mata pelajaran IPS dengan materi pembelajaran IPS di kelas VIII B SMP Negeri 1 Angrek hasil belajar siswa menjadi meningkat.

Dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa belajar dalam kelompok heterogen dengan jumlah anggota 4-5 anak yang memiliki latar belakang dan tingkat akademis yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan gender. Penguasaan materi oleh siswa dapat tercapai karena siswa berperan aktif dalam pembelajaran, anggota kelompok saling bekerja sama dan saling membantu dalam memahami materi dan memecahkan masalah yang ada dalam lembar kerja kelompok. Siswa yang sudah bisa mengajari teman yang masih belum bisa dan saling mengecek penguasaan materi dengan dengan saling bertanya jawab antar kelompok.

Peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V SD Negeri Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo semester II tahun pelajaran 2010/2011” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran IPS.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.
- Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.
- Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) berpengaruh terhadap motivasi belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD berpengaruh positif terhadap motivasi belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS, maka disampaikan saran sebagai berikut: Siswa yang terbiasa pasif dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya belajar membiasakan diri untuk dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam kerja kelompok seperti dalam pembelajaran yang menggunakan metode STAD. Dengan berdiskusi dan saling membantu akan memudahkan siswa dalam menguasai materi pelajaran dan memecahkan masalah sehingga hasil belajar dapat meningkat. Sementara bagi Guru, Jika memiliki siswa yang cenderung memiliki karakteristik pasif, guru sebaiknya menggunakan variasi metode pembelajaran yang menarik yang salah satunya adalah pembelajaran kooperatif metode STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) karena metode ini dapat membuat siswa aktif sehingga lebih termotivasi untuk belajar dan hasil belajar siswa pun meningkat. Bagi kepala sekolah untuk menyarankan guru untuk menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) dalam kegiatan belajar mengajar.

Daftar Pustaka

- Ahmad Izudin, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional di Gorontalo (Analisis Pemberdayaan Masyarakat)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2012).
- Amirin, Tatang (2002). *Landasan Filosofis Pendidikan Berwawasan Kecakapan Hidup (Life Skills)*, Majalah Dinamika Pendidikan No, 1/Tahun IX, Maret 2002. Yogyakarta.
- Baron, Robert A. 1977. *Human Aggression*. New york: Plenum Press.
- Brown, Carol. 2008. *Developmental Psychology*. Singapore: Sage.
- Robert Chambers dan G. Conways, *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*, (Brighton, England: Institute of Development Studies, 1992).
- Soepardi. 2003. *Menyiapkan Sumber Daya Manusia Mandiri Melalui Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA *SUSTAINABLE LIVELIHOOD* DI DESA BINAJAYA KABUPATEN GORONTALO

Abdul Rahmat

Gorontalo State University

abdulrahmat@ung.ac.id

Abstrak

Kemiskinan di Indonesia, data yang dilansir oleh BPS 2015 penduduk miskin mencapai 10,96 persen (27,3 juta jiwa) dengan prosentasi sekitar 62,65 persen penduduk miskin berada di desa. Desa harusnya menjadi salah satu sumber utama dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi faktanya desa masih saja dieksploitasi secara besar-besaran, sehingga menyebabkan limbah air mata bagi warga desa karena harus mencari sumber nafkah lain. Apakah program pemberdayaan masyarakat desa berdampak pada *sustainable livelihood* bagi warga desa? Hasil temuan dilapangan terhadap persoalan yang diajukan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan pemerintah masih saja terjadi ego-sektoral antar lini, baik pemerintah pusat maupun daerah. Faktanya, UU Desa yang meskinnya menjadi dorongan untuk mengembangkan sumberdaya desa yang berkelanjutan, masih terjadinya beberapa tumpang tindih program, seperti *Community Development* Mengentaskan Kemiskinan, tidak berbanding lurus dengan realitas masyarakat yang secara nyata dapat mengembangkan dirinya sendiri tanpa bantuan langsung program tersebut. Butuh adanya dorongan advokasi perubahan kebijakan yang lebih tepat sasaran, yaitu mendorong pemerintah agar program harus lebih ditekankan pada *pro-job* dan *pro-growth* untuk meningkatkan sisi produktifitas ekonomi masyarakat desa.

Kata Kunci: *Pembangunan Desa, dan Sustainable Livelihood.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan di desa adalah tantangan yang belum kunjung padam hingga usai Indonesia menginjak 70 tahun merdeka. Setiap rejim pemerintah memiliki strategi dan program yang berbeda-beda untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Tetapi, pada kenyataannya, penduduk miskin masih berada di desa. Data yang dilansir BPS (Mei, 2015) adalah faktanya dimana penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,96 persen (27,3 juta jiwa) dengan prosentase sekitar 62,65 persen penduduk miskin ada di desa (Marwan Jafar, 2015:xxi).

Pada sisi lain, desa masih saja dikategorikan dengan tertinggal dan sangat tertinggal. Kondisi ini menjadikan sebuah pembangunan perlu berpikir lebih dalam terkait dengan implementasi dari sebuah program. Belum lagi persoalan desa yang belum memiliki profil desa, jumlah warga desa miskin, kondisi infrastruktur yang tidak memadai, aparatur desa yang tidak kompeten, dan kantor desa yang tidak layak

bahkan tidak punya. Kondisi ini berdampak penuh terhadap pemanfaatan potensi dan aset desa yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi sumber nafkah warga desa.

Kondisi ini sudah saatnya tidak untuk dikeluhkan tetapi justru mendorong kita untuk bekerja keras. Dengan berpedoman pada implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 dalam setiap program pembangunan yang bermuara pada peningkatan ekonomi desa. UU Desa pada pasal 3 (tiga) poin delapan hingga 13 sudah sangat jelas telah mengatur penuh terkait dengan kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Selain itu, untuk mendorong pembangunan berkelanjutan tersebut maka pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar.

Persoalannya adalah alokasi dana yang begitu besar tersebut, tidak menutup kemungkinan akan melahirkan anti-klimaks dari pembangunan itu sendiri. Walaupun dengan anggaran besar tapi bukan faktor utama untuk menyelesaikan permasalahan desa. Namun lebih dari itu desa harus menjadi ruang yang cukup efektif dalam mengembangkan diri sebagai desa mandiri sebagai titik balik dari *sustainable livelihood*. Kenyataan ini harus menjadi titik tekan dalam pembangunan sebagaimana cita-cita besar dari pemerintahan Jokowi-JK dibawah konsep nawa citanya (Jim Gilling, Stephen Jones, dan Alex Duncan, 2001:67).

Konsep *sustainable livelihood* tersebut pada dasarnya merupakan titik balik dari persoalan desa selama ini yang tidak menarik, usang, dan tidak perlu dibahas. Padahal, sumber penghidupan semua penduduk di bumi ini lahir dari desa. Bisa dibayangkan bila warga desa tidak memproduksi sumber penghidupan manusia di kota (sandang-pangan-papan), apa yang akan terjadi? Pada posisi ini kita harus bijak dalam memandang persoalan yang muncul.

Maka dari itu, kekayaan alam dan potensi yang dimiliki harus menjadi sumber kekuatan ekonomi berbasis desa untuk mendorong potensi-potensi alam yang dimiliki, misalnya memanfaatkan sekitar pesisir pantai dan gua-gua serta sungai sawah bawah tanah menjadi sumber penghidupan baru bagi warga desa dengan menghadirkan ekonomi eko-wisata (*environmental services based economic activities*). Dengan demikian, tidak berlebihan dalam hal ini merupakan salah satu alternatif pembangunan berkelanjutan di desa sebagai *role model*.

Untuk mewujudkan desa berkelanjutan tersebut maka dalam perspektif lebih luas harus memaknai kembali apa yang dimaksud dengan kemiskinan di desa, tata kelola (*governance*) dan penanggulangan kemiskinan, strategi alternatif pembangunan *sustainable livelihood*, advokasi dan perubahan kebijakan, serta kontribusi nyata dari lembaga *think thanks* dalam mempertahankan desa sebagai kekuatan ekonomi-politik.

Dari lima perspektif ini merupakan auto-kritik bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan berbasis desa (Sunajii Zamroni, Abdur Rozaki, M. Zainul Anwar:2015:xiii).

TINJAUAN TEORITIS

Kemiskinan adalah fenomena sosial yang kompleks, ‘ill defined problem’, bersifat multidimensi (Muhadjir, 2005). Dalam mendefinisikan kemiskinan banyak kecenderungan distorsi pemaknaan yang terbatas pada penampilan fisik (tubuh, konsumsi pangan, pakaian, perhiasan, rumah, perabot rumah tangga, alat transportasi yang digunakan, gaya hidup). Pada gilirannya, distorsi pemaknaan tersebut berdampak terhadap pengukuran dan indikator yang digunakan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menjadikan negeri ini kaku dalam memaknai kemiskinan, sehingga berdampak terhadap jumlah statistik kemiskinan, tapi angka yang disajikan tidak sesuai dengan realitas dilapangan.

Dengan begitu, angka statistik yang disugukan oleh BPS lebih bertitiktekan hanya soal ekonomi. Padahal, dimensi lain yang mendukung potensi orang bisa dikatakan miskin atau tidak, ada indikator lain sekiranya perlu diperhatikan. Namun, pada umumnya pengukuran kemiskinan setidaknya ada 4 (empat) klasifikasi umum mengenai kemiskinan, yaitu (1) kemiskinan relatif, akibat langsung dari pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (2) kemiskinan absolut, disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok minum. (3) Kemiskinan kultural, disebabkan oleh faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu sehingga membuat tetap miskin. (4) Kemiskinan struktural, ketidakberdayaan terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil dan tidak memiliki akses untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Selain itu, kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam

kehidupan sipil, sosial dan budaya (*World Summit for Social Development* Kopenhagen, Denmark, Maret 1995).

Fenomena tersebut mendorong pemerintah untuk terus berupaya melakukan perbaikan dalam aspek indikator kemiskinan. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta (2015), menyusun kembali konsep dan indikator kemiskinan. Di mana desain capaian penelitian ini bermuara pada 5 (lima) indikator utama dalam mengukur tingkat kemiskinan, yaitu indikator ekonomi, politik, sosial, budaya, dan psikis.

Pengalaman penelitian ini dieksplorasi dari berbagai studi kualitatif untuk memahami perspektif masyarakat terhadap kemiskinan yang mereka alami. Konsolidasi kajian kemiskinan yang melibatkan masyarakat (partisipatoris), lebih menekankan pada kajian dari studi-studi yang secara langsung melibatkan masyarakat miskin. Pada konteks ini, mengukur dan membandingkan tingkat akurasi penghitungan kuantitatif dengan persepsi masyarakat (Penelitian SMERU, 2012).

Komitmen dan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan cara-cara yang adil tanpa mengecualikan masyarakat miskin akan meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari oleh hak-hak asasi manusia, nondiskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung merupakan hakikat paradigma pembangunan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-eksploratif (Lexy J. Moleong, 2010:27). Rancangan penelitian ini disajikan dalam bentuk cerobong (*funnel*). Bentuk ini merupakan langkah sistematis yang berawal dari eksplorasi yang bersifat luas dan mendalam. Dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang lebih menyempit serta terarah pada suatu topik tertentu (Suharsimi Arikunto, 1998:131). Sifat penelitian ini lebih ditekankan bernarasi induktif yang berdasarkan pada perspektif kritis. Perspektif ini salah satu bagian dari metode ilmiah *rasional-empiris*.

Penelitian ini berdasarkan pada pandangan manusia sebagai instrumen sehingga memiliki karakteristik alamiah (*naturalistik*). Maka dapat dipengaruhi oleh definisi dari model atau teori yang digunakan. Oleh karena setiap peneliti memandang bidang ilmu yang sedang dikaji sama maka hasil penelitian yang di dapat cenderung ditafsirkan berdasarkan fenomena yang sama tetapi dengan cara yang berbeda (Deddy Mulyana, 2003:13).

Untuk mengumpulkan sumber data yang menjadi kunci dari sebuah penelitian, maka teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi: (1) *Pengumpulan Data Sekunder*. Data sekunder yang terkait dengan dinamika perundang-undangan UU Desa No. 6 Tahun 2014, pendamping desa, LSM, akademisi, maupun lembaga lainnya. Selain itu, data yang berbasis *website* juga akan menjadi salah satu acuan dalam kajian ini. Data dapat berbentuk undang-undang, data capaian program kerja pemerintah, laporan program kerja dan kegiatan serta informasi penting lainnya yang terkait. (2) *Wawancara Mendalam (In-depth Interview)*. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah partisipan atau narasumber sebagai berikut: a) Pejabat pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, b) Pendamping Desa, b) Aktivistis LSM yang bergerak pada isu-isu pemberdayaan masyarakat, dan c) Tokoh masyarakat dan Profesional. (3) *Observasi dan Studi Dokumen*. Data juga dihasilkan dari observasi dan studi dokumen. Observasi dilakukan melalui kunjungan ke beberapa desa dampingan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Selanjutnya, Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tercatat baik terkait dengan hasil evaluasi pemerintah terkait dengan pendampingan desa, laporan kegiatan atau program serta dokumen lain.

Dalam hal ini, peneliti menerapkan metode triangulasi dengan cara melakukan *cross-check* terhadap hasil wawancara dengan hasil studi dokumen. Selain itu, peneliti juga membandingkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai *stakeholder*, yakni pejabat pemerintah, pendamping desa, aktivis LSM, tokoh masyarakat, dan seterusnya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara data yang telah dihimpun selanjutnya disusun secara sistematis, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga dapat menjelaskan pengertian dan pemahaman tentang gejala yang diteliti. Ada 3 (tiga) jalur yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut, yakni:

1. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *fieldnote* (catatan lapangan). Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, dimana hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam satu pola.
2. Penyajian data (*data display*) merupakan bentuk rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan atas riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Proses ini dilakukan dari awal pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab-akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan (Miles and Huberman, 1994:15).

Ketiga komponen analisis data di atas dalam aplikasinya membentuk sebuah interaksi antara ketiganya dengan proses pengumpulan data sebagai sebuah siklus, dimana sifat interaksi ketiganya berjalan terus menerus dari proses awal peneliti turun ke lapangan hingga selesainya proses penelitian.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Deskripsi Desa Bina Jaya

Desa Bina Jaya merupakan sebuah desa terpencil yang awalnya berdiri masih berada dalam naungan desa Molohu dan pada tahun 2003 kemudian di dirikan menjadi satu desa yang bernama Desa Bina Jaya. Desa ini terletak di daerah dataran tinggi wilayah bagian barat dari Kabupaten Gorontalo dan bagian utara dari Kecamatan Tolangohula.

Dewasa ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui asal-usul tentang Desa Bina Jaya, baik dari sejarah maupun cerita rakyat, legendaris yang membahas tentang Desa Bina Jaya, perkembangan kehidupan masyarakat, sosial ekonomi, budaya, agama, tokoh agama/pemuka agama islam, nama-nama kepala Desa dari masa ke masa serta termasuk pula nama-nama serta pengertian dari masing-masing dusun tersebut.

Sehingga untuk mengatasi hal demikian perlu penanganan dari pemerintah untuk mengenalkan seluruh kegiatan maupun program yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Dan untuk melakukan hal demikian dapat di sajikan dengan beberapa tulisan ini tentang terbentuknya Desa Bina Jaya yang dikemas secara sederhana agar dapat dengan mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh pembaca dengan harapan dapat membuka tabir rahasia dari Desa Bina Jaya tersebut yang kemudian dapat disumbangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilupakan oleh generasi mendatang.

Sehingga sangat tepat apa yang dikatakan oleh Bung Karno sang Proklamator yang sekaligus sebagai Presiden R.I. pertama tentang *Jasmerah* (Jangan sekali-kali melupakan sejarah).

Dimana Sejarah daerah merupakan hasil budaya manusia yang bersahaja, lebih banyak berupa cerita dari mulut ke mulut, berupa legenda, dongeng dan mitos yang oleh orang Barat dikatakan tidak riil, penuh dengan kegaiban, fantasi dan spekulasi.

Pemerintah Desa berkeyakinan, bahwa di Desa Bina Jaya masih banyak menyimpan bahan – bahan sejarah berpotensi dan ilmu pengetahuan yang belum banyak diungkap, seperti budaya adat suku terasing “Polahi”

Dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa sejarah daerah Desa Bina Jaya juga merupakan saksi dari waktu, obor dari kebenaran, kenang-kenangan hidup bagi yang berkepentingan, guru bagi yang mau meneladani serta jelas merupakan pesuruh dari zaman kuno. Dengan berdasar pada pernyataan tersebut, Pemerintah Desa akan berusaha mengungkap apa yang sebenarnya pernah terjadi di Desa Bina Jaya.

Pada Tahun 2002 Desa Bina Jaya Pisah dari Desa Molohu karena keinginan dari masyarakat untuk lebih dekat dengan pelayanan agar mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal dari Pemerintah Desa dan Definitif pada Tahun 2003. Desa Bina Jaya terbentuk pada Tahun 2003 yang sebelumnya merupakan Dusun dari Desa Molohu yaitu Dusun Bina Karya, Dusun Pilomuluta, Dusun Tonala dan Dusun Mekar Jaya.

Nama Desa Bina Jaya berasal dari paduan nama dua Dusun yaitu Dusun Bina Karya sebagai pusat desa dan Dusun Mekar Jaya sehingga menjadi BINA JAYA yang artinya Desa yang tetap terbina dan Jaya terus

1. *Sustainable Livelihood* Warga Desa

Desa Bina Jaya, sebagai imajinasi kehidupan yang penuh harapan dan cita-cita. Kondisi ini akan jauh dari dinamika perkembangan besar-besaran proses urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai laporan yang disuguhkan oleh PBB diprediksi, penduduk desa akan berhijrah ke kota dengan proyeksi 66 persen pada tahun 2050 (*World Urbanization Prospect*, 2014). Data statistik ini seperti *zero sum game*: mengembangkan pertumbuhan kota semakin meyakinkan penduduk di desa akan ditinggal. Kondisi ini sedikit memprihatinkan, bahkan pandangan ekstrem menebak, entah kapan, suatu saat sudah tidak ada lagi penduduk desa.

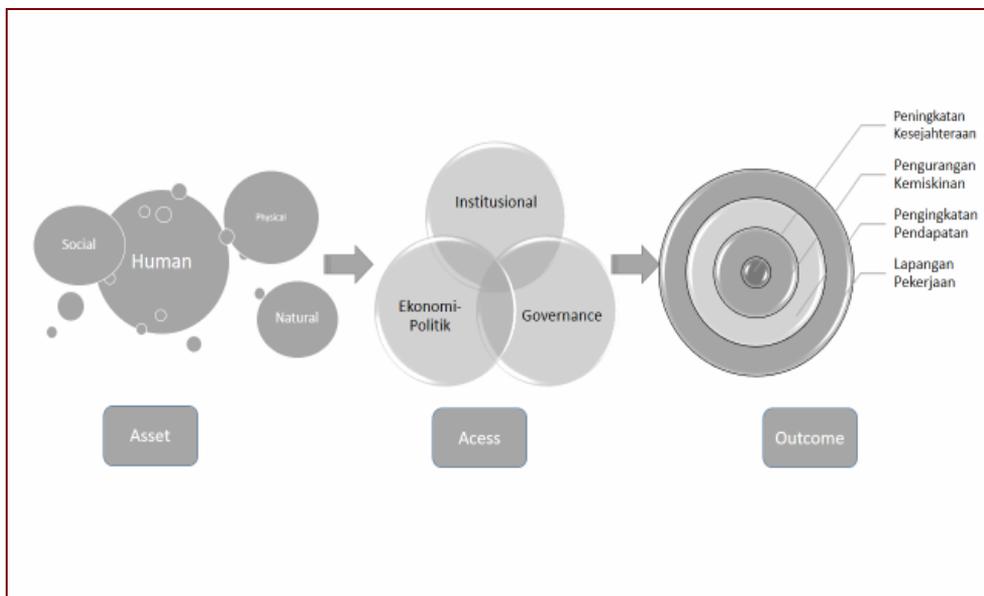
Ramalan hilangnya penduduk desa, sedikit tidak berlebihan, karena tidak ada lagi sumber penghidupan bagi warganya. Padahal, sumber penghidupan manusia berada di jantung desa. Letak kebutuhan dasar manusia, bila kita mau jujur, berada di desa. Kalaupun dulu desa sebagai perpindahan temporer, bagaikan sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Menjelang hari lebaran tiba, penduduk kota mempersiapkan

diri untuk mudik ke kampung halaman. Sebatas temu kangen teman masa lalu dan nostalgia tempat kelahiran.

Fenomena ini jamak ditemukan hampir di seluruh daerah Indonesia. Dalam kajian sosiologis, hal ini merupakan fakta bahwa desa masih menjadi daya tarik bagi mereka yang menghabiskan waktunya di kota. Selain itu, dalam perpindahan temporer penduduk desa ke kota sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan tenaga kerja.

Sebagai bagian dari strategi pemanfaatan tenaga kerja, sayangnya, pembangunan yang berorientasi kepada mekanisme pasar, menuntut desa menjadi tidak menarik, persoalan usang, dan bahan cerita lama. Pada kondisi ini semakin menegaskan bahwa desa akan semakin ditinggalkan dan hanya menjadi bahan eksploitasi bagi mereka yang memiliki kepentingan besar dalam pemanfaatan sumber daya alam, potensi, dan aset yang dimiliki oleh desa. Pembangunan yang berorientasi pada mekanisme pasar pasti akan berdampak pada pendapatan warga desa dan kesenjangan sosial yang begitu tinggi.

Secara konsep, pengembangan pemikiran keras Chambers dan Conways tersebut termanifestasi ke dalam tiga rangkaian utama, yaitu aset (manusia, psikologis, alam, dan sosial), akses (institusional, pemerintah, dan sumber ekonomi-politik), dan outcome. Hal ini tergambar seperti alur pengurangan berbasis aset berikut:



Gambar 1. Alur Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset
Sumber: Penelitian IRE, 2012.

Gambar di atas menunjukkan bahwa sumber potensi yang dimiliki oleh warga desa tersebut sedikitnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: *Pertama*, aset yang dimiliki oleh manusia dalam mengembangkan dirinya menjadi lebih baik sedikitnya ada tiga yang melekat pada dirinya. (1) Masalah psikis merupakan kondisi kejiwaan individu, apakah diriny ada dorongan secara psikologis atautidak untuk menjadi manusia maju. (2) Natural (alamiah), secara naluriah manusia memiliki potensi masing-masing untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. (3) Faktor sosial, dimana ketika seseorang individu memiliki daya sosial yang tinggi akan sangat mudah mereka beradaptasi secara baik, sehingga mendorong komunalitas penghidupan yang lebih baik (berkumpul dan berorganisasi).

Dalam pandangan Chambers dan Conways (1992), masalah aset bagi individu dibagi ke dalam dua hal, yaitu aset kasat mata (*tangible asset*) dan aset tidak kasat mata (*intangible asset*). Aset kasat mata adalah sumber daya yang relatif langsung berada dalam penguasaan rumah tangga atau seseorang yang diperlukan untuk mendukung dan melangsungkan penghidupannya, seperti *natural capital*, *financial capital*, dan *physical capital*. Sedangkan aset tidak kasat mata ialah klaim dan akses yang diperlukan oleh rumah tangga agar mampu memperoleh manfaat atas sumberdaya atau jasa yang relatif tidak dalam penguasaannya secara langsung, seperti *human capital*, *social capital* atau *political capital*.

Kedua, akses manusia yang difasilitasi oleh negara yang sifatnya institusional. Dalam hal ini bagaimana pemerintah sebagai regulator dapat memberikan kemudahan bagi individu untuk mengembangkan dirinya masing-masing, baik persoalan regulator, program/kegiatan, dan dana alokasi yang dianggarkan. Bila hal ini dapat dipenuhi penyelenggara oleh negara sedikit banyak akan meningkatkan solidaritas sosial dan pendapatan secara berangsur-angsur.

Konteks akses yang dimiliki manusia tersebut pada dasarnya pengadaan kemampuan untuk mewujudkan penguasaan diri secara individu. Hal ini dapat diwujudkan melalui relasi sosial, kelembagaan, dan organisasi. Relasi sosial dapat berupa etnis, suku, agama, umut, yang dapat membangun kesatuan dalam komunitas. Begitu sebaliknya, adat istiadat (kelembagaan) berperan penting dalam keputusan yang akan dijalani seseorang.

Ketiga, outcome sebagai tujuan akhir dari proses penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Ketika aset dan akses secara dasar dapat dijalankan oleh individu maka pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kapasitas, bahkan bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan. Hal ini bisa

terwujud dalam pengembangan kapasitas individu yang memiliki orientasi maju mengembangkan diri dan komunitas dimana mereka tinggal. Melakukan perubahan terhadap masyarakat itu menjadi point penting dalam orientasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Pada titik ini, kepemilikan aset yang mampu menjadi modal pengembangan kapasitas individu merupakan strategi penghidupan berkelanjutan bagi manusia. Artinya, memahami potensi diri, membangun orientasi pengembangan kapasitas, adanya kesepakatan antar lintas etnis yang di dalamnya adanya adat istiadat (kelembagaan), dengan sendirinya akan membangun hidup yang berdampak pada stabilitas sosial dan kuatnya relasi sosial. Dengan adanya pengembangan portofolio tersebut dapat disinyalir akan mengembangkan peningkatan pendapatan, kesejahteraan (keluar dari kemiskinan), kelembaman terhadap kerentanan (*vulnerity*) atau tekanan ekonomi (*shocks*), bahkan kelangsungan kesempatan ekonomi yang bisa diwarikan kepada generasi selanjutnya (*sustainability*).

2. Advokasi Perubahan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan fenomena dunia yang masih saja bergelora disetiap sendi kehidupan. Menanggapi persoalan tersebut secara serempak negara-negara di dunia di tahun 2000-an mengajak seluruh negara untuk memerangi kemiskinan, tidak terkecuali bagi Indonesia. Dokumen secara global tersebut, pada gilirannya mematok batas penyelesaian kemiskinan yang ditargetkan pada 2015, dengan isu yang termaktub dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Bagaimana dengan Indonesia? Dibawah pemerintahan SBY, sejak tahun 2004 hingga 2014, dengan percaya diri mematok dapat menurunkan angka kemiskinan 8-10 persen.

Data kemiskinan tersebut ternyata luput untuk diraih. Data terakhir secara nasional menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih berkisaran sebesar 11,47 persen (BPS, 2014). Kini, pemerintahan Jokowi-JK pun mematok penurunan angka kemiskinan 6-8 persen diakhir masa jabatan mereka 2019 (Bappenas, 2015). Apakah target jokowi akan terengkuh? Ini artinya akan ada target pengurangan angka kemiskinan 3-5 persen. Sebuah angka yang tidak ambisius tetapi tidak sesederhana meraihnya.

Dalam rangka pengurangan jumlah rakyat miskin publik sudah mafhum bahwa uang yang mengalir deras untuk program-program yang telah dirancang. Maka dana negara dipompa secara kencang untuk segera merealisasikan program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan tersebut, Kabupaten Gorontalo mengukur dengan skala dari beberapa aspek, diantaranya adalah (1) aspek penghasilan, (2) aspek penentu kemiskinan, dan (3) aspek pendukung kemiskinan. Pada aspek penghasilan, pemerintah Kabupaten Gorontalo mengukur penghasilan di atas usia 16 tahun ke atas. Pada aspek pendukung kemiskinan melihat Pangan (seluruh anggota keluarga tidakmampu makan minimal dua kali dalam sehari), Sandang (lebih dari sebagian anggotakeluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal enam stel), dan Papan (tempat tinggal/rumah berlantai tanah/berdinding bambu/beratap rumbia). Sedangkan, pada aspek pendukung kemiskinan, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, kekayaan, air bersih, listrik, dan jumlah anggota keluarga per-KK.

Penurunan prosentase kemiskinan ini mengabarkan ada perubahan positif dalam penanggulangan kemiskinan. Bahkan secara global catatan yang dilansir oleh Bank Dunia, Indonesia menemui prestasi positif dalam menurunkan angka kemiskinan. Laju pertumbuhan Indonesia 0,8 persen terhitung yang tercepat dibandingkan sejumlah negara Asia, misalnya China, Kamboja, dan Thailand (0,1). Namun demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut masih menyisakan persoalan gap antar propinsi di Indonesia. Tidak meratanya penurunan kemiskinan tersebut diakibatkan langsung oleh disparitas yang mencolok antar propinsi. Disparitas ini juga dimaknai kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tidak luput juga antar Kabupaten.

Kemiskinan bukan soal angka statistik yang selama ini menjadi indikator utama pengukuran tingkat keberhasilan dalam pembangunan. Eksploitasi sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resources*), bukan satu-satunya dinamika penanggulangan kemiskinan. Realitas multi dimensi kemiskinan tidak sekedar angka matematis yang setiap tahun dikeluarkan oleh BPS. Lebih daripada itu, seyogyanya pemerintah daerah dengan sekian perangkat kebijakan dan program yang akan dirancang harus memomorsatukan potensi-potensi sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat.

Untuk itu, pada titik ini program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, tak terkecuali dengan UU Desa, harus dengan segera merealisasikan program tepat guna bagi warga desa. Karena temuan data di lapangan mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan para birokrat dalam merancang program pemberdayaan dengan anggaran yang sudah disepakati. Misalnya, dalam rancangan program kerja pada tahun 2009 SKPD memomorsatukan pemberdayaan warga desa. Namun pada tahun 2010, program tersebut menjadi nomor empat, sehingga pada titik ini tidak adanya inkonsistensi dari pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan lebih menekankan pada hasil capaian program/kegiatan bukan pada proses, sehingga program pun lebih menekankan pada mekanisme *pro-poor*. Dinamika pemikiran ini harus diubah. Semangat terbaru UU Desa, harus menjadi pintu dalam membuka tabir, bahwa rancangan program harus lebih ditekankan pada *pro-job* dan *pro-growth* untuk meningkatkan sisi produktifitas ekonomi masyarakat desa. Alokasi yang besar akan sangat bermanfaat bagi pengembangan kehidupan desa berkelanjutan. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berlubang dan inkonsistensi.

PENUTUP

Selain inkonsistensi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, masih juga ditemukan program pengentasan kemiskinan masih bersifat *pro-poor*, bukan mengembangkan *pro-job* dan *pro-growth* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak bagi perkembangan pembangunan berkelanjutan di desa sebagai bagian dari *sustainable livelihood*. Pada titik ini, maka peneliti menganjurkan kepada pemerintah agar dengan segera merubah haluan kebijakannya. Dengan harapan menjadi salah satu *role model* dari pembangunan yang berkelanjutan ataupun UU Desa sebagai unsur pijakan hukum dalam merancang program, menjadi salah satu spirit dalam mendorong kehidupan berkelanjutan di desa.

Daftar Pustaka

- Ahmad Izudin, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional di Gorontalo (Analisis Pemberdayaan Masyarakat)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2012).
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Jim Gilling, Stephen Jones, dan Alex Duncan, “Sector Approaches, Sustainable Livelihoods and Rural Poverty Reduction”, dalam *Development Policy Review*, Vol. 19, No. 3, Tahun 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 27.
- Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Thousand Oaks: Sage Publication: 1994).

- Muhadjir Darwin, *Memanusian Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2005)
- Robert Chambers dan G. Conways, *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*, (Brighton, England: Institute of Development Studies, 1992).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Sunaji Zamroni, Abdur Rozaki, M. Zainul Anwar, Sugeng Yulianto, dan Ashari Cahyo Edi, (dkk), *Desa Mengembangkan Desa Berkelanjutan*, (Yogyakarta: IRE, 2015).
- Teresa Morris, *Social Work Research Methods Four Alternative Paradigms*, (USA: California University Press, 2006).
- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 8-13.

POLA ASUH ORANG TUA DAN PERILAKU AGRESI ANAK

Icam Sutisna

Pendidikan Luar Sekolah-universitas negeri gorontalo

Email : icamsutisna@gmail.com

Abstrak

Orang tua menjadi orang yang pertama dalam memberikan pengaruh terhadap kehidupan seorang anak, namun sayangnya masih banyak orang tua yang tidak menyadari akan hal ini. Orang tua tidak menyadari bahwa perlakuan yang mereka berikan terhadap anak memiliki dampak terhadap perkembangan anak. Ketidaksadaran atau ketidaktahuan orang tua akan hal tersebut terlihat dari besarnya angka tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi didalam keluarga. KPAI mencatat ada 91% kekerasan anak terjadi didalam keluarga.. Tentu hal ini tidak akan terjadi apabila orang tua menyadari bahwa tindakannya tersebut akan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan anaknya. Pola asuh yang keliru akan memberikan efek buruk terhadap perkembangan anak. Anak berperilaku agresi menjadi salah satu contoh yang diduga adanya pengaruh dari penerapan pola asuh yang tidak tepat didalam keluarga.

Kata Kunci : *Pola asuh, Perilaku agresi*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28B menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara rinci bagaimana perlindungan negara terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014, pasal 1 ayat 2 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pihak-pihak seperti orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, negara dan pemerintah berkewajiban melindungi anak dari kekerasan maupun diskriminasi.

Anak menjadi individu yang sangat rentan terhadap kekerasan secara fisik, psikis, sosial, maupun secara seksual. Kondisi fisik dan mental yang masih lemah menjadi pendorong ketidakberdayaan anak untuk menghindari kekerasan-kekerasan tersebut terhadap dirinya. Data Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) tahun 2014 tercatat ada 5066 kasus tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak, sedangkan

pada tahun 2013 tercatat ada 4311 kasus. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen dilingkungan sekolah dan 17.9 persen dilingkungan.

Data hasil monitoring KPI tersebut terlihat jelas bahwa potensi kekerasan pada anak bisa terjadi dimana saja bahkan di lingkungan keluarga sekalipun, justru kekerasan paling banyak dilakukan ternyata berada dilingkungan keluarga, padahal lingkungan ini seharusnya lingkungan yang super aman untuk kehidupan seorang anak. Kita tentu masih ingat peristiwa kekerasan dan disertai pembunuhan seorang anak usia 8 tahun di Bali pada tahun 2015 peristiwa tersebut justru terjadi di lingkungan keluarga yang notabene sebagai lingkungan utama dan pertama bagi anak. Terjadinya tindak kekerasan didalam keluarga oleh orang tua pada anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut ini beberapa faktor yang mendorong orang tua melakukan tidak kekerasan pada anak misalnya seperti orang tua yang kurang bergaul dengan masyarakat, tertutup dan menutup diri, tersisih dari lingkungan, kompensasi, tertekan secara psikologis, pelampiasan ketidak berdayaan, dan faktor kemiskinan (Surbaki, 2008: 185-187).

Perilaku orang tua akan sangat menentukan perilaku anak-anaknya, baik dan buruknya perilaku anak bisa dipengaruhi oleh perilaku kedua orang tuanya. Didalam keluarga perilaku orang tua menjadi model bagi anak-anaknya untuk berperilaku, setiap saat anak mengamati perilaku orang tuanya lalu anak tersebut meniru tindakan yang dilakukan orang tuanya dan menerapkan tindakan tersebut dalam kehidupan sosialnya. Bandura dalam teori belajar sosial (*social learning theory*) mengemukakan "*children observe their caretakers performing certain action and then imitate those action themselves*" (Brewer, 2007: 12). Oleh sebab itu orang tua harus berhati-hati dalam mendidik putra dan putrinya, karena orang tua-lah yang akan menentukan perilaku anak baik maupun buruk. Dalam satu hadits Rasulullah SAW bersabda "Setiap anak sebenarnya dilahirkan di atas fitrah (Islam). Kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani" (Suwaid, 2012: 19). Berdasarkan hadist tersebut jelas bahwa anak-anak akan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang dilakukan orang tuanya didalam keluarga. Kebiasaan orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak didalam sebuah keluarga biasa disebut dengan istilah pola asuh. Menurut Baumrind, ada 4 (empat) gaya pola asuh yaitu "*Authoritarian, Authoritative, Neglectful parenting, Indulgent parenting*" (Sanrock, 2010: 404-405). Masing-masing dari pola asuh tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda-beda terhadap perilaku anak. Kesalahan dalam menerapkan pola asuh dapat memberikan efek buruk terhadap

perilaku anak. Efek pola asuh *permissive* misalnya “perilaku anak diantaranya menjadi agresif” (Brown, 2008: 88). Begitu pula anak yang di asuh dengan otoriter (*Authoritarian*), “anak tersebut akan berperilaku agresif” (Sanrock, 2010: 404). Orang tua tentunya tidak mengharapkan bahwa anaknya berperilaku negatif, semuanya menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, dan selalu mengharapkan agar anaknya terhindar dari perilaku maupun sifat-sifat negatif.

Perilaku agresi secara umum lebih banyak berdampak negatif terhadap kehidupan anak dibandingkan positifnya. Berikut ini dampak negatif perilaku agresif yang dikutip dari buku *The Development and Treatment of Childhood Aggression* yaitu “...*aggressive behavior results in peer rejection, then isolation and rejection leads to the child's isolation by the peer group, then isolation and rejection preclude the child from the necessary social interaction experiences that foster the development of competent social cognizing*” (Debra J. Pepler dan Kenneth H. Rubin, 1991: xv). Sedangkan dampak positif dari perilaku agresi pada diri anak yaitu bahwa agresivitas bisa menjadi saluran untuk menurunkan ketegangan psikis yang dialaminya (Tim Pustaka Familia, 2006:11).

Pola Asuh Orang Tua

Anak adalah amanah bagi orang tuanya. Hatinya yang suci adalah substansi yang berharga. Jika dibiasakan dengan kebaikan, ia akan tumbuh dalam kebaikan dan bahagia di dunia dan akhirat. Adapun jika ia dibiasakan dengan kejelekan dan diabaikan begitu saja seperti binatang maka ia akan sengsara dan celaka, maka dari itu, menjaga anak adalah dengan mendidik, mendisiplinkan, dan mengajarkannya akhlak-akhlak terpuji (‘Ulwan, 2012: 548). Ini tentu mengingatkan peranan orang tua yang mungkin disaat sekarang ini banyak yang tidak menyadari bahwa anak adalah sebagai titipan Tuhan yang harus di asuh dengan sebaik-baiknya. Jika orang tua sudah sadar betul bahwa anak merupakan titip Tuhan, mungkin tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dilakukan orang tua yang berakibat buruk pada perkembangan anak. Tindakan berakibat buruk yang dimaksud adalah bentuk tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya baik fisik maupun psikis, bahkan tidak jarang disaat sekarang ini tindakan kekerasan tersebut berujung pada kematian seperti yang sering kita saksikan di media televisi maupun media massa lainnya. Orang tua yang seharusnya menjadi pelindung dan memberikan rasa aman pada anak-anaknya justru ini sebaliknya orang tua menjadi ancaman bagi anak. Tentunya hal ini menjadi preseden buruk yang harus dijadikan pelajaran bagi para orang tua dalam mengasuh para buah hatinya.

Menurut Supartini (2004: 35) Tujuan utama pengasuhan orang tua adalah mempertahankan kehidupan fisik anak dan meningkatkan kesehatannya, memfasilitasi anak untuk mengembangkan kemampuan sejalan dengan tahapan perkembangannya dan mendorong peningkatan kemampuan berperilaku sesuai dengan nilai agama dan budaya yang diyakininya. Setiap orang tua memiliki gaya yang unik dalam mendidik maupun mengasuh anak-anak mereka. Keunikan setiap orang tua dalam mengasuh atau mendidik anak didalam keluarga disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu seperti usia orang tua, keterlibatan ayah, pendidikan orang tua, pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak, stress orang tua, dan hubungan suami istri (Supartini, 2004: 36-38). Berdasarkan faktor-faktor tersebutlah maka terjadi adanya perbedaan dalam gaya pola asuh orang tua terhadap anak. Baumrind (dalam Santrock, 2011: 404-405) mengidentifikasi ada empat gaya pola asuh yaitu “*Authoritarian parenting, Authoritative parenting, Neglectful parenting, Indulgent parenting*”. Baumrind (dalam Arnet (ed), 2007: 643). “*authoritative parenting, Authoritarian parents, Permissive parents, neglectful parents*”. Baumrind (dalam Presley dan McCormick, 2007: 305) “*Authoritative parenting, Authoritarian parenting, Permissive parenting, uninvolved parenting*”. Baumrind (dalam Fathi, 2011: 53) “Authoritarian, Authoritative dan Permissive”. Menurut Fathi, ketiga gaya pola asuh Baumrind, hampir sama dengan pola asuh menurut Hurlock, Hardy, dan Heyes yaitu “pola asuh otoriter, pola asuh demokrasi dan pola asuh permisif”. Baumrind membagi karakteristik gaya pola asuh menjadi dua dimensi yaitu “*the degree of parental responsiveness* dan *the degree of demand*” (dalam Presley dan McCormick, 2007: 305).

Pola asuh *authoritative* menjadi pola asuh yang paling ideal dibandingkan dengan ketiga pola asuh lainnya, hal ini disebabkan karena adanya keseimbangan antara tingginya permintaan orang tua yang dibarengi dengan tingginya respon yang diberikan orang tua terhadap anak . Orang tua yang menerapkan pola asuh *authoritative* sangat senang dan mendukung dengan perilaku konstruktif anak, serta berharap anak bisa lebih matang, mandiri, dan berperilaku sesuai dengan usia perkembangannya. Menurut Santrock Anak-anak yang diasuh dengan gaya *authoritative* akan memiliki ciri seperti “*often cheerful, self-controlled and self-reliant, and achievement oriented; they tend to maintain friendly relations with peers, cooperate with adults, and cope well with stress*” Santrock (2011: 405).

Gaya pola asuh *Authoritarian. a restrictive, punitive style in which parents exhort the child to follow their directions and respect their work and effort. The*

authoritarian parent places firm limits and controls on the child and allows little verbal exchange. For example, an authoritarian parent might say, "You do it my way or else." Santrock (2011: 404). Pola asuh *authoritarian* atau otoriter lebih berorientasi pada adanya permintaan yang tinggi dari orang tua terhadap anak dan tidak dibarengi dengan tingginya respon orang tua terhadap anak, hal ini cenderung memperlihatkan kekuatan (*power*) orang tua terhadap anak. Pola asuh ini menerapkan disiplin keras yang sesuai dengan kehendak orang tua dan serta membatasi kebebasan anak untuk mengungkapkan perasaannya, hal ini akan memberikan efek buruk terhadap perilaku anak. Menurut Santrock, efek dari gaya pola asuh *authoritarian* (otoriter) terhadap perilaku anak yaitu *"often unhappy, fearful, and anxious about comparing themselves with others, fail to initiate activity, and have weak communication skills"*. Ditambahkan oleh Hart & dkk. *Sons of authoritarian parents may behave aggressively"* (Santrock, 2011: 404). Menurut Arkoff (dalam Fathi, 2011: 56) menyebutkan bahwa "anak yang dididik secara otoriter atau ditolak akan memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan agresivitasnya dalam bentuk yang merugikan". Menurut Priyatna (2010: 51) pola asuh otoriter kelak cenderung memicu anak menjadi anak nakal saat dia mulai memasuki bangku sekolah.

Gaya pola asuh *Permissive* (permissif). *"in opposition to authoritarian parents. Permissive parents demonstrate a great deal of warmth and acceptance toward children but low levels of parent-child involvement and discipline"* (Arnet (ed), 2007: 643)". Ditambahkan penjelasan menurut Presley dan McCormick. *"Permissive parents allow children to make up their own mind about most daily events: snacks, tv viewing, going to bed, and so on. Permissive parent tend to be mildly warm to neutral in the effect they direct toward their children"* (Presley dan McCormick, 2007: 305). Dalam gaya pola asuh *permissive* orang tua cenderung untuk mengikuti semua keinginan anak atau dalam istilah lain mungkin yang tepat yaitu memanjakan anak. Orang tua yang memiliki pola asuh permissif menurut Widyarini (2009: 11) yaitu berusaha berperilaku menerima dan bersikap positif terhadap impuls (dorongan emosi), keinginan-keinginan, dan perilaku anaknya, hanya sedikit menggunakan hukuman, berkonsultasi pada anak, hanya sedikit memberi tanggung jawab rumah tangga, membiarkan anak mengatur aktivitasnya sendiri dan tidak mengontrol, berusaha mencapai sasaran tertentu dengan memberikan alasan, tetapi tanpa menunjukkan kekuasaan.

Gaya pola asuh *neglectful*. *"a style in which the parent is very uninvolved in the child's life"* Santrock (2011: 405). *"These parents stress neither responsiveness*

*nor demandingness and exhibit low levels of all parenting practices. The style is characterized by high indifference to children's needs and behaviors” (Arnet (Ed), 2007: 643)”. Kata lain pola asuh ini yaitu *uninvolved*, sesuai dengan artinya bahwa dalam pola asuh ini keterlibatan orang tua maupun respon orang tua terhadap anak sangat rendah. Orang tua cenderung mengabaikan atau membiarkan anak berkembang dengan sendiri. Anak dalam proses perkembangannya tentu membutuhkan pendamping untuk mengarahkan setiap perilaku dalam kehidupannya, namun tentu jika hal tersebut tidak terjadi maka ini akan mendorong terbentuknya perilaku buruk pada diri anak. Berikut ini menurut Santrock (2011: 405) efek anak yang mendapatkan pola asuh neglectful yaitu *socially incompetent, poor self-control and don't handle independence well. low self-esteem, are immature, and may be alienated from the family. In adolescence, they may show patterns of truancy and delinquency”*.*

Perilaku Agresi Anak

Dalam buku *Introduction to Early Childhood Education preschool through primary grade* (Brewer, 2007: 24) menempatkan perilaku agresi di dalam pembahasan perkembangan sosial. Dia menuliskan bahwa agresi menjadi salah satu aspek yang mendapatkan perhatian dalam perkembangan sosial pada anak usia dini. Oleh karena itu orang tua dan guru harus memberikan perhatian khusus terhadap perilaku agresif, karena perilaku ini jika lepas dari pantauan bisa membahayakan perkembangan sosial anak. Menurut Baron (1977:7) “...aggression be viewed as a form of behavior...”. Agresi dapat dipandang sebagai suatu bentuk perilaku. Dalam kamus besar bahasa Indonesia agresi secara psikologi diartikan sebagai perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda. Agresi secara antropologi yaitu perbuatan bermusuhan yang bersifat penyerangan fisik ataupun psikis terhadap pihak lain. (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000: 13). Naylor mengartikan agresi sebagai “*Any type of behavior or action that is used to harm or dominate another”*. Brewer (2007: 24) *aggression can be manifested as either a reactive or proactive action. A reactive action is usually accompanied by anger, as when a child defends himself or his belongings through aggressiv action. A proactive action is not always accompanied by anger but involves the child's use of aggressive behavior to get something he want, such as a toy form another. Bullying is usually proactive aggression”*. Santrock (2010: 435) mengartikan *bullying “as verbal or physical behavior intended to disturb someone less powerful”*. Sedangkan menurut Priyatna

(2010: 2) *bullying* yaitu tindakan yang disenghaja oleh si pelaku pada korbannya— bukan suatu kelalaian. Memang betul-betul disenghaja. Tindak itu terjadi berulang-ulang. *Bullying* tidak pernah dilakukan secara acak atau Cuma sekali saja. Didasari perbedaan power yang mencolok.

Muhith, lebih khusus menggambarkan bentuk perilaku agresi “perilaku agresi sering bersifat menghukum, menyalahkan atau menuntut. Hal ini termasuk mengancam, melakukan kontak fisik, berkata-kata kasar, komentar menyakitkan, dan juga menjelek-jelekan orang lain dibelakang” (2015: 152). Lebih spesifik bentuk perilaku agresi yang sering muncul pada masa kanak-kanak dikemukakan oleh tim pustaka familia seperti misalnya “marah, bermusuhan, bertengkaar, mengancam orang lain, menghancurkan barang orang lain, membanting mainan atau menyerang secara fisik” (Tim Pustaka Familia, 2006:97). Namun seiring bertambahnya usia bentuk perilaku agresi tidak lagi diekspresikan dalam bentuk agresi secara fisik, tetapi lebih pada bentuk “agresivitas verbal (mengejek teman, memberikan julukan tidak menyenangkan), perilaku menghindar, ataupun penolakan” (Tim Pustaka Familia, 2006:98). Ekspresi perilaku agresi fisik pada anak-anak *toddler* digambarkan oleh Newman dan Newman (2012:218) “*The most common forms of physical aggression at this age are kicking, biting, pushing, and hitting*”. Perlu diketahui juga bahawa bentuk ekspresi perilaku agresi antara laki-laki dan perempuan tidak sama. Menurut Brendgen (dalam Santrock 2010:355) “*...that boys are more physically aggressive than girls*. Sedangkan ekspresi perilaku agresi perempuan menurut Eagly dan Steffen (dalam Santrock 2010: 355)”*...verbal aggression is more pronounced in girls than boys*”. Salah satu bentuk ekspresi agresi verbal yaitu berteriak. Selain perilaku agresi fisik dan agresi verbal, pada usia kanak-kanak juga berkembang perilaku agresi realisional (*relational aggression*). Dishion dan Piehler menyebutkan bahwa “*Relational aggression increases in middle and late childhood*” (dalam Santrock, 2010 : 236). Crick and others; Salmivalli and Peets (dalam Santrock, 2010:355) menyebutkan bahwa “*...relational aggression, which involves harming someone by manipulating a relationship*”. Tentang agresi relasional lebih jelas dikemukakan oleh Underwood (dalam Santrock, 2010: 355-356) “*Relational aggression includes such behaviors as trying to make others dislike a certain individual by spreading malicious rumors about the person*”.

Setelah menjelaskan pengartian agresi, bentuk ekspresi perilaku agresi dan juga dasar yang mendorong ekspresi perilaku agresi tersebut muncul. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana anak mempeoleh perilaku agresi tersebut?

Bagaimana perilaku agresi tersebut dimiliki oleh anak atau bagaimana anak memperolehnya, menurut Hawadi (2001: 55) ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku agresi pada anak yaitu “faktor yang berasal dari dalam diri dan dari luar diri anak”. *Pertama*, faktor yang berasal dari dalam diri anak. “Pada dasarnya, berkelahi adalah insting yang universal ada dalam diri setiap manusia. Frustrasi dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dorongan agresif. Anak akan beraksi agresif jika mendapatkan hambatan dalam memuaskan keinginannya”. *Kedua*, faktor dari luar diri anak. Perilaku agresif didapat anak karena ada contoh dari lingkungan sekitarnya, bisa orang tua, paman, bibi atau saudara kandung maupun temannya sendiri. Jadi perilaku agresi itu karena mereka pelajari dari sekitarnya. Film yang bertemakan kekerasan yang mereka tonton juga bisa menyebabkan perilaku agresif pada anak, termasuk film kartun. Hukuman fisik yang diberikan orang tua untuk mendisiplinkan anak justru menjadi contoh bagi anak berperilaku agresif.

Menurut pandangan teori psikoanalisis, teori ini mendukung bahwa perilaku agresi merupakan akibat dari *instinctual drives*. *Sigmund Freud* berpendapat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua insting yaitu insting hidup (*eros*) dan insting kematian (*thanatos*). “**Eros**, or the life instinct, was said promote survival by directing life-sustaining activities such as breathing, eating, sex, and the fulfillment of all other bodily needs. By contrast, **Thanatos**--the death instinct--was viewed as a destructive force present in human beings that is expressed through such behavior as arson, fistfights, sadistic aggression, murder, and even masochism (harm directed against the self)” (Shaffer, 2009: 39).

Selain teori psikoanalisis, Bandura juga dalam teori belajar sosial (*social learning theory*) menjelaskan perilaku agresif pada anak. Menurut Keliat (dalam Muhith, 2015: 145) “teori belajar sosial menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil pembelajaran seseorang sejak masa kanak-kanaknya yang kemudian menjadi pola perilaku (*learned behavior*)”. Menurut Keliat (dalam Muhith, 2015: 154) “Menurut teori ini bahwa perilaku agresi tidak berbeda dengan respon-respon lain. Agresi dapat dipelajari melalui observasi atau imitasi, dan semakin sering mendapatkan penguatan, maka semakin besar kemungkinan untuk terjadi”. Observasi terhadap model memang menjadi bagian yang sangat penting dalam teori belajar sosial. Menurut Bandura (1977: 22-23) “*Modeling influences produce learning principally through their informative function*”. *Modeling* memiliki pengaruh besar dalam pembentukan perilaku seseorang, karena sebagian besar perilaku dipelajari melalui pengamatan atau observasi terhadap model. Bagaimana proses observasi

terhadap *modeling* sehingga mampu berpengaruh terhadap perilaku yang mengobservasinya. Ada empat proses dalam observasi untuk mempelajari model menurut teori belajar sosial yaitu “proses atensi (*attentional process*), proses retensi (*retentional process*), proses reproduksi penggerak (*motor reproduction process*), dan proses motivasi (*motivational process*)” (Bandura, 1977: 23). Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bagaimana perilaku agresi dimiliki oleh anak. Pertama, perilaku tersebut merupakan insting manusia yang memang dibawa sejak lahir (*inherent*), Freud menyebutnya dengan istilah *Thanatos* (insting kematian) . Kedua, perilaku agresi diperoleh anak melalui proses observasi terhadap model. Model yang berperilaku agresi yang datang dari lingkungan bisa orang tua yang bertindak kasar, teman sebaya, tokoh yang terdapat dalam tayangan televisi yang menampilkan kekerasan, dan serta lingkungan yang kondisi dalam peperangan itu juga mendorong anak berperilaku agresi.

Daftar Pustaka

- Arnet, Jeffrey Jensen (Ed). 2007. *Encyclopedia of Children Adolescents and the Media*. London : Sage Publications.
- Bandura, Albert. 1977. *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Baron, Robert A. 1977. *Human Aggression*. New York: Plenum Press.
- Brewer, Jo Ann. 2007. *Introduction To Early Childhood Education sixth edition*. United State : Person.
- Brown, Carol. 2008. *Developmental Psychology*. Singapore: Sage.
- Fathi, Bunda. 2011. *Mendidik Anak Dengan Al-Quran Sejak Janin*. Jakarta: Grasindo.
- Hawadi, Reni Akbar-. 2001. *Psikologi Perkembangan Anak. Mengenal Sikap, Bakat, dan Kemampuan Anak*. Jakarta : PT. Gramedia widiasarana Indonesia.
- <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> (diakses 20 Pebruari 2016).
- Muhith, Abdul. 2015. *Pendidikan Keperawatan Jiwa: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Newman, Babara M., dan Philip R. Newman. 2012. *Development Through Life: A Psychosocial Approach*. USA : wardsworth.
- Priyatna, Andri. 2010. *Lets End Bullying: Memahami, Mengenal dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Pressley, Michael dan Christine B. McCormick. 2007. *Child and Adolescent Development For Educator*. New York: The Guildford Press.

- Surbakti, EB. 2008. *Sudah Siapkah menikah? Panduan bagi siapa saja yang sedang dalam proses menentukan hal penting dalam hidup*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Suwaid, Muhammad. 2002. *Mendidik Anak Bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf*. 2003. Terjemahan oleh Salafuddin Abu Sayyid. Surakarta: Pustaka Arafah.
- Santrock, John W. 2010. *Life Span Development Thirteenth edition* . New York: McGraw Hill.
- Supartini, Yupi. 2004. *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC.
- Shaffer, David R. 2009. *Social and Personality Development*. USA: Wadsworth.
- Tim Pustaka Familia. 2006. *Menyikapi Perilaku Agresif Anak*. Yogyakarta: Kanisius.
- 'Ulwan, Abdullah Nashih. 2012. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Terjemahan Oleh Arif Rahman Hakim. 2015. Sukoharjo: Al-Andalus.

PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PERANANNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

Misran Rahman

Pendidikan Luar Sekolah -Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Masyarakat miskin pada suatu lokasi merupakan suatu keniscayaan. Keberadaan rakyat miskin di mana-mana tetap ada baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Bagi sebagian wilayah masyarakat miskin merupakan beban pembangunan. Oleh karena itu masyarakat miskin perlu diberdayakan.

Salah satu upaya memberdayakan rakyat miskin adalah melalui sentuhan pendidikan. Sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat tiga jalur pendidikan yaitu: pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Diantara ketiga jalur ini yang diidolakan masyarakat adalah pendidikan formal. Sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa pendidikan formal menjanjikan kesejahteraan bagi mereka, sehingga minat terhadap pendidikan formal sangat besar. Akan tetapi bagi masyarakat miskin, menempuh pendidikan formal merupakan masalah tersendiri. Meskipun saat ini gema pendidikan gratis hingga di pedesaan, namun dengan aturan pendidikan formal yang ketat maka anak-anak orang miskin mengalami kesulitan untuk mengikuti pendidikan formal sambil membantu orang tuanya. Itulah sebabnya solusi pendidikan nonformal dibutuhkan.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana peran pendidikan nonformal dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Metode yang digunakan dalam pembahasan makalah ini adalah metode analisis konseptual yang didasarkan pada regulasi dan teori. Dalam tulisan ini dikemukakan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan nonformal.

Kata kunci: *pemberdayaan, masyarakat miskin, pendidikan nonformal*

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan komunitas dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi perkembangan negara tersebut. Maju tidaknya suatu negara sangat bergantung pada karakter masyarakatnya. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan dan dikembangkan agar dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan suatu negara.

Di Indonesia, masyarakat terdiri atas beberapa kategori ekonomi. Salah satu kategorinya adalah masyarakat miskin. Meskipun terdapat perbedaan tentang kriteria masyarakat miskin, namun masyarakat miskin tersebut menyebar baik di desa maupun dikota. Masyarakat miskin dianggap sebagai penghambat pembangunan suatu negara. Meskipun demikian ,asyarakat miskin di berbagai tempat di Indonesia merupakan

suatu keniscayaan. Oleh karena itu masyarakat miskin perlu dikembangkan dan diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan pengembangan terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat tersebut. Bagi masyarakat miskin pemberdayaan merupakan upaya merubah kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Selanjutnya upaya pemberdayaan adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, tapi dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti mengembangkan masyarakat dari berbagai lini kehidupan. Namun agaknya lebih populer bahwa mengembangkan masyarakat identik dengan mengembangkan dari sudut pandang ekonomi, dalam kaitannya dengan pembangunan bahwa ekonomi merupakan penunjang dari berbagai keberhasilan pembangunan. Indikator suatu masyarakat maju juga dilihat dari tingkat kesejahteraan hidup dalam hal ini ekonomi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin adalah melalui pendidikan. Sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat tiga jalur pendidikan yaitu: pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Diantara ketiga jalur ini yang diidolakan masyarakat adalah pendidikan formal. Sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa pendidikan formal menjanjikan kesejahteraan bagi mereka, sehingga minat terhadap pendidikan formal sangat besar. Akan tetapi bagi masyarakat miskin, menempuh pendidikan formal merupakan masalah tersendiri. Meskipun saat ini gema pendidikan gratis hingga di pe-desaan, namun dengan aturan yang ada pada pendidikan formal yang ketat maka anak-anak orang miskin mengalami kesulitan untuk mengikuti pendidikan formal sambil membantu orang tuanya. Itulah sebabnya solusi pendidikan nonformal dibutuhkan.

Konsep Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal pada dasarnya adalah segala kegiatan pendidikan yang berlangsung di luar sistem persekolahan. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran, yang banyak terdapat

di Masjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua Gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya.

Selanjutnya pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Demikian pula pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik

Pendidikan Nonformal memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan suatu masyarakat terutama pemberdayaan masyarakat miskin. Peran dan fungsi Pendidikan Nonformal yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat berupaya mendorong segera terciptanya transformasi sosial agar terciptanya keseimbangan pembangunan, sehingga masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin dapat teratasi. Pemberdayaan masyarakat ini diupayakan dalam rangka menolong dan memberdayakan masyarakat miskin untuk lepas dari permasalahan yang dihadapi.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Sebagian para ahli mendefinisikan istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai pengembangan masyarakat. Salah satu ahli yang mengemukakan definisi tersebut adalah Moedzakir. Menurut Moedzakir (2008:33) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang dulu dikenal dengan istilah pengembangan masyarakat (*community development*) atau pembangunan masyarakat (*rural development*). Secara konseptual, program ini sejalan dengan tipe program developmental yang sarannya adalah komunitas. Inti kegiatan dari pemberdayaan adalah pemberian bantuan pemecahan masalah. Target keluaran adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan.

Pada dasarnya inti pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai pro-ses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Konsep pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan dan objek pasif penerima pelayanan belaka, melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan dimaksud dapat dijadikan kerangka acuan tentang mantra kekuasaan (*power*) dan kemampuan yang melingkupi arus sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Peran Pendidikan Nonformal dalam upaya memberdayakan masyarakat

Pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam sistem persekolahan atau jalur sekolah, melainkan juga di jalur luar sekolah seperti keluarga, di tengah pergaulan dan di tempat kerja. Pendidikan selain terjadi atas bantuan orang lain bisa juga terjadi sepanjang hayatnya. Pendidikan Nonformal adalah pendidikan yang mempunyai program-program dalam rangka mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat. Sasaran dari program Pendidikan Nonformal salah satunya adalah kaum miskin.

Pandangan para ahli tentang peran pendidikan nonformal dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin, Faisal (2007:8), mengemukakan bahwa program Pendidikan Nonformal pada dasarnya hanya tertuju kearah dua muara, yaitu untuk pembelajaran kaum tertinggal dan untuk pembelajaran kaum tersingkir (kaum miskin). Dalam realitas sosial, terdapat sejumlah orang atau komunitas yang secara relatif tergolong miskin. Komunitas tersebut secara absolut atau relatif adalah kelompok sasaran dari program PNF. Ketertinggalan komunitas ini bisa jadi karena tingkat

pengetahuan yang rendah, keterampilan yang tidak ada, atau sistem nilai dan sikap serta perilakunya.

Adanya komunitas atau masyarakat yang masih tergolong miskin merupakan tugas jajaran pendidikan nonformal dimana salah satu perannya adalah membebaskan komunitas miskin. Dalam upaya pembebasan masyarakat miskin, dapat dilakukan pendampingan pada kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Peran PNF sebagai pendamping sosial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat melakukan beberapa kegiatan penting sebagai berikut:

- 1) Pembentukan kelompok masyarakat agar mudah didorong dan diorganisir melselanjutnya Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber dan kemampuan mereka sendiri.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dasar dan keterampilan vokasional untuk membantu masyarakat miskin agar dapat menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan.
- 3) Manajemen diri dengan jalan mengarahkan kelompok untuk memilih pemimpin mereka sendiri dalam mengatur kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan diawali dengan membantu masyarakat dalam mengembangkan sebuah sistem, kemudian mereka diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
- 4) Mengorganisasi kelompok swadaya masyarakat yang disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya, membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Inisiatif dan keterlibatan Pendidikan Nonformal adalah merupakan upaya untuk memecah lingkaran setan kemiskinan serta sekaligus mendorong kemampuan agar secara mandiri masyarakat mampu meningkatkan taraf ekonomi serta kualitas hidupnya. Komitmen dan semangat tenaga Pendidikan Nonformal tersebut diimplementasikan melalui berbagai program pengembangan masyarakat (*community development*) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Indikator dari keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh tenaga Pendidikan Nonformal adalah terbebaskannya kaum miskin dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Penutup

1. Masyarakat miskin tersebar di wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan.
2. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mendukung pembangunan bangsa.
3. Pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui program pendidikan nonformal.
4. Diharapkan inisiatif dari tenaga pendidikan nonformal untuk terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.
5. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga pendidikan nonformal merupakan program yang diharapkan mampu mebidik sasaran dengan tepat, agar komunitas miskin mampu mandiri serta mempunyai kualitas hidup yang lebih baik.

Daftar Rujukan

- Moedzakir, Dzauji. 2008. *Metode Pembelajaran Untuk Pendidikan Luar Sekolah*. Malang : UM Press
- Faisal, S. 2007. *Pendidikan Luar Sekolah Menjawab Tugas Mulia Mengisi Pembangunan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan-STKS
- Suharto, Edi. 2004. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung : STKSPpress.
- Taufik, Tatang A. 2008. *102 Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK PENGAJIAN PADA KEGIATAN BELAJAR KEAKSARAAN FUNGSIONAL DI KABUPATEN PAMEKASAN

Mohamad Zubaidi

Pendidikan Luar sekolah-Universitas Negeri Gorontalo

zubeth@ung.ac.id

Abstract

Functional literacy is a program of literacy carried out in rural area and the target is to improve their ability in reading, writing and counting, beside that focus on their knowledge and skill. participation in learn functional literacy activity, showing loaded in such a way with nature that do not only concerning with pengajian member participation, the activity learn functional literacy that have economic value. However, the society of Bangkes which tend to loaded paternalistic with nature which related to believe inning and cultural..

Kata kunci: *Participation, andragogi, Fungsional literaci*

LATAR BELAKANG

Pada awal konsep PBH fungsional yang pernah diluncurkan pada tahun 1970 an hanya berorientasi pada cara membaca, menulis dan berhitung di tambah dengan salah satu bentuk keterampilan kejuruan, takaran operasional perkembangan program ini mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat di pedesaan. Besarnya partisipasi masyarakat terkait dengan besarnya suntikan dana pendidikan dari pemerintah. Tidak kurang fasilitas yang disediakan baik bagi pelaksana program maupun warga belajar, yang semuanya bertujuan untuk mendukung tercapainya keberhasilan program pendidikan masyarakat di pedesaan.

Pada tahun 1980 penuntasan pemberantasan buta aksara semakin intensif dan terus menerus dilakukan dengan berbagai upaya dan cara. Pelibatan seluruh lapisan masyarakatpun dilakukan, namun kenyataannya program ini samakin hari semakin tidak ada hasilnya, atau bahkan boleh dikatakan “berjalan di tempat”. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (2004: 1) mensinyalir beberapa alasan mengapa penuntasan Buta Aksara di daerah tidak berkembang dan cenderung tidak menunjukkan hasil yang maksimal. *Pertama* pendidikan masyarakat dilakukan secara terpusat, sehingga penyelenggaraan pendidikan sangat bergantung pada keputusan birokrasi. Kebergantungan pada kebijakan pusat ini, adakalanya apa yang diinstruksikan tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan yang ada di masyarakat. Kondisi

inilah yang menyebabkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan hilang, motivasi dan inisiatif untuk belajar menjadi musnah seiring berakhirnya program kegiatan. *Kedua* peran masyarakat khususnya pemerhati pendidikan keaksaraan dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan selama ini dirasa sangat minim. Sementara itu akuntabilitas penyelenggara yang biasanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat di tingkat pedesaan (LMD, BPD dll) kurang bisa di pertanggungjawabkan dan seperti tidak mempunyai beban terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan pemberantasan buta aksara. Lemahnya manajemen penyelenggaraan pembelajaran, kurangnya monitoring dan supervisi, serta tidak adanya evaluasi yang mendalam turut memperparah kondisi Program percepatan pemberantasan buta aksara yang semakin hari semakin “lemah”.

Ketiga, kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan program pemberantasan buta aksara, terutama pada hambatan-hambatan struktural juga turut berpengaruh terhadap kebijakan yang akan di ambil. Sementara perubahan eksternal yang terus berlanjut dengan kecepatan yang semakin tinggi akan semakin mempersulit dalam menentukan alternatif-alternatif pilihan yang dianggap paling tepat.

Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan belajar tidak lepas dari kurangnya intensitas pengelola pendidikan masyarakat dalam memperkenalkan dan memasyarakatkan program yang ditawarkan pada masyarakat kurang maksimal dilakukan, akibatnya program inipun tidak lepas dari pandangan miring dari beberapa praktisi pendidikan di Kabupaten Pamekasan, yang hanya melihat dari sisi kuantitas di banding dari sisi kualitas.

Terlepas dari persoalan karakter masyarakat Madura yang pada umumnya masih bersifat paternalistik. Kegiatan program keaksaraan fungsional dengan bingkai pengajian dalam beberapa bulan telah mampu menarik minat peserta untuk terus mengikuti kegiatan (sekalipun pada awalnya tersendat-sendat), anggota yang semula hanya dikhususkan untuk 10 orang yang dipilih mulai berkembang menjadi beberapa orang yang dengan sukarela mengikuti program keaksaraan fungsional, tanpa harus lagi menunggu perintah “pimpinan” untuk ikut kegiatan, bahkan ada yang meminta untuk diikutkan sebagai salah satu anggota keaksaraan fungsional. Program keaksaraan fungsional juga menjadi sebuah ikon suatu kelompok belajar dikalangan komunitas pengajian di Kabupaten Pamekasan, khususnya pengajian yang berada di bawah payung Muslimat Cabang Pamekasan. Pola yang dilakukan semacam ini ternyata mampu memberikan kontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan belajar keaksaraan fungsional, sekalipun mereka tanpa

dibayar, bahkan kegiatan ini menjadi bentuk kegiatan rutinitas seperti layaknya kegiatan “*ajiyan*”.

Langkah yang sangat strategis ini ternyata mulai banyak diikuti oleh desa-desa lain untuk menyelenggarakan program yang sama, dengan memanfaatkan kelompok pengajian yang memang ada dan berkembang di desa-desa di Kabupaten Pemekasan. Pada akhirnya Program ini berjalan “sesuai” dengan apa yang menjadi tujuan utama program keaksaraan fungsional, sekalipun dengan cara “menitipkan” pada kelompok pengajian (*Kamrat, Kolom*) yang ada di setiap desa.

Namun demikian, Realitas empirik partisipasi anggota kelompok pengajian pada kegiatan keaksaraan fungsional yang demikian ini tentu saja perlu dikaji secara mendalam untuk bisa memahami mengapa kenyataannya demikian, dan mengapa mereka dengan sukarela mengikuti kegiatan pembelajaran. Sekalipun pada awalnya adalah suatu “keterpaksaan” untuk belajar.

Aspek keunikan dalam kasus ini terletak pada fenomena dibalik kerelaan dan kesungguhan mereka sebagai anggota pengajian dalam berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan keaksaraan fungsional selepas mengikuti pengajian (*kolom/kamrat*), sehingga kegiatan belajar ini juga tetap eksis dan bertahan untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar sekalipun masa program ini sebenarnya sudah habis.

Apa yang melatar belakangi antusiasme peserta program keaksaraan fungsional ini, sehingga menjadi suatu bentuk kegiatan yang berkembang dan dianggap berhasil oleh Penilik dikmas di tingkat kecamatan bahkan Ka Sub din Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, merupakan kenyataan yang menjadi alasan penting ~dari sisi fakta dan fenomena~ mengapa masalah ini menarik dan mendasar untuk diangkat sebagai fokus kajian penelitian dalam kerangka Pendidikan Luar Sekolah, dan dalam perspektif teori Pendidikan Orang Dewasa (*andragogi*), yang lebih humanistik. Karenanya perlu dicari alasan-alasan yang bersifat konstruktif dan rasional terhadap fenomena dimaksud.

Penelitian ini pada dasarnya memfokuskan pada realitas empirik partisipasi masyarakat (anggota *kamrat, kolom atau muslimatan*) dalam mengikuti program keaksaraan fungsional. Realitas empirik tersebut mencakup wujud partisipasi dalam mengikuti program keaksaraan fungsional. Mengapa mereka dengan sukarela mengikuti program belajar keaksaraan fungsional sehingga tetap eksis dan berjalan, serta bagaimana sebenarnya pola partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan belajar tersebut sehingga bisa berkembang dalam konteks keanggotaanya.

Seiring dengan fokus masalah yang akan diungkap tersebut ada dua masalah pokok yang hendak ditelaah secara mendalam dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apa sebenarnya makna dibalik partisipasi anggota kelompok pengajian dalam kegiatan belajar keaksaraan fungsional, sehingga dapat tetap eksis dan berjalan sekalipun program belajar yang dicanangkan telah habis? (2) Alasan-alasan (*reason*) rasional apakah yang dilakukan oleh anggota kelompok pengajian dalam mengikuti kegiatan belajar program Keaksaraan Fungsional? karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara jelas tentang : (1) Makna dibalik partisipasi anggota kelompok pengajian dalam kegiatan belajar keaksaraan fungsional, sehingga tetap eksis dan lestari sekalipun program telah habis? (2) Secara konstruktif, alasan-alasan rasional apa yang mendasari mereka untuk ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada kelompok keaksaraan fungsional yang mereka ikuti?

Disamping itu pula temuan terhadap akar makna dibalik partisipasi kegiatan belajar keaksaraan fungsional yang dilaksanakan oleh anggota pengajian, bisa menjadi acuan serta dapat memberikan kontribusi praktis pada pengambilan kebijakan untuk program pembelajaran masyarakat yang hendak dilakukan pemerintah atau penyelenggara pendidikan masyarakat di Madura saat ini maupun pada masa-masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memahami makna terhadap fenomena partisipasi belajar yang terjadi pada kelompok keaksaraan fungsional yang ada pada kelompok pengajian. karena itu, proses pemahaman dalam penelitian ini tidak dilakukan secara deduktif, melainkan induktif. Karena pada dasarnya penelitian ini tidak dilakukan untuk menguji sebuah hipotesis. Maka, data lapangan (*grounded research*) menjadi data utama. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada ciri pokok penelitian kualitatif, dimana penemuan makna akan menjadi ciri utama, karena makna dalam penelitian ini lebih esensial. Dengan demikian penelitian ini, akan lebih mementingkan kedalaman data dibanding keluasan cakupan penelitian.

Untuk menjawab segala masalah dan tujuan penelitian ini, proses pengumpulan data digunakan beberapa strategi: *Pertama* akan dilakukan eksplorasi atau observasi pendahuluan secara umum, observasi ini penting dilakukan, guna memperoleh data awal. *Kedua*, observasi terfokus. tahap observasi terfokus dilakukan dengan pendekatan *active participant observation*. proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*depth interview*) secara siklus sampai

terlihat elemen-elemen konstruktif yang bersifat maknawi ditemukan. Untuk itu, dalam proses wawancara akan dilakukan secara bergulir dengan mengikuti prinsip-prinsip *Snow ball sampling*. *Ketiga* pengecekan keabsahan data. Untuk melihat keabsahan data, peneliti akan berusaha membandingkan data yang satu dengan data yang lain, dari data yang di peroleh maupun data yang datang dari luar. Karenanya dalam pengecekan keabsahan data ini peneliti menggunakan pendekatan *triangulasi*. *Keempat* analisis data. Digunakan pendekatan analisa *domain* dan analisa *taksonomis*. Dari proses analisa tersebut, dilakukan proses penafsiran terhadap data dan akan ditetapkan menjadi suatu kesimpulan (tema) terhadap hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

Cerminan masyarakat Madura yang begitu paternalistik, tercermin pula pada masyarakat desa Bangkes tempat penelitian ini dilakukan. Seperti yang telah di kemukakan pada bagian terdahulu, bahwa orang Madura adalah Islam, demikian halnya masyarakat Bangkes. Tidak dijumpai seorangpun yang beragama di luar Islam. Ketaatan sebagai penganut agama Islam tercermin dalam simbol-simbol budaya mereka, disamping keaktifan mereka dalam menjalankan ibadah sunnah, serta sosialisasi nilai-nilai agama secara intensif dalam prilaku keseharian mereka.

Pola sosialisasi yang dilakukan di pesantren oleh kyai pada santrinya, hubungan kyai dan santripun terjalin menjadi hubungan batin dan sosial yang kuat dan tidak mudah luntur. Rozaki (2004) menengarai bahwa kyai memperoleh dukungan sosial, ekonomi dan finansial dari masyarakat, terutama mereka yang pernah menjadi santrinya, sementara masyarakat memperoleh pengetahuan agama sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa kedekatan penduduk dengan kyai sering kali menimbulkan prestice sosial tersendiri, sehingga memunculkan kebanggaan tersendiri.

Sementara itu, sosialisasi nilai-nilai agama untuk kalangan masyarakat luas dilakukan melalui pengajian-pengajian. Dan yang mempunyai peran besar dalam mensosialisasikan kegiatan ini adalah para kyai *langgârân*, sosok kyai yang lebih banyak berkecimpung di kalangan masyarakat akar rumput. Kegiatan pengajian yang bersifat kelompok ini biasanya dilaksanakan secara berkala, baik mingguan atau bulanan. Pengajian di desa Bangkes dikenal dengan istilah *kamrad*, *kolom*, *ajian*, *muslimatan* dan sebagian lain mengatakan *Diba*’.

Pengajian *muslimatan* adalah salah satu bentuk kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh kaum perempuan. Pengajian ini dilaksanakan pada hari selasa sore,

karenanya pengajian ini juga disebut oleh sebagian orang dengan sebutan *kolom slasaan*.

Beberapa pandangan tentang partisipasi selalu dikaitkan dengan keikutsertaan masyarakat secara sukarela, sementara itu, sebagian lagi mengatakan bahwa besarnya partisipasi dalam masyarakat akan bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat itu sendiri, dalam artian bahwa masyarakat akan berpartisipasi tergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan yang ia rasakan. Semakin besar pemenuhan kebutuhan yang ia dapat, maka semakin besar ia akan berpartisipasi, namun sebaliknya jika sedikit keuntungan yang ia dapat dari kebutuhan yang ia rasakan, maka semakin kecil partisipasi yang ia lakukan. Penelitian Nuril Huda tentang partisipasi pengusaha kecil dimaknai sebagai suatu bentuk kesempatan untuk memperoleh peluang untuk mendapatkan modal usaha.

Partisipasi oleh para ahli juga dikaitkan dengan persoalan pelibatan masyarakat dalam suatu aktifitas yang terorganisir tanpa tendensi seperti yang dikemukakan oleh Zimmerman and Rappaport (Eklund L. 1999; 36) "*participate without pay in order to achieve a common goal*". Namun apapun alasannya, partisipasi yang ditimbulkan akan melibatkan motif seseorang yang selalu timbul dari dalam diri individu itu sendiri, baik karena faktor intern atau ekstern. Motif yang ditimbulkan, sudah barang tentu akan melibatkan suatu tindakan yang didalamnya terdapat suatu sikap (*attitude*) mental dan emosional seseorang. Sikap mental dan emosional dalam diri seseorang akan tercermin dalam suatu symbol-simbol perilaku yang mengandung makna.

Namun kenyataan di masyarakat, terkait dengan partisipasi pada kegiatan keaksaraan fungsional pada tempat penelitian ini dilakukan memperlihatkan sedemikian sarat dengan sifat-sifat yang tidak hanya bersangkut paut dengan bentuk partisipasi anggota pengajian terhadap kegiatan keaksaraan fungsional dan aktifitas kegiatan belajar keaksaraan fungsional yang dipandang tidak mempunyai nilai ekonomis dan fungsional, namun juga sarat dengan sifat-sifat yang terkait dengan keberagaman dan budaya yang memang melekat pada kebanyakan masyarakat Madura yang cenderung paternalistik. Seperti misalnya partisipasi mereka (warga belajar) dalam mengikuti kegiatan belajar keaksaraan fungsional tidak hanya sekedar dimaknai sebagai suatu bentuk kesukarelaan untuk sekedar ikut belajar membaca, menulis, dan berhitung, namun lebih dari itu keikutsertaan mereka dalam kegiatan belajar dimaknai sebagai suatu bentuk kepatuhan kepada sang guru yang menyuruh mereka "*epakon*" untuk ikut belajar keaksaraan fungsional. Ini tercermin bagaimana

konsep mereka dalam menjelaskan kepatuhan atas perintah sang guru kedalam bentuk symbol ke “takdzim” an pada seorang guru yang telah memberikan bimbingan pada mereka. Guru dalam konteks ini adalah sosok kyai/nyai. Berangkat dari ke “takdzim”an mereka (warga belajar) dalam mengikuti kegiatan belajar dimaknai sebagai suatu yang mengandung nilai “*barokah*”, yang pada akhirnya dipercaya akan memperoleh keuntungan di dunia dan akhirat. Sebaliknya jika tidak mengikuti apa yang disuruh “*epakon*” nyaih/kyai, atau dengan kata lain memBangkesng, maka dipercaya akan memperoleh kerugian baik di dunia dan akhirat.

Bentuk kepatuhan atas “perintah” kyai/nyai yang diyakini akan mendatangkan *berkah dari Tuhan* dikemudian hari dikalangan masyarakat Bangkes, mencerminkan bahwa sebenarnya posisi kyai/nyai menjadi *figure sentral* yang tidak bisa dilepaskan dari segala aktifitas kehidupan sehari-hari. Kondisi ini juga dibuktikan oleh hasil penelitian Mohamad Molik (1992; 108) tentang orientasi nilai budaya orang Madura di Bangkeslan yang menempatkan empat fungsi keberadaan ulama/kyai, yaitu; (1) sebagai tempat bertanya tentang masalah-masalah agama; (2) sebagai figur ayah, tempat mengadu dan ketentraman batin; (3) sebagai penghubung dalam arti mempersatukan warga; (4) sebagai penasihat rokhani yang dijalankan melalui acara pengajian.

Konsep kyai/nyai yang diyakini membawa “barokah” dari Tuhan dengan jalan mematuhi segala apa yang disarankan “*epakon*”, dengan meminjam istilah “berkah” dari Faisal (1998, 342) mengingatkan pada konsep “berkah” yang dikemukakan oleh Weber tentang etika penganut Protestan. Namun apakah temuan lapangan tempat penelitian ini dilakukan mempunyai kesamaan atau perbedaan dengan konsep yang dikemukakan Weber, kiranya perlu penelitian dan diskusi mendalam diluar konteks penelitian ini. Namun demikian konsep Weber di “pinjam” dalam pembahasan ini, karena tesis Weber dalam tindakan sosial dari suatu masyarakat tidak lepas dari ide-ide agama yang dianut dari suatu masyarakat, khususnya tentang nilai-nilai agama Protestan (*the values of Protestantism*) (Halper. Charles L. 1989; 59). Demikian halnya dengan temuan atas tindakan partisipasi masyarakat Bangkes terhadap kegiatan keaksaraan fungsional tidak lepas dengan ide-ide yang terkait dengan keberagamaan yang dianut oleh masyarakat Bangkes (kelompok pengajian).

Pada tesis Weber, etika Protestan memberi tekanan pada usaha menghindari kemalasan atau kenikmatan semauanya, dan menekankan kerajinan dalam melaksanakan tugas dalam semua segi kehidupan, khususnya dalam pekerjaan dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Dengan demikian, Weber lebih memperlihatkan

bahwa “berkah” dari Tuhan akan diperoleh dengan jalan bekerja keras; kesuksesan hidup di dunia sebagai suatu kemungkinan untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan kelak. Sukses dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh pekerjaan, sebagai pertanda bahwa mereka terpilih dalam mendapatkan berkah dari Tuhan, dan mereka yakin bahwa tidak mungkin seorang individu akan mendapatkan berkah jika tidak terpilih. Dengan demikian secara teoritis sikap fatalistic yang berhubungan dengan keselamatan diubah menjadi suatu komitmen yang sangat mendorong penganut protestan untuk membuktikan diri dengan keberhasilan dalam bidang ekonomi. Dari apa yang telah disebutkan tersebut nampak bahwa etika nilai-nilai agama protestan yang dilihat oleh Weber memperlihatkan suatu orientasi agama yang bersifat *asketik* dalam dunia (*inner worldly*). Asketik dalam dunia menurut Johnson (1988, 240) harus dimengerti sebagai suatu yang muncul dari keyakinan agama yang murni, yang berhubungan dengan peran gereja yang sebenarnya dalam fungsinya sebagai perantara antara individu dengan Allah. Sementara konsep “berkah” bagi kalangan masyarakat Bangkes akan diperoleh manakala ia mau mengikuti “perintah” kyai/nyai.

Kepatuhan atas perintah kyai/nyai yang diyakini sebagai orang yang lebih dekat dengan Tuhan dan mampu menjadi “perantara” antara dirinya sebagai manusia biasa dengan Tuhan, dimaknai akan memberikan “berkah” dalam segala aktifitas kehidupan sehari-hari selama hidup di dunia. Jika ia berhasil dalam menjalani aktifitas kehidupan didunia, maka diyakini sebagai suatu bentuk “keberkahan” dari Tuhan karena telah mendapat “restu” dan “doa” dari para kyai/nyai. Dengan meyakini kesuksesan yang diperoleh, sebagai pertanda bahwa hal itu merupakan kesuksesan para kyai/nyai yang telah men”doa”kan dirinya kepada Tuhan; mereka juga yakin jika dekat dengan para kyai/nyai baik dengan jalan ke”takdzim”an atau kepatuhan akan mendapatkan keselamatan baik di dunia dan akhirat. Dalam konsep ini nampak jelas bahwa etika kedekatan kyai/nyai yang mewakili agama, merupakan perangsang yang kuat dalam meningkatkan motivasi pada masyarakat yang melingkupinya untuk berpartisipasi dalam menjalankan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal berpartisipasi untuk ikut kegiatan belajar keaksaraan fungsional.

Namun apapun alasannya, apa yang terjadi pada fenomena masyarakat desa Bangkes, semakin menguatkan tesis Weber, di mana tekanan pada konsep Weber yang utama dalam tesisnya yang berhubungan dengan peran independen di mana ide-ide agama dapat memainkan peran dalam menggalakkan perubahan sosial. demikian halnya masyarakat Bangkes yang juga memperlihatkan ide-ide agama melalui kyai/nyai mampu mendorong gerakan suatu masyarakat untuk berpartisipasi dan

melakukan perubahan baik dari sisi perilaku keberagamaan maupun perilaku yang tidak berkaitan sama sekali dengan aspek keberagamaan, seperti Keaksaraan fungsional misalnya.

Dengan menempatkan kyai/nyai sebagai figure sentral dikalangan masyarakat Bangkes, semakin meyakinkan bahwa sosok individu seperti kyai/nyai yang dianggap memiliki pengetahuan di luar kemampuan manusia pada umumnya, serta diyakini mampu menghantarkan nilai “barokah” atas segala kehidupan di dunia, dapat membentuk pemaknaan tertentu tentang kategori moral, ilmu pengetahuan, perilaku yang bermanfaat atau sejenisnya di dalam masyarakat, terutama menyangkut “wilayah” keberagamaan dan pembentukan pengetahuan serta perilaku dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya.

Kemampuan sosok kyai/nyai dalam ilmu pengetahuan ~agama~ yang dimiliki kyai/nyai, melalui praktek pengajaran dan pendidikan baik dengan jalan mendirikan lembaga pendidikan agama ~semisal mendirikan madrasah diniyah dan pesantren~ serta praktek dakwah keagamaan ~misalnya dengan mendirikan kelompok pengajian~ akan dapat membentuk struktur kognitif dan afektif individu dan kelompok sosial yang melingkupinya dengan orientasi dan visi keberagamaan oleh sang kyai/nyai. Terkait dengan bentuk partisipasi kelompok pengajian pada keaksaraan fungsional masyarakat Bangkes, struktur afektif ditandai oleh tindakan yang didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar dari segala aktifitas kehidupannya, hal ini tercermin bagaimana anggota pengajian membedakan “perintah” kyai/nyai sebagai panutan mereka dengan pejabat birokrasi pemerintahan desa mulai dari “*klebun sampai apel desa*”. Jika “perintah” kyai/nyai, yang dalam istilah mereka *epakon*, dilakukan dengan sukarela tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan rasional, karena dianggap sebagai representasi dari sebuah “amanah” yang terkait dengan agama, akan sangat berbeda jika mereka di “perintah” oleh *klebun*, yang dianggap sebagai representasi kepanjangan tangan dari sebuah struktur pemerintahan ~semisal mulai dari perintah bupati, kemudian ke camat dan dilanjutkan pada *klebun*~ akan dianggap sebagai suatu bentuk urusan duniawi, maka ia akan mempertimbangkan untung ruginya atas apa yang diperintah yang dikeluarkan, atau dengan jalan melakukan “konsultasi” untung ruginya lebih dahulu dengan kyai/nyai atas perintah *klebun*. Dengan kondisi yang demikian, tidak jarang *klebun* dalam melakukan kebijakan pemerintahannya selalu ber “konsultasi” terlebih dahulu pada kyai/nyai agar segala kebijakannya dapat diikuti oleh rakyatnya.

Dalam konteks ini, nampak bahwa “cengkraman” kekuasaan kyai/nyai atas wilayah masyarakat yang melingkupinya ~sepertinya~ sangat erat kaitannya dengan teologi keberagamaan yang menunjuk pada sifat Rakhmat yang secara bebas diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa pemimpin-pemimpin agama yang kharismatik di mana dasar kepemimpinannya adalah kepercayaan bahwa mereka memiliki suatu hubungan khusus dengan Ilahi, atau malah mewujudkan karakteristik-karakteristik ilahi itu sendiri sehingga nantinya akan dipercaya sebagai “wakil” Tuhan dimuka bumi.

Kesimpulan

Partisipasi bagi orang Madura merupakan suatu bentuk kesukarelaan yang didalamnya sarat dengan pengaruh budaya yang melingkupinya. Bagi sebagian orang Madura, khususnya pada lokasi penelitian ini, mereka dikenal dengan individualisme dan mobilitas yang mampu menciptakan suatu landasan yang kokoh untuk suatu gerakan-gerakan sosial, sekalipun dalam setiap gerakan masih ada suatu bentuk ketergantungan pada sosok pimpinan masyarakat,

Temuan pada proposisi ini, berkait dengan hasil penelitian, maka sangat beralasan jika apa yang didengungkan oleh para ahli andragogi tentang teori pendidikan orang dewasa rasanya sangat “pas”; didalam pelaksanaan kegiatan belajar terdapat suasana kolegial antara sesama warga belajar dan kyai/nyai yang menjadi panutan peserta belajar; suasana yang begitu “nyaman” manakala sang kyai/nyai dalam menyampaikan materi terkait dengan masalah-masalah kehidupan sehari hari (*problem centred*); kyai/nyai dalam menyampaikan materi “kadang kala” bertindak sebagai fasilitator yang berusaha membantu warga belajar dalam segala aspek kehidupan, sekalipun didalamnya sarat dengan pengaruh budaya “hegemoni” yang melingkupinya.

Saran

Pertama hendaknya program yang ditawarkan tidak hanya sekedar program yang lebih bersifat teknikal dan kompetensi fungsional, melainkan program yang ditawarkan harus lebih bersifat kontekstual dan fungsional yang mengacu pada praktek sosial. *Kedua* hendaknya para praktisi pendidikan masyarakat dalam setiap kegiatan program mampu melihat kebutuhan yang dirasakan masyarakat di mana tempat program itu akan dilaksanakan. *Ketiga* hendaknya para praktisi pendidikan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pendidikan masyarakat, mampu melihat

karakter budaya masyarakat yang akan menjadi sasaran program. *Keempat* terkait dengan pembelajaran keaksaraan fungsional, hendaknya kegiatan pembelajaran menulis, membaca dan berhitung selalu dikaitkan dengan aspek keberagaman.

Kelima bagi para peneliti dan pemerhati tentang pendidikan orang dewasa, penelitian ini hanya penelitian sebatas penelitian awal, temuan pada takaran makna hanya sebatas pada kulit dalam, belum mencapai pada substansi makna sebenarnya, karenanya perlu ada penelitian lanjutan yang harus melibatkan pendekatan teori-teori lainnya seperti teori Antropologi sosial, psikologi sosial, sosiologi, ekonomi dan politik.

Daftar Pustaka

- Abdulkhak, Ishak. 1990. *Program Kejar Paket A Dalam Hubungannya Dengan Motivasi Mengikuti Pendidikan Lanjutan Dan Meningkatkan Pendapatan, Studi Tentang Tamatan Program Kejar Paket A1 – A 20 Di Kabupaten Bandung*. Bandung. Disertasi
- Apps. Jerold W. 1979. *Problems in Continuing Education*. United State of America: McGraw-Hill.
- Arif. Zainuddin. 1986. *Andragogi*. Bandung. Angkasa.
- _____, 1989, *Studi Mengenai Tingkat Keaksaraan di Beberapa Propensi di Indonesia*, laporan penelitian, Jakarta.
- Basleman. A. 2003. *Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Melalui PLS*. VISI, Nomor 14/TH XI/2003.
- Bogdan, R.C. and Biklen, S K. 1992. *Qualitative Research for Education, an Introduction To Theory and Methods*. Boston: Allyn And Bacon Inc., London.
- Brookfield, Stephen D. 1989. Facilitating Adult Learning. Dalam Sharan B. Maerriam and P.M. Cunningham (eds), *Handbook of Adult and Continuing Education*. (hal 201-208). San Fransisco: American Association for Adult and Continuing Education.
- Brundage. Donald H. 1980. *Adult Learning Principles and Their Application to Program Planning*. Ontario. Ministry of Education.
- Darkenwald. Gordon G. and Marriam. Sharan B. 1982. *Adult Education. Foundations of Practice*. New York: Harper & Row Publishers.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asuh Asah.
- Goutlet. Denis. 1990. *Partisipasi dalam Pembangunan*. Analisis. Tahun XIX, No 2 Maret April 1990.

- Huda, Nuril. 2003. *Pelatihan Bersifat Andragogi lebih di sukai, Kasus Partisipasi pengusaha kecil pada pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas koperasi, pengusaha kecil dan menengah propensi Jawa timur*. Tesis. Tidak diterbitkan. Malang.
- Jonge. Huub. (ed). 1989. *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi, Studi-studi interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kusnadi., Widarmi D & Raharjan, W. 2003. *Keaksaraan Fungsional di Indonesia: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta. Mustika Aksara.
- Niachooff, R.O. 1977. *Non Formal Education and The Rurar Poor*. East Lansing: M.S.U. Institute For Internationl Studies.
- Rogers. Alan. 1993. *Adults Learning for Development*. Landon: Cassell Educational Limited.
- Rozaki. Abdur. 2004. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa.Kiprah kyai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*. Yokyajarta. Pustaka Marwa.
- Soedomo. M. 1989. *Pendidikan Luar Sekolah ke Arah Pengembangan Sistem Belajar Masyarakat*. Jakarta. PPLPTK Depdikbud.

PENINGKATAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR PENDIDIKAN NONFORMAL MELALUI PENDEKATAN HEUTAGOGI

Rosdiana

Jurusan PLS-FIP Unimed

Abstrak

Kompetensi merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki pamong belajar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pendidikan nonformal membutuhkan pamong belajar yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, pengembangan sikap, dan kepribadian. Dalam pendekatan heutagogi, penting bahwa peserta didik memperoleh kompetensi yang baik. Kompetensi dapat dipahami sebagai kemampuan dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan hasil akhirnya yaitu kemampuan untuk mengambil tindakan yang tepat dan efektif untuk merumuskan dan memecahkan masalah dan terbiasa dengan perubahan. Melalui pendekatan ini, pamong belajar merangsang warga belajar untuk menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pembelajaran didesain sedemikian rupa agar warga belajar mampu mengkonstruksi pengetahuan dalam pemikirannya, mencatat pola berpikir sendiri, dan mengalami sendiri proses berpikir dalam pembelajaran.

Kata Kunci: *Kompetensi, Pamong Belajar, Pendekatan Heutagogi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kebutuhan belajar masyarakat akan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, oleh karena itu maka pendidikan nonformal membutuhkan pamong belajar yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan dengan maksud agar masyarakat mendapatkan layanan pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan belajar dan pengembangan potensi dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, pengembangan sikap, dan kepribadian.

Menurut Joesoef (2004:79), “pendidikan nonformal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat”. Kemudian Niehoff (dalam Kamil 2009:14) mendefinisikan sebagai berikut:

Nonformal education is defined for our purpose as the method of assessing the needs and interests of adults and out of school youth in developing countries

of communicating with them, motivating them with patterns, and related activities which will increase their productivity and improve their living standard.

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis oleh karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan (prosedural) dan sistemik oleh karena berlangsung dalam kondisi, di semua lingkungan yang saling mengisi. Bagi mereka yang sudah dewasa tetap dituntut adanya pengembangan diri agar kualitas kepribadian meningkat seiring dengan meningkatnya tantangan hidup yang selalu berubah. Dalam hubungan ini dikenal apa yang disebut dengan *pendidikan sepanjang hayat*. Pembentukan pribadi mencakup pembentukan cipta, rasa, dan karsa (kognitif, afektif dan psikomotorik) yang sejalan dengan perkembangan fisik.

Kompetensi merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki pamong belajar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kompetensi merupakan serangkaian kemampuan yang diperlukan pamong belajar untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan tertentu sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi pamong belajar dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang tercermin dalam bagaimana pamong belajar berpikir, bertindak dan berperilaku dalam menekuni profesinya. La Ode Tomo (2008:146), menjelaskan bahwa:

Seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksudkan dalam standar pendidikan nasional tersebut meliputi kompetensi pedagogik-andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Berkaitan dengan kompetensi pamong belajar, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian. Penelitian oleh Sukarman (2007:79), menemukan bahwa "terdapat pengaruh yang bermakna antara tingkat pendidikan, pengalaman bekerja, pelatihan, sikap terhadap profesi, dan iklim instansi kerja secara bersama-sama terhadap tingkat kompetensi pamong belajar SKB Jawa Tengah". Kemudian disebutkan bahwa, "urutan besarnya kontribusi adalah sikap terhadap profesi, iklim instansi kerja, tingkat pendidikan, pengalaman bekerja, dan yang terkecil adalah pelatihan". Penelitian lain yang berkaitan dengan kompetensi pamong belajar yaitu penelitian Melati Indri Hapsari (2008:183), menemukan bahwa "peningkatan kompetensi dilakukan dengan cara pembinaan, sekolah lanjut, magang, diklat, kursus, dan belajar mandiri".

Perkembangan kebutuhan belajar masyarakat akan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, oleh karena itu maka pendidikan nonformal membutuhkan pamong belajar yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan dengan maksud agar masyarakat mendapatkan layanan pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan belajar dan pengembangan potensi dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, pengembangan sikap, dan kepribadian.

Kompetensi Pamong Belajar

Secara yuridis formal, keberadaan pamong belajar telah diakui melalui undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab I ayat 6, dengan menegaskan bahwa:

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sebagai pendidik bagi orang dewasa, pamong belajar dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang dapat menghasilkan perubahan perilaku bagi orang dewasa yang dididiknya. Sadulloh (2011:133) menjelaskan bahwa:

Ciri utama seorang pendidik adalah kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan (kekuasaan batin mendidi) menghindari penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan merupakan suatu pancaran batin yang dapat menimbulkan pada pihak lain sikap untuk mengakui, menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian atas pengaruh tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya pasal 1, disebutkan bahwa:

Jabatan fungsional pamong belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian lebih lanjut disebutkan bahwa:

Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.

Masih berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010, selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa pamong belajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang belajar mengajar, pengkajian program, pengembangan model PNFI. Dilanjutkan pada pasal 4 dengan menyebutkan bahwa tugas pokok pamong belajar adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang PNFI.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, pada pasal 34 mengenai kompetensi pamong belajar disebutkan bahwa “Standar kompetensi pamong belajar mencakup: (a) Kompetensi pedagogik; (b) Kompetensi kepribadian; (c) Kompetensi sosial; dan (d) Kompetensi profesional”.

Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan, disebutkan bahwa:

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.

- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Kompetensi pedagogik pamong belajar adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap warga belajar, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan warga belajar untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian pamong belajar adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi warga belajar, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial pamong belajar adalah kemampuan pamong belajar sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan warga belajar, sesama pamong belajar, tenaga kependidikan, orangtua/wali warga belajar, dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional pamong belajar adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing warga belajar memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Rasid (2009:74) merinci kompetensi kepribadian pamong belajar sebagai berikut:

Tabel 2 Kompetensi Kepribadian Pamong Belajar

No	Sub Kompetensi	Indikator
1.	Mampu mengenali dan mengembangkan potensi diri dalam pendidikan nonformal	1. Memiliki pengetahuan pendidikan nonformal dan informal 2. Memiliki keterampilan pendidikan nonformal dan informal 3. Memiliki minat pendidikan nonformal dan informal
2.	Memiliki motivasi berprestasi	1. Senang mengikuti lomba 2. Semangat kerja yang tinggi 3. Gemar berinovasi dalam bidang pengembangan SDM 4. Melakukan pekerjaan dilandasi aturan hukum
3.	Mampu merumuskan dan menganalisis masalah	1. Peka terhadap masalah 2. Dapat memilih masalah yang dianggap penting 3. Menggunakan metode ilmiah
4.	Memiliki komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya	1. Memiliki rencana kerja secara periodik 2. Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya 3. Melaksanakan tugas koordinasi untuk pelaksanaan tugas 4. Menyusun laporan setiap selesai melaksanakan tugas
5.	Mampu beradaptasi terhadap lingkungan	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi 2. Melibatkan diri dalam kegiatan lingkungan sosial 3. Peka terhadap permasalahan lingkungan dan sosial

6.	Cepat tanggap terhadap sumber-sumber informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu mengikuti perkembangan informasi 2. Mampu menyaring informasi yang negatif 3. Tidak berdasar pada satu sumber informasi 4. Mampu mengumpulkan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan
----	--	--

(Rasid, 2009:74)

Selanjutnya Rasid (2009:76) merinci kompetensi sosial pamong belajar sebagai berikut:

Tabel 3 Kompetensi Sosial Pamong Belajar

No	Sub Kompetensi	Indikator
1.	Mampu berkomunikasi dengan mitra kerja serta kelompok sasaran program dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konsultasi kegiatan 2. Melakukan akad kerja sama dengan stakeholder terkait 3. Memfasilitasi rancangan pembelajaran yang disusun bersama antara warga belajar, pengelola, dan tutor
2.	Mampu bekerja sama secara tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rancangan kerja tim 2. Melaksanakan kegiatan secara tim 3. Melaksanakan evaluasi
3.	Memiliki ide yang inovatif dan kreatif untuk kesuksesan kerja tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menuangkan ide dan wawasan 2. Mampu mengaplikasikan ide
4.	Mengetahui dan memahami nilai-nilai dan kehidupan sosial budaya setempat serta dapat mengembangkannya dalam program pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu beradaptasi dengan lingkungan 2. Mampu mengadopsi keadaan lingkungan ke dalam pembelajaran
5.	Membina hubungan kekerabatan dengan baik di lingkungan warga belajar serta masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangkitkan sikap saling menghormati antar sesama warga belajar dan masyarakat 2. Membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembelajaran
6.	Bersikap terbuka dan bijaksana dalam menganggapi kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima kritik dan saran dari berbagai <i>stakeholder</i> 2. Dapat melaksanakan bimbingan dan penyuluhan

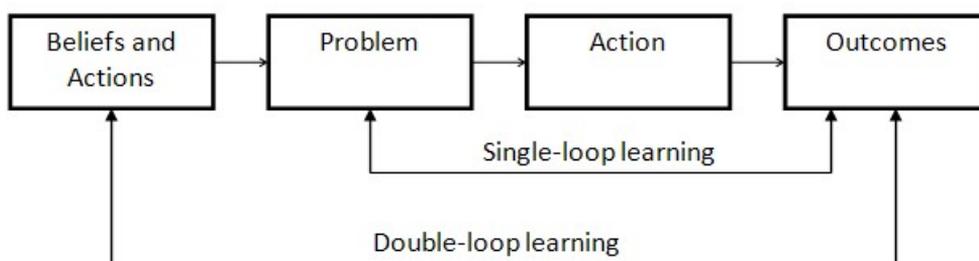
(Rasid, 2009:76)

Pendekatan Heutagogi

Heutagogy didefinisikan oleh Hase dan Kenyon sebagai “studi pembelajaran mandiri. Heutagogy menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan memandang proses pembelajaran sebagai proses aktif dan proaktif, peserta didik mendapatkan pembelajaran yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi (Hase & Kenyon, 2007, hal. 112). Sama seperti dalam pendekatan andragogi, pada heutagogi instruktur juga memfasilitasi proses

pembelajaran dengan memberikan bimbingan dan sumber daya pembelajaran, tetapi sepenuhnya proses pembelajaran, penentuan apa yang akan dipelajari, dan bagaimana hal itu akan dipelajari adalah milik peserta didik” (Hase & Kenyon, 2000; Eberle, 2009).

Konsep kunci dalam heutagogi yaitu putaran ganda pembelajaran dan refleksi diri (Argyris & Schon, 1996, dalam Hase & Kenyon, 2000). Dalam putaran ganda pembelajaran, peserta didik mempertimbangkan masalah dan tindakan yang dihasilkan dan hasil pembelajaran, kemudian merefleksikan proses pemecahan masalah dan bagaimana hal itu mempengaruhi keyakinan dan tindakan peserta didik itu sendiri (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Double-loop Learning
Sumber : Blaschke, L.M. (2012).

Dalam pembelajaran heutagogi, penting bahwa peserta didik memperoleh kompetensi yang baik (Stephenson, 1994 dalam McAuliffe et al, 2008, hal 3; Hase & Kenyon, 2000, 2007). Kompetensi dapat dipahami sebagai kemampuan dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan, sementara kemampuan ditandai dengan keyakinan peserta didik terhadap kompetensinya, dan hasil akhirnya yaitu kemampuan untuk mengambil tindakan yang tepat dan efektif untuk merumuskan dan memecahkan masalah dan terbiasa dengan perubahan "(Cairns, 2000, hal. 1, dalam Gardner, Hase, Gardner, Dunn, & Carryer, 2007, hal. 252), yang dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) self-efficacy, mengetahui bagaimana cara belajar yang baik dan mampu merefleksikan proses pembelajaran;
- 2) komunikasi dan keterampilan kerja sama secara berkelompok, terbuka, dan komunikatif;
- 3) kreativitas, khususnya dalam menerapkan kompetensi untuk situasi baru dan asing, dan mampu beradaptasi dengan fleksibel;

4) memiliki nilai-nilai positif (Hase & Kenyon, 2000; Kenyon & Hase, 2010; Gardner et al, 2007).

Apabila peserta didik mampu mereproduksi pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang asing, maka ini disebut double-looping. Kemampuan ini merupakan refleksi kompetensi diri seseorang, dan tanpa kompetensi tidak mungkin ada kemampuan. Melalui proses double-looping, peserta didik akan menyadari pendekatan belajar dimana mereka mudah beradaptasi sehingga membuat peserta didik menjadi lebih mampu. Dengan fokus pada kompetensi dan kemampuan, heutagogi bergerak selangkah lebih dekat menuju arah yang lebih baik untuk menangani kebutuhan pelajar dewasa di lingkungan kerja yang kompleks dan dinamis (Bhoryrub et al., 2010).

Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar Melalui Heutagogi

Pembelajaran dengan pendekatan konvensional dilihat dari hubungan pedagogik antara guru dan peserta didik. Pada prakteknya, biasanya selalu guru yang memutuskan apa yang dibutuhkan peserta didik dan bagaimana pengetahuan dan keterampilan harus diajarkan. Dalam tiga puluh tahun terakhir ini telah cukup sebuah revolusi dalam pendidikan melalui penelitian bagaimana orang belajar, dan apa yang dihasilkan dari proses tersebut. Disisi lain, Andragogi (Knowles, 1970) memberikan banyak pendekatan berguna untuk meningkatkan metodologi pendidikan, dan telah diterima hampir secara universal, hal ini masih memiliki korelasi dengan hubungan antara guru dan peserta didik. Pesatnya perubahan kebutuhan pendidikan dalam masyarakat dan ledakan informasi yang diterima melalui teknologi, menunjukkan bahwa sekarang dibutuhkan suatu pendekatan pendidikan dimana peserta didik itu sendiri yang menentukan apa dan bagaimana pembelajaran harus dilakukan.

Dalam menanggapi kondisi ini, telah muncul beberapa pendekatan inovatif yang mengatasi kekurangan dari pedagogis dan pendekatan andragogi. Heutagogy adalah suatu studi tentang pembelajaran mandiri yang diakumulasikan dengan beberapa ide yang disajikan oleh berbagai pendekatan belajar. Hal ini juga merupakan upaya untuk menantang beberapa ide tentang pengajaran dan pembelajaran yang masih berlaku di teacher centered learning. Dalam hal ini heutagogy melihat ke masa depan dimana mengetahui cara belajar akan menjadi keterampilan mendasar mengingat laju inovasi dan perubahan struktur masyarakat dan kebutuhan lapangan pekerjaan.

Pendekatan heutagogical mengakui kebutuhan untuk bersikap fleksibel dalam belajar dimana guru menjadi narasumber kemudian peserta didik menentukan desain pembelajaran. Dengan demikian peserta didik dapat membaca isu-isu kritis dan menentukan apa yang menarik dan relevan dengan kondisi mereka. Dalam hal ini, penilaian dilakukan melalui pengalaman belajar. Sebagai guru kita harus menyibukkan diri dengan mengembangkan kemampuan peserta didik dan tidak hanya menanamkan keterampilan berbasis disiplin dan pengetahuan.

PENUTUP

Pendekatan heutagogi diyakini efektif dan mampu meningkatkan kompetensi pamong belajar. Melalui pendekatan ini, pamong belajar merangsang warga belajar untuk menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pembelajaran didesain sedemikian rupa agar warga belajar mampu mengkonstruksi pengetahuan dalam pemikirannya, mencatat pola berpikir sendiri, dan mengalami sendiri proses berpikir dalam pembelajaran. Melalui pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya merupakan proses pentransferan pengetahuan dimana warga belajar cenderung meniru prosesnya. Mereka jarang sekali mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan gagal menerapkan pengetahuan tersebut ketika dituntut untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Daftar Pustaka

- Blaschke, L.M. (2012). *Heutagogy and lifelong learning: A review of heutagogical practice and self-determined learning*. International Review of Research in Open and Distance Learning, 13(1), 56-71. Retrieved from: <http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1076/2113>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
- Hase, S. and Kenyon, C. (2000). *From andragogy to heutagogy*. Ultibase, RMIT. <http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/dec00/hase2.htm>.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2011). *Peraturan bersama menteri pendidikan nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor 03/III/PB/2011 & nomor 8 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya*.
- La Ode Tomo. (2008). Kompetensi pendidik PAUD pada lembaga PAUD (kelompok bermain) binaan BPKB Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah VISI pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTK-PNF)*, 3,144-149.

- Melati Indri Hapasari. (2008). Pengembangan dan peningkatan kinerja pamong belajar. *Jurnal Ilmiah VISI Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal*, 3, 177-183.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya*.
- Mustofa Kamil. (2009). *Pendidikan nonformal, pengembangan melalui pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) di Indonesia (sebuah pembelajaran dari komunikasi Jepang)*. Bandung: Alfabeta.
- Rasid. (2009). Peningkatan kompetensi pamong belajar sebagai agen pemberdayaan masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal. *Jurnal Ilmiah VISI Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal*, 4, 71-80.
- Soelaiman Joesoef. (2004). *Konsep dasar pendidikan luar sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarwan Danim.(2010). *Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi*. Bandung : Alfabeta.
- Sukarman. (2007). Analisis kompetensi pamong belajar sanggar kegiatan belajar (SKB) Jawa Tengah (Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi pamong belajar). *Jurnal Ilmiah VISI Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal*, 2, 70-81.
- Uyoh Sadulloh. (2011). *Pedagogik (ilmu mendidik)*. Bandung: Alfabeta.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Ramlani Lina Sinaulan

Dosen Tetap Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

Abstrak

Ketentuan-ketentuan yang diadopsi oleh Indonesia jelas sekali tidak memiliki kesesuaian dengan *whistleblower* pada hukum asalnya di *common law*. Berdasarkan UU yang ada di dalam sistem *common law* khususnya Amerika Serikat, maka diketahui bahwa seorang *Whistleblower* tidak boleh dipecat dan dilindungi dari kriminalisasi, viktimisasi serta perlakuan yang merugikan. Karena kesalahan atau perbedaan konsep *whistleblower*, maka implementasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam praktek saat ini masih sangat jauh dari harapan. Sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum mengalami kebuntuan. Hal ini menunjukkan bahwa *integrated criminal justice system* hanya ada di bangku kuliah namun di dalam praktek sama sekali tidak berjalan.

Kata Kunci: *saksi, korban, perlindungan, hukum, whistleblower*

Abstract

The provisions adopted by Indonesia obviously have no whistleblower in conformity with the original law in common law. Based on existing law in the common law system, especially the United States, it is known that a whistleblower should not be dismissed and protected from criminalization, victimization and adverse treatment. Due to an error or discrepancy whistleblower concept, the implementation of witness protection in practice is still very far from expectations. System coordination between law enforcement agencies in deadlock. This shows that the integrated criminal justice system exists only in college but in practice they did not walk.

Keywords: *witnesses, victims, protection, law, whistleblower*

PENDAHULUAN

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai

kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya satu pasal yakni Pasal 229, sehingga dalam prakteknya dijumpai hal yang mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk menggantikan biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana.

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketehau, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Praktek Internasional, statuta pengadilan-pengadilan dan persidangan (*tribunal*) pidana internasional mengakui pentingnya kesaksian ini sebelum yurisdiksi ini dilindungi olehnya. Mereka telah mengembangkan langkah-langkah perlindungan yang akan dijamin untuk kesaksian sebelum, selama dan setelah proses pengadilan, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi hak atas pengadilan yang fair bagi terdakwa. Jurisprudensi ini merupakan sumber yang penting bagi pengadilan pidana internasional dan prosedur tentang perlindungan saksi.

Jaminan perlindungan kepada saksi (baik sebagai saksi sebagai korban maupun saksi bukan sebagai korban) sebagai bagian dari warga negara wajib diberikan oleh negara dalam proses penegakan hukum. Pasal 9 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966 mengajukan hak atas kebebasan dan keamanan seseorang. Hak ini diperkuat oleh pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (bersama dengan hak atas hidup) pasal 5 Konvensi Eropa dan pasal 7 Konvensi Amerika.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terbaikannya elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban sebagai pelapor (*whistleblower*) yang sebelumnya terserak-serak dalam beberapa peraturan.

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) oleh pemerintah merupakan kebutuhan yang mendesak saat ini dalam kerangka penegakan hukum (pidana) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dan dalam rangka mentaati prinsip-prinsip “*Good Governance*” yakni tegaknya supremasi hukum.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah perlindungan hukum *Whistleblower* dalam pengaturannya di Indonesia berkaitan dengan tuntutan balik terhadapnya jika diperbandingkan dengan sistem hukum di Amerika Serikat?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hukum

Hukum dapat difungsikan untuk mengwujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Oleh karena itu, makna dari “perlindungan hukum”, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Phillipus M. Hadjon, bahwa secara teoretis, terdapat 2 (dua) bentuk dari perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan Hukum secara Preventif

Perlindungan ini merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum secara Represif

Perlindungan jenis kedua ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Dimana wujud dari perlindungan hukum jenis kedua ini diwujudkan dalam bentuk institusi hukum, yaitu peradilan baik yang sifatnya umum maupun khusus, dan institusi pemerintahan yang berfungsi sebagai lembaga banding administrasi.

Kedudukan Saksi Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana

Pengertian umum dari *saksi* dicantumkan didalam pasal 1 butir 26 KUHAP yang menegaskan “*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang*

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil dari pemikiran saja, bukanlah keterangan saksi. Keterangan saksi baru dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila si saksi yang memberikan keterangan itu mendengar sendiri, mengalami sendiri dan melihat sendiri.

Dalam menilai kebenaran dari keterangan seorang saksi, hakim perlu memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya. Oleh karena itu, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah atau dikenal dengan *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya sehingga tidak patut dipergunakan. Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Sebagai alat yang kedua yang diatur didalam KUHAP adalah ***keterangan ahli***. Yang dimaksud dengan keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Alat bukti ini berbeda dengan keterangan saksi yang memang seorang ahli tersebut memberikan kesaksiannya, dimana keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedangkan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan (*waardering*) dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.

Dalam hal kesaksian hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli. Apa yang dicantumkan

didalam pasal 1 butir 28 KUHAP yang menjelaskan mengenai keterangan ahli belum menjelaskan tentang siapa-siapa yang dimaksudkan dengan para ahli. Penyebutan para ahli secara tegas adalah sangat perlu untuk menghindarkan perbedaan pendapat dikalangan para penegak hukum.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (*negatif wettelijk*)http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=62&tipe=penelitian_-_ftn26. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP menegaskan “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*”

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Disamping itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (*minimum bewijs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Sebagai Whistleblower

Istilah *whistleblower* secara yuridis tidak ada dalam sistem hukum di Indonesia. Sehingga tidak akan ditemui di dalam UU manapun juga di Indonesia ini yang mengatur dan mendefinisikan kata *whistleblower*. Sehingga bisa dipastikan bahwa konsep whistleblower lebih banyak diusung oleh Negara-Negara Anglo Saxon, khususnya Amerika, dan Negara-Negara *Commonwealth* (Negara-negara Jajahan Inggris).

Sang pengungkap fakta (*whistleblower*) yakni orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi dalam bahasa Inggris disebut *whistleblower* (peniup peluit) disebut demikian karena, seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak “menilang” seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul—dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran.

Di dalam berbagai literatur maka diketahui bahwa Pengungkap Fakta (*whistleblower*) adalah istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik. Termasuk di dalamnya korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja, dan masih banyak lagi.

Istilah *whistleblower* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”, disebut demikian karena sebagaimana halnya wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran. Dalam tulisan ini, istilah “peluit peluit “ diartikan sebagai orang yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi.

Menurut *Whistleblower Protection Act 1989 United States* menjelaskan “*A whistleblower is a present or former employee or member of an organization who reports misconduct.*” Dan menurut UU di Negara Bagian Amerika – Michigan, menjelaskan “*Employees who report a violation or suspected violation of state, local, or federal law.*”

Amerikat Serikat, *whistleblower* diatur dalam *Whistleblower Protection Act* (WPA) of 1989, yang merupakan Undang-Undang Whistleblower Protection yang pertama di AS dibuat pada 1912 dan dikenal sebagai Lloyd-Lafollette Act di mana seorang pegawai federal mendapat perlindungan hukum untuk memberikan Kongres keterangan ada kriminalitas yang merugikan negara. Pada tahun sembilan belas tujuh puluhan dan selanjutnya banyak lagi undang-undang yang sama dibuat oleh Kongres di berbagai bidang untuk mencegah pelanggaran hukum dan melindungi seperti air

bersih, bahan-bahan beracun, limbah, nuklir sampai corporate fraud. Berdasarkan WPA 1989 ditentukan sebagai berikut:

"Bahwa setiap pengungkapan informasi dari seorang karyawan dirahasiakan jika "cukup yakin" adanya bukti "pelanggaran hukum, aturan, atau peraturan" atau bukti "mismanagement, pemborosan keuangan, suatu penyalahgunaan wewenang, atau bahaya substansial dan spesifik terhadap kesehatan masyarakat atau keselamatan "yang dilindungi, maka pengungkapan tersebut tidak dilarang oleh hukum atau jika dibutuhkan harus dirahasiakan oleh Orde Eksekutif."

Bahkan saat ini di Amerika terdapat pengaturan whistleblower untuk pihak swasta, contohnya seperti *Pharmacy whistleblower*. *Pharmacy Whistleblower* adalah istilah yang sudah dikenal di AS, diperuntukkan bagi farmasis atau apoteker yang berani mengungkapkan tindakan perusahaannya yang melanggar hukum (biasanya perusahaan farmasi raksasa) kepada pihak yang berwenang. Jika tidak diungkapkan, niscaya pemerintah AS akan mengalami kerugian material yang besar, di samping juga bisa membahayakan masyarakat pengguna obat dan alat kesehatan.

Selama ini, peran Pharmacy Whistleblower di AS sangat signifikan. Sudah banyak perusahaan farmasi yang ditindak berkat jasa Pharmacy Whistleblower, karena perusahaan tersebut terbukti melakukan kecurangan, mengambil jutaan dolar uang bukan haknya - ataupun melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang AS.

Di dalam UU Whistleblower No 469 Tahun 1980 pada Negara Bagian Michigan, dimana UU tersebut memberikan batasan ruang lingkup sebagai berikut:

"An Act to provide protection to employees who report a violation or suspected violation of state, local, or federal law; to provide protection to employees who participate in hearings, investigations, legislative inquiries, or court actions; and to prescribe remedies and penalties."

(Terjemahan bebas → sebuah UU yang memberikan perlindungan kepada karyawan yang melaporkan adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Hukum Negara, Lokal (daerah) atau Hukum Federal; untuk memberikan perlindungan kepada karyawan-karyawan yang berpartisipasi dalam dengar pendapat, investigasi, untuk kepentingan Legislatif dan tindakan pemeriksaan Pengadilan; dan untuk menentukan upaya hukum dan pemedanaannya).

Adapun yang dimaksud dengan *employee* dalam UU tersebut adalah sebagaimana ditegaskan dalam Section 1 (a) sebagai berikut:

“Orang yang memperoleh upah atau imbalan lainnya sebagaimana tertuang di dalam kontrak, baik secara tertulis maupun lisan, tersurat maupun tersirat. Karyawan termasuk di dalamnya seseorang yang dipekerjakan oleh Negara atau Lembaga Negara lainnya kecuali yang diklasifikasikan sebagai layanan sipil.”

Seorang *Whistleblower* dilindungi dari tindakan pemecatan dan diskriminasi lainnya oleh Majikan/Pemilik Usaha, hanya karena karyawan tersebut melakukan pelaporan atas dugaan adanya pelanggaran hukum, atau ketika seorang karyawan diminta oleh Badan Publik untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, mendengar atau menjawab pertanyaan baik dari Badan Publik atau dari Pengadilan.

Sedangkan di Indonesia, hanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengeluarkan pengertian mengenai *whistleblower*. Dimana dalam KPK *Whistleblower's System* (KWS) menegaskan bahwa seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

Hingga tahun 2005, Indonesia belum secara khusus memiliki undang-undang perlindungan saksi. Di tahun 2002 aturan yang ada hanya ‘membonceng’ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan itu meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum.

Baru kemudian di tahun 2006 undang-undang perlindungan saksi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut mengatur hak-hak para saksi dan korban sehingga keberadaan para ‘pahlawan’ ini tidak lagi terancam dan dijamin oleh hukum.

Eksistensi pelapor (*whistleblower*) di dalam UU 13/2006 belumlah terdefiniskan dengan baik, sehingga dilakukanlah amandemen melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana pada Pasal 1 angka 4 telah termuat istilah “Pelapor”, yang mengandung makna bahwa “*Pelapor adalah*

orang yang memberikan informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.”

Seiring dengan diundangkannya UU tersebut, muncullah istilah *whistleblower* yang selalu didengungkan oleh LPSK dan para ahli hukum serta praktisi, khususnya para Penasehat Hukum dari tersangka/terdakwa yang memiliki informasi tentang tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga menjadi akrab di telinga kita nama-nama Susno Duadji, Agus Tjondro, M. Nazaruddin dan Endin Wahyudi. Yang sebenarnya masih banyak nama-nama selain mereka, baik sebagai saksi yang dipidanakan, pelapor yang dipidanakan ataupun saksi/pelapor yang mendapat ancaman keselamatan atas jiwa, harta dan keluarganya.

Karena permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam praktek, maka diadakan rapat koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan LPSK pada tanggal 19 Juli 2011, yang hasilnya adalah bahwa Mahkamah Agung berjanji akan mengeluarkan Surat Edaran sebagai petunjuk teknis. Maka pada tanggal 10 Agustus 2011 dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Dari judul SEMA tersebut jelaslah bahwa Mahkamah Agung memberikan penafsiran bahwa Pelapor adalah seorang *whistleblower*. Namun pengertian *whistleblower* tersebut harus sesuai dengan pedoman yang dimuat di dalam SEMA tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam point 8 (a) SEMA No. 4/2011, yang menegaskan sebagai berikut:

“Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.”

Yang kemudian menjadi permasalahan adalah, jika *whistleblower* disamakan dengan Pelapor, apakah seorang *whistleblower* memperoleh perlindungan melalui UU PSK?

Di dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat diberikan, namun perlindungan hukum tersebut hanya diberikan kepada Saksi dan Korban, bukan kepada *whistleblower* (pelapor). Namun, berdasarkan amandemen UU PSK, maka pada ditambahkan 1 ayat yaitu Pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan sebagai berikut:

“Selain saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku,

Pelapor, dan ahli termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Adapun perlindungan terhadap Pelapor yang dianggap sebagai *whistleblower* dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

	Pasal 10 UU No. 13/2006	Pasal 10 UU No. 31/2014
(1).	Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.	Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
(2).	Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.	Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3).	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.	

Maka diketahui perubahan pada Pasal 10 ayat (2) pada Amandemen UU PSK telah mengadopsi point 8 (b) SEMA No. 4/2011 yang menegaskan sebagai berikut:

“Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan oleh Terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari Terlapor.”

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengandung makna, bahwa jika perkara yang dilaporkan oleh seorang *whistleblower* selesai disidangkan, maka kemudian perkara yang dilaporkan oleh Terlapor akan dapat di proses. Sehingga seorang *whistleblower* akan menghadapi tuntutan pidana dan/atau perdata atas perkara yang ia laporkan.

Kesimpulan

Ketentuan-ketentuan yang diadopsi oleh Indonesia jelas sekali tidak memiliki kesesuaian dengan *whistleblower* pada hukum asalnya di *common law*. Berdasarkan UU yang ada di dalam sistem *common law* khususnya Amerika Serikat, maka diketahui bahwa seorang *Whistleblower* tidak boleh dipecat dan dilindungi dari kriminalisasi, viktimisasi serta perlakuan yang merugikan. Karena kesalahan atau perbedaan konsep *whistleblower*, maka implementasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam praktek saat ini masih sangat jauh dari harapan. Sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum mengalami kebuntuan. Hal ini menunjukkan bahwa *integrated criminal justice system* hanya ada di bangku kuliah namun di dalam praktek sama sekali tidak berjalan.

Menyimpangnya konsep *whistleblower* di Indonesia tersebut, justru menghilangkan makna aslinya, sehingga berakibat kepada perlindungan hukum bagi setiap orang yang hendak bersaksi sebagai *whistleblower* akan menjadi terancam. Pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia, pada hakikatnya, menunjukkan keinginan dari pembentuk Undang-undang agar setiap *whistleblower* berlaku jujur terhadap kesaksiannya. Namun, redaksional dalam pengaturan di Indonesia tersebut justru memunculkan “kemalasan” bagi institusi penegak hukum untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi keaslian data, fakta dan informasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1996.
- Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM*, Jakarta : Elsam, 2006.
- Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik (Esai-esai pilihan)*, Buku 1, Jakarta : Eslam.2001.
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung : PT.Grafitri, 2006.
- L. Paige Whitaker, *The Whistleblower Protection Act: An Overview*, Congressional Research Service: Order Code RL33918, March 12, 2007.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya. 1993.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Quentin Dempster, *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Jakarta : Elsam-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2006.

R. Tresna, *Komentor HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. (sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1992.

Artikel/Internet

<http://kws.kpk.go.id/>

Surastini Fitriasih, “*Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*”, <http://pemantauperadilan.org/perlindungan-saksi-dan-korban-surastini-fitriasih>, di download tanggal 28 November 2016.

“*Whistleblower Dan Perkembangan Demokrasi*”, Sumber: <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/371183/>, diakses tanggal 28 November 2016.

Rocky Marbun, “*SE Mahkamah Agung No. 4/2011 Cacat Hukum. Petunjuk Pelaksana Yang Buta Arah*”, Sumber: <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2011/09/21/se-mahkamah-agung-no-42011-cacat-hukum-petunjuk-pelaksana-yang-buta-arah/>, tanggal 21 September 2011, diakses tanggal 28 November 2016.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

The Whistleblower Protection Act 469 of 1980 The State of Michigan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu

DUALISME KOMPETENSI PERADILAN TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Yuhelson

Dosen Tetap Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

Abstrak

Dalam menguji suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan tidak hanya didasarkan kepada asas legalitas semata, namun berfokus kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebagaimana diketahui bahwa peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk menguji suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun hanya peradilan administrasi yang boleh mengujinya.

Kata Kunci: *Keputusan, Tindakan Administrasi, Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Kewenangan*

Abstract

In testing a decision and / or action of public administration is not only based on the principle of legality alone, but focuses on the General Principles of Good Governance. In this regard, it is well known that the general judiciary does not have the authority to examine the decisions and/or actions of public administration based on the General Principles of Good Governance, but only administrative tribunals may be tested.

Keywords: *Decision, Action Administration, Government, General Principles of Good Governance, Authority*

PENDAHULUAN

Perdebatan terhadap perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut “ASN”) seakan-akan tidak akan pernah selesai untuk selalu diperbincangkan, baik oleh kalangan praktisi hukum (Advokat-Polisi-Jaksa-Hakim) maupun di kalangan ilmuwan hukum. Euforia darurat korupsi, dalam oposisi biner ini, selalu berada dalam posisi dominan pada proses penegakan hukum di Indonesia. Pada sisi praktisi Hukum Pidana dengan dukungan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) pegiat anti-korupsi dan pada sisi lain diisi oleh para ilmuwan Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dari tahun ke tahun angka proses hukum terhadap ASN yang terjerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut “**UU No. 31/1999**”), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terus bertambah dan bukan berkurang. Salah satu penyebabnya adalah masuknya perilaku suap menyuap sebagai salah satu Tindak Pidana Korupsi. Sehingga akumulasi dan statistik pelaku Tindak Pidana Korupsi semakin meningkat.

Penegakan hukum secara represif tersebut memunculkan ketakutan para Kepala Daerah dalam menggunakan anggaran yang telah disiapkan guna pembangunan. Jumlah anggaran yang disimpan di bank mengalami peningkatan, dari sebelumnya Rp 253 triliun di April 2015, kini menjadi Rp 273 triliun. penyerapan anggaran melalui belanja modal saat ini baru mencapai 20 persen. Adapun keseluruhan penyerapan baru mencapai 50 persen lebih. Artinya, di daerah itu uang negara dan BUMN itu ada, namun tidak berani digunakan, oleh karena, adanya ketakutan dikriminalisasi dalam persoalan hukum. Terhadap hal tersebut, ada pihak-pihak yang berpandangan bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang mengada-ada. Misalnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut “**KPK**”) Alexander Marwata menegaskan menilai persoalan kepala daerah yang takut kebijakan menggunakan anggaran justru dianggap sebagai korupsi, tidak perlu terjadi apabila dikerjakan sesuai ketentuan. Menurut Alexander Marwata, setiap kepala daerah tidak perlu takut dikriminalisasi apabila mereka tidak melakukan intervensi di tingkat operasional penggunaan anggaran.

Pada penelitian ini tidak memfokuskan kepada permasalahan alasan-alasan terjadinya suatu pelanggaran tersebut. Namun, hal yang menarik dari kegundah-gulanaan dari Kepala Daerah tersebut direspon oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo meminta penegak hukum tak memidanakan pejabat berdasarkan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Hal itu ia instruksikan guna mempercepat penyerapan anggaran di daerah-daerah yang seret belakangan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana pada akhirnya memberikan dampak pula kepada pelaksanaan pembangunan nasional.

Menarik untuk dicermati permintaan dari Presiden Joko Widodo tersebut, dimana hal tersebut akan mengingatkan kepada kita mengenai bagaimanakah hukum asal dari suatu “kebijakan” yang dikeluarkan oleh seorang penyelenggara negara. Yang menarik dari ungkapan Presiden Joko Widodo adalah didasarkan pada argumentasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut “UU No. 30/2014”), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut “UU No. 5/2014”) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (untuk selanjutnya disebut “UU No. 17/2003”).

Menarik untuk dikaji, jika dikaitkan dengan penulisan karya ilmiah ini, adalah landasan filosofi dari disahkan dan diundangkannya UU No. 30/2014. Dimana dijelaskan oleh M. Halid Nuhjad bahwa UU No. 30/2014 merupakan *general administrative law* (Hukum Administrasi Umum). Pendapat yang menyatakan bahwa hukum administrasi tidak dapat dikodifikasi pada saat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena baik di Belanda maupun di Indonesia sudah menyadari bahwa kekeliruan tentang konsep hukum administrasi yang dianut selama ini, yaitu dengan mengembangkan konsep hukum administrasi yang tidak lagi sektoral melainkan sudah berkembang menjadi hukum administrasi umum (*general administrative law*) yaitu menelusuri bagian-bagian khusus hukum administrasi sektoral dengan mencari titik temu antara berbagai komponen seperti yang telah dilakukan dengan memberikan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara secara umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU No. 5/1986”) dalam arti dapat diberlakukan di semua sektor, sehingga setiap lembaga atau institusi menggunakan rumusan umum yang sama secara yuridis yang dinamakan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut pula termuat dalam Konsideran huruf c UU No. 30/2014 yang menegaskan sebagai berikut:

“bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Landasan filosofis tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 30/2014 yang menegaskan “*Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;*” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum materiil dari Hukum Administrasi Negara telah ditetapkan dalam UU No. 30/2014 tersebut. Keunikan dari UU No. 30/2014 adalah meletakkan kompetensi penyelesaian sengketa

pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketya adalah kewenangan dan diskresi baik dalam bentuk keputusan maupun tindakan hukum.

Keberadaan PTUN yang semula hanya diatur dalam UU No. 5/1986 telah beberapa kali mengalami perluasan objek pemeriksaannya. Setelah yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut “UU No. 14/2008”) telah memberikan sinyalemen kepada setiap penyelenggara negara untuk mentaati Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Transparansi sehingga mampu mengontrol profesionalitas dan kredibilitas dari kinerja penyelenggara negara, saat ini kembali diperluas melalui UU No. 30/2014.

Eksistensi peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara (PTUN) sebagai salah satu badan peradilan yang memberi akses keadilan di bidang tata usaha negara adalah merupakan salah satu pilar negara hukum. Peran PTUN sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari tindakan pemerintahan yang melanggar hukum merupakan bentuk kontrol yuridis (*judicial control*) terhadap penyalahgunaan wewenang ataupun perbuatan sewenang-wenang. Ungkapan dari Phillipun M. Hadjon tersebut merupakan filosofis dasar dari keberadaan PTUN sebagai peradilan administrasi. Oleh karena, dalam PTUN tidak hanya memeriksa berdasarkan *wetsmatigeheid* namun pula *rechtsmatigeheid*, sehingga suatu kebijakan berupa keputusan dan tindakan administrasi penyelenggara negara patut diuji melalui peradilan administrasi.

Eksistensi UU No. 30/2014 tersebut semakin pelik, ketika dikaitkan dengan akibat dari adanya suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi yang memunculkan kerugian keuangan negara. Antinomi norma kemudian muncul saat bersinggungan dengan UU No. 31/1999 yang secara bersamaan mengatur objek pemeriksaan yang sama yaitu “penyalahgunaan wewenang”. Sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 yang menegaskan “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,,,,,*”

Antinomi norma tersebut, justru semakin mempertajam perbedaan pendapat baik dikalangan praktisi hukum maupun akademisi hukum itu sendiri. Oleh karena itu lah, menurut Penulis menjadi menarik untuk dituangkan dalam bentuk karya ilmiah guna memperkaya wacana diskursus ilmiah terhadap konvergensi diversitas antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah menentukan kompetensi peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu kebijakan ASN yang memunculkan kerugian keuangan negara?”

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Kerugian Keuangan Negara

Pada umumnya, pengetahuan kita terhadap frase “kerugian keuangan negara” selalu diarahkan kepada Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, tidaklah mungkin dilepaskan dari perjalanan formulasi kebijakan Hukum Pidana dalam bidang penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan korupsi lebih teraktualisasi dengan diterbitkannya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, sesungguhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan jauh sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 1998 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 24/Prp/1960); dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3/1971).

Sejak dikeluarkannya TAP MPR No. IX/1998, Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan makna dari “kerugian keuangan negara”, hanya memuat makna dari “keuangan negara” saja. Dalam penjelasan umum dari UU No. 3/1971 menjelaskan bahwa “*Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran*”

dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain.”

Sedangkan dalam Penjelasan Umum dari UU No. 31/1999 pula menegaskan sebagai berikut:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;*
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”*

Pada pengaturan lebih lanjut, melalui UU No. 17/2003 kembali didefinisikan makna dari “keuangan negara” yaitu pada Pasal 1 angka 1 dengan menegaskan *“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”* Sedangkan tata cara pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (untuk selanjutnya disebut **“UU No. 1/2004”**).

Berkaitan dengan subyek hukum yang dituju sebagai pihak yang harus bertanggungjawab memiliki inkonsistensi norma. Pada UU No. 3/1971, subjek hukum yang dituju adalah “barangsiapa” dan “Pegawai Negeri”. Sedangkan pada UU No. 31/1999, subjek hukum yang dituju adalah “barangsiapa”, “korporasi” dan “Pegawai Negeri”. Sedangkan dalam UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 memiliki subjek hukum yang telah dikualifikasikan secara khusus.

Secara definitif diatur dalam Pasal 34 *jo* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dimana berdasarkan Pasal 34 UU 17/2003 subyek hukum yang dapat diancam pidana dan denda adalah:

1. Menteri
2. Pimpinan Lembaga
3. Gubernur
4. Bupati
5. Walikota

6. Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara
7. Pimpinan Unit Organisasi Lembaga
8. Pimpinan Unit Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sedangkan pada Pasal 35 UU 17/2003 memberikan pedoman penyelesaian mengenai kerugian negara dengan memberikan sanksi penggantian kerugian negara, yaitu:

1. Setiap Pejabat Negara dan Pegawai bukan Bendahara;
2. Bendahara; penggantian kerugian hingga mencapai kepada harta pribadinya.

Pengaturan pada Pasal 35 UU 17/2003 tersebut diperkuat melalui Pasal 59 ayat (1) UU No. 1/2004, dimana ditegaskan Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara dan pejabat lain yang memunculkan kerugian negara secara langsung sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian kewajiban diwajibkan mengganti kerugian tersebut, melalui tuntutan ganti kerugian oleh Atasan langsung.

Hegemoni Hukum Pidana Dalam Administrative Penal Law (Hukum Pidana Administrasi)

Secara terminologi, Barda Nawawi Arief mengulas secara lengkap transformasi antara Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi Negara, dimana ditegaskan bahwa “Hukum pidana administrasi” dapat dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”. Oleh karena itu, “kejahatan/tindak pidana administrasi (*“administrative crime”*) dinyatakan sebagai (Black; 1990; 45): “*An offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction.*” Disamping itu, karena hukum administrasi pada dasarnya “hukum mengatur atau hukum pengaturan” (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan “kekuasaan mengatur/pengaturan” (*“regulatory powers”*), maka “hukum pidana administrasi” sering disebut pula “hukum pidana (mengenai) pengaturan atau “hukum pidana dari aturan-aturan” (*ordnungstrafrecht/ordeningstrafrecht*). Selain itu, karena istilah “hukum administrasi” terkait juga dengan tata pemerintahan (sehingga istilah “hukum administrasi negara” sering juga disebut “hukum tata pemerintahan”), maka istilah “hukum pidana administrasi” juga ada yang menyebutnya sebagai “hukum pidana pemerintahan” sehingga dikenal pula istilah “*Verwaltungsstrafrecht*” (“*Verwaltungs*” = “administrasi/ pemerintahan”) dan “*Berstuursstrafrecht*” (“*bestuur* = pemerintahan).

Pandangan ahli hukum lain yang memberikan pengertian dari istilah Hukum Pidana Administrasi adalah Mardjono Reksodiputro yang menjelaskan kewajiban

negara modern untuk secara lebih luas melindungi kesejahteraan masyarakatnya, menimbulkan berbagai pengaturan mengenai misalnya: bidang keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dan tempat pemukiman, dalam pengolahan makanan dan obat-obatan, dan sebagainya. Meskipun pengaturan dapat disertai sanksi perdata ataupun sanksi administratif, namun terdapat kecenderungan kuat untuk mengaturnya pula melalui ketentuan-ketentuan (sanksi) pidana. Yang terakhir inilah yang sering dinamakan “*administrative penal law*” atau “*verwaltungsstrafrecht*”. Untuk bidang hukum pidana inilah, konsep “*strict liability*” dipergunakan. Hampir senada pendapat Mardjono Reksodiputro, dimana Muladi menjelaskan fungsi, tugas dan tujuan hukum pidana dalam kerangka kerja alat-alat pemerintahan pada era modern dan globalisasi. Menurut Muladi, Hukum Pidana, dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional digunakan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam mengelola kehidupan masyarakat. Lebih jauh dijelaskan bahwa Hukum Pidana dipergunakan secara maksimal guna mendukung norma hukum administratif dalam berbagai hal. Inilah yang dinamakan *administrative penal law (verwaltungsstrafrecht)*, yang termasuk dalam kerangka *public welfare offences (ordnungswidrigkeiten)*.

Guna menjernihkan permasalahan tersebut, sebaiknya dikembalikan kepada akar ilmu hukum pada masa-masa sebelumnya, dimana jika mengacu kepada pendapat-pendapat ahli hukum Perancis terdahulu, seperti Macarel, de Gerando dan Trolley, maka diketahui bahwa hukum administratif mengatur kepentingan individu dalam hubungannya dengan negara. Oleh karena itu, menurut Romeyn bahwa hukum pidana berfungsi sebagai “hukum pembantu” atau *hulprecht* bagi hukum administratif, yaitu setiap ketentuan dalam Hukum Administrasi Negara selalu disertai sanksi pidana supaya ketentuan Hukum Administrasi Negara tersebut ditaati oleh masyarakat. Bahkan secara lebih tegas dijelaskan oleh Frank von Litz menjelaskan bahwa hukum pidana itu merupakan substitusi dari ranah hukum lainnya. G.E. Mulder menjelaskan bahwa Hukum Pidana merupakan lingkaran terluar dari hukum yang harus diberlakukan. Demikian pula Merkel menegaskan bahwa tempat Hukum Pidana adalah selalu subsider terhadap obyek hukum lainnya. Demikian pula Modderman yang memberikan penjelasan bahwa Negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lainnya. Bahkan secara lebih tegas Mr. Modderman dan Van Bemmelen, bahwa ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, kewenangan pembuatan kebijakan melekat pada jabatan

pemerintahan (*inherent aan het bestuur*) yang dijalankan oleh pejabat pemerintahan, dan ternyata telah menyebabkan banyak pejabat yang menjadi tersangka bahkan terpidana. Di sisi lain, dianut suatu pendapat bahwa kebijakan pemerintah itu tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Arifin P. Soeria Atmadja mengatakan, suatu kebijakan tidak mungkin diajukan ke pengadilan apalagi dikenakan hukum pidana karena dasar hukum kebijakan yang akan menjadi dasar hukum penuntutannya tidak ada. Hal ini disebabkan suatu kebijakan pada umumnya berjalan tidak seiring atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, kebijakan penguasa tidak dapat digugat didasarkan pada prinsip "*beleidsvrijheid*" yang ada pada penguasa. *Beleidsvrijheid* penguasa meliputi; tugas-tugas militer, politonil, hubungan luar negeri, pekerjaan untuk kepentingan umum, keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu atau dalam mengambil tindakan darurat. Sementara Amarullah Salim mengatakan bahwa perbuatan kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilai sesuai dengan yurisprudensi dan ilmu hukum.

Parameter/Ukuran Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan

Asas negara hukum yang memunculkan konsep *welfare state* (*welfare staats*/negara hukum kesejahteraan) menuntut negara untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan legislasi bagi negara intervensionis pada abad XX. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Dalam mencapai tujuan negara sebagai tujuan akhir dari fungsi penyelenggaraan negara sehingga kekuasaan dan kewenangan negara menjadi meluas khususnya dalam banyak kepentingan yang dahulu diselenggarakan orang partikelir (swasta), sekarang diselenggarakan pemerintah karena kepentingan-kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan ini oleh Lemaire disebut sebagai "*bestuurszorg*" yaitu tugas dan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum. *Bestuurszorg* itu meliputi segala lapangan kemasyarakatan dimana-mana turut serta pemerintah secara aktif dalam pergaulan manusia, dirasa perlu. *Bestuurszorg* itu menjadi tugas pemerintah "*welfare state*" yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat dan yang telah meninggalkan *azas staatsonthouding* (pemerintah bersikap pasif). Dapat

dikatakan bahwa adanya *bestuurszorg* tersebut menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu *welfare state*.

Berkaitan dengan kegiatan kenegaraan tersebut nampak jelas kebutuhan atas pengorganisasi bidang-bidang pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara dalam praktek keseharian membutuhkan sistem pengorganisasian yang besar, dikarenakan bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Dalam hal tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai, melibatkan administrasi negara di dalam melaksanakan tugas-tugas servis publiknya yang sangat kompleks, rungkup lingkup yang luas, dan memasuki semua sektor kehidupan. Dalam hal administrasi negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan walaupun demikian sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum.

Keleluasaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut dikarenakan ketidakmampuan asas legalitas dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum material untuk mewujudkan kesejahteraan umum, suatu asas baru telah lahir dalam lapangan hukum administrasi negara. Asas tersebut disebut asas diskresi atau *freies ermessen*. Asas *freies ermessen* dapat dipandang sebagai asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum material dapat diwujudkan karena *freies ermessen* memberikan keleluasan bertindak kepada Pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang.

Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan Aparatur Sipil Negara tersebut ditegaskan pula di dalam Pasal 2 huruf a UU No. 5/2014 yang menegaskan “*Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. Kepastian hukum;*”

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam konteks kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), perlindungan hukum terhadap seorang ASN melalui asas *rechtmatig bestuur*. *Rechtmatig bestuur* adalah asas pemerintahan yang bertumpu atas asas negara hukum, yaitu asas legalitas. Berdasarkan asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus dilakukan pada wewenang yang sah, prosedur yang tepat dan substansi yang tepat. Setiap tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*), berdasarkan asas negara hukum dengan konsep *welfare state*, haru selalui mengacu kepada tujuan bernegara. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), adalah “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”.

Pada dasarnya keterlibatan pemerintah dalam kehidupan warga negara itu harus didasarkan pada asas legalitas, yakni harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun seiring dengan adanya cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan (*artificial defect*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kepada pemerintah diberikan kewenangan diskresi atau *ermessen*. Mendasarkan tindakan pemerintah pada asas legalitas dan diskresi sesungguhnya adalah mendasarkan tindakan itu pada wewenang. Tindakan pemerintah yang didasarkan pada asas legalitas mengandung arti mendasarkan tindakan itu pada kewenangan terikat (*gebonden bevoegheid*), sedangkan tindakan yang didasarkan pada diskresi berarti mendasarkan tindakan pemerintahan itu pada kewenangan tidak terikat. Terkait dengan adanya kewenangan adalah pertanggungjawaban, sesuai dengan prinsip “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan konsep *welfare state* memunculkan konsekuensi, yaitu intervensi pemerintah yang cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat serta digunakannya asas diskresi, menimbulkan suatu dilema.

Penggunaan Asas legalitas atau *wetmatigheid van bestuur* tersebut tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya, menurut Ridwan HR, sumber kewenangan bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Ketiga sumber kewenangan tersebut, pada hakikinya adalah berupa asas (ajaran umum) yang hidup dan tumbuh berkembang dalam ranah doktrin para ahli hukum. Sehingga, seringkali guna menilai apakah seorang pejabat pemerintahan melakukan pelanggaran atautkah tidak melakukan pelanggaran sangat bergantung kepada penjelasan dari ahli hukum. Perdebatan implementasi ajaran tersebut memunculkan kesimpangsiuran dalam menafsirkan makna dari perbuatan hukum pejabat pemerintahan, yang pada akhirnya, justru memunculkan ketidakpastian hukum.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan hak dan kewajibannya yang diklasifikasikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang jika dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang. Sehingga akibat hukum atas penggunaan diskresi tersebut adalah tidak sah. Sedangkan

keputusan yang diambil berdasarkan diskresi jika menyalahi prosedur dan substansinya dapat diklasifikasikan sebagai suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat dibatalkan. Suatu *beleids* tidak dapat diuji melalui *wetmatigheid*, karena memang tidak akan ada dasar peraturan perundang-undangan untuk keputusan membuat *beleids* tersebut. Oleh karena itu, pengujian terhadap *beleids* lebih diarahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam praktek, *beleids* dapat saja berupa keputusan, instruksi, edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan ada yang berbentuk peraturan.

Untuk menjamin penggunaan asas diskresi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut, maka Pasal 24 UU No. 30/2014 memberikan batasan-batasan dalam penggunaan asas diskresi, yaitu:

1. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU No. 30/2014, yaitu:
 - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Mengisi kekosongan hukum;
 - c. Memberikan kepastian hukum; dan
 - d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
2. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
4. Berdasarkan alasan-alasan yang obyektif;
5. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
6. Dilakukan dengan itikad baik.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan hak dan kewajibannya, dalam bentuk Keputusan Tertulis, dengan tidak didasarkan kepada ketentuan tersebut, maka dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang jika dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang. Demikian pula akibat hukum atas penggunaan diskresi tersebut adalah tidak sah. Oleh karena itu, UU No. 30/2014 pula mewajibkan agar dalam mengeluarkan Keputusan yang didasarkan kepada diskresi, pula memuat pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.

Keleluasaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut dikarenakan ketidakmampuan asas legalitas dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum material. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, telah lahir suatu asas baru dalam lapangan hukum administrasi negara yang disebut asas diskresi atau *freies ermessen*. Asas *freies*

ermessen dapat dipandang sebagai asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum material dapat diwujudkan karena *freies ermessen* memberikan keleluasan bertindak kepada Pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang.

Menurut Luthfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi, keputusan yang diambil berdasarkan diskresi jika menyalahi prosedur dan substansinya dapat diklasifikasikan sebagai suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat dibatalkan. Suatu *beleids* tidak dapat diuji melalui *wetmatigheid* (Undang-Undang), karena memang tidak akan ada dasar peraturan perundang-undangan untuk keputusan membuat *beleids* tersebut. Oleh karena itu, pengujian terhadap *beleids* lebih diarahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah AAUPB. Di dalam praktek, *beleids* dapat saja berupa keputusan, instruksi, edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan ada yang berbentuk peraturan.

Terhadap penggunaan diskresi tersebutlah kemudian memunculkan permasalahan yuridis dalam pelaksanaan program-program pemerintah, yaitu politisasi Aparatur Sipil Negara dan kriminalisasi Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan permasalahan yang kedua, yaitu kriminalisasi aparat sipil negara, dimana banyaknya perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dibawa ke Pengadilan Tipikor menjerat banyak penyelenggara negara atau pegawai ASN. Sebagian terseret perkara hukum lantaran kelalaian dalam penanganan masalah administrasi. Persoalan maladministrasi ke ranah pidana tidak hanya disebabkan karena adanya multitafsir perundang-undangan, namun disebabkan pula pada ketidakmampuan aparat membedakan kompetensi pidana dan kompetensi administrasi. Sehingga seringkali aparat penegak hukum tidak mampu membedakan antara perbuatan melawan hukum, dalam hal pidana dikenal dengan istilah Ajaran Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijke*), dengan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Permasalahan lain yang muncul terhadap penggunaan kewenangan tersebut, baik yang didasarkan kepada undang-undang maupun yang didasarkan kepada diskresi, adalah masih banyaknya penyelenggara negara yang tidak memahami implikasi hukum dari pembebanan tanggung jawabannya dalam melaksanakan tugas dengan memisahkan pertanggungjawaban secara pribadi dan pertanggung jawaban dalam jabatan. Demikian pula pemahaman penyelenggara negara terhadap konsep-konsep hukum (keputusan) administrasi seperti batal (*nietig*), batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Pembatalan konsep

pertama dan kedua bersifat *ex-tunc*, sedangkan pembatalan konsep ketiga bersifat *ex-nunc*.

Penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan (*de tournement pouvoir* atau *onrechtmatige overheidsdaad*) dalam konteks *welfare state* semakin sulit ketika bersinggungan dengan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan sebagai hasil dari penggunaan asas diskresi, yang sifatnya melampaui undang-undang. Sehingga dalam konteks Hukum Pidana yang memiliki ketertundukan sangat ketat terhadap asas legalitas menjadikan permasalahan ini menjadi dilematis, ketika harus melakukan pembuktian dengan menguji suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan bebas (diskresi) sebagai penyalahgunaan kewenangan (*de tournement pouvoir* atau *onrechtmatige overheidsdaad*) dengan instrumen Hukum Pidana yaitu asas legalitas.

Simpulan

Berdasarkan asas preferensi yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *lex posteriori derogat legi priori*, kebijakan yang menggunakan instrumen diskresi, selain subyek hukum dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003, tidaklah dapat diancam pidana namun hanya sanksi administratif. Oleh karena itu, sepanjang pengambilan keputusan tersebut didasarkan kepada Pasal 24 UU 30/2014, maka berlakulah Pasal 50 KUHP yang menegaskan “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.*” Eksistensi UU 17/2003 *jo* UU 1/2004 *jo* UU 30/2014 telah mereduksi sifat melawan hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan jika didasarkan kepada Pasal 22 *jo* Pasal 23 *jo* Pasal 24 *jo* Pasal 25 *jo* Pasal 26 UU 30/2014 tersebut. Dengan direduksinya sifat melawan hukum tersebut, maka mengacu kepada pandangan Aliran Dualistis tidaklah patut untuk dipidana.

Persoalan maladministrasi ke ranah pidana tidak hanya disebabkan karena adanya multitafsir perundang-undangan, namun disebabkan pula pada ketidakmampuan aparat membedakan kompetensi pidana dan kompetensi administrasi. Sehingga seringkali aparat penegak hukum tidak mampu membedakan antara perbuatan melawan hukum, dalam hal pidana dikenal dengan istilah Ajaran Sifat Melawan Hukum (*wederrechtlijke*), dengan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan (*de tournement pouvoir* atau *onrechtmatige overheidsdaad*) dalam konteks *welfare state* semakin sulit ketika

bersinggungan dengan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan sebagai hasil dari penggunaan asas diskresi, yang sifatnya melampaui undang-undang. Sehingga, dalam menguji suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan tidak hanya didasarkan kepada asas legalitas semata, namun berfokus kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebagaimana diketahui bahwa peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk menguji suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun hanya peradilan administrasi yang boleh mengujinya.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: Softmedia, 2012.
- Arifin P Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Kritik, dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1962.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Koentjoro Purbopranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1981.
- M. Hadin Nuhjad, *Komentar Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Kaukaba, 2013.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam*

Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

SF. Marbun, et.al., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Artikel/Internet/Makalah

“Jika Tidak Ada Kepentingan, Kepala Daerah Tak Perlu Takut Gunakan Anggaran, Kata KPK”, Sumber: <http://batam.tribunnews.com/2016/08/24/jika-tidak-ada-kepentingan-kepala-daerah-tak-perlu-takut-gunakan-anggaran-kata-kpk>, diakses pada tanggal 12 Desember 2016.

“Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dipidana” Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/15/08/25/ntmgk612-jokowi-minta-kebijakan-jangan-dipidana>, diakses pada tanggal 12 Desember 2016.

“Seskab: Kepala Daerah Takut Gunakan Anggaran”, Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/19093691/Seskab.Kepala.Daerah.Takut.Gunakan.Anggaran>, diakses pada tanggal 12 Desember 2016.

Amarullah Salim, *Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata Beserta Masalah Ganti Rugi*, Bahan Kuliah Pekan Orientasi dan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 1994, hlm. 157-158.

Ari Wahyudi Hertanto dan Arief Nurul Wicakso, *Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan Dan Penegakan Hukum*, 10 Februari 2004, <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=152>.

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990, hlm. 8.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR No. IX/1998

Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 24/Prp/1960); dan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3/1971).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

PERSPEKTIF ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TENTANG KEGIATAN DHARMA WANITA PERSATUAN DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Soetoto Adiwirno¹⁾ & Wahyu Edy Setiawan²⁾

1) Peneliti Pertama adalah Pengawas Sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

2) Peneliti Kedua adalah Dosen Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Palangka Raya

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Subyek penelitian berjumlah 5 orang dan kesemuanya adalah anggota Dharma Wanita Persatuan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengambilan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatif kepada subyek penelitian dan kegiatan dharma wanita persatuan di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kasus Partisipasi istri Pegawai Negeri Sipil pada kegiatan Dharma Wanita Persatuan tahun 2013/2014 di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui gambaran tentang partisipasi Istri Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan program kerja kependidikan Organisasi Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya; 2. Untuk mengetahui partisipasi Istri Pegawai Negeri Sipil terhadap kegiatan program kerja Seksi Pendidikan Dharma Wanita Persatuan sekarang ini berbeda dengan dulu sebelum reformasi tahun 1999.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pola partisipasi yang sangat kontras pada kegiatan Dharma Wanita didalam melaksanakan program kerjanya pada tahun 2011-2014 hanya para anggota DWP menunjukkan keanggotaan dalam mengikuti kegiatan, sedangkan pada kegiatan Dharma Wanita tahun lalu justru anggotanya sangat bersemangat dan antusias dalam berpartisipasi aktif di segala kegiatan yang tergambar melewati keberhasilan kegiatan pelatihan keterampilan-keterampilan para anggota Dharma Wanita dalam kursus menjahit, kapelaria/kantin, TPA bahkan beberapa yayasan sekolah-sekolah pada Seksi Pendidikan.

Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan-pelatihan yang terangkum dalam program kerja Dharma Wanita Persatuan yang lebih mengutamakan program kerja Dharma Wanita yang lebih mengutamakan pendekatan menggunakan kurikulum yang tertuju pada pemecahan masalah dan menghargai kebutuhan dan pengalaman anggota untuk memecahkan masalah belajar yang partisipatif, hal ini dapat digambarkan suatu ketetapan penggunaan tehnik pelatihan bagi orang dewasa (Andragogi).

Kata Kunci: *Andragogi, Kegiatan Kependidikan, Dharma Wanita Persatuan 2011-2014*

PENDAHULUAN

Salah satu garapan pendidikan dewasa ini adalah “Subjek” dengan penekanan pada mutu dan penerapan pendidikan. Tugas yang diemban saat ini adalah bagaimana kita harus jeli melihat berbagai kegiatan dan aktifitas organisasi dimata masyarakat sebagai “Subjek” yang kira-kira ada arah kepada pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai “Objek” pemerataan pendidikan yang dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana namun benar-benar dapat menyentuh kebutuhan dasar untuk membekali diri

didalam menempatkan ketrampilan sebagai modal dasar dikancah persaingan bursa pencari kerja hingga nanti mendapat pekerjaan atau bahkan dapat dilakukan usaha mandiri didalam memenuhi kebutuhan hidup, yang nantinya akan menjadikan masyarakat merasa berarti dan aman menuju Indonesia bermasyarakat yang adil dan makmur.

Bagi Pegawai Negeri Sipil kegiatan Dharma Wanita terkadang hanya dipandang sebelah mata karena dianggap sebagai kegiatan istri mendompleng status suami. Namun kenyataan kita sering mendengar dan melihat bahkan merasakan kiprah mereka sangat menyentuh kebutuhan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan Santunan pada Bhakti Sosial, Kursus dan pelatihan, Ceramah, Anjangsana, menjadi Sponsor kegiatan amal bahkan pendirian beberapa yayasan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal maupun Pendidikan Non Formal.

Namun sejak perubahan nama, struktur dan berbagai hal, Organisasi Dharma Wanita menjadi Dharma Wanita Persatuan, khususnya Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Provinsi Kalimantan tengah yaitu terdiri dari beberapa Unit Dharma Wanita Persatuan di berbagai Instansi dibawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kelihatannya semakin tidak terasa kiprah mereka, terutama aktifitas mereka hanya bertumpu pada Dharma Wanita Persatuan Propinsi, sedangkan Dharma Wanita Persatuan Unit-Unit Instansi semakin sepi dari kegiatan. Dahulu organisasi Dharma Wanita di beberapa puluh Unit Instansi begitu eksis dengan kegiatan-kegiatan Sosial kemasyarakatan bahkan melaksanakan kursus-kursus dan pelatihan bagi masyarakat dan anak-anak putus sekolah melalui beberapa yayasan dan Karang Taruna yang mana itu merupakan Program Kerja Seksi Pendidikan yang dilaksanakan Unit masing-masing dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan anggotanya dan terasa sekali peran serta mereka di dalam menunjang kebutuhan keluarga dan kebutuhan pengembangan masyarakat dibidang sosial ekonomi dan pendidikan. Prediksi tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi atau yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dapat dikaji dari pemahaman terhadap yang terjadi pada masa sekarang. Pendidikan Luar Sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupan dengan tujuan pengembangan tingkat ketrampilan, sikap dan nilai, yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dalam keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya. Pendidikan Luar Sekolah adalah setiap kegiatan yang diorganisasikan di luar setiap sistem persekolahan yang mapan, apakah dilakukan

secara terpisah atau sebagai bagian penting untuk melayani anak didik tertentu untuk mencapai tujuan belajar.

Fungsi pendidikan luar sekolah adalah mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berbicara tentang tujuan pendidikan luar sekolah pada umumnya adalah sama, yaitu mendidik setiap insan / individu untuk dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang luas dan dapat menunjang setiap aktivitas atau kegiatan seseorang dalam mempertahankan hidupnya. Dengan demikian Pendidikan Luar Sekolah memiliki kekhususan dalam pelaksanaannya, salah satunya pada sasarannya. Secara khusus sasaran Pendidikan Luar Sekolah adalah meliputi seluruh warga masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang karena berbagai hal tidak dapat/semampai mengikuti pendidikan di luar sekolah sepenuhnya, warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya yang tidak diperoleh pada jalur sekolah, warga masyarakat yang sudah atau bekerja tetapi menuntut persyaratan tertentu yang tidak diperoleh di jalur sekolah, warga masyarakat yang ingin melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Usia warga masyarakat yang harus dibelajarkan tidak terbatas, namun secara prioritas diutamakan mereka yang berusia 10 – 44 tahun.

Dharma wanita merupakan sebuah nama organisasi wadah berkumpulnya istri-istri Pegawai Negeri Sipil berkumpul tersebut adalah untuk melakukan suatu kegiatan yang telah diatur dan diprogramkan bersama baik Dharma Wanita Pusat bahkan berkelanjutan ke daerah dan diberi nama Dharma wanita sebagaimana Instansi dimana organisasi Dharma wanita itu berada sebagai contoh apabila Instansi Pemerintah daerah Provinsi, maka Dharma wanita adalah Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Tengah yang juga membawahi beberapa Unit Instansi dibawah Pemerintah Propinsi juga akan diberi nama sebagaimana nama unitnya masing-masing, contohnya organisasi istri-istri Pegawai negeri Sipil Diknas Provinsi Kalimantan Tengah itu akan diberi nama Dharma Wanita Diknas Provinsi.

Dharma Wanita berfungsi sebagai wadah berkumpul istri-istri Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan beberapa kegiatan usaha bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan tujuannya adalah untuk membawa para kaum ibu istri Pegawai Negeri Sipil belajar berorganisasi serta melakukan kegiatan usaha sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan demi terciptanya ibu-ibu Pegawai Negeri Sipil berwawasan luas, mandiri serta memiliki pengetahuan dan pengalaman

diberbagai bidang melalui ketrampilan-ketrampilan yang bisa digunakan untuk usaha kebutuhan keluarganya. Sedangkan untuk tujuan masyarakat umum adalah melewati kegiatan yang tertuang dalam Program Kerja Dharma Wanita masyarakat dapat menikmati berbagai pelayanan yang dilakukan oleh Dharma Wanita baik itu pelayanan segi kesehatan, sosial, agama, pendidikan dan kebudayaan, dimana secara periodik Dharma Wanita itu akan mengadakan kegiatan sosial dengan cara mendatangkan ahli kesehatan, ahli sosial, ahli agama bahkan bekerjasama dengan perguruan tinggi terdekat untuk memberikan semacam, kursus atau ceramah bagi masyarakat, sedangkan pelaksanaannya akan mengambil topik dan bahan yang akan disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat setempat.

Program kerja dari Dharma Wanita diantaranya adalah :

1. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan bidang yang meliputi usaha untuk meningkatkan mutu kehidupan baik melalui sikap mental anggota Dharma Wanita Persatuan dan keluarga dalam bersosialisasi melalui beberapa kegiatan yang berguna bagi masyarakat dan selalu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Meningkatkan mutu pengetahuan dan ketrampilan anggota dan keluarga dan masyarakat.
- c. Meningkatkan mutu pengelolaan lembaga pendidikan Dharma wanita.
- d. Meningkatkan penyelenggaraan penyediaan perpustakaan mini.

2. Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan bidang yang meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan menghimpun dana untuk menggerakkan roda organisasi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan material anggota.

Adapun kegiatan dimaksud antara lain :

- a. Mengusaha dana yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota dalam pengelolaan suatu usaha, diantaranya:
 - 1) Kursus-kursus
 - 2) Pendidikan Koperasi
 - 3) Pendirian Yayasan
 - 4) Pendirian Kantin
 - 5) Pendirian Toserba

3. Bidang Sosial Budaya

Bidang sosial budaya merupakan bidang yang meliputi pemahaman, penghayatan serta pengalaman norma dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan bangsa Indonesia antara lain :

- a. Meningkatkan nilai dan wawasan kemajemukan budaya.
- b. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya.
- c. Meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan kesehatan jasmani.

4. Administrasi Umum

- a. Pelaksanaan manajemen pelayanan administrasi organisasi.
- b. Penerangan, humas, dokumentasi, penerbitan.

Kegiatan Dharma Wanita sebagai penambah ditujukan oleh Program Kerja yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan yang telah diterima oleh anggota Dharma Wanita dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan kegiatan Dharma Wanita berfungsi sebagai pelengkap ditujukan oleh program kegiatan yang bertujuan melengkapi pengetahuan sikap dan ketrampilan yang dibutuhkan sebagai modal untuk mengembangkan diri dan ketrampilan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tujuan PLS Dharma Wanita memiliki kesamaan yaitu meningkatkan kualitas seluruh warga masyarakat disekitarnya, melalui pengembangan dan pengetahuan serta sikap yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana ditegaskan sebagai berikut: Pendidikan Luar Sekolah termasuk pendidikan yang bersifat memasyarakat diantaranya sebagai latihan, ketrampilan, perlu ditingkatkan dan diperluas dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan serta memberikan kesempatan yang luas untuk bekerja atau berusaha bagi anggota masyarakat. Program Kerja Dharma Wanita sebagaimana telah dibahas sebelumnya selalu mengarahkan kepada kebutuhan masyarakat dan hal ini sama dengan Program kerja yang diinginkan oleh PLS. Baik itu tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi selalu melibatkan masyarakat dan dinikmati juga oleh masyarakat itu sendiri.

Pendidikan Luar Sekolah memiliki peran sangat besar dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dan hal ini tidak dapat dipisahkan dengan kreativitas yang berlangsung dalam sistim sosial dan sistim kultural kemasyarakatan serta bagaimana paradigma yang diterapkan oleh berbagai prosedur konitif dan praksis-praksis pengetahuan hidup didalamnya (Adi Wicaksono, 1994).

Untuk hal diatas maka program PLS dirasakan semakin dapat mengakomodasikan kebutuhan rakyat mendapat pendidikan seumur hidup bukan melalui pendidikan formal tetapi bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi yang kegiatannya memiliki sasaran dan tujuan dengan melibatkan masyarakat di segala usia, dalam hal ini dapat dilihat dalam kegiatan Dharma Wanita dan didalamnya telah termaktub suatu keterlibatan PLS itu sendiri, karena organisasi Dharma Wanita tempat berkumpulnya pada Istri Pegawai Negeri Sipil ini memiliki *program kerja yang ada kesamaan dengan tujuan dan sasaran PLS, sehingga partisipasi istri Pegawai Negeri Sipil didalam kegiatan Organisasi Dharma Wanita ini selalu dilaksanakan dalam bentuk praktek bukan hanya teori saja*, sehingga hal ini benar-benar suatu gambaran kegiatan PLS yang tepat guna. Namun untuk itu perlu dilakukan penelitian sehingga dalam kajian ke-PLS-nya bisa memperluas kajian masa depan sebagaimana pendapat Shame (1973). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana gambaran tentang partisipasi istri Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan program kerja kependidikan Organisasi Dharma Wanita Persatuan Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah?; 2. Bagaimana partisipasi istri Pegawai Negeri Sipil terhadap kegiatan program kerja Seksi Pendidikan Dharma Wanita Persatuan sekarang ini berbeda dengan dulu sebelum reformasi tahun 1999?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui gambaran tentang partisipasi istri Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan program kerja kependidikan Organisasi Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya; 2. Untuk mengetahui partisipasi istri Pegawai Negeri Sipil terhadap kegiatan program kerja Seksi Pendidikan Dharma Wanita Persatuan sekarang ini berbeda dengan dulu sebelum reformasi tahun 1999.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi, maupun peran serta melalui perilaku, pandangan, maupun harapan istri Pegawai Negeri Sipil didalam kegiatan Organisasi Dharma Wanita, maka perlu terlebih dahulu fenomena yang terjadi sekarang dikenali dengan mengadakan penelitian dan terjun langsung ke lokasi penelitian. Hal ini dilakukan dengan menggunakan observasi yaitu berupa daftar, tabel, daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan dokumen menggunakan dokumentasi kamera sebagai bahan untuk mengabdikan gambaran kegiatan fasilitas yang ada. Untuk melaksanakan penelitian sebagaimana yang dimaksud diatas, maka digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur

penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang akan diamati (Bogdan dan Taylor, 1975). Sedangkan jenis penelitiannya adalah Studi Kasus yang pemecahannya dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif mengenai partisipasi istri PNS terhadap program Kependidikan Dharma Wanita tersebut, apa penyebab mereka enggan dalam mengikuti Kegiatan Dharma Wanita Persatuan dan apa yang menyebabkan mereka enggan atau antusias, apa benar mereka itu enggan atau bersemangat.

Data diperoleh baik selama observasi partisipasi dilakukan maupun dalam keseharian selama peneliti bekerja. Sehingga peneliti memerlukan waktu dalam penyesuaian diri dan pendekatan untuk dapat diterima di lingkungan yang diteliti ; hal ini karena kerjasama yang baik dengan seluruh Anggota Dharma Wanita Persatuan. Sebelum observasi dilakukan peneliti memberi penjelasan kepada Ketua Dharma Wanita baik secara formal dan secara informal. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini data yang bersumber dari Pengurus Dharma Wanita Persatuan. Data lainnya adalah tentang pelaksanaan kegiatan rutin pada setiap bulan yang dilaksanakan Anggota Dharma Wanita Persatuan tiap-tiap tanggal 5 bulan berikutnya.

Sumber data yaitu informasi yang dianggap banyak mengetahui data yang dikumpulkan peneliti.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua Dharma Wanita	1 orang	Menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan
2.	Wakil Ketua	1 orang	Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan
3.	Mantan Ketua Dharma Wanita	1 orang	Menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita 2 Periode
4.	Anggota Dharma Wanita Persatuan	7 orang	Mewakili dari jumlah Dharma Wanita.

Wawancara ini dilakukan kepada informan utama (Anggota Dharma Wanita) dan informan lainnya seperti Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan. Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan yakni pada saat pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara berulang-ulang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tehnik deskriptif sebagai berikut: 1.Reduksi Data. Ini merupakan pemilihan data yang telah dikumpulkan dan diteliti yang mana dipergunakan sebagai data penelitian dan yang mana yang tidak diperlukan, dan hal ini

diberi tanda khusus atau kode sehingga memudahkan dalam mereduksi data nantinya;

2. Penyajian Data. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel sedangkan data deskriptif akan dibuat dalam bentuk naratif deskriptif; dan 3. Penarikan Kesimpulan. Data yang telah direduksi dan diorganisir dalam bentuk sajian data akan disimpulkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian

Secara umum tahapan penelitian ini melalui tiga tahapan yakni: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Pada tahap persiapan peneliti menentukan fokus penelitian, teori yang mendukung, konsultasi dengan pembimbing dan atasan peneliti, menyusun proposal penelitian, seminar proposal dan konsultasi-konsultasi. Tahap pelaksanaan data penelitian di lapangan meliputi pengumpulan data, analisis data, penafsiran data dan pengecekan keabsahan data. Sedangkan pada tahap pelaporan, peneliti menyusun hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian dan presentasi hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

Bahwa kewajiban tersebut akan berhasil jika para istri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia mau dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki dalam menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan baik pada cara reformasi yang sedang terjadi di negara kita maupun dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Bahwa sejalan dengan tuntutan dan perubahan kehidupan tersebut di atas, istri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dalam suatu wadah organisasi yang bernama Dharma Wanita, perlu melakukan perubahan mendasar tujuannya agar organisasi netral secara politis, mandiri dalam menentukan visi dan misi, demokratis, terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya untuk kesejahteraan anggota.

Program Kerja Dharma Wanita Persatuan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anggota dan keluarganya melalui dan pendidikan keagamaan secara teratur dan berkualitas.
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan formal dan non formal dalam bentuk latihan, kursus, sanggar, BLK, Karang Taruna dan lain-lain.

- c. Meningkatkan mutu pengolahan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Rapat Dharma Wanita Persatuan serta meningkatkan tenaga pengajarnya.
 - d. Meningkatkan upaya pemahaman tentang bahaya narkoba, zat adiktif lainnya serta HIV/AIDS.
 - e. Meningkatkan pengetahuan anggota keluarga tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara di bidang hukum.
 - f. Mengusahakan beasiswa atau santunan pendidikan bagi putra-putri anggota Rapat Dharma Wanita Persatuan baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga yang berpartisipasi dalam mengajukan pendidikan sesuai kondisi dan situasi masing-masing.
 - g. Meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat dokumentasi dan informasi, sehingga mampu memberikan sumber peningkatan, mendorong minat baca dan tulis serta memperluas wawasan.
2. Bidang Sosial Budaya
- 1. Meningkatkan nilai dan wawasan keanekaragaman budaya :
 - a. Mendorong meningkatkan pemahaman keanekaragaman budaya bangsa, dengan tujuan meningkatkan wawasan untuk mempertebalkan rasa kesatuan dan kesatuan bangsa.
 - b. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya Indonesia.
 - 2. Meningkatkan kepedulian sosial lingkungan hidup:
 - a. Menumbuhkan sikap cinta lingkungan dengan mempertahankan keseimbangan alam.
 - b. Memasyarakatkan kesadaran hemat energi.
 - c. Meningkatkan perhatian guna membantu anggota dan masyarakat yang memerlukan bantuan sebagai upaya memantapkan rasa kesetiakawanan sosial.
 - 3. Meningkatkan kesehatan jasmani anggota dan keluarga melalui :
 - a. Olah Raga
 - b. Penyuluhan tentang budaya hidup bersih.
 - 4. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba, zat adiktif dan HIV/AIDS dengan bekerjasama dengan instansi terkait.
 - 5. Meningkatkan kesejahteraan pria dan wanita yang harmonis. Mewujudkan kemitra sejahteraan pria dan wanita dengan mengupayakan perubahan sikap serta peran serta pria dan wanita, baik didalam maupun diluar rumah, yang

mengandung pengertian adanya kesamaan hak, kewajiban dan kesempatan untuk berperan dalam segala bidang kehidupan.

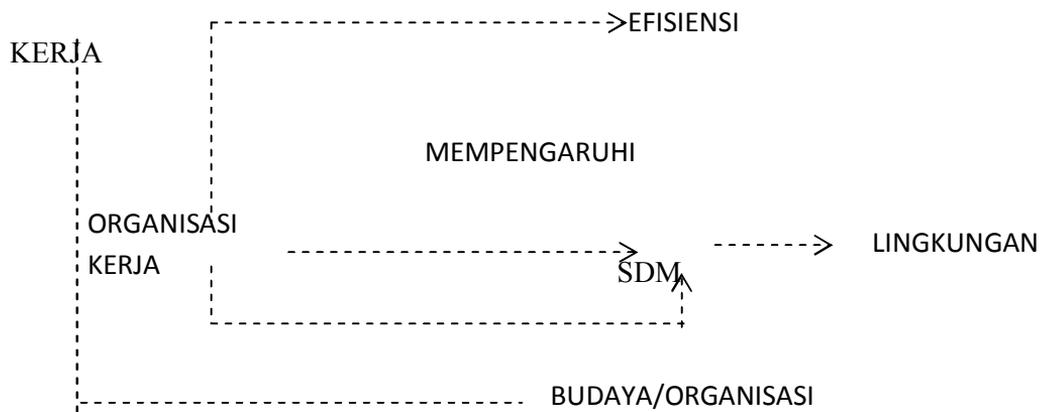
6. Meningkatkan kepedulian tentang HAM. Meningkatkan kesadaran anggota dan keluarga tentang pengertian HAM serta berupaya untuk mewujudkannya sesuai dengan nilai kebudayaan dan aturan yang berlaku.

Sebelum otonomi daerah diberlakukan menjelang pelaksanaan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh organisasi Dharma Wanita senantiasa memanfaatkan forum rapat kerja (raker) kepada masing-masing unit atau para Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah se Propinsi Kalimantan Tengah. Pada saat raker ini organisasi menginformasikan secara tertulis dan lisan tentang rencana jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Dari pendapat-pendapat mereka umumnya mereka enggan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan dalam pelatihan karena mereka hanya mendengarkan ceramah saja terhadap materi yang disampaikan maka mereka tidak tertarik dan tidak memahami.

Sedangkan keengganan pada saat sebelum mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan itu merupakan kegiatan yang membuang waktu padahal ada pekerjaan yang lebih penting mereka tinggalkan di rumah. Melihat masalah ini maka Pendidikan Dharma Wanita Persatuan sekarang tidak variatif hingga terasa kurang bermanfaat seperti dulu (masa Dharma Wanita). Karena Dharma Wanita persatuan adalah sebuah organisasi maka pendapat Robbins (1990, 4).

“ An organization is a consciously coordinated soared entity, with a relatively identifiable boundary, that faction on a relatively continuous basis to achieve a come on goal or set of goals”.

Jadi kita akan tahu bahwa organization itulah organisasi, karena yang diorganisasikan adalah semua sumber yang diperlukan mengaktualisasikan imajinasi visi, norma, SDA, SDM, SDB yang akan memperoleh sinergi, nilai lebih dan nilai tambah. Memilih pendapat Robbins di diatas, maka keadaan yang ditetapkan dalam sebuah organisasi adalah kegiatan yang menimbulkan timbal balik yang saling menguntungkan dan menunggu arah kemajuan hal ini selalu dipengaruhi oleh kerja itu sendiri, ini terlihat dalam Bagan sebagai berikut :



Dalam bagan ini terlihat 2 (dua) variabel mempengaruhi SDM yaitu Organisasi dan lingkungan.

Dari hal diatas maka dapatlah kita lihat bahwa Dharma Wanita Persatuan Propinsi Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh dua variabel yaitu organisasi itu sendiri dari sudut Program Kerja dan lingkungan.

1. a. Dari sudut organisasi kegiatan khususnya Seksi Pendidikan Dharma Wanita Persatuan Propinsi selalu kurang bisa mengkoordinir kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga kurang memilih untuk di ikuti. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi perubahan struktur organisasi dari Pemerintah Daerah Otonomi Daerah yang mau tidak mau menjadi terkotak-kotak pengaktualisasi organisasi.
- b. Organisasi Dharma Wanita Persatuan belum maksimal mengaplikasikan teori Andragogi pada anggota-anggotanya yang mayoritas memerlukan pendidikan orang dewasa dalam setiap kegiatan pada program kerja Seksi Ekonomi.
2. Dari sudut lingkungan organisasi Dharma Wanita persatuan sangat dipengaruhi oleh budaya kerja (etos kerja) dalam lingkungan masyarakat dimana organisasi Dharma Wanita persatuan itu berada di lingkungan budaya kerja pada organisasi Dharma Wanita Persatuan kemampuannya melalui perilaku seseorang dapat diukur dan diamati yaitu melalui gerak dan bahasa isyarat tubuh dan ucapan dan hal ini digambarkan dalam hasil wawancara penulis pada lingkungan kerja orang Dharma Wanita Persatuan, seperti nya program kerja Dharma Wanita Seksi Pendidikan mulai dianggap tidak lagi berpengaruh pada kebutuhan sosial, kebutuhan keluarga, bahkan juga tidak berpengaruh pada lingkungan kerja suami sebagai PNS yang pada asalnya adalah faktor penyebab timbulnya Dharma

Wanita Persatuan. Hal ini disebabkan karena Dana yang kurang memadai yang dimiliki oleh Dharma Wanita yang sekarang ini tidak lagi mendapat subsidi dari pemerintah.

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan makna yang mendasari teman-teman penelitian sedangkan pembahasan hasil temuan penelitian lebih berfokus pada aspek-aspek permasalahan yang diteliti secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya dilakukan analisis substantif teoritik dengan mengacu pada kajian teori dan pendapat para ahli serta penjelasan-penjelasan yang dipaparkan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : (1) kontras pola partisipasi, dan (2) bersifat andragogi lebih disukai.

Menurut pendapat Spear dalam Sharan (1989: 648) bahwa hal yang fundamental dalam belajar Khususnya Pendidikan Orang Dewasa adalah Motivasi. Apabila dikaitkan dengan teori kebutuhan dari Roots (modifikasi dari Maslow, 1954) yang membicarakan konsep motivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, dalam pemenuhannya akan mengikuti tingkatan yang rendah baru pemenuhan ke tingkat yang lebih tinggi. Pemuasan suatu kebutuhan juga mendorong timbulnya kebutuhan baru yang menuntut pemuasan. Demikian seterusnya sampai terpuaskan kebutuhan yang paling tinggi. Jika suatu kebutuhan telah terpenuhi itu tidak berarti tidak akan muncul lagi untuk selama-lamanya, tetapi kepuasan itu hanya untuk sementara waktu saja. Manusia yang dikuasai oleh kebutuhan yang tidak terpuaskan akan termotivasi untuk melakukan kegiatan guna memuaskan kebutuhan tersebut (Maslow, 1954). Menurut Roots (1970) Hirarki kebutuhan Maslow dimodifikasi menjadi 7 tingkatan kebutuhan yaitu *Survival needs*, *Security needs*, *Belonging needs*, *Esteem needs*, *Need of knowledge*, *Need for understanding* dan *Aesthetic needs*. Dari pendapat Roots tersebut ternyata kebutuhan akan pengetahuan dan kebutuhan akan pemahaman menduduki tingkat ke lima dan ke enam. Dari tingkatan tersebut adalah wajar kalau jumlah orang yang ingin memenuhinya tidak besar. Berkaitan dengan kebutuhan fisik, Maslow yakin bila kebutuhan ini belum terpenuhi manusia tidak akan ada perhatiannya terhadap hal lainnya. Orang yang kebutuhan fisiknya belum terpenuhi sulit diharapkan untuk memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Lingkungan fisik yang baik dan menyenangkan juga menyokong perhatian yang baik dalam belajar. Kunci timbulnya motivasi adalah apabila perencanaan pembelajaran

mengacu pada keinginan dan pengalaman warga belajar daripada menggunakan buku teks (Spear dalam Sharan 1989:648).

Karena itu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan didasarkan atas permasalahan, kebutuhan dan pengalaman bagi anggota akan timbul partisipasi yang lebih baik seperti pada kegiatan Dharma Wanita tahun 1996/1997 (sebelum perubahan nama). Setelah melihat fungsi dan tujuan Dharma Wanita pada Bab II tersebut maka resensi masalah dari penulisan ini adalah terdapatnya kesenjangan antara aktivitas Organisasi Dharma Wanita melalui keanggotaannya pada masa 0 - 1999 s/d 2011 - 2014 dan seterusnya hingga aktivitas anggota sangat kelihatan mundur sekali sejak tahun 2000 hal ini juga telah diperjelas dengan beberapa pembahasan pada Bab IV (dalam kegiatan Dharma Wanita Tahun 1996) disana digambarkan bahwa dari data tahun 1996/1997 terdapat beberapa keaktifan dalam pengelolaan kerja dan hasil kerja dalam Bidang Pendidikan Kursus dan Latihan melalui pendirian Pondok Sosial tempat pelatihan ketrampilan Batako, Beternak, Bertukang dan Montir dan berdasarkan hasil wawancara pada masa itu siapa saja para anggota Dharma Wanita dan masyarakat yang membutuhkan batako, papping stone, ayam ras dan tukang batu/kayu, selalu disediakan oleh Dharma Wanita dan sudah beberapa kali dalam satu tahun itu diperoleh proyek-proyek yang lumayan besar untuk penyediaan tukang dan batako dalam pembangunan Aula, Masjid dan Gereja, bahkan proyek penyediaan daging ayam untuk kegiatan Porda dan Pesparawi, semuanya itu dilakukan oleh Pondok Sosial dibawah asuhan Dharma Wanita Propinsi yang kelihatannya sangat-sangat menjanjikan untuk kehidupan anggota dan masyarakat sekitarnya melalui pelatihan dan pendidikan non formal.

Pengaruh keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pada keaktifan serta keikutsertaan anggota-anggota Dharma Wanita itu sendiri didalam melakukan kegiatan bukan hanya pada Pondok Sosial tersebut saja, tetapi berbagai kegiatan lainnya menghimpun anak-anak putus sekolah dari Kabupaten Kabupaten karena hal ini dipimpin langsung oleh Ketuanya yaitu Ibu Gubernur beserta ibu-ibu Kepala Kantor Instansi-instansi dari Badan dan Dinas-dinas se Kotamadya Palangkaraya yang membawa anggotanya masing-masing dalam beberapa kegiatan sosial dan kemasyarakatan dan disana sesekali ada Rapat Anggota beserta dengan Bapak-bapak selaku PNS dan saat itu memang dukungan dari pihak Bapak-bapak sebagai PNS terhadap istrinya dalam kegiatan Dharma Wanita sangat diharuskan dan hal ini akan juga dinilai didalam Baperjakat sang suami dalam kenaikan jabatan baik struktural maupun fungsional.

Hal ini sependapat dengan Tjondronegoro (1991) yang menguraikan bahwa: ada hubungan saling mempengaruhi antara kondisi sosial-ekonomi dengan etos kerja suatu masyarakat, dimana etos itu adalah suatu watak atau semangat fundamental suatu budaya, sebagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan, atau perilaku suatu kelompok masyarakat. Jadi etos kerja itu adalah budaya kerja (hadirnya etos kerja antara lain produktivitas dan kualitas kerja).

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana uraian data temuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat partisipasi yang berbeda antara tahun sebelumnya dengan 2011 - 2014 kegiatan Dharma Wanita Persatuan pada umumnya anggota Dharma Wanita Persatuan kurang berpartisipasi dan enggan mengikuti atau menghadiri Dharma wanita Persatuan, sedangkan pada kurun waktu lalu sebelum perubahan nama (Dharma Wanita) justru sangat antusias dan berpartisipasi secara aktif dan positif didalam kegiatan Dharma Wanita Persatuan khususnya Seksi Pendidikan. Hal ini tentu kegiatan pendidikan seperti kursus dan pelatihan juga menurun. Keengganan atau kurangnya partisipasi anggota pada masa 2011 sampai dengan 2014 ini disebabkan adanya perasaan bahwa mengikuti kegiatan dalam melaksanakan program kerja Seksi Pendidikan Dharma Wanita Persatuan bukan kebutuhan utama tapi hanya sampingan, karena kegiatan program kerja yang terealisasi tidak bisa memberi kontribusi dalam bentuk finansial yang dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kegiatan menjadi tidak memilih dan membosankan. Karena pendidikan Andragogi dalam kegiatan Dharma Wanita Persatuan Seksi Pendidikan tidak maksimal. Beberapa kegiatan dilaksanakan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat sekitar yang pada jaman Reformasi dan Demokrasi semakin melarat dan berkekurangan karena terhimpit persaingan era globalisasi.
2. Kurangnya dukungan dari Instansi Terkait yang mana ini akibat dari hasil Munas 16 Dharma Wanita Persatuan 1999, yang membolehkan Ketua tidak harus ibu Kepala Kantor/Dinas setempat dan menimbulkan rasa kurang berwibawanya Ketua Dharma Wanita Persatuan karena suaminya bukan pejabat. Hal ini mengakibatkan kurang begitu didengar atau dihargai ajakan atau himbauan Ketua dan yang tidak kalah pentingnya Dharma Wanita tidak lagi mendapat subsidi dana dari pemerintah. Selanjutnya juga disebabkan oleh anggota pengurus Dharma wanita Persatuan adalah seorang PNS dan seharusnya seorang pengurus harus istri

PNS yang tidak berstatus PNS (Ibu Rumah Tangga) karena diharapkan totalitas di Dharma Wanita Persatuan dapat maksimal, walaupun pengurus Dharma Wanita Persatuan adalah ibu yang berstatus PNS haruslah benar-benar kelihatan antusias dan keseriusannya di dalam kepengurusan organisasi Dharma Wanita Persatuan tersebut.

Adapun saran yang nantinya dapat menjadi acuan bagi para praktisi selanjutnya adalah :

- a. Agar Dharma Wanita Persatuan Propinsi Kalimantan Tengah mengusulkan pada Pemda setempat untuk mendapat dukungan dalam kegiatan-kegiatan khususnya Seksi Pendidikan bahkan legilimasi keberadaan Dharma Wanita Persatuan yang direalisasi dalam bentuk Perda, sehingga keberadaan organisasi Dharma Wanita dapat diakui Sah di dalam tata pemerintahan hingga ada efek kegiatan Dharma Wanita Persatuan bagi suami sebagai PNS sebagai wujud penghargaan kiprah istri sebagai anggota maupun pengurus yang aktif di Dharma Wanita Persatuan. Hal ini dikarenakan antara etos kerja istri sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan dengan etos kerja suami sebagai PNS ada hubungan saling mempengaruhi khususnya kita tekankan dari segi positif kegiatan Dharma Wanita Persatuan di dunia Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- b. Agar Dharma Wanita Persatuan Propinsi Kalimantan Tengah bisa mulai memikirkan untuk mencari solusi yang tepat di dalam memilih program kerja Seksi Pendidikan dan yang utama adalah tehnik-tehnik merekrut anggota Dharma Wanita Persatuan melalui Pendidikan Orang Dewasa yang pada saatnya nanti menyelenggarakan Penataran bagi Pengurus dan Ketua-ketua Dharma Wanita Persatuan khusus tentang Pendidikan “Andragogi” yang mana cara sumber orang-orang PLS dari pusat dan daerah, karena titik tolak kegagalan berawal dari pusat kegiatan Dharma Wanita Persatuan itu sendiri oleh sebab itu maka perlu dibenahi dulu pengurusnya.
- c. Agar lembaga Dharma Wanita Persatuan yang ada di Pemda dan Perguruan Tinggi tidak memandang sebelah mata organisasi-organisasi yang dapat memajukan PLS yang pada jaman sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah organisasi Dharma Wanita Persatuan ini tempat wahana penyediaan, penciptaan dan pelaksanaan hingga keberhasilan yang menyentuh kebutuhan masyarakat melalui pendidikan Andragogi dapat benar-benar menghidupkan PLS itu dari pendidikan-pendidikan lain.

Daftar Pustaka

- Ary. H. Gunawan. 1945. *Kebijaksanaan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Basir Bartkos. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta PT. Bumi Aksara.
- Dharma Wanita Propinsi Kalimantan Tengah, Program Kerja Tahun 1996/1997 Palangka Raya.
- Dharma Wanita Persatuan Propinsi Kalimantan Tengah, Program Kerja Tahun 2001/2002 Palangka Raya.
- Dharma Wanita Persatuan Pusat, AD dan AD/RT DWP Tahun 1999, Munaslub Dharma Wanita Jakarta.
- Faisal S. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Aplikasi*. IKIP Malang. GA 3 Malang.
- Winarno, S. 1985. *Ed Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung. Transito
- Yin, R. 1990. *Studi Kasus, Design Metode*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Gusti Ngurah, A.I. 1992. *Statistika Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Kategori*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Widjaya Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Sarlito Wirawan, S. 1997. *Psikologi Sosial*. Balai Pustaka Leiden.
- Muhibbin Syah. 1995. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Jakarta. Remaja Rosdakarya.
- Sudjana, H. D., 2001. *Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah Teori Pendukung Azas*. Bandung. Folah Production.
- Joesef Soelaman. 1986. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta. Bumi Aksara Tahun.
- Ndraha Taliziduhu. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Reineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pengusaha Kecil, Kantor Koperasi Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 1996.
- Zainuddin, A. 1986. *Androgogi*. Bandung. Angkasa.
- Muhadjin H. N., 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Jogyakarta. Bigrof.

IDENTIFIKASI SUMBER DAYA POTENSI LOKAL DALAM PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dayat Hidayat

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP

Universits Singaperbangsa Karawang email: dayathidayat194@yahoo.com

Abstrak

Kajian ini membahas tentang : Pertama, identifikasi kebutuhan belajar dan sumber daya potensi lokal, kedua, konsep pelatihan kewirausahaan, dan ketiga, pemberdayaan masyarakat sebagai dampak pelatihan kewirausahaan masyarakat. Pembahasan kajian ini menggunakan metode studi komparasi melalui analisis literature dari berbagai sumber kepustakaan. Analisis dilakukan secara mendalam sehingga ditemukan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kajian ini menyimpulkan beberapa temuan : pertama, identifikasi kebutuhan belajar dan sumber daya potensi lokal dilakukan dengan menciptakan iklim belajar, menyusun kelompok belajar, mendiagnosis kebutuhan belajar, menyusun tujuan belajar, merancang pengalaman belajar, melaksanakan langkah kegiatan belajar, dan mengevaluasi proses, hasil, dan dampak kegiatan belajar. Kedua, proses pelatihan kewirausahaan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat. Ketiga, dampak pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat adalah meningkatnya kemandirian usaha bagi warga belajar.

Kata kunci: *Identifikasi Sumber Daya, Pelatihan Kewirausahaan, Pemberdayaan Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Salah satu ciri yang membedakan antara program pendidikan nonformal dan pendidikan formal adalah cara penyusunan program belajar. Program belajar pendidikan nonformal bersifat fleksibel, unik dan spesifik, artinya tidak seragam. Cara penyusunan program belajar pendidikan nonformal sangat berbeda-beda. Proses penyusunan programnya pada umumnya lebih sederhana bahwa prosedurnya tidak rumit. Penyusunan program dapat dilakukan atau dikerjakan langsung oleh pengelola program bersama-sama masyarakat sebagai calon peserta didik. Termasuk program pelatihan sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal yang banyak dilakukan oleh masyarakat.

Pada prinsipnya suatu pelatihan dilakukan karena adanya kebutuhan masyarakat. Tidak sedikit lembaga organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga maupun organisasi ibaratnya sebuah modal yang bersifat internal dan tak ternilai harganya. Ia merupakan suatu

modal yang tidak terlihat yang nantinya diharapkan memiliki manfaat kembali dari hasil pelatihan tersebut. Melalui pelatihan, suatu organisasi akan mendapatkan manfaat berupa: efisiensi waktu, *skill* peserta pelatihan meningkat, dan produktifitas individunya meningkat. Program pelatihan diselenggarakan dengan tujuan memperbaiki *performance* kerja peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan yang hendak dicapai yaitu setelah mengikuti pelatihan, mereka dapat memperbaiki cara kerja sehingga menjadi lebih efektif dan produktif. Jika peserta pelatihan berasal dari lembaga kemasyarakatan misalnya karang taruna, PKK, ormas maka setelah mengikuti pelatihan mereka dapat bekerja lebih efektif yaitu dengan bertambahnya kecakapan memecahkan masalah di desanya sehingga jumlah dan kualitas masalah yang dipecahkan menjadi semakin meningkat.

Salah satu tujuan pelatihan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan masyarakat. Situasi dan kondisi ketidakberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi melalui keterbatasan akses, minimnya kemampuan sumber daya dan terbatasnya modal atau *capital*. Berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya sering ditemui di berbagai aspek: baik ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Kondisi ini mengundang multi pihak baik pemerintah sebagai pelayan, maupun organisasi masyarakat untuk berpikir tentang situasi yang sedang dihadapi masyarakat.

Pada hakikatnya inti dari pemberdayaan melalui pengembangan kewirausahaan berfungsi sebagai stimulus, perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, serta untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi usaha yang dimiliki. Memberdayakan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi ekonomi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, jadi merupakan upaya memampukan dan memandirikan ekonomi masyarakat. Dewasa ini pada berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan yang bersifat parsial maupun sektoral telah banyak dilakukan. Identifikasi kebutuhan pelatihan kewirausahaan dan sumber daya modal sosial masyarakat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kewirausahaan masyarakat. Identifikasi kebutuhan pelatihan kewirausahaan dan sumber daya modal sosial menjadi pendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat untuk menumbuhkan semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi secara bersama. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan kewirausahaan sehingga kemandirian masyarakat lebih cepat terwujud.

Kebutuhan belajar dan sumber daya modal sosial perlu diidentifikasi sebagai landasan penyusunan program pelatihan kewirausahaan masyarakat. Karena kebutuhan belajar dan sumber daya modal sosial yang telah diidentifikasi akan memberikan arahan kemana program kegiatan itu ditujukan. Sulitnya adalah bahwa kebutuhan belajar dan sumber daya modal sosial itu tidak selalu disadari oleh kelompok masyarakat. Pengelola program pendidikan nonformal dituntut dapat menggali dan mengungkap secara bijaksana sehingga kebutuhan belajar dan sumber daya modal sosial yang semula tidak disadari dapat disadari oleh masyarakat sebagai peserta didik.

Kegiatan identifikasi kebutuhan belajar dan sumber daya modal sosial dilakukan untuk memberikan arah dan sebagai bahan pertimbangan untuk menemukan skala prioritas dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan belajar. Oleh karena itu identifikasi kebutuhan belajar dilakukan untuk mengetahui adanya berbagai masalah atau kebutuhan pelatihan yang diinginkan oleh sasaran dan mempermudah dalam menentukan skala prioritas bagi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan pelatihan.

KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kebutuhan Belajar Dan Sumber Daya Potensi Lokal Dalam Pelatihan

Identifikasi berasal dari kata “identify” yang berarti meneliti atau menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari lapangan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya, demi mencapai suatu hasil (tujuan) yang lebih baik. Belajar adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yang mengubah seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak pantas menjadi pantas. Kebutuhan belajar pada dasarnya menggambarkan kesenjangan jarak antara tujuan belajar yang diinginkan dan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian pengertian identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar itu sendiri, baik itu proses belajar yang berlangsung di lingkungan informal (keluarga), formal (sekolah), maupun nonformal (masyarakat).

Pada tahap identifikasi kebutuhan belajar ini, sebaiknya pengelola program pendidikan nonformal melibatkan peserta didik untuk mengenali, menyatakan dan

merumuskan kebutuhan belajar, sumber-sumber yang tersedia dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. Identifikasi kebutuhan belajar bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Hal ini dapat dilakukan agar peserta didik terdorong untuk menyatakan kebutuhan belajar berupa kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar. Peserta didik dibantu untuk mengenali dan menyatakan kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Identifikasi kebutuhan belajar dan sumber daya potensi lokal dilakukan dengan menciptakan iklim belajar, menyusun kelompok belajar, mendiagnosis kebutuhan belajar, menyusun tujuan belajar, merancang pengalaman belajar, melaksanakan langkah kegiatan belajar, dan mengevaluasi proses, hasil, dan dampak kegiatan belajar.

Proses identifikasi sumber daya potensi lokal dalam pelatihan kewirausahaan untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Pada tahap membantu warga belajar dalam menciptakan iklim belajar. Di dalam usaha menciptakan iklim belajar, sumber belajar bersama-sama warga belajar menyiapkan bahan belajar, menentukan fasilitas dan alat-alat, serta membina keakraban di antara warga belajar. Bahan-bahan belajar perlu diperoleh warga belajar sebelum kegiatan belajar itu dimulai. Bahan-bahan tersebut terdiri atas informasi tertulis dan lisan.

Pada tahap membantu warga Belajar dalam menyusun Kelompok belajar. Situasi yang baik untuk melibatkan warga belajar di dalam perencanaan kegiatan belajar adalah apabila kegiatan belajar itu dilakukan pada kelompok terbatas. Dalam kelompok tersebut sumber belajar bertanggung jawab dalam membantu warga belajar dengan memberikan saran tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dan dengan mengkoordinasi kegiatan warga belajar.

b. Pada tahap membantu warga belajar dalam mendiagnosis kebutuhan belajar. Identifikasi kebutuhan belajar secara menyeluruh yang dilakukan oleh perencana program pendidikan telah dibicarakan pada bagian terdahulu. Identifikasi kebutuhan belajar yang dibicarakan di sini ialah kebutuhan khusus dengan maksud untuk meningkatkan motivasi warga belajar agar berperan serta dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu kebutuhan belajar khusus yang diajukan oleh warga

belajar dalam kegiatan belajar perlu diidentifikasi dan diagnosis oleh warga belajar sendiri. Pada tahap membantu warga belajar dalam menyusun tujuan belajar.

Penentuan tujuan belajar mengandung arti merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan belajar. Tujuan ini penting untuk dirumuskan berdasarkan tiga alasan. *Pertama*, tujuan itu merupakan arah dari segala kegiatan belajar. *Kedua*, tujuan dijadikan dasar untuk pemilihan dan pengadaan unsur-unsur belajar yang tepat. *Ketiga*, tujuan itu adalah sebagai tolok ukur dalam evaluasi kegiatan belajar, dalam arti bahwa kegiatan belajar itu baik apabila hasil belajar itu telah membawa warga belajar kepada tujuan belajar yang telah ditetapkan, secara umum dapat dikemukakan bahwa "*tujuan belajar itu merupakan tolok ukur yang menentukan untuk pemilihan sarana belajar, merinci isi atau materi pelajaran, mengembangkan kegiatan belajar, dan menyiapkan alat-alat evaluasi kegiatan belajar*" (Tyler, 1950 : 3) dalam Sudjana, D. (2004).

- c. Pada tahap membantu warga belajar dalam merancang pengalaman belajar. Dalam merancang pengalaman belajar ini sumber belajar dapat membantu warga belajar dalam dua hal. *Pertama*, membantu warga belajar dalam penerapan prinsip-prinsip pengorganisasian bahan belajar. *Kedua*, ia membantu warga belajar dalam penentuan model kegiatan belajar yang akan ditempuh.
- d. Pada tahap membantu warga belajar dalam melakukan langkah kegiatan belajar. Penjabaran penggolongan kegiatan belajar ke dalam urutan langkah- langkah kegiatan belajar akan menentukan cara pemilihan teknik-teknik belajar yang tepat dan penentuan bahan belajar yang cocok untuk mencapai tujuan belajar. Peranan sumber belajar ialah memberikan dorongan kepada warga belajar untuk menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan belajar. Hubungan antara teknik-teknik dan aspek-aspek tingkah laku itu dijelaskan oleh Knowles, M. (1990 : 294) dalam gambar berikut :

Tabel 1 : Hubungan Antara teknik Kegiatan Belajar Dengan Aspek Tingkah Laku

Aspek tingkah Laku	Teknik yang Cocok
Pengetahuan (generalisasi, pengalaman, penyerapan informasi)	Ceramah/kuliah, televisi, debat, dialog, wawancara, simposium, panel, wawancara berkelompok, percakapan, film, slide, diskusi isi buku, membaca
Pengertian (Penerapan informasi dan generalisasi)	Kelompok pendengar, demonstrasi, film, drama, diskusi sokratik, diskusi pemecahan masalah kritis, diskusi kasus/studi kasus, bermain peran
Keterampilan (Perubahan penampilan dalam kegiatan)	Bermain peran, latihan basket, permainan, kasus partisipatif, kelompok-T, latihan tanpa bicara, latihan keterampilan.

Sikap (Penyerapan perasaan melalui pengalaman baru yang berhasil)	Tukar pengalaman, diskusi kelompok, bermain peran, pemecahan masalah kritis, studi kasus, permainan, latihan tanpa bicara, situasi hipotesis, broken square
Nilai (Penyerapan prioritas keyakinan)	Siaran televisi, ceramah, debat, dialog, simposium, percakapan, film, gambar, drama, diskusi terpimpin, tukar pengalaman, bermain peran, pemecahan masalah kritis, permainan, kelompok-T, brokensquare
Minat (Kepuasan terhadap kegiatan baru)	siaran televisi, demonstrasi, film, gambar, slide, drama, diskusi tukar pengalaman, pameran, karya wisata, latihan tanpa bicara.

e. Pada tahap membantu warga belajar dalam mengevaluasi hasil, proses dan pengaruh kegiatan belajar. Evaluasi terhadap hasil belajar dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan belajar telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tercapainya tujuan belajar akan mempengaruhi warga belajar dalam dua hal. *Pertama*, mereka mempunyai pandangan tentang tingkat kemampuan yang telah dicapai melalui kegiatan belajar. *Kedua*, mereka diharapkan akan menjadikan tingkah laku baru yang telah dimilikinya itu menjadi tingkat kemampuan saat ini yang akan dikembangkan pada waktu selanjutnya guna mencapai kemampuan baru yang lebih baik. Untuk mengevaluasi hasil belajar sebaiknya diutamakan teknik evaluasi diri (*self evaluation*) baik oleh diri sendiri maupun oleh kelompok.

Pada setiap kegiatan belajar, warga belajar mempunyai tanggung jawab terhadap kelancaran proses kegiatan dan terhadap hasil belajar yang akan dicapai. Mereka akan mempelajari sesuatu yang dianggap baru dan dapat memperdalam pengalaman, nilai-nilai, dan pandangan yang telah mereka miliki di dalam interaksi dengan dunia kehidupannya.

Para warga belajar akan menerapkan proses dan hasil kegiatan belajar itu ke dalam dunia kehidupannya, baik dalam tugas pekerjaan sehari-hari maupun dalam pergaulan di masyarakat. Pengalaman baru yang telah mereka miliki akan digunakan untuk mengejikan sesuatu yang mereka inginkan atau untuk memenuhi sesuatu yang mereka butuhkan.

Gambaran kondisi yang telah dikemukakan di atas sejalan dengan pendapat Atmodiwirio, S. (2002: 88) mengemukakan bahwa tujuan analisis kebutuhan belajar warga belajar terhadap pengembangan pelatihan kewirausahaan adalah untuk : 1) menggambarkan sifat yang sebenarnya dari suatu diskripsi pelaksanaan pekerjaan,

2) menentukan sebab-sebab diskripsi pelaksanaan pekerjaan, 3) merekomendasikan solusi yang tepat, 4) menggambarkan calon peserta pelatihan.

Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat

Di dalam kegiatan pelatihan partisipatif, sumber belajar berperan pula sebagai pembantu bagi kelompok dalam lingkungan kehidupan khusus. Dalam melakukan peran itu, bahan belajar merupakan komponen penting. Tetapi yang lebih penting lagi ialah usaha sumber belajar dalam mendorong para warga belajar untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan untuk menyatakan tingkat kemampuan yang mereka miliki. Usaha ini dapat menghindarkan penyimpangan dan perkiraan yang salah tentang kebutuhan dan kemampuan mereka serta dapat mengembangkan kepekaan warga belajar dalam merespon kehidupan dan lingkungannya. Selanjutnya, sumber belajar menerapkan keterampilan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersama warga belajar guna memenuhi kebutuhan belajar mereka.

Pelatihan (*training*) merupakan suatu istilah yang memiliki konotasi yang tergantung pada pengalaman seseorang dan latar belakangnya. Bagi seorang yang antusias pada dunia balap motor, maka pelatihan merupakan usaha untuk mencetak pemenang. Bagi pemain sirkus, *training* merupakan usaha untuk menjinakkan binatang-binatang dan menunjukkan kemahiran di depan penonton. Dalam dunia kerja, pelatihan biasanya dihubungkan dengan memberi petunjuk, orientasi dan pengarahan supaya dapat bekerja lebih baik.

Pelatihan dilaksanakan dengan berbagai tujuan yang jelas kegunaannya bagi suatu organisasi maupun pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pelatihan. Pada dasarnya setiap pelatihan diadakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya saja suatu organisasi dalam perkembangannya ternyata tidak dapat menunaikan fungsinya secara baik karena berbagai alasan seperti: struktur dan fungsi bagian-bagian yang tidak mampu menyesuaikan dengan beban dan kualitas tugasnya, peralatan-peralatannya tidak memadai lagi, mekanisme kerjanya yang kurang efisien dan personalianya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan tugas secara efisien.

Secara *ontologis*, pengertian pelatihan telah dirumuskan oleh para ahli, di antaranya oleh Friedman dan Yarbrough (1985:4) dalam Sudjana, D. (2007:4) mengemukakan bahwa : “*Training is a process used by organizations to meet their goals. It is called into operation when a discrepancy is perceived between the current situation and a preferred state of affairs. The trainer’s role is to facilitate trainee’s movement from the status quo toward the ideal*”.

Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright (2003:251) mengemukakan bahwa : *training is a planned effort to facilitate the learning of jobrelated knowledge, skills, and behavior by employe*. Artinya : pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh pegawai. Jika didefinisikan pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuam *skill*/keterampilan dan sikap) agar mencapai sesuatu yang diinginkan (Robinson, 1981:12).

Michael J. Juicus (1972) dalam Kamil, M. (2010:3) mengemukakan: *“the term training is used here to indicate any process bay wich the aptitudes, skills, and abilities of employes to perform specipic job are in creased”* (istilah pelatihan yang dipergunakan di sini adalah untuk menunjukan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu). Dari definisi tersebut diketahui bahwa pelatihan berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Konsep pelatihan digunakan berdasarkan pada asumsi-asumsi tentang pelatihan. Asumsi adalah sesuatu yang kita angap benar tanpa harus membuktikannya terlebih dahulu. Adapun fungsinya adalah menjadi petunjuk bagi tindakan seseorang sesuai dengan yang diyakini kebenarannya. Dalam pelatihan misalnya asumsi ini akan mempengaruhi fasilitator dalam melakukan kegiatan fasilitasi belajar kepada peserta. Berikut ini dikemukakan beberapa konsep lama dan konsep baru tentang pelatihan.

Tabel 2: Asumsi-asumsi yang Mendasari Pelatihan

Konsep Lama	Konsep baru
Penguasaan atau dikuasainya pengetahuan atau suatu <i>subject matter</i> oleh partisipan akan menimbulkan perbuatan (<i>action</i>).	Motivasi dan <i>skills</i> akan menimbulkan perbuatan. <i>Skills</i> dikuasai melalui pelatihan.
Peserta belajar dari yang disampaikan oleh pematernya. Belajar adalah fungsi dari kapasitas atau kemampuan pemateri untuk belajar dan kecakaan peserta dalam mengajar.	Belajar merupakan fungsi yang kompleks dari motivasi dan kapasitas individu, norma kelompok, metode pelatihan dan tingkah laku fasilitator, dan suasana kelembagaan. Motivasi peserta pelatihan dipengaruhi oleh suasana kerja organisasi
Perbuatan individual menimbulkan perbaikan dalam pekerjaannya atau dalam bekerjanya.	Perbaikan kerja adalah fungsi yang kompleks dari pada hasil belajar seseorang, norma-norma kerja kelompok, suasana kerja dalam organisasi.
Pelatihan merupakan tanggung jawab lembaga pelatihan.	Pelatihan merupakan tanggung jawab tiga pihak, yaitu: organisasi partisipan, partisipan, dan lembaga latihan.

Sumber: Marzuki, S. (2010)

Pelatihan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga atau organisasi tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Pelaksanaan pelatihan yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja akan berdampak pada kurang maksimalnya hasil yang dicapai. Penyelenggaraan pelatihan yang baik tentu saja harus diiringi oleh besarnya manfaat yang diperoleh dari pelatihan tersebut. Beberapa manfaat dalam pelatihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Robinson dalam Marzuki, S. (2010: 28) sebagai berikut:

1. Pelatihan sebagai alat untuk memperbaiki kemampuan individu atau kelompok dengan harapan memperbaiki *performance* organisasi. Perbaikan-perbaikan itu dilakukan dengan berbagai cara. Pelatihan yang efektif dapat menghasilkan pengetahuan dalam pekerjaan/tugas, pengetahuan tentang struktur dan tujuan organisasi, tujuan tugas masing-masing karyawan dan sarannya, sistem dan prosedur.
2. Keterampilan tertentu diajarkan agar para karyawan dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan Standard yang diinginkan. Contoh: *skill* dalam menggunakan teknik yang berhubungan dengan fungsi "*behavioral skill*" dalam mengelola hubungan dengan atasan dengan bawahan, maupun dengan teman sejawat.
3. Pelatihan juga dapat memperbaiki sikap terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan atau karyawan, seringkali sikap-sikap tidak produktif timbul dari adanya salah pengertian yang disebabkan oleh informasi yang tidak cukup, dan informasi yang membingungkan. Karena itu, salah satu pemecahan dalam kebijakan pelatihan ditujukan pada penjelasan tentang fakta-fakta secara jujur.
4. Memperbaiki Standard keselamatan. Pada salah satu perusahaan listrik melaporkan bahwa dengan adanya pelatihan ternyata telah banyak membantu membawa keselamatan dari bahaya aliran listrik.

Johnson dalam Marzuki, S. (2010) merumuskan manfaat pelatihan dengan merumuskan manfaat pelatihan dengan menjawab pertanyaan *what problem can training solve?* jawabannya antara lain: 1) menambah produktifitas (*increase productivity*), 2) memperbaiki kualitas kerja dan menaikkan semangat kerja, 3) mengembangkan ketrampilan, pengetahuan, pengertian, dan sikap-sikap yang baru, 4) memperbaiki cara yang tepat dalam mengoperasikan alat-alat, mesin, proses, metode, dan lain-lain, 5) mengurangi pemborosan, kecelakaan kerja, keterlambatan, kelalaian, biaya berlebihan dan mengurangi yang tidak diperlukan, 6) melaksanakan perubahan atau pembaharuan kebijakan tentang aturan-aturan baru, 7) memerangi kejenuhan atau keterlambatan dalam skill, teknologi, metode, produksi, pemasaran, dan modal, 8) meningkatkan pengetahuan agar sesuai *standard performance* sesuai dengan

pekerjaannya., 9) mengembangkan, menyiapkan orang untuk maju, memperbaiki pendayagunaan tenaga kerja dan menjamin kelangsungan kepemimpinan, dan 10) menjamin ketahanan dan pertumbuhan perusahaan.

Pelatihan berbasis kewirausahaan masyarakat dalam mengembangkan kewirausahaan masyarakat memiliki dimensi pemberdayaan masyarakat lokal. Pelatihan berbasis kewirausahaan masyarakat sebagai suatu proses pemberdayaan bukan sekedar proses penyampaian keingintahuan dan keterampilan, melainkan untuk lebih menekankan pada upaya untuk mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat (masyarakat belajar). Dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal, pelatihan kewirausahaan banyak dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan kewirausahaan masyarakat. Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan (*ability*) dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya.

Indikasi penting tercapainya tujuan pelatihan kewirausahaan ialah tumbuhnya jiwa usaha dalam pribadi setiap peserta didik, sehingga dapat membentuk komunitas “*business entrepreneur*” yang imbasnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan menanggulangi masalah pengangguran yang kian hari makin bertambah.

Dalam konteks bisnis, Zimmerer, T.W (1996) dalam Suryana (2007 : 2) mengemukakan bahwa “*entrepreneurship is the result of a disciplined, systematic, process of applying creativity and innovations to need and opportunities in the marketplace*”. Kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin, proses sistematis penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Kewirausahaan menurut Hisrich-Peters (1995:10) dalam Alma, B. (2007:26) dikemukakan bahwa “*enterpreneurship is the process of creating something different with vaule by devoting the necessary time and effort, assuming the accompanying financial, psyhic, and social risk, and receiving the resulting rewards of monetary and personal satisfaction and independence*. (Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan).

John Kao (1991:14) dalam Sudjana, D. (2004:131) mengemukakan bahwa “kewirausahaan adalah sikap dan perilaku wirausaha. Wirausaha ialah orang yang inovatif, antisipatif, inisiatif, pengambil resiko, dan berorientasi laba.” Ini berarti kewirausahaan merupakan sikap dan perilaku orang yang inovatif, antisipatif, inisiatif, pengambil resiko, dan berorientasi laba. Kewirausahaan merupakan terjemahan dari

“*entrepreneurship*”, yang dapat diartikan sebagai “*the backbone of economy*”, yaitu syaraf pusat perekonomian atau sebagai ‘*tailbone of economy*’, yaitu pengendali perekonomian suatu bangsa (Soeharto Wirakusumo, S. 1997:1 dalam Suryana, 2007:4). Secara etimologi kewirausahaan merupakan nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start-up phase*) atau suatu proses dalam mengerjakan suatu yang baru (*creative*) dan sesuatu yang berbeda (*innovative*).

Drucker, P.F. (1994) mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*). Bahkan secara sederhana kewirausahaan diartikan sebagai kemampuan wirausaha (Ibnu Soedjono, 1993; meredith, 1996; Marzuki Usman, 1997 dalam Suryana, 2007:4). Lebih lanjut Zimmener, W. T. and Norman M.S. (1996:51) mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah : ‘*applying creativity and innovation to solve the problem and to exploit opportunities that people face everyday*’. Kewirausahaan adalah penerapan kreatifitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreatifitas, inovasi dan keberanian menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. *Kreatifitas* oleh Zimmener, W. T. and Norman M.S. (1996:51) diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara baru untuk memecahkan persoalan dan menghadapi peluang (*creativity is the ability to develop new ideas and discover new ways of looking at problem and opportunities*).

Pemberdayaan Masyarakat

Dampak pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat memiliki dasar teori yang sangat kuat yaitu pada tahapan proses dan hasil. Proses pemberdayaan memberikan kesempatan bagi masyarakat mengembangkan keterampilan dan menjadi pemecah masalah dan pengambil keputusan. Hasil pemberdayaan adalah tingkat keberdayaan masyarakat, yang mengacu pada hasil dari proses pemberdayaan, termasuk konsekuensi dari upaya untuk mendapatkan kontrol di masyarakat dan efek dari intervensi yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, yang berasal dari kata “*power*” yaitu kekuatan. Istilah pemberdayaan dapat dikaitkan dengan proses transformasi sosial, ekonomi dan politik (kekuasaan). Soetomo (2011:65) mengemukakan bahwa pada perkembangan terakhir pemberdayaan masyarakat menempatkan dirinya sebagai pendekatan yang banyak digunakan dalam berbagai

kebijakan pembangunan masyarakat. Pendekatan ini dalam banyak hal dapat dilihat sebagai operasionalisasi dari perspektif atau paradigma pembangunan masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat meliputi tahapan 1) perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*), 2) aksi sosial dan politik (*sosial dan political action*), dan 3) peningkatan kesadaran dan pendidikan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat dalam konteks pendidikan nonformal meliputi : 1) *community organization*, yaitu karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka, 2) *participatory approaches*, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap anggota dalam seluruh kegiatan, perlunya melibatkan para pemimpin, tokoh masyarakat serta tenaga-tenaga ahli setempat; dan 3) *education for justice*, yaitu pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga masyarakat tumbuh dan berkembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk ikut berperan serta.

Pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk menentukan pilihan masa depannya. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dalam pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah proses saling belajar di antara sesama warga masyarakat untuk sama-sama meningkatkan kesadaran diri secara kritis dan secara bersama pula membangun institusi-institusi yang resisten terhadap segala bentuk intervensi negara ke dalam wilayah masyarakat. Keberdayaan masyarakat akan membuat mereka mampu melindungi kepentingan-kepentingan mereka dari campur tangan negara secara berlebihan. Pemberdayaan masyarakat tidak memandang hierarki struktural siapa yang di atas dan siapa di bawah. Pemerintah negara dan masyarakat dihargai sesuai dengan fungsi masing-masing (Rasyad, A. 2014).

Proses pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya berbicara tentang inovasi teknis, perbaikan manajemen dan efisiensi usaha, tetapi harus juga mampu dan berani menyuarkan hak-hak politik masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain di lingkungan masyarakat. Hal ini penting, karena selama ini masyarakat miskin lebih sering dijadikan kendaraan politik. Dengan kata lain, tanpa adanya upaya penyadaran dan penguatan daya saing politik, semua upaya pemberdayaan masyarakat sulit berhasil, karena tidak memperoleh legitimasi jajaran birokrasi ataupun elit atau tokoh-tokoh masyarakat.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Dalam operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas bukan semata-mata hanya memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*".

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Sutoro, E. 2002).

Pemberdayaan merupakan proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade utilitas* dari obyek yang diberdayakan. Dasar pemikiran suatu obyek atau target group perlu diberdayakan karena obyek tersebut mempunyai keterbatasan, ketidakberdayaan, keterbelakangan dan kebodohan dari berbagai aspek. Oleh karenanya guna meng-upayakan kesetaraan serta untuk mengurangi kesenjangan diperlukan upaya merevitalisasi untuk mengoptimalkan utilitas melalui penambahan nilai. Simon dalam tulisannya tentang *Rethinking Empowerment* mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu aktivitas refleksif, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self determination*). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik (dalam Hikmat, H. 2006:10).

Pembangunan yang mengacu kepada partisipasi masyarakat memiliki dua aspek, yaitu (1) pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, dan pelaksanaan program, sehingga dengan demikian dijamin bahwa persepsi, pola sikap, pola pikir, nilai-nilai dan cita rasa dipertimbangkan secara penuh, dan (2) penyelenggaraan penilaian sebagai balikan (*feed back*) yang tak terpisahkan dari kegiatan pembangunan itu sendiri. Partisipasi ini mengacu pada pemberdayaan atau efisiensi. Bilamana pengembangan partisipasi sebagai alat dan bertujuan pada pengembangan maka partisipasi bersifat transformasional dan instrumental. Sebagai sebuah tujuan untuk pengembangan sumber daya manusia (*transformasional*), partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Sebagai sebuah alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen proyek (*instrumental*)

partisipasi menghasilkan efisiensi dan efektivitas program yang dapat menggali potensi tenaga finansial dan pemikiran optimal serta pemanfaatan sumber terbatas dalam mencapai sukses program. Mobilisasi rakyat untuk kepentingan-kepentingan penguasa atau keberhasilan program yang *top down* seperti ini sering juga diartikan sebagai partisipasi. Dalam kenyataannya partisipasi sebagai tujuan transformasi maupun partisipasi sebagai alat manajemen efisiensi hadir pada saat yang sama, namun fungsi, strategi perolehannya dan pendekatan metodologi pengaktualisasinya berbeda (Rasyad, A, 2014).

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program unggulan pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan lokal melalui partisipasi aktif warga belajar di dalam proses pendidikan nonformal. Strategi pemberdayaan masyarakat ini bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki sisi produktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong dan meningkatkan dimensi sosial dan budaya yang mempengaruhi warga belajar. Karena itu, program pendidikan nonformal dengan kelenturan dan kapasitas kewirausahaan dan organisasinya diharapkan menjadi pelaku utama dalam proses atau strategi pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan terhadap dunia kehidupan peserta didik sebagai bagian dari masyarakat, sesuai dengan pendidikan penyadaran yang diajukan Freire, Kindevatter, S. (1979) mengemukakan bahwa *"people gaining an understanding of and control over social, economic, and lor political forces in order to improve their standing in society"*. Proses pemberian kekuatan atau pemberdayaan adalah setiap upaya pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan peserta didik terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan/atau politik, sehingga pada gilirannya peserta didik memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan status sosial, ekonomi dan politiknya dalam masyarakat.

PENUTUP

Kajian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Identifikasi kebutuhan belajar dan sumber daya potensi lokal dilakukan dengan menciptakan iklim belajar, menyusun kelompok belajar, mendiagnosis kebutuhan belajar, menyusun tujuan belajar, merancang pengalaman belajar, melaksanakan langkah kegiatan belajar, dan mengevaluasi proses, hasil, dan dampak kegiatan belajar.

Pada tahap pengidentifikasian kebutuhan belajar ini, pengelola program pendidikan nonformal melibatkan peserta didik untuk mengenali, menyatakan dan merumuskan kebutuhan belajar, sumber-sumber yang tersedia dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar.

2. Proses pelatihan kewirausahaan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat. Di dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan yang bersifat partisipatif, pengelola program pendidikan nonformal dan sumber belajar berperan membantu kelompok warga belajar dalam lingkungan kehidupan khusus untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelatihan. Artinya, pengelola dan sumber belajar menerapkan keterampilan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersama warga belajar guna memenuhi kebutuhan belajar mereka.
3. Dampak pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat adalah meningkatnya kemandirian usaha bagi warga belajar. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan lokal melalui partisipasi aktif warga belajar di dalam proses pendidikan nonformal. Strategi pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk memperbaiki produktivitas ekonomi masyarakat, mendorong dan meningkatkan dimensi sosial dan budaya yang mempengaruhi warga belajar.

Daftar Pustaka

- Alma, B. (2007). *Kewirausahaan*. Bandung : Alfabeta.
- BuAtmodiwirio, S. (2002). *Manajemen Pelatihan*. Jakarta: PT. Ardadizya Jaya.
- Chambers, R. (1995). *Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development*. London: Intermediate Technology Publicatios.
- Drucker, P. F. (1994). *Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principle*. New York: Harper Business.
- Friedman, J. (1992). *Empowerment: The Polotics of Alternative Development*. Oxford: Blackwell.
- Hikmat, H. (2010) *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kamil, M. (2009). *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta.
- Kamil, M. (2010) *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*, Bandung:

Alfabeta.

- Kindervatter, S. (1979). *Nonformal Education as An Empowering Process*. Massachusetts: Center for International Education University of Massachusetts.
- Knowles, M. (1990). *The Modern Practice of Adult Education*. New York: Assosiation Press.
- Marzuki, S. (2010). *Pendidikan Nonformal : Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan dan Andragogi*. Bandung: Rosdakarya dan Universitas Negeri Malang.
- Meredith, G., (2005). *Kewirausahaan, Teori dan Praktik, Seri Manajemen Strategis* No. 1. Jakarta. PT. Pustaka Bimanan Pressindo.
- Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2003). *Human Resource Management*, International Edition. New York: The McGraw-hill Companies Inc.
- Prijono, O.S. dan Pranarka A.M.W. (1996). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Rasyad, A. (2014). *Pendidikan dan Pelatihan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Malang: Elang Mas.
- Robinson, K. P. (1981). *A Handbook of Training Management*. London: Kogan Page Ltd.
- Sudjana, D. (2004). *Pendidikan Nonformal, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas*. Bandung : Falah Production.
- _____. (2007). *Sistem dan Manajemen Pelatihan, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Falah Production.
- _____, (2004). *Manajemen Program Pendidikan, untuk Pendidikan Nonformal, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.
- _____, (2004). *Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Nonformal*. Bandung: Falah Production.
- Soetomo. (2011) *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutoro, E. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002*.
- Suryana. (2007). *Kewirausahaan, Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zimmener, W. T. and Norman M.S. (1996). *Entrepreneurship and The New Venture Formation*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.

PENDIDIKAN KEBENCANAAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Asep Saepudin

*Dosen Jurusan PLS Universitas Pendidikan Indonesia
aspudin@gmail.com*

Abstrak

Indonesia termasuk salah satu negara yang sering diterpa bencana. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua samudera terbentang di garis katulistiwa serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia. Posisi tersebut mengakibatkan sangat rawan terhadap bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Untuk itu peningkatan kesadaran dan sosialisasi kesiapan menghadapi bencana melalui pendidikan kebencanaan sangat penting dilakukan dan ditanamkan ke masyarakat yang hidup terutama di daerah rawan bencana. Melalui pendidikan kebencanaan diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya pemberdayaan komunitas agar memiliki informasi memadai, waspada, lebih aktif, serta memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dalam kegiatan prevensi maupun mitigasi. Pendidikan bencana dapat dibagi dalam kedalam empat kegiatan utama, yaitu: (1) pendidikan kesadaran dan persiapan diri menghadapi bencana, (2) pendidikan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini, (3) pendidikan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat serta pengungsian, dan (4) pendidikan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kata Kunci: *Bencana Alam, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara yang sering diterpa bencana. Hal ini tidak terlepas dari letak geografisnya. Selain sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua samudera yang terbentang di garis katulistiwa serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, juga terletak di daerah katulistiwa dengan morfologi yang beragam dari dataran sampai pegunungan tinggi.

Keragaman morfologi ini dipengaruhi oleh faktor geologi terutama dengan adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik aktif di sekitar perairan Indonesia (Lempeng Eurasia, Hindia-Australia, dan lempeng dasar Samudera Pasifik). Pergerakan lempeng-lempeng tersebut menyebabkan terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung api aktif serta patahan-patahan geologi yang merupakan zone rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor. Posisi tersebut mengakibatkan sangat rawan

terhadap bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.

Bencana bukan hanya mengancam penduduk pesisir yang dekat laut, namun juga mengancam penduduk yang berada di pegunungan. Dalam studinya Irma Suryani (2014:2) mendeskripsikan peristiwa banjir bandang di Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie 3 (tiga) tahun lalu telah memporak-porandakan beberapa desa dengan kerugian material miliaran rupiah, bahkan memakan korban jiwa, menghilangkan lapangan pekerjaan dan menghancurkan tempat tinggal serta terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.

Berbagai bencana tersebut telah menimbulkan kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan, dan juga telah mengakibatkan korban jiwa maupun harta benda serta dampak traumatik yang mendalam bagi masyarakat yang mengalaminya. Sebagaimana diungkapkan Sujana Royat (2009:4) bahwa adalah ancaman kerentanan kejiwaan pada diri para korban bencana, baik kerentanan secara kejiwaan individual (psikologis) maupun kejiwaan secara sosial (sosiologis). Namun selama ini yang sering menjadi sorotan adalah kejiwaan secara psikologis sedangkan kejiwaan secara sosiologis kurang terkenal walaupun sebenarnya jiwa sosial tidak kalah pentingnya dalam menyelesaikan masalah sosial masyarakat pasca bencana.

Masyarakat yang terkena bencana akan mengalami beberapa kerentanan secara sosiologis antara lain: *pertama*, hilangnya sistem sosial yang telah mapan. Tuntutan untuk membuatnya pulih tentu membutuhkan pendampingan agar mereka dapat dengan segera bangkit dari keterpurukan. Karena pada hakekatnya masyarakat korban bencana dalam kondisi sakit secara sosial yang tentunya hanya dapat diobati dengan proses sosial lagi. *Kedua*, hilangnya solidaritas sosial yang telah mapan. Ancaman dari hilangnya solidaritas sosial tersebut bisa mengakibatkan timbulnya dorongan bagi individu untuk berbuat jahat. *Ketiga*, terkurasnya mobilitas sosial sehingga membuat masyarakat akan kehilangan kebiasaan yang dilakukan. Ancamannya dapat berupa hilangnya kesempatan dalam mencari kebutuhan hidup.

Melihat begitu besarnya dampak yang harus diterima oleh para korban bencana tentu sudah menjadi keharusan dilakukan penanggulangan bencana secara terpadu. Semua pihak juga harus lebih berhati-hati dalam menjaga lingkungan dan memantapkan kesadaran serta memiliki kesiap-siagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana. Kesiapan menghadapi bencana dimaksud untuk mengurangi dampak dan korban yang akan menimpa penduduk atau masyarakat yang terkena musibah bencana. Untuk itu peningkatan kesadaran dan sosialisasi kesiapan menghadapi bencana

melalui pendidikan kebencanaan sangat penting dilakukan dan ditanamkan ke masyarakat yang hidup terutama di daerah rawan bencana. Melalui pendidikan kebencanaan diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya pemberdayaan komunitas agar memiliki informasi memadai, waspada, lebih aktif, serta memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dalam kegiatan preventasi maupun mitigasi.

Batasan dan Ruang Lingkup Bencana

Bencana merupakan suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia yang terjadi secara tiba-tiba atau berlahan-lahan mengakibatkan terganggunya kehidupan dan penghidupan serta dampaknya. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Indonesia memiliki tiga kategori bencana. Pertama, bencana alam, yaitu suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, dan tanah longsor. Kedua, bencana non alam, yaitu suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, dan wabah penyakit. Ketiga, bencana sosial, yaitu suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Menurut Kuswaji Dwi Priyono (2014:2) bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya utama ini dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunungapi, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan lain-lain.

Dari indikator-indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi bahaya utama (main hazard potency) yang tinggi. Demikian pula dari indikator likuifaksi, bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan, dan kepadatan industri berbahaya maka potensi bahaya ikutan (collateral hazard potency) juga sangat tinggi.

Potensi bencana akibat kenaikan permukaan laut terhadap kondisi lingkungan bio-geofisik yang berantai yaitu dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir maka terjadi perubahan arus laut dan meluasnya kerusakan mangrove, akibatnya akan

meluas pula intrusi air laut yang mengancam kegiatan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, serta berkurangnya luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil.

Dalam studinya Kuswaji Dwi Priyono (2014:3) memaparkan bahwa saat ini terus terjadi penurunan luas hutan mangrove di Indonesia, dari 5.209.543 ha (1982) menjadi 3.235.700 ha (1987) dan 2.496.185 ha (1993), sehingga dalam kurun waktu 10 th telah terjadi penurunan sekitar 50% dari total semula. Akibatnya abrasi dan intrusi air laut tak terelakkan dipicu terjadinya land subsidence akibat penurapan air tanah yang berlebihan, di Jakarta diperkirakan pada periode 2050-2070 intrusi air laut akan mencakup 50% dari luas Jakarta Utara. Gangguan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di antaranya hilangnya lahan budidaya pertanian di sepanjang dataran pantai, gangguan jaringan jalan lintas dan kereta api di Pantura Jawa dan Timur-Selatan Sumatera, genangan terhadap permukiman kota-kota pesisir di Pantura Jawa, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian barat daya, dan beberapa bagian Papua. Berkurangnya luasan kawasan pesisir dan bahkan hilangnya pulau-pulau kecil yang mencapai angka 2000-4000 pulau, tergantung dari kenaikan muka air laut yang terjadi. Dengan asumsi kemunduran garis pantai sejauh 25 m, pada akhir abad 21 lahan pesisir akan hilang hingga 202.500 ha.

Redefinisi Penanggulangan Bencana

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi penanggulangan bencana yang selama ini telah terjadi, pengorganisasian penanggulangan bencana belum secara sempurna berhasil sebagaimana yang diharapkan. Konsisi tersebut diungkapkan Siti Nuryati (2014:3) salah seorang peneliti senior di Institut Pertanian Bogor. Menurut peneliti tersebut dari berbagai pengalaman bencana yang terjadi, ternyata belum tampak bahwa kita mampu melakukan penanganan bencana secara holistik, profesional dan proporsional. Selain persoalan yang bersifat struktural, persoalan lainnya adalah paradigma bencana saat ini masih bersifat sesaat saja yaitu hanya dilakukan dengan pemberian santunan/bantuan pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi fisik pada pasca bencana. Sementara paradigma mitigasi melalui antisipasi bencana/kesiapsiagaan bencana belum banyak dilakukan. Padahal konsep dari kesiapsiagaan bencana sangat jelas. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa sistim yang memadai untuk bencana, prosedur dan sumber-sumber daya berada di tempat kejadian dan bisa membantu masyarakat menolong diri mereka sendiri.

Berdasarkan uraian diatasm cukup jelas bahwa tujuan dari kesiapsiagaan bencana adalah untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh yang merugikan dari satu

bahaya melalui tindakan-tindakan berjaga-jaga yang efektif. Akan tetapi sebagian masyarakat masih memandang upaya penanggulangan bencana belum merupakan kebutuhan mendesak sehingga keamanan dan keselamatan dalam menghadapi bencana belum menjadi kebutuhan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana sangat strategis dan mutlak diperlukan.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, telah menjadi perubahan paradigma. Dulu penanggulangan bencana dilakukan pada saat tanggap darurat, kini penanggulangan bencana berubah lebih diprioritaskan pada fase pra bencana sebagai upaya kesiapsiagaan, kesiapsiagaan dilakukan sebelum terjadi bencana. Hal ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan sebagai upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB). PRB memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlatih melalui pendidikan kebencanaan, baik di sekolah formal maupun di organisasi kemasyarakatan.

Program Pendidikan Bencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam pendidikan kebencanaan mengingat, selama ini penanganan bencana lebih banyak diutamakan pada kegiatan tanggap darurat dan kegiatan pascabencana, sedangkan kegiatan prabencana yang merupakan langkah untuk mengantisipasi risiko bencana terjadinya bencana terkadang dikesampingkan. Oleh karena itu perlu diperhatikan fokus pemberdayaan masyarakat sejak manajemen prabencana. Manajemen prabencana adalah melibatkan masyarakat tidak sebatas subjek melainkan menjadi objek dengan langkah pemberdayaan masyarakat yang juga melibatkan komunitas yang ada pada lingkungan masyarakat.

Asumsi Dasar Pengelolaan Bencana Berbasis Masyarakat

Program pendidikan bencana berbasis masyarakat sangat efektif untuk diselenggarakan, untuk itu dalam dokumen aksi pemuda untuk PRBBK dikembangkan beberapa asumsi dasar yang dijadikan pertimbangan. Asumsi dasar tersebut adalah:

1. Masyarakat adalah pihak yang paling memahami tentang kondisi lingkungan tempat tinggalnya,
2. Pemerintah dan unsur-unsur eksternal merupakan pihak-pihak dengan sumber terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam mengidentifikasi kekurangan dan

menyediakan sumber daya yang diperlukan (sesuai kemampuannya) merupakan sebuah keharusan,

3. Masyarakat paling memahami masalah sekaligus potensi yang dapat digarap untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Ketika terjadi bencana, masyarakat adalah korban yang harus segera memperoleh pertolongan, sekaligus penolong pertama yang potensial pada saat pertama bencana melanda. Untuk itu masyarakat harus memiliki kapasitas untuk melakukan pertolongan darurat dan diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat menjalankan peranannya dalam keadaan darurat.
5. Sebuah sistem yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat sendiri akan lebih efisien dan efektif untuk memperlancar penanggulangan bencana. Misalnya terkait dengan penyebaran informasi peringatan diri, pengerahan relawan, pemberian pertolongan pertama dan lain-lain.
6. Dalam masyarakat terdapat potensi budaya yang biasanya menjadi alat yang efektif untuk melakukan edukasi, seperti ketoprak, wayang, ludruk, dan wayang orang. Media-media ini efektif untuk melakukan edukasi pengurangan resiko bencana.

Pengelolaan Bencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa tahun terakhir pengelolaan bencana bergeser ke arah pemberdayaan komunitas, seperti yang dikemukakan dalam World Conference on Natural Disaster Reduction di Yokohama pada tahun 1994 mengenai Community-based Disaster Management. Suatu kesadaran mengenai pentingnya upaya pemberdayaan komunitas agar memiliki informasi memadai, waspada, lebih aktif, serta memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dan mendukung pemerintah dalam kegiatan prevensi maupun mitigasi. Penanganan bencana membutuhkan kecepatan, serta pendekatan berdasarkan kekhasan masalah di lapangan, yang sangat terbantu jika keterlibatan komunitas tinggi. Komunitas lokal dapat memberikan dukungan dalam bentuk informasi, usulan maupun gagasan kepada pemerintah, bahkan sumber daya tertentu yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah. Melibatkan komunitas dalam perencanaan manajemen bencana dan mendorong komunitas berpartisipasi akan memberikan nilai tambah. Demikian juga pada saat pemulihan pasca bencana, pengembangan komunitas merupakan prioritas, yang melibatkan langkah-langkah konsultatif dengan komunitas, penerapan prinsip "dari komunitas untuk komunitas" dalam pemanfaatan sumber

daya, serta timbulnya kemitraan jangka panjang dengan komunitas. Keterlibatan terhadap komunitas memiliki jangkauan yang luas sehingga seluruh aktivitas berdasarkan konsultasi dan usulan-usulan dari komunitas, memantau kebutuhan yang nyata, serta memodifikasi dukungan strategis untuk menjaga keterkaitannya dengan situasi yang berkembang (Irwan Abdullah (2008:2).

Manajemen bencana haruslah mempertimbangkan dan responsif terhadap keberagaman, perbedaan, dan persaingan yang dapat saja timbul karena faktor sosial, ekonomi, kepentingan politik, perbedaan komunitas, bahkan mungkin pula agama. Perbedaan ini acap menghasilkan suatu hubungan yang kompleks dan dinamis. Penanganan yang salah dapat menimbulkan konflik horisontal, yang sangat tidak diinginkan. Juga harus memahami dengan hati-hati kemungkinan terjadinya konflik yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan kelompok maupun perbedaan kebutuhan. Sehingga hubungan yang terbangun dengan komunitas harus memberi masukan mengenai prioritas-prioritas tindakan dalam penanganan bencana, menyeimbangkan dan memperantarai agar terjadi titik temu yang paling dapat diterima dalam kondisi setempat. Pendekatan berbasis komunitas ini pula yang perlu menjadi perhatian kalangan bisnis dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR), dalam menyalurkan dananya. Juga bagi perusahaan yang mempunyai program *community development*.

Upaya pemberdayaan masyarakat terkait dengan dua hal yakni pertama, meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat berkenaan dengan bencana alam. Kedua meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga siap terlibat dalam penanggulangan bencana alam. Kedua hal tersebut dilakukan melalui proses pendidikan bencana alam baik di selenggarakan di sekolah formal maupun melalui organisasi kemasyarakatan.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Kuswaji Dwi Priyono (2014:2) bahwa upaya strategis untuk melindungi setiap warga negara dari bencana adalah dengan langkah-langkah penanggulangan bencana (manajemen bencana) baik sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi menjadi penting untuk dilakukan. Manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana, yang bertujuan untuk: (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam empat kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan situasi normal yang mencakup peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang baik resiko, antisipasi dan partisipasi masyarakat yang diselenggarakan secara berkelanjutan.
2. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;
3. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian
4. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap peningkatan kesadaran masyarakat tentang adanya bencana lebih merupakan proses pendidikan yang orientasinya untuk menyadarkan masyarakat bahwa bencana alam dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Kesadaran masyarakat untuk memahami konsep bencana secara dini adalah modal dasar dalam mempersiapkan diri masyarakat baik pengetahuan, kesiapan mental dan keterampilan dalam menghadapi bencana.

Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi.

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi.

Di dalam perpektif lingkungan fisik, kesiapan menghadapi kejadian bencana meliputi prediksi kejadian bencana (pemantauan bencana), kesiapsiagaan emergensi (persiapan tanda-tanda bahaya, sistem peringatan dini, dan sistem evakuasi), dan sosialisasi bencana melalui media cetak maupun ceramah. Pada saat/sesaat setelah kejadian bencana dengan penyelamatan korban bencana, termasuk pula usaha pencarian dan evakuasi (pengungsian) korban, pemberian bantuan kepada korban meliputi pemberian bantuan bahan makanan, pelayanan sosial (santunan) dan pelayanan medik. Pasca kejadian bencana dengan rehabilitasi lahan bencana terutama pada lokasi-lokasi bekas pemukiman penduduk yang rusak atau bahkan hancur akibat bencana, rekonstruksi atau pembangunan dan penataan kembali lahan bencana.

Berdasarkan alur pemikiran di atas. Maka orientasi yang harus dibentuk dalam pengorganisasian masyarakat ini adalah partisipasi masyarakat untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Partisipasi jangka pendek maksudnya adalah partisipasi masyarakat selama menjalankan program atau kegiatan. Partisipasi jangka menengah maksudnya adalah partisipasi masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan keluaran program pasca program selesai. Sedangkan maksud partisipasi jangka panjang adalah partisipasi masyarakat secara berkesinambungan dari generasi ke generasi untuk mewujudkan , memelihara, dan mengembangkan masyarakat yang memiliki budaya aman dari ancaman bencana.

Penyelenggaraan Pendidikan Bencana Bagi Masyarakat

Pendidikan kebencanaan merupakan ikhtiar yang sistematis untuk mengembangkan sikap tanggap bencana pada diri masyarakat. Menurut salah seorang peneliti Fakultas Ekologi Manusia IPB, Sri Nuryati (2014:2) pendidikan bencana diartikan sebagai upaya membuat seseorang atau sekelompok masyarakat sadar akan pentingnya pencegahan bencana. Pendidikan bencana adalah proses belajar mengajar tentang bencana, bagaimana bencana terjadi, apa bahayanya, bagaimana mencegahnya, dan sebagainya. Pendidikan bencana mempunyai tujuan akhir

mengubah sikap dan tindakan ke arah kesadaran untuk melakukan kesiapsiagaan bencana.

Dalam formulasi lain pendidikan bencana alam dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan sehingga masyarakat mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pendidikan kebencanaan untuk menyiapkan masyarakat melalui pendidikan di sekolah formal maupun pada organisasi kemasyarakatan. Menyiapkan dapat diartikan peserta didik (siswa atau anggota masyarakat) yang belum siap, sehingga perlu disiapkan dan sedang menyiapkan dirinya sendiri terhadap risiko terjadinya bencana. Selain itu strategi pelaksanaan pendidikan kebencanaan dilakukan dalam bentuk kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan di sekolah formal maupun di organisasi kemasyarakatan terhadap bencana sangat diperlukan sebagai acuan dalam menghadapi kejadian serupa dimasa yang akan datang. Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan, sikap dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi bencana.

Secara substantif Listyo Yuwanto (2014:2) memparkan bahwa pendidikan kebencanaan mencakup banyak aspek yang penting seputar kebencanaan. Misalnya pengenalan tentang potensi bencana yang ada di sekitar, histori bencana yang pernah terjadi, bentuk antisipasi, meningkatkan kesadaran tanda-tanda bencana, dampak bencana bagi individu, keluarga, dan komunitas, cara penanganan dalam kondisi bencana, serta bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana. Bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi sebelumnya, baik itu bencana alam ataupun sosial. Melalui pendidikan bencana, tidak berarti resiko dampak bencana dapat ditekan sehingga sama sekali tidak menimbulkan dampak. Tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui pendidikan bencana melalui pemberdayaan masyarakat adalah mencapai minimal resiko dampak bencana.

Dengan berbagai materi, peserta didik diajak untuk sama-sama memahami besarnya potensi bencana di Indonesia. Di dalamnya dipaparkan potensi bencana masing-masing wilayah dan kemungkinan waktu terjadinya. Peserta didik juga diajarkan cara menyelamatkan diri sendiri dan orang lain saat bencana terjadi. Selain itu, diberikan pula materi kesiapan mental untuk bertahan dalam kondisi bencana.

Materi umum dalam pendidikan kebencanaan memuat berbagai disiplin ilmu. Geografi, fisika, psikologi, dan cabang ilmu terkait bencana lainnya disusun agar mampu secara tuntas menjelaskan konsep tanggap bencana. Materi tersebut harus terangkum dalam sebuah mata pelajaran khusus agar lebih fokus. Saat penyampaian mata pelajaran umum, hendaknya pula disisipkan kaitannya dengan pengembangan

kesadaran tanggap bencana. Materi khusus dalam pendidikan kebencanaan memuat tentang materi-materi yang memperkaya pengetahuan dan teknis penanggulangan bencana, mengenalkan metode pembuatan peta ancaman dan evakuasi oleh masyarakat setempat, menguatkan kemampuan masyarakat untuk menanggulangi bencana dengan membangun kemampuan masyarakat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Selanjutnya berkenaan dengan metodologi pembelajaran, materi pendidikan bencana yang diberikan harus menyajikan kenyataan/masalah yang realistik. Informasi bencana perlu dinyatakan dalam istilah-istilah yang sederhana dan mudah dikenal pula sehingga peserta didik atau masyarakat mudah menerimanya dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut secara efektif. Dalam menyampaikan materi bencana, narasumber dapat memilih metoda yang dapat digunakan apakah metoda ceramah, diskusi, demonstrasi, eksperimen, atau pemberian tugas.

Penutup

Paradigma pendekatan penanggulangan bencana yang menilai bahwa korban bencana merupakan pihak yang tidak berdaya sudah saatnya dirubah menjadi penanggulangan bencana yang bersifat pemberdayaan. Penanggulangan bencana yang dilakukan harus memandang korban sebagai manusia yang aktif dengan kapasitas dan latar belakang sosial serta motivasi dan sikapnya masing-masing. Dengan demikian, dalam implementasinya pemberian bantuan yang bersifat fisik dan temporer dengan tujuan pemulihan kondisi selayaknya dilengkapi dengan pemberian bantuan yang bersifat memberdayakan masyarakat di masa mendatang.

Berbagai upaya penanggulangan bencana hendaknya selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang serta selalu menghormati gagasan dan kapasitas yang ada pada masyarakat dengan tujuan mengurangi kerentanan dalam jangka panjang dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Hal utama yang perlu dikembangkan adalah sistem dan kapasitas mitigasi bencana mulai dari pusat sampai ke daerah bahkan sampai pada kesiapan masyarakat. Ini yang mampu menekan kerugian, kerusakan dan korban bencana bilamana bencana terjadi. Setiap resiko bencana yang terjadi pada gilirannya ditentukan oleh kesiapan masyarakat untuk sadar dan mau melibatkan diri secara aktif baik saat mengantisipasi terjadinya bencana, serta penanggulangan pasca bencana. Demikian terimakasih.

Daftar Pustaka

- Dinperkim. 2006. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006-2016. Laporan Akhir..
- Irma suryani. 2014. Pembekalan Masyarakat Tentang Bencana Melalui Pendidikan
vailabel: <http://dek-ima.blogspot.com/2014/08/pembekalan-masyarakat-tentang-bencana.html>.
- Irwan Abdullah, 2008, Konstruksi dan Reproduksi Sosial atas Bencana Alam, Working papers in Interdisciplinary Studies No.1 Januari 2008, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Kuswaji Dwi Priyono. (2014)) Model Manajemen Bencana Berbasis Pemberdayaan Komunitas Menghadapi Pemanasan Global. Available: <http://one-geo.blogspot.com/2010/03/model-manajemen-bencana-berbasis.html>.
- Kodoatie, R.J. dan Roestam Sjarief, 2006, Pengelolaan Bencana Terpadu, Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone.
- Listyo Yuwanto (2014. Pentingnya Pendidikan Bencana. Artikel: publiaksi Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.
- Siti Nuryati (2014). Pentingnya Pendidikan Bencana dalam Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat. Available: <http://pelita.or.id/baca.php?id=80278>.
- Sujana Royat . (2009). Pemberdayaan Pasca Bencana Di muat di Majalah Komite Edisi 01 Februari 2009. Available: <http://catatan-sr.blogspot.com/2009/02/pemberdayaan-pasca-bencana.html>.
- Sutikno, 2008, Geografi dan Kompetensinya dalam Kajian Geografi Fisik, Materi Sarasehan Keilmuan Geografi, 18-19 Januari 2008, Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Jakarta: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB)

HUBUNGAN KONSEP DIRI DAN PENGALAMAN KERJA WIDYAISWARA DENGAN KINERJA WIDYAISWARA DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG

Imas Masliah, Achmad Hufad, Yanti Shantini

*Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia
imas.masliah@student.upi.edu*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan tahanan peneliti terhadap konsep diri widyaiswara, dan pengalaman kerja widyaiswara terhadap kinerja di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan tentang hubungan (1) Konsep diri dengan kinerja widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung, (2) pengalaman kerja terhadap kinerja widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung, (3) Konsep Diri dan Pengalaman Kerja terhadap kinerja widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu konsep kinerja pegawai, konsep pengalaman kerja, dimensi kinerja dan konsep widyaiswara. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui angket kuesioner, subjek penelitian terdiri atas 31 responden yakni widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Bandung. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Subjek dalam penelitian terdiri dari widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Bandung Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data yaitu : (1) konsep diri yang dimiliki widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Bandung sangat baik dengan nilai rata-rata paling tinggi yaitu 112,06. (2) pengalaman kerja yang dimiliki widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan baik sebagian besar widyaiswara berpendidikan S2 dan memiliki nilai rata-rata 54,74. (3) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja widyaiswara yaitu konsep diri dan pengalaman kerja. Saran untuk : (1) Bagi Widyaiswara Diharapkan widyaiswara dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan membangun konsep diri yang positif, serta dikayakan lagi akan pengalaman-pengalaman kerjanya yang dapat menunjang peningkatan kinerja. (2) Peneliti Selanjutnya hendaknya menindak lanjuti penelitian ini lagi untuk memperkaya wawasan mengenai hubungan konsep diri dan pengalaman kerja terhadap kinerja.

Kata Kunci: *konsep diri widyaiswara, pengalaman kerja widyaiswara, dan kinerja widyaiswara.*

PENDAHULUAN

Latar belakang dalam penelitian ini adalah, Organisasi merupakan sebuah lembaga dimana orang-orang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keberhasilan suatu organisasi antara lain ditentukan oleh kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia yang dimilikinya. Manusia adalah sumber daya yang umum bagi semua organisasi. Pada prinsipnya sumberdaya manusia merupakan sumberdaya

terpenting disamping sumberdaya lainnya dalam perputaran roda kegiatan instansi. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) diperlukan pihak manajemen secara optimal. SDM tidak hanya dipandang sebagai pelengkap dalam jaringan mata rantai untuk pencapaian tujuan saja, tetapi dalam perkembangan ekonomi, manusia juga perlu diberdayakan agar mampu menjadi sumberdaya yang berkualitas dan terlatih demi tercapainya kinerja yang diharapkan. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan aktivitas manusia yang selalu bergerak, kebutuhan manusia berkualitas meningkat dengan pesatnya. Namun, ketersediaan sumberdaya yang berkualitas belum mampu mengimbangnya.

Mengatasi masalah ini, organisasi perlu melakukan peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja sumberdaya manusia yang dimiliki organisasi. Usaha ini dapat ditempuh dengan penilaian kinerja pegawai. Penilaian kinerja dapat dilihat melalui proses kerja. Proses kerja ini dapat menggambarkan pegawai yang memiliki keinginan untuk berprestasi. Kebutuhan pegawai tidak hanya material tetapi juga non material seperti kebanggaan dan kepuasan kerja. Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan kerja yang dihadapinya akan menghadapkan pegawai pada hal-hal baru dalam menambah pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan selama pengabdian pegawai pada instansi. Penilaian kinerja digunakan instansi untuk menilai kinerja pegawainya atau mengevaluasi hasil pekerjaan pegawai. Apabila penilaian kinerja dilakukan dengan benar, para pegawai akan diuntungkan dengan adanya kepastian bahwa upaya-upaya individu memberikan kontribusi kepada tujuan organisasi.

Widyaiswara merupakan suatu jabatan fungsional yang berada dalam lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemerintah yang memiliki tugas utama mengajar dan melatih para pegawai negeri sipil (PNS) guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan sehingga mencapai standar kompetensi tertentu dalam menjalankan tugasnya. Lembaga atau organisasi yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sangat tergantung pada profesionalisme pegawai-pegawai yang diberi tugas sebagai pejabat fungsional, misalnya peneliti pada lembaga penelitian, dokter pada rumah sakit, guru dan dosen pada lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Pejabat fungsional tersebut yang menjadi tulang punggung atau sokoguru atau pilar dalam menjalankan tugas pokok lembaga yang bersangkutan. Oleh karenanya mereka diposisikan dan diperankan secara baik, diberi hak, kewajiban dan kewenangan yang memadai.

Widyaiswara sebagai pilar penyelenggaraan diklat merupakan bagian yang sangat penting dalam institusi penyelenggara diklat, sebab bila pilar tersebut rapuh

maka akan runtuh pula penyelenggaraan diklat. Widyaiswara harus kokoh dalam menopang penyelenggaraan diklat keagamaan yang tugas pokoknya adalah dalam rangka membentuk manusia-manusia penyelenggara pendidikan di bidang agama yang profesional dan memiliki akhlak yang mulia.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya Widyaiswara (WI) adalah: Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Pemerintah.

Jadi widyaiswara merupakan salah satu komponen atau ada yang menyebutkan sebagai pilar yang sangat penting dalam keberhasilan penyelenggaraan diklat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS disebutkan bahwa widyaiswara merupakan salah satu komponen tenaga kediklatan yang sangat penting disamping komponen lainnya (lembaga diklat, program diklat dan penyelenggaraan diklat) dalam penyelenggaraan diklat pemerintah.

Widyaiswara sebagai orang dewasa yang memiliki asumsi bahwa orang dewasa mempunyai konsepsi diri, orang dewasa mempunyai akumulasi pengalaman, orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar, orang dewasa berharap agar dapat segera menerapkan perolehan belajarnya dan orang dewasa mempunyai kemampuan untuk belajar.

Berdasarkan asumsi diatas, dalam konsep diri orang dewasa merupakan suatu hal yang wajar apabila dalam suatu proses pendewasaan, seseorang akan berubah dari bersifat tergantung menuju ke arah memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri, namun setiap individu memiliki irama yang berbeda-beda dan juga dalam dimensi kehidupan yang berbeda-beda pula. Dan para widyaiswara bertanggungjawab untuk menggalakkan dan memelihara kelangsungan perubahan tersebut. Pada umumnya orang dewasa secara psikologis lebih memerlukan pengarahan diri, walaupun dalam keadaan tertentu mereka bersifat tergantung.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti meneliti tentang, “*Hubungan Konsep Diri Dan Pengalaman Kerja Widyaiswara Terhadap Kinerja Widyaiswara Di Balai Diklat Keagamaan Bandung*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan

tentang: (1) Mengetahui hubungan konsep diri dengan kinerja widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung. (2) Mengidentifikasi hubungan pengalaman kerja widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung. (3) Menganalisis hubungan antara konsep diri, dan pengalaman kerja widyaiswara terhadap kinerja widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung

KAJIAN TEORI

Kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini diantaranya Konsep Kinerja Pegawai. Konsep diri kinerja yang dimaksud disini yaitu, dimana dalam diri seseorang yang mampu mencapai suatu kematangan pribadi ini adalah orang yang memiliki kepribadian yang positif. Ciri seseorang yang memiliki kepribadian positif oleh Rogers dinyatakan pada *self concept* (konsep diri), sedangkan menurut Maslow unit utama kepribadian adalah aktualisasi diri. Dengan demikian komponen kepribadian adalah konsep diri dan aktualisasi diri.

Konsep diri merupakan modal dasar yang dimiliki seseorang untuk menjadi pimpinan, sehingga wujud dan perilaku seseorang sebagai pemimpin akan membawa dampak negatif maupun positif bagi suatu kelompok yang dipimpinnya. Tentu saja hal ini disebabkan adanya potensi-potensi atau kemampuan yang ada pada diri pemimpin, di samping faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kepemimpinannya.

Guna memperoleh gambaran tentang konsep diri, perlu ditinjau pandangan-pandangan yang menyorot tentang hal yang dimaksud. Konsep diri diartikan sebagai dirinya sendiri dari titik pandang sendiri. Oleh karena itu, konsep diri disusun dari persepsi-persepsi yang bersangkutan dengan individunya.

Kajian pustaka selanjutnya yaitu Pengalaman Kerja. Pengalaman kerja menunjukan suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang. Seseorang yang sudah memiliki pengalaman kerja pasti akan lebih mudah untuk memahami suatu pekerjaan yang serupa daripada orang yang belum memiliki pengalaman. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Hariandja (2002 : 120) menyatakan, ” Pengalaman kerja adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang pernah diduduki sebelumnya selama kurun waktu tertentu.” Selain itu ada pendapat lain menurut Hasibuan (2002 : 55), ”Pengalaman kerja seorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan utama dalam proses seleksi. Orang yang berpengalaman merupakan calon karyawan yang siap pakai”.

Pengalaman kerja menurut pendapat Alwi (2001 : 717) ”Masa kerja atau pengalaman kerja adalah jangka waktu atau lamanya seseorang bekerja pada suatu

instansi, kantor atau sebagainya” . Dari uraian pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang yang dapat diukur dari masa kerja seorang. Sehingga semakin lama seseorang bekerja semakin bertambah pengalamannya terhadap pekerjaannya. Dengan banyaknya pengalaman kerja yang dimiliki seseorang pekerja maka orang tersebut akan lebih menguasai pekerjaannya, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik ini berarti orang tersebut mempunyai efektifitas kerja yang baik

Kajian teori lain yang berkaitan dengan penelitian adalah Definisi Kinerja dan dimensi kinerja. definisi kinerja menurut Mangkunga (2011:67) menjelaskan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Withmore dalam (Hamzah dan Nina, 2012:119) menjelaskan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Dengan demikian, kinerja merupakan bagaimana melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut, dengan kata lain kinerja merupakan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai tujuan sebuah organisasi atau lembaga, sehingga kinerja perlu diupayakan untuk selalu ditingkatkan. Namun hal ini tidak mudah dilakukan, sebab banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif atau hubungan. Subjek untuk penelitian ini adalah berjumlah 29 orang yang merupakan widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Penentuan subjek tersebut berdasarkan *total sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kuesioner/ angket dan observasi. Analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi, *display* dan verifikasi. Serta Uji keabsahan data dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengacu pada tujuan penelitian yang mendeskripsikan mengenai 1) Mengetahui hubungan konsep diri dengan kinerja widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung. 2) Mengidentifikasi hubungan pengalaman kerja widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung. 3) Menganalisis hubungan antara

konsep diri, dan pengalaman kerja widyaiswara terhadap kinerja widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung.

1. Mengetahui hubungan konsep diri dengan kinerja widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung

Konsep diri memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja widyaiswara. Hal tersebut sejalan dengan mengacu pada pengertian konsep diri itu sendiri, selanjutnya dapat dirumuskan bahwa konsep diri merupakan perasaan, penerimaan, dan identitas diri yang relatif stabil yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri, pendapatnya tentang gambaran diri individu di mata orang lain, dan pendapatnya tentang hal-hal yang dicapai yang didapat dari hasil interaksi dengan lingkungan sekitar yang dimiliki setiap individu. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri. Rakhmat (dalam Sobur, 2009) menyebut faktor orang lain dan kelompok rujukan (*reference group*) sebagai faktor yang mempengaruhi konsep diri. Dalam konsep diri terdapat tiga aspek yang diukur yaitu : aspek affektif, aspek kognitif dan aspek psikomotor.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif pada tabel diatas mengenai variabel konsep diri, aspek affektif memiliki presentasi paling tinggi yaitu 258,66% . Pada aspek kognitif persentase yang diperoleh berdasarkan hasil pengolahan statistik deskriptif adalah 160,47%. Untuk aspek psikomotor perolehan persentase berdasarkan perhitungan statistik deskriptif mencapai 238,03%. artinya bahwa aspek afektif memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap kinerja widyaiswara,

2. Mengidentifikasi hubungan pengalaman kerja widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh temuan bahwa pengalaman kerja, kompetensi sosial dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan Robbins dan Timothy (2008) bahwa pengalaman kerja, kompetensi sosial dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Basuki (2009), Laniwidyanti (2010), Listio (2010), Farlen (2011), Winanti (2011), dan Purwanti (2012), dengan hasil penelitian bahwa pengalaman kerja, kompetensi sosial dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Robbins dan Timothy (2008)

bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam bekerja yang tampaknya menjadi sebuah dasar perkiraan yang baik atas kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Basuki (2009), Laniwidyanti (2010), dan Purwanti (2012), dengan hasil penelitiannya bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. dimiliki seseorang.

Seseorang yang sudah memiliki pengalaman kerja pasti akan lebih mudah untuk memahami suatu pekerjaan yang serupa daripada orang yang belum memiliki pengalaman. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Hariandja (2002 : 120) menyatakan, ” Pengalaman kerja adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang pernah diduduki sebelumnya selama kurun waktu tertentu.” Selain itu ada pendapat lain menurut Hasibuan (2002 : 55), ”Pengalaman kerja seorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan utama dalam proses seleksi. Orang yang berpengalaman merupakan calon karyawan yang siap pakai”.

Untuk variable pengalaman kerja , terdiri atas aspek masa kerja, jenis pekerjaan dan pengalaman sebelumnya. Berikut hasil persentase dari masing-masing aspek : Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif pada tabel diatas mengenai variabel pengalaman kerja, aspek pengalaman sebelumnya memiliki presentasi paling tinggi yaitu 159,27% . Pada aspek masa kerja persentase yang diperoleh berdasarkan hasil pengolahan statistik deskriptif adalah 79,83%. Untuk aspek jenis pekerjaan perolehan persentase berdasarkan perhitungan statistik deskriptif mencapai 83,06%.

Berdasarkan hasil presentase diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman sebelumnya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja, semakin tinkaya dan tinggi pengalaman seorang widyaiswara akan semakin meningkat kinerjanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Peneliti menyimpulkan bahwa widyaiswara diharapkan dapat lebih membangun konsep diri nya yang lebih positif untuk mendorong kinerja yang lebih baik, serta menambah dan mengkayakan pengalaman kerja agar lebih mudah dalam menghadapi situasi kerja kedepannya. konsep diri yang dibangun dengan positif akan mampu memudahkan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab kerjanya karena dengan konsep diri yang positif seseorang percaya akan kemampuan dirinya dalam melaksanakan pekerjaannya. Peneliti dalam penelitian ini memberikan saran kepada widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Bandung, Diharapkan dari hasil penelitian ini, widyaiswara dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan membangun konsep diri yang

positif, serta dikayakan lagi akan pengalaman-pengalaman kerjanya yang dapat menunjang peningkatan kinerja.. Bagi peneliti selanjutnya,yang berminat mengkaji lebih mengenai hubungan konsep diri dan penalaman kerja terhadap knerja dipersilahkan untuk meneliti lebih lanjut lagi untuk memperkaya wawasan mengenai hubungan konsep diri dan pengalaman kerja terhadap kinerja.

Daftar Pustaka

- Hamzah Dan Nina. (2012). *Teori Kinerja Dan Pengukurannya*. Jkt : Buah Aksara
- Hasan, Iqbal. (2009). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Pt Bumi Aksara
- Iskandar. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Social*. Jakarta : Referensi
- Mangkunegara,A.A Anwar Prabu. (2005). *Evaluasi Kinerja Sdm*. Bdg: Refika Aditama
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif ; Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Narbuko, C Dan Achmadi, A. (2009). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Bumi Aksara
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sinabela, L. (2012). *Kinerja Pegawai Teori Dan Pengukuran Dan Implikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sudjana. (2001). *Pendidikan luar sekolah*. Bandung: Falah Psoduction
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suprijanto.(2007).*Pendidikan Orang Dewasa*.Jakarta: Pt Bumi Aksara
- Suryabrata, S. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Taniredja, T Dan Mustafidah, H. (2012). *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Umar, Husein. (2008). *Desain Penelitian Msdm Dan Perilaku Karyawan*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Uno, H. (2006). *Teori Motivasi Dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Uno Dan Lamatenggo.(2012). *Teori Kinerja Dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zaenudin.(2012). *Andragogy*.Bandung: Angkasa Bandung

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KEWIRAUSAHAAN DI PKBM BINA TERAMPIL MANDIRI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Raden Aufa Mulqi, Oong Komar, Iip Saripah

*Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia
mulqiaufa@yahoo.co.id*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam program kewirausahaan di PKBM Bina Terampil Mandiri (BTM). Hal ini dilatarbelakangi karena adanya temuan empiris kondisi daerah yang cenderung belum maju, banyaknya penganggur dan miskin sehingga masih bergantung pada bantuan. Hal ini dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang tidak menentu. Fakta yang ditemukan yaitu masyarakat Desa Kertawangi masih rendah dalam tingkat pendidikan dan keterampilan, PKBM BTM sebagai pelopor peningkatan ekonomi dan keterampilan masyarakat Desa Kertawangi. Program keterampilan yang dilaksanakan oleh PKBM adalah keterampilan kerajinan tangan, keterampilan melukis dan keterampilan bertani. Penelitian bertujuan: mengetahui dan menganalisa upaya pengelola PKBM BTM dalam partisipasi masyarakat Desa Kertawangi; mengetahui dan menganalisa alasan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan program kewirausahaan di PKBM BTM; mengetahui dan menganalisa bentuk partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan program kewirausahaan di PKBM BTM. Peneliti menggunakan teori partisipasi, teori ekonomi, dan teori kewirausahaan. Penelitian dilakukan di PKBM Bina Terampil Mandiri, Desa Kertawangi, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu pengelola, tutor, dan peserta program kewirausahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan: upaya yang dilakukan oleh pengelola PKBM BTM dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga menumbuhkan antusiasme masyarakat terhadap program yang terdapat di PKBM BTM; alasan partisipasi masyarakat dalam program kewirausahaan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi; bentuk partisipasi masyarakat: partisipasi langsung, berupa tenaga, partisipasi tidak langsung berupa buah pikiran/ide, harta benda, dan partisipasi keterampilan. \

Kata Kunci: *Partisipasi, Kewirausahaan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah pendidikan memegang peranan yang cukup penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, maju, dan mandiri karena pendidikan merupakan suatu bidang yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

sehingga dapat menjadikan masyarakat Indonesia yang cerdas dan mempunyai keterampilan untuk bekal hidupnya di masa yang akan datang. Dengan begitu, segala aspek kehidupan yang sekarang ini sedang terpuruk dapat ditangani melalui bidang pendidikan tersebut.

Pendidikan Luar Sekolah merupakan pelengkap bagi masyarakat, dalam mewujudkan misinya yaitu “membelajarkan masyarakat”, telah berupaya mengembangkan berbagai macam program. Program pendidikan yang dibuat hendaknya mengacu pada peningkatan kualitas dan kebermaknaan program, sehingga program tersebut akan betul-betul bermakna bagi kehidupan masyarakat, diakui keberadaannya dan dapat memberdayakan masyarakat, serta dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kualitas hidupnya.

PKBM Bina Terampil Mandiri yang berlokasi di Jl.Mekartani No.164 RT/RW 04/05 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Labsite PP-PAUDNI Regional 1 Bandung. Berdirinya PKBM Bina Terampil Mandiri merupakan salah satu kepedulian warga masyarakat terhadap pendidikan luar sekolah karena, kondisi daerah yang masih belum mampu untuk beranjak dari kondisi sebelumnya yang cenderung stagnan. Masih banyaknya masyarakat penganggur dan miskin secara ekonomi, sehingga masih sangat bergantung dari bantuan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang tidak menentu. Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan bahwa, masyarakat Desa Kertawangi masih rendah dalam tingkat pendidikan, serta keterampilan. PKBM Bina Terampil Mandiri sebagai pelopor untuk meningkatkan ekonomi dan keterampilan masyarakat Desa Kertawangi.

Salah satu program prestasi dari PKBM adalah program kewirausahaan yang banyak diminati oleh warga belajar/masyarakat, karena program tersebut memberikan kemampuan untuk terampil dan kegiatan belajarnya pun tidak bersifat konseptual, sehingga masyarakat lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan-kegiatan program kewirausahaan. Program keterampilan yang dilaksanakan oleh PKBM Bina Terampil Mandiri diantaranya; keterampilan kerajinan tangan, keterampilan melukis, dan keterampilan bertani. Program keterampilan didalamnya terdapat materi-materi mengenai kewirausahaan, sehingga warga belajar setelah diberikan keterampilan, maka tutor memberikan materi mengenai kewirausahaan agar masyarakat dapat mengolah keterampilan tersebut.

Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Terampil Mandiri, ikut berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti meneliti tentang, “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kewirausahaan di PKBM Bina Terampil Mandiri Kabupaten Bandung Barat”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang: (1) Upaya yang dilakukan pengelola PKBM Bina Terampil Mandiri dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat Desa Kertawangi; (2) Alasan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan program kewirausahaan di PKBM Bina Terampil Mandiri.; dan (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan program kewirausahaan di PKBM Bina Terampil Mandiri

KAJIAN TEORI

Kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini diantaranya konsep partisipasi, dimana masyarakat berpartisipasi dalam program kewirausahaan yang terdapat di PKBM. Upaya yang dilaksanakan oleh pengelola PKBM merupakan keberhasilan pembangunan dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh peran serta masyarakat Desa Kertawangi. Keith Davis (dalam Nurasa, 2010, hlm. 87) berikut persyaratan untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif: (a) Waktu, untuk dapat berpartisipasi diperlukan waktu. Waktu yang dimaksud adalah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemerkarsa atau pimpinan. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta. Pesan-pesan itu disampaikan melalui komunikasi, yaitu usaha dan kegiatan untuk menumbuhkan pengertian yang sama antara komunikator dengan komunikan, apabila dalam kegiatan partisipasi diperlukan data perangsang, hendaknya dibatasi agar tidak memberikan kesan “memanjakan”; (b) Subjek partisipan hendaknya relevan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu bergabung; (c) Partisipan harus memiliki kemampuan komunikasi timbal balik; (d) Para pihak yang bersangkutan bebas didalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan (e) Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya didasarkan pada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang akan menimbulkan gangguan dalam pikiran

atau jiwa yang bersangkutan. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif.

Upaya yang dilaksanakan oleh PKBM Bina Terampil Mandiri berupa wadah pendidikan dan keterampilan untuk masyarakat Desa Kertawangi, hal ini menjadi suatu keuntungan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Hal tersebut berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Umberto Sihombing (dalam Kamil, 2009, hlm.85) bahwa PKBM adalah “sebuah model pelebagaan” yang diartikan, bahwa PKBM sebagai basis pendidikan masyarakat, dikelola secara professional oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga masyarakat dengan mudah dapat berhubungan dengan PKBM dan meminta informasi tentang berbagai program pendidikan masyarakat, persyaratannya, dan jadwal pelaksanaannya. Pelebagaan artinya menempatkan PKBM sebagai basis penyelenggaraan program pendidikan di masyarakat di tingkat operasional (desa/kelurahan). Program pendidikan yang selama ini terpisah-pisah dan dilaksanakan di berbagai tempat seperti di rumah penduduk, gedung sekolah, balai desa, dan tempat lainnya diupayakan untuk dipusatkan di PKBM.

Kajian pustaka selanjutnya yaitu konsep sumber daya manusia. Adam Smith (dalam Mulyadi, 2003, hlm.4) menganggap bahwa manusia adalah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya keingintahuan masyarakat yang tinggi serta dukungan dari motivasi dalam diri masyarakat yang baik, terciptalah program-program yang dilaksanakan oleh PKBM Bina Terampil Mandiri. Semua program yang dilaksanakan oleh PKBM merupakan kebutuhan masyarakat Desa Kertawangi. Menurut Roesmidi (2008, hlm.8) mengemukakan bahwa kelompok masyarakat yang dicirikan menurut hubungan manusianya serta nilai sosial yang berlaku sebagai berikut.

- a. Menurut mata pencaharian, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang dan lain-lain.
- b. Menurut lingkungan tempat tinggalnya seperti masyarakat hutan, pantai atau pesisir.
- c. Menurut tingkat kehidupan ekonomi seperti masyarakat miskin yang dibedakan dengan masyarakat kaya/mapan.

- d. Menurut tingkat pendidikan seperti masyarakat terpelajar, intelek/berpengatahuan yang dibedakan dengan masyarakat awam.
- e. Menurut penataan lingkungan/pemukiman masyarakatnya seperti masyarakat desa/kota metropolitan.
- f. Menurut lingkungan pergaulan agama seperti ulama, santri, gereja.
- g. Menurut tingkat keberadaan seperti masyarakat madani, sebagai masyarakat yang beradab yang didikontonomikan dengan masyarakat jahiliyah.
- h. Menurut jenis kelamin (gender) yang dibedakan antara perempuan (feminism) dengan laki-laki (maskulin).

Kajian teori lain yang berkaitan dengan penelitian adalah Adam Smith (dalam Akhmad, 2006, hlm.3) mengartikan bahwa sumber daya alam sebagai seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan *output*. Sumber daya alam diidentikkan dengan *input* produksi. Pernyataan ini tentu saja memiliki keterbatasan karena “sumber daya” diartikan secara terbatas dalam peranannya untuk menghasilkan utilitas (kepuasan) melalui proses produksi. Dengan kata lain, sumber daya diperlukan bukan karena dirinya sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Subjek untuk penelitian ini adalah berjumlah lima orang yang merupakan satu orang pengelola PKBM, satu orang tutor, dan tiga orang warga belajar. Penentuan subjek tersebut berdasarkan *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa subjek tersebut merupakan orang-orang yang mengetahui aktivitas layanan dan kondisi lembaga. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi, *display* dan verifikasi. Serta Uji keabsahan data dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *memberchek*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya yang Dilakukan Pengelola PKBM Bina Terampil Mandiri dalam Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat

program kewirausahaan merupakan program hasil identifikasi kebutuhan warga yang tinggal di Desa Kertawangi. PKBM Bina Terampil Mandiri merupakan wadah untuk pendidikan nonformal di Desa Kertawangi yang didalamnya memiliki

program yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C), Keaksaraan Fungsional, Kursus dan Kewirausahaan.

Kamil (2009, hlm.87) menjelaskan bahwa ada tiga tujuan penting dalam rangka pendirian dan pengembangan PKBM antara lain: (a) memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri (berdaya), (b) meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi, (c) meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya sehingga mampu memecahkan permasalahan tersebut.

Pada awal terbentuknya program diawali dengan proses identifikasi lapangan, hasil wawancara dari pihak pengelola (P), proses identifikasi terlebih dahulu dilakukan sebelum terbentuknya suatu program, melihat terlebih dahulu kebutuhan masyarakat Desa Kertawangi serta mempelajari pola hidup, tingkah laku, kebiasaan masyarakat sehari-harinya. Dilakukan pendekatan kepada masyarakat dan memperkenalkan program yang sarannya adalah masyarakat. Proses tersebut dilakukan oleh pengelola dan tutor PKBM Bina Terampil Mandiri. Program keterampilan yang terdapat di PKBM diantaranya adalah keterampilan kerajinan tangan, keterampilan melukis dan keterampilan bertani.

Upaya yang dilaksanakan oleh pengelola PKBM merupakan Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh peran serta masyarakat desa Kertawangi. Menurut Keith Davis (dalam Nurasa, 2010, hlm. 87) berikut persyaratan untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif (a) Waktu, untuk dapat berpartisipasi diperlukan waktu. Waktu yang dimaksud adalah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemerksa atau pimpinan. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta. Pesan-pesan itu disampaikan melalui komunikasi, yaitu usaha dan kegiatan untuk menumbuhkan pengertian yang sama antara komunikator dengan komunikan, apabila dalam kegiatan partisipasi diperlukan data perangsang, hendaknya dibatasi agar tidak memberikan kesan “memanjakan”; (b) Subjek partisipan hendaklah relevan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu bergabung; (c) Partisipan harus memiliki kemampuan komunikasi timbal balik; (d) Para pihak yang bersangkutan bebas didalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan (e) Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya didasarkan pada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang akan menimbulkan gangguan dalam pikiran atau jiwa

yang bersangkutan. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif.

Perencanaan yang dilakukan pengelola dalam membentuk program tersebut melihat masyarakat Desa Kertawangi tingkat pendidikannya masih tergolong rendah yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD) dan melihat potensi sumber daya yang kuat, oleh karena itu, pengelola membentuk program Kewirausahaan di PKBM Bina Terampil Mandiri.

Berkaitan dengan proses perencanaan yang dilakukan oleh pengelola dalam membuat sebuah program telah mengacu pada teori manajemen program pendidikan yang menjelaskan mengenai perencanaan. Dijelaskan oleh Sudjana (2010, hlm.55) perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup proses pengambilan keputusan. Penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi. Satu pemahaman dengan Sudjana, Waterson (dalam Sudjana, 2010, hlm.55) mengemukakan bahwa pada hakekatnya perencanaan merupakan usaha sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan untuk memilih alternatif dari sejumlah alternatif tindakan guna mencapai tujuan. Perencanaan bukan kegiatan yang tersendiri melainkan merupakan suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang kompleks.

Upaya yang dilaksanakan oleh PKBM Bina Terampil Mandiri berupa wadah pendidikan dan keterampilan untuk masyarakat Desa Kertawangi, hal ini menjadi suatu keuntungan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Hal tersebut berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Umberto Sihombing (dalam Kamil, 2009, hlm.85) bahwa PKBM adalah “sebuah model pelebagaan” yang diartikan, bahwa PKBM sebagai basis pendidikan masyarakat, dikelola secara profesional oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga masyarakat dengan mudah dapat berhubungan dengan PKBM dan meminta informasi tentang berbagai program pendidikan masyarakat, persyaratannya, dan jadwal pelaksanaannya. Pelebagaan artinya menempatkan PKBM sebagai basis penyelenggaraan program pendidikan di masyarakat di tingkat operasional (desa/kelurahan). Program pendidikan yang selama ini terpisah-pisah dan dilaksanakan di berbagai tempat seperti di rumah penduduk, gedung sekolah, balai desa, dan tempat lainnya diupayakan untuk dipusatkan di PKBM.

Upaya pengelola untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai suatu tindakan yang dinilai sangat baik, karena masyarakat mulai memiliki motivasi untuk meningkatkan keingintahuan serta dapat meningkatkan potensi wilayah Desa Kertawangi.

2. Alasan Masyarakat untuk Ikut Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Program Kewirausahaan di PKBM Bina Terampil Mandiri

Gordon W. Allport (dalam Sastropetro, 1988, hlm.12) mengemukakan bahwa salah satu motivasi seseorang untuk berpartisipasi dalam sebuah program/kegiatan yaitu dengan adanya rasa takut atau terpaksa, biasanya akibat perintah yang kaku dari atasan atau pemerintah. Sehingga adanya unsur keterpaksaan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil temuan peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat desa tidak mengalami paksaan karena rasa takut dalam berpartisipasi pada program yang diselenggarakan oleh PKBM.

Motif selanjutnya yang mempengaruhi seseorang berpartisipasi dalam sebuah program/kegiatan yaitu rasa ikut-ikutan. Menurut Gordon W. Allport (dalam Sastropetro, 1988, hlm.12) rasa ikut-ikutan, biasanya partisipasi ini hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi antara teman atau anggota masyarakat. Sehingga keikutsertaan mereka bukan karena hati sendiri. Hasil temuan peneliti mengenai motif rasa ikut-ikutan tidak terbukti dan yang menjadi motivasi utama adalah rasa kesadaran masyarakat, dimana alasan masyarakat mengikuti program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh PKBM Bina Terampil Mandiri yaitu karena masyarakat memahami akan kebermanfaatan program kewirausahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Gordon W. Allport (dalam Sastropetro, 1988, hlm.12) bahwa jika partisipasi dilakukan atas dasar rasa kesadaran, biasanya partisipasi ini timbul karena kehendak atau keinginan pribadinya sendiri dan dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nuraninya. Alasan yang menjadi dorongan nuraninya sendiri yaitu dengan menyadari kebermanfaatan program tersebut yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah taraf ekonomi keluarga. Tidak ada paksaan dan ajakan dari berbagai pihak, baik pengelola maupun tutor bagi masyarakat yang ingin mengikuti program yang berada di PKBM. Semua terjadi atas kesadaran masyarakat/warga belajar sendiri.

Tujuan masyarakat berpartisipasi mengikuti program kewirausahaan di PKBM Bina Terampil Mandiri adalah untuk meningkatkan potensi wilayah yang terdapat di daerah Desa Kertawangi. Salah satu indikator untuk meningkatkan potensi wilayah Desa Kertawangi adalah dengan kualitas masyarakat itu sendiri. Sumber daya manusia

merupakan hal yang utama dalam meningkatkan kualitas suatu desa, sebelum beranjak pada potensi wilayah, yang terpenting adalah mendorong masyarakat tersebut untuk termotivasi dalam hal pembangunan desa, dengan demikian perlahan ekonomi masyarakat dapat meningkat.

Adam Smith (dalam Mulyadi, 2003, hlm.4) menganggap bahwa manusia adalah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Program Kewirausahaan di PKBM Bina Terampil Mandiri

Partisipasi merupakan bentuk dari terjalinnya hubungan antara pengelola dengan masyarakat Desa Kertawangi. Keikutsertaan masyarakat dalam program kewirausahaan merupakan suatu keberhasilan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM Bina Terampil Mandiri, sehingga pihak PKBM mengetahui bahwa kebutuhan masyarakat sangat tinggi dalam segi pembangunan desa. Hal ini berkaitan dengan teori WHO (dalam Sastropoetro, 1988, hlm.11) bahwa partisipasi (masyarakat) adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriyahnya. Partisipasi tersebut dapat keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta ikut bertanggung jawab terhadap usaha tersebut.

Sutrisno (dalam Nasution, 2009, hlm.16) bahwa ada dua pengertian partisipasi yaitu, pertama, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencana, kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai partisipasi buah pikiran/ide masyarakat dalam program kewirausahaan, bahwa masyarakat Desa Kertawangi berpartisipasi dalam menyumbang ide atau gagasan terhadap program yang akan dilaksanakan oleh PKBM Bina Terampil Mandiri. Ide-ide tersebut kemudian ditampung dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan teori Davis (dalam Nurasa, 2010, hlm.64) berpendapat ada tiga

aspek penting untuk mengukur bentuk partisipasi, yaitu: (a) keterlibatan emosi dan mental. Berpartisipasi berarti melibatkan emosi dan mental daripada kegiatan fisik, sehingga dapat terlihat dari perilakunya yaitu aktivitas kerja yang kreatif dan semangat kerja yang tinggi, serta mempunyai sikap empati dan simpati kepada orang lain. (b) motivasi untuk menyumbang (kontribusi), (c) penerimaan tanggung jawab. Partisipasi merupakan proses sosial yang melihatkan diri pegawai pada organisasi untuk mencapai keberhasilan bersama, intinya mereka harus dapat bekerjasama dalam satu tim kerja.

Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai partisipasi harta benda, bahwa masyarakat Desa Kertawangi tidak dituntut untuk mengeluarkan atau menyumbangkan dana. Masyarakat datang untuk belajar dan sepenuhnya alokasi dana dibiayai oleh pihak PKBM Bina Terampil Mandiri. Peneliti menilai bahwa, masyarakat desa dalam segi ekonomi masih tergolong kurang, sehingga apabila masyarakat dituntut untuk mengeluarkan biaya akan mengakibatkan kurangnya minat belajar masyarakat di PKBM. Untuk kebutuhan sehari-haripun masyarakat masih sangat membutuhkan dana untuk kehidupan keluarga.

Masyarakat yang memiliki keterampilan dalam bidangnya masing-masing diberikan kesempatan sebagai tutor/fasilitator oleh pihak pengelola PKBM agar masyarakat dapat menyumbangkan keterampilannya, sehingga masyarakat ikut berperan sebagai fasilitator dan memberikan nilai lebih bagi dirinya, serta memunculkan rasa percaya diri masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hamidjojo (dalam Sastropetro, 1986, hlm.23) menjelaskan bahwa dari setiap partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki sifat dan ciri tersendiri, yaitu:

- a. Partisipasi harus bersifat sukarela.
- b. Berbagai *issue* atau masalah harus disajikan dan dibicarakan secara jelas dan objektif.
- c. Kemampuan untuk berpartisipasi harusnya mendapat keterangan atau informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi atau aspek program yang dilaksanakan.
- d. Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri harusnya menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan yang didalamnya mengandung unsur partisipasi langsung yaitu berupa tenaga dan partisipasi yang tidak langsung berupa partisipasi ide/gagasan, partisipasi harta benda, dan partisipasi keterampilan. Partisipasi masyarakat di Desa Kertawangi dapat dinilai sangat baik, karena keikutsertaan masyarakat Desa Kertawangi dalam program yang dilaksanakan oleh PKBM Bina Terampil Mandiri menjadi tolak ukur bahwa masyarakat Desa Kertawangi dalam minat belajarnya sangat tinggi, sehingga menumbuhkan rasa saling memiliki dan menjadi solusi masyarakat Desa Kertawangi dalam segi pendidikan dan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengelola PKBM Bina Terampil Mandiri dalam partisipasi masyarakat memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dalam mengukur kebutuhan masyarakat dilakukan tahapan untuk menggali kebutuhan itu. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi atas kebutuhan masyarakat, sehingga menumbuhkan antusias masyarakat terhadap program-program yang terdapat di PKBM Bina Terampil Mandiri. Untuk menemukan kebutuhan masyarakat Desa Kertawangi diperlukan adanya sosialisasi program oleh PKBM. Proses sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang terdapat di Desa Kertawangi, sehingga mempermudah para pengelola dalam kegiatan menyosialisasikan program-program yang terdapat di PKBM Bina Terampil Mandiri.

Peneliti dalam hal ini memberikan saran kepada pengelol, bahwa kegiatan kewirausahaan harus selalu ada dan berinovatif agar masyarakat dapat mengeluarkan kreativitasnya, sehingga masyarakat memiliki rasa percaya diri dan memunculkan motivasi yang baik untuk dirinya dan keluarganya. Maka disarankan bagi pengelola untuk terus berinovatif dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk tutor, bahwa tidak semua warga belajar/masyarakat senang belajar di dalam kelas. Maka disarankan untuk tutor agar proses pembelajaran tidak selalu dikelas. Lebih sering diruang terbuka, mengingat warga belajar/masyarakat bukan anak-anak, sehingga kejenuhan ketika pembelajaran bisa saja terjadi, dan untuk masyarakat, bahwa PKBM merupakan suatu tempat pendidikan, dimana lembaga tersebut dapat memberikan solusi permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Maka sebaiknya masyarakat harus terus termotivasi untuk belajar, agar kelak anak dan cucu dapat merasakan dan mengetahui bahwa pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan manusia.

Daftar Pustaka

- Fauzi, Akhmad. (2006). *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan teori dan aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kamil, M. (2009). *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nasution, Z. (2009). *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Press.
- Nurasa, H. (2010). *Reformasi Administrasi dan Partisipasi Masyarakat (perspektif Teori dan Praktik dalam Pembangunan Pedesaan)*. Bandung: Unpad Press.
- Roesmidi (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jatinangor, Sumedang : Alqaprint
- Sastropetro, S. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: PT Alumni.
- Sudjana, D (2010). *Manajemen Program Pendidikan: Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.



UNG Press - Gorontalo
Anggota IKAPI
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Telp. (0435) 821125
Fax. (0435) 821752 Kota Gorontalo
Website: www.ung.ac.id

ISBN 978-602-6204-08-0

